

Perubahan

**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Tahun 2018 - 2023**

RPJMD



**Pemerintah Kabupaten Kuningan
2020**

Perubahan

RPJMD

**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Tahun 2018 - 2023**



**Pemerintah Kabupaten Kuningan
2020**



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan masyarakat sejatinya merupakan tujuan akhir pembangunan, agar tujuan tersebut tercapai dengan baik harus termuat dalam perencanaan pembangunan yang terukur di Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan yang mendasar;
- c. bahwa perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, perubahan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta kejadian khusus pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan target antara dan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

a. Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan.

d. Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Memuat analisis Permasalahan Pembangunan dan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan daerah tahun 2018-2023.

e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas yang menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menyajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

i. Bab IX : Penutup

Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang berisi prinsip-prinsip pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 18-2-2021

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 18-02-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT (3123/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di Kabupaten Kuningan. Selain visi dan misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 belum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019. Sehingga ada beberapa nomenklatur perangkat daerah yang berubah belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

3. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengubah struktur pembiayaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, perubahannya diakomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu :

a. Pada Bab III Gambaran Keuangan Daerah.

b. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan harus menyesuaikan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021-2023.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019, yang mengamatkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Kuningan yang menyebabkan berubahnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru.

d. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu adanya penyalarsan arah pembangunan Kabupaten Kuningan dengan arah pembangunan nasional; dan

e. Terjadinya bencana nasional pandemi covid-19 yang telah berdampak pada target kinerja tahun 2020 tidak mungkin tercapai, hal ini mengakibatkan daerah harus merealokasi anggaran pembangunan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 perlu ditinjau kembali dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2021-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan.

Dalam menyusun dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, terdapat hal-hal pokok yang akan tetap menjadi komitmen bersama untuk dijaga, yaitu Perubahan RPJMD ini tidak mengubah visi dan misi Kabupaten Kuningan,

Visi “**Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023**”, lahir dari kesadaran bahwa pembangunan sejatinya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Kemakmuran yang dimaksudkan dalam visi ini adalah terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Agamis dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis dengan Allah, manusia dan alam dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.

Dan **Pinunjul** merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras dan pantang menyerah. Sebagai kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata, **sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa**. Kesadaran membangun Kuningan dengan **membangun desa** merupakan warna pembangunan kita 5 (lima) tahun kedepan.

Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- (1) Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan jiwa kepemimpinan *nu sajati*.
- (2) Mewujudkan masyarakat Kuningan *nu sajati* dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.
- (3) Mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia *nu sajati*.
- (4) Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
- (5) Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Cita-cita besar ini dapat terwujud dengan komitmen dan dukungan semua pihak, baik jajaran eksekutif, legislatif dan seluruh mitra kerja kami yang berada di Kabupaten Kuningan. Peran serta aktif para pihak pelaksana pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang akan kita laksanakan bersama. Sinergi semua pihak akan menjadi daya dorong yang besar bagi pencapaian visi Kuningan Maju.

Harapan yang terkandung dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah tercapainya kualitas perencanaan pembangunan yang baik yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun.

Akhirnya saya berharap, visi misi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan menjadi semangat dan pedoman bagi jajaran pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Kuningan sekaligus untuk mewujudkan amanat pembangunan jangka panjang yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025”.

Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita bersama.

Kuningan, Februari 2021

BUPATI KUNINGAN



H. ACEP PURNAMA, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-13
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	I-13
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.....	I-13
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RTRW Kabupaten Kuningan.....	I-14
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	I-15
1.4 Maksud dan Tujuan	I-15
1.5 Sistematika Penulisan	I-16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Topografi	II-4
2.1.1.3 Klimatologi	II-6
2.1.1.4 Penggunaan Lahan	II-6
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-7
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-8
2.1.4 Demografi.....	II-10

2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-11
2.2.1	Pertumbuhan PDRB	II-11
2.2.2	PDRB Per Kapita.....	II-14
2.2.3	Indeks Gini.....	II-15
2.2.4	Indeks Pembangunan Manusia	II-15
2.2.5	Angka Kemiskinan.....	II-17
2.2.6	Angka Melek Huruf.....	II-17
2.2.7	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	II-19
2.2.8	Angka Partisipasi Kasar	II-19
2.2.9	Angka Partisipasi Murni	II-20
2.2.10	Jumlah Kematian Bayi	II-21
2.2.11	Jumlah Kasus Kematian Ibu.....	II-21
2.2.12	Angka Usia Harapan Hidup	II-22
2.2.13	Persentase Balita Gizi Buruk	II-22
2.2.14	Rasio Penduduk Yang Bekerja	II-23
2.2.15	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-25
2.2.16	Keluarga Pra Sejahtera	II-26
2.2.17	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.....	II-26
2.2.18	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan.....	II-27
2.2.19	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	II-27
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-28
2.3.1.	Layanan Urusan Wajib	II-28
2.3.1.1	Pendidikan	II-28
2.3.1.2.	Kesehatan	II-33
2.3.1.2.1	Angka Kematian Bayi.....	II-33
2.3.1.2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	II-34
2.3.1.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-35
2.3.1.2.4	Jumlah Fasilitas Kesehatan	II-36
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-37
2.3.1.3.1	Jalan dan Jembatan	II-37
2.3.1.3.2	Infrastruktur Sumber Daya Air	II-37

2.3.1.3.3	Penataan Ruang.....	II-39
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-39
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-40
2.3.1.6	Sosial	II-41
2.3.1.7	Tenaga Kerja.....	II-43
2.3.1.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-43
2.3.1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-44
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-45
2.3.1.9	Pangan	II-46
2.3.1.9.1	Ketersediaan Pangan Utama	II-46
2.3.1.9.2	Jumlah Desa Rawan Pangan	II-46
2.3.1.9.3	Konsumsi Beras Perkapita	II-48
2.3.1.10	Pertanian.....	II-48
2.3.1.11	Lingkungan Hidup.....	II-49
2.3.1.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-49
2.3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-50
2.3.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-51
2.3.1.15	Perhubungan.....	II-52
2.3.1.16	Komunikasi dan Informatika	II-53
2.3.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-55
2.3.1.18	Penanaman Modal	II-55
2.3.1.19	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-56
2.3.1.20	Kebudayaan	II-57
2.3.1.21	Statistik.....	II-58
2.3.1.22	Persandian	II-59
2.3.1.23	Perpustakaan	II-60
2.3.1.24	Kearsipan	II-60
2.3.2.	Layanan Urusan Pilihan	II-61
2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan.....	II-61
2.3.2.2	Pariwisata.....	II-62
2.3.2.3	Pertanian	II-65

2.3.2.4	Kehutanan.....	II-68
2.3.2.5	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-68
2.3.2.6	Perdagangan.....	II-70
2.3.2.7	Perindustrian.....	II-70
2.3.2.8	Transmigrasi.....	II-71
2.3.3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-71
2.3.3.1	Perencanaan.....	II-71
2.3.3.2	Keuangan	II-72
2.3.3.3	Pengawasan.....	II-74
2.3.3.4	Sekretariat Daerah.....	II-74
2.3.4	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-76
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-76
2.4.1	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Perbulan	II-77
2.4.2	Jumlah Demo	II-78
2.4.3	Rasio Ketergantungan.....	II-78
2.5	Capaian Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kuningan	II-93
2.6	Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018	II-97
2.7	Kinerja BUMD	II-107
2.8	Kerjasama Daerah	II-111
2.9.	Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan dan Arahkan Rekomendasi terhadap RPJMD menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan	II-116
2.9.1	Proyeksi Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan	II-118
2.10	Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	II-123
2.11	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	II-130
2.12	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-137
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-14
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-20
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-23
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-31

3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-34
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-34
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-38
3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran.....	III-39

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-1
4.1.2. Aspek Pelayanan Umum	IV-3
4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-6
4.1.2.3 Urusan Pilihan	IV-12
4.2 Isu Strategis	IV-14
4.3 Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-18
4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-21

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi.....	V-1
5.2 Tujuan dan Sasaran	V-5
5.3 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023	V-13
5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 (Program Unggulan Daerah)	V-15

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2 Program Pembangunan Daerah	VI-17
6.3 Program Prioritas	VI-53

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

9.1 Kaidah	IX-2
9.2 Pedoman Transisi	IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Kuningan Tahun 2018.....	II-2
Tabel 2.2	Luas Berdasarkan Ketinggian	II-5
Tabel 2.3	Luas Berdasarkan Morfologi	II-5
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan	II-6
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 2016	II-7
Tabel 2.6	Luas Kawasan Rawan Gerakan Tanah	II-9
Tabel 2.7	Luas Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Ciremai	II-9
Tabel 2.8	Informasi Demografi Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019...	II-10
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah)	II-11
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2014–2018 (Miliar Rupiah)	II-12
Tabel 2.11	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018 ..	II-13
Tabel 2.12	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (juta rupiah).....	II-15
Tabel 2.13	Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018	II-15
Tabel 2.14	Indikator IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019 (Metode Baru)	II-16
Tabel 2.15	Perbandingan IPM Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional	II-16
Tabel 2.16	Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019	II-17
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kuningan Tahun 2015– 2019	II-18
Tabel 2.18	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019	II-19

Tabel 2.19	Angka Partisipasi Kasardi Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-20
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-21
Tabel 2.21	Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Kuningan 2015 – 2019.....	II-21
Tabel 2.22	Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-21
Tabel 2.23	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019	II-22
Tabel 2.24	Jumlah Gizi Buruk Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019 ...	II-22
Tabel 2.25	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019	II-23
Tabel 2.25.1	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-26
Tabel 2.26	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-26
Tabel 2.27	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-27
Tabel 2.27.1	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-27
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2018.....	II-29
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Tahun 2016-2018.....	II-29
Tabel 2.30	Kondisi Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	II-30
Tabel 2.31	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar 2015-2018	II-31
Tabel 2.32	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-31
Tabel 2.33	Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2019	II-32
Tabel 2.34	Angka Kelulusan Tahun 2015-2019.....	II-33
Tabel 2.35	Angka Kematian Bayi Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019 .	II-34
Tabel 2.36	Angka Kematian Ibu Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019...	II-35
Tabel 2.37	Angka Gizi Buruk di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019...	II-36

Tabel 2.38	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kuningan tahun 2015-2019.....	II-36
Tabel 2.39	Inventarisasi dan Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Kuningan Tahun 2018.....	II-38
Tabel 2.40	Jumlah Rumah dan RTLH Per-Kecamatan Kabupaten Kuningan	II-39
Tabel 2.41	Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	II-40
Tabel 2.42	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-42
Tabel 2.43	Jumlah PMKS dan Sarana Sosial Di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-43
Tabel 2.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-44
Tabel 2.45	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-44
Tabel 2.46	Indikator Partisipasi Perempuan di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-45
Tabel 2.47	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kuningan 2015-2018.....	II-45
Tabel 2.48	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-46
Tabel 2.49	Desa Rawan Pangan Di Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2016.....	II-47
Tabel 2.50	Konsumsi Beras perkapita (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-48
Tabel 2.51	Jumlah Volume Sampah yang Terangkut serta Cakupan Pelayanan di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018	II-49
Tabel 2.52	Jumlah Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-50
Tabel 2.53	Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-50

Tabel 2.54	Rata rata Jumlah Anak di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-51
Tabel 2.55	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-52
Tabel 2.56	Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-53
Tabel 2.57	Ketersediaan Sarana dan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2019.....	II-53
Tabel 2.58	Indikator kinerja KUKM Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-55
Tabel 2.59	Jumlah Nilai Investasi dan Kerjasama Investasi Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2019	II-56
Tabel 2.60	Prasarana Olahraga yang Dimiliki Pemda Kabupaten Kuningan tahun 2015-2018	II-57
Tabel 2.61	Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2015- 2018	II-58
Tabel 2.62	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-58
Tabel 2.63	Data Perpustakaan di Kabupaten Kuningan 2015-2018.....	II-60
Tabel 2.64	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018	II-61
Tabel 2.65	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-61
Tabel 2.66	Sarana Prasarana Perikanan di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-62
Tabel 2.67	Potensi Sarana Prasarana Pariwisata di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-64
Tabel 2.68	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-65
Tabel. 2.69	Produktivitas dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-67
Tabel 2.70	Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Kuningan	II-69

Tabel 2.71	Target dan Realisasi PAD dari Pasar Kabupaten Kuningan.....	II-70
Tabel 2.72	Jumlah Pasar Modern dan Tradisional di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-70
Tabel 2.73	Data Sektor Industri Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2018 ..	II-70
Tabel 2.74	Jumlah Transmigran Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018..	II-71
Tabel 2.75	Kinerja Perencanaan per Program Kabupaten Kuningan 2015- 2018.....	II-71
Tabel 2.76	Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-72
Tabel 2.77	Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-74
Tabel 2.78	Nilai SAKIP Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-75
Tabel 2.79	Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2017.....	II-76
Tabel 2.80	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-77
Tabel 2.81	Jumlah Demonstrasi (unjuk rasa) di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018.....	II-78
Tabel 2.82	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019.....	II-79
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018.....	II-80
Tabel 2.84	Target dan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018.....	II-99
Tabel 2.85	Kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018.....	II-111
Tabel 2.86	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018 (persen).....	II-118
Tabel 2.87	Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuningan (dalam persen)	II-118
Tabel 2.88	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2018 (dalam persen)	II-119

Tabel 2.89	Nilai dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2018.....	II-120
Tabel 2.90	PDRB Per Kapita di Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2017...	II-120
Tabel 2.91	Proyeksi PDRB Kabupaten Kuningan (dalam Ribu Rupiah)	II-121
Tabel 2.92	Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2015– 2018	II-122
Tabel 2.93	Keterkaitan Isu Utama dengan Jasa Ekosistem	II-123
Tabel 2.94	Rumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	II-125
Tabel 2.95	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Program Unggulan Bupati	II-128
Tabel.2.96	Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kuningan Tahun 2017 – 2018	II-137
Tabel.2.97	Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	II-142
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-10
Tabel 3.3	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2018.....	III-11
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-13
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-16
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-19
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-25
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-27
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-28
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-30

Tabel 3.11	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 ..	III-32
Tabel 3.12	Komposisi Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-32
Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.....	III-33
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019-2020	III-35
Tabel 3.15	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021-2023	III-36
Tabel 3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2020	III-38
Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023	III-39
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023	V-6
Tabel 5.2	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023.....	V-13
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-2
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah	VI-18
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2020	VI-53
Tabel 6.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023	VI-85
Tabel 6.5	Rencana Proyek Strategis Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023.....	VI-157
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2020.....	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023.....	VII-3
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kuningan Tahun 2019	VII-4

Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kuningan Tahun 2020	VII-34
Tabel 7.5	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023.....	VII-143
Tabel 8.1	Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.....	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.....	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.....	I-3
Gambar 1.2 RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah & Tahunan	I-14
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kuningan	II-4
Gambar 3.1 Rata-rata Realisasi Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-3
Gambar 3.2 Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah	III-6
Gambar 3.3 Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen Dana Perimbangan ..	III-6
Gambar 3.4 Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-7
Gambar 5.1 Pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025	V-1
Gambar 5.2 Arti Semangat dan Nilai-nilai SAJATI (Santana, Basajan, Santika).....	V-3
Gambar 5.3 Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Visi Misi Nasional.....	V-4
Gambar 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan	VI-13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan



mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah provinsi, hingga Nasional.

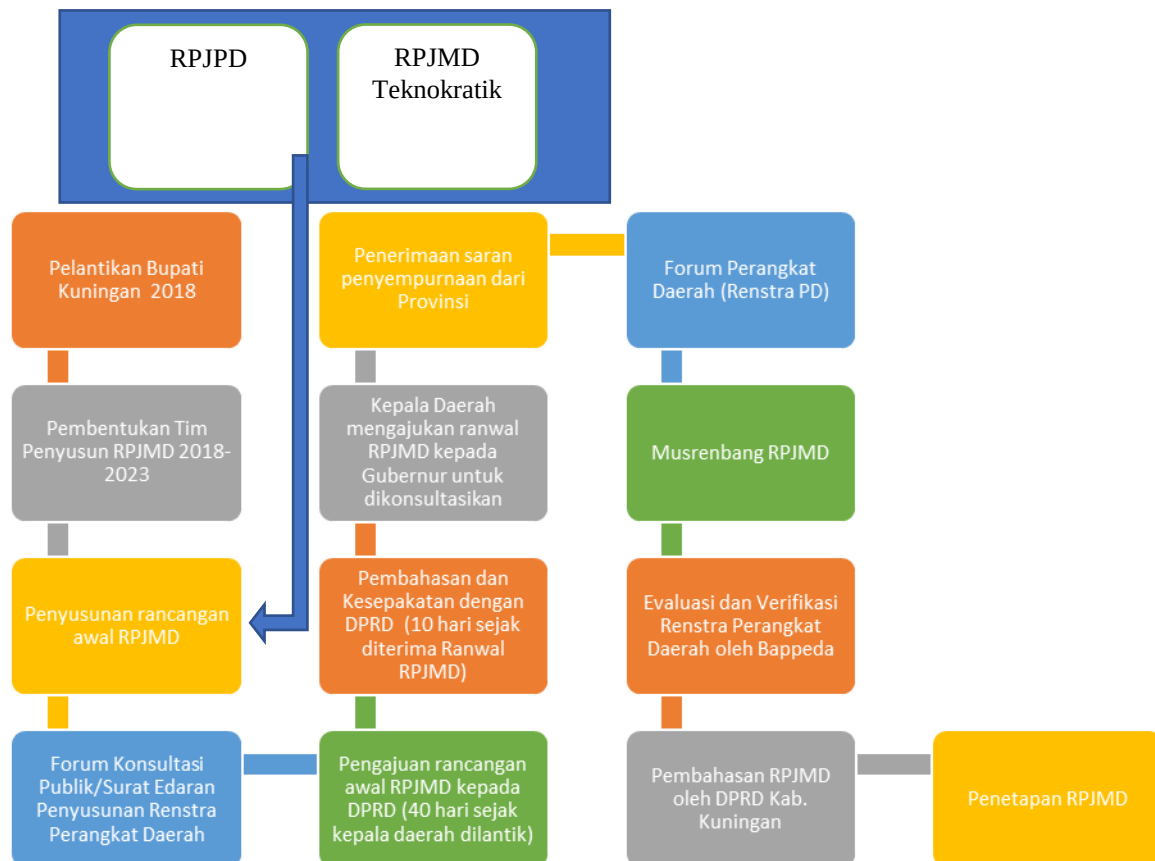
RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 menjadi dokumen yang sangat strategis, antara lain:

- (1) Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
- (2) Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 tahap keempat;
- (3) Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
- (4) Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan;
- (5) Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
- (6) Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki; dan
- (7) Pedoman penyusunan RENSTRA tahun 2018-2023 bagi Perangkat Daerah serta pedoman RPJMD bagi seluruh desa di Kabupaten Kuningan.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kuningan.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah proses penyusunan RPJMD dimulai sejak Pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Dalam rangka menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan di daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang RPJMD Teknokratik, untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pada masa transisi. Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana bagan berikut



Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Dalam perjalanannya sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila ditemukan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri tersebut, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial



budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada awal tahun 2020, infeksi Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Awalnya World Health Organization (WHO) menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia yang disebut dengan corona virus di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain, termasuk Indonesia.

Pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia pada akhir Maret 2020 yang menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia, merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan yang dilakukan suatu negara harus memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan politik maupun ekonomi. Nyatanya seluruh sendi kehidupan masyarakat terdampak oleh adanya pandemi ini. Tidak hanya ekonomi, sosial budaya masyarakat dan religi pun tidak luput dari pandemi ini. Perkembangan tersebut mendorong Pemerintah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Kuningan terdampak cukup berat, antara lain :

1. Sektor pariwisata terhenti. Adanya pembatasan warga untuk bepergian, membuat sektor ini yang paling kuat terkena dampaknya. PAD dari sektor ini turun hingga 70%.
2. Bisnis UMKM terhenti. Akibat adanya pembatasan sosial, banyak pelaku UMKM kehilangan pemasukan cukup drastis dan terpaksa

merumahkan para pekerjanya, sehingga angka pengangguran meningkat.

3. Pembatasan operasional industri. Kebijakan PSBB di masa Pandemi Covid-19, membuat sektor industri melakukan pembatasan operasional industri. Adanya pembatasan ini berakibat pada pengurangan tenaga kerja (PHK). Akibatnya banyak warga Kuningan yang merantau, kehilangan pekerjaan dan harus pulang kampung. Demikian juga dengan mereka yang bekerja di sector informal, misalnya pedagang Bubur/Indomie/Rokok, karena industri ditutup/terbatas jam operasinya, pendapatan berkurang drastic, sehingga dagangannya rugi. Tak hanya menambah angka pengangguran di daerah, para perantau ini berpotensi juga sebagai carrier virus corona.
4. Perubahan sosial budaya masyarakat. Kebijakan *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB memaksa masyarakat harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru di berbagai tataran kehidupan, seperti pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya.
5. *Refocusing* anggaran pemerintah. Dengan telah ditetapkannya UU Nomor 2 tentang UU 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Adanya refocusing anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan. Refocusing anggaran ini menjadi salah satu alasan terbesar penyusunan Perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023.

Alasan lain dilaksanakannya perubahan RPJMD ini adalah adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memaksa daerah untuk menyeragamkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang termaktub dalam peraturan tersebut. Kemudian sebagai bentuk sinergitas perencanaan daerah dan nasional, dengan telah ditetapkan RPJMN 2020 – 2024, arah pembangunan daerah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa



- 
- Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan



Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

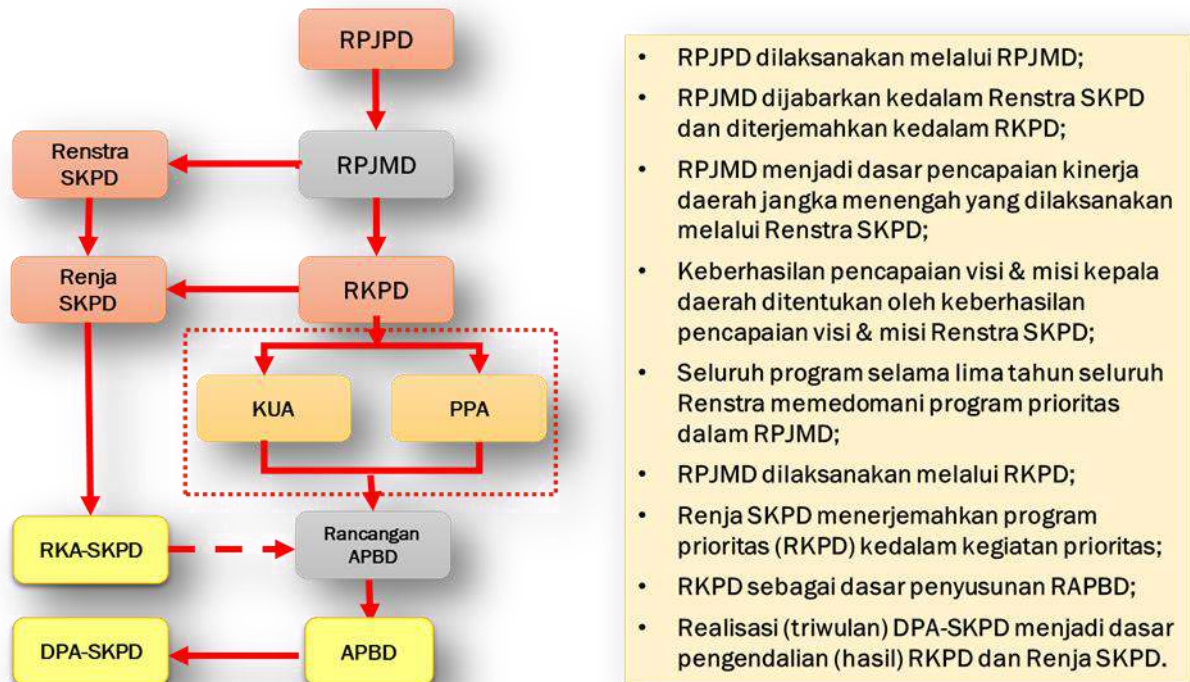
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024, pada perubahan RPJMD ini juga memperhatikan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan dan RPJMD Teknokratik merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan Pemerintah

Daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.



Gambar 1.2
RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah & Tahunan

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RTRW Kabupaten Kuningan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kuningan dengan rencana struktur dan pola ruang RTRW.



1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi.

Berdasarkan kajian KLHS diatas, rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Sejalan dengan perubahan RPJMD ini, KLHS pun mengalami revisi agar sejalan dengan perubahan yang dilakukan dalam RPJMD ini, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023 adalah untuk memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang terintegrasi dan sinergi antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar pemerintah, dan antar pelaku pembangunan sebagai tindak lanjut pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah serta percepatan penanganan pendemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023, adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah;
- b. Strategi pembangunan daerah;
- c. Kebijakan umum daerah; dan



- d. Program PD dan lintas PD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Hubungan Antar Dokumen
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Daya Saing Daerah
5. Capaian Pelaksanaan RPJPD Kab. Kuningan
6. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018
7. Kinerja BUMD
8. Kerjasama Daerah
9. Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan dan Arahkan Rekomendasi terhadap RPJMD menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan
10. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
11. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
12. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

BAB III – GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3. Kerangka Pendanaan
4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

BAB IV - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

- 
- 2. Isu Strategis
 - 3. Sustainable Development Goals (SDGs)
 - 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB V - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 1. Visi dan Misi
- 2. Tujuan dan Sasaran
- 3. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023
- 4. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 (Program Unggulan Daerah)

BAB VI - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2. Program Pembangunan Daerah
- 3. Program Prioritas

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII - KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

BAB IX - PENUTUP

- 1. Kaidah Pelaksanaan
- 2. Pedoman Transisi



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat $6^{\circ}46'51,92''\text{LS}$ – $7^{\circ}11'44,02''\text{LS}$ dan $108^{\circ}23'2,07''\text{BT}$ – $108^{\circ}47'40,12''\text{BT}$. Sedangkan secara geografis, berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai kurang lebih 119.409,31 hektar dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Cibingbin seluas kurang lebih 6.972 hektar dan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit yaitu Kecamatan Sindangagung seluas kurang lebih 1.300,91 hektar.

Batas wilayah Kabupaten Kuningan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat.

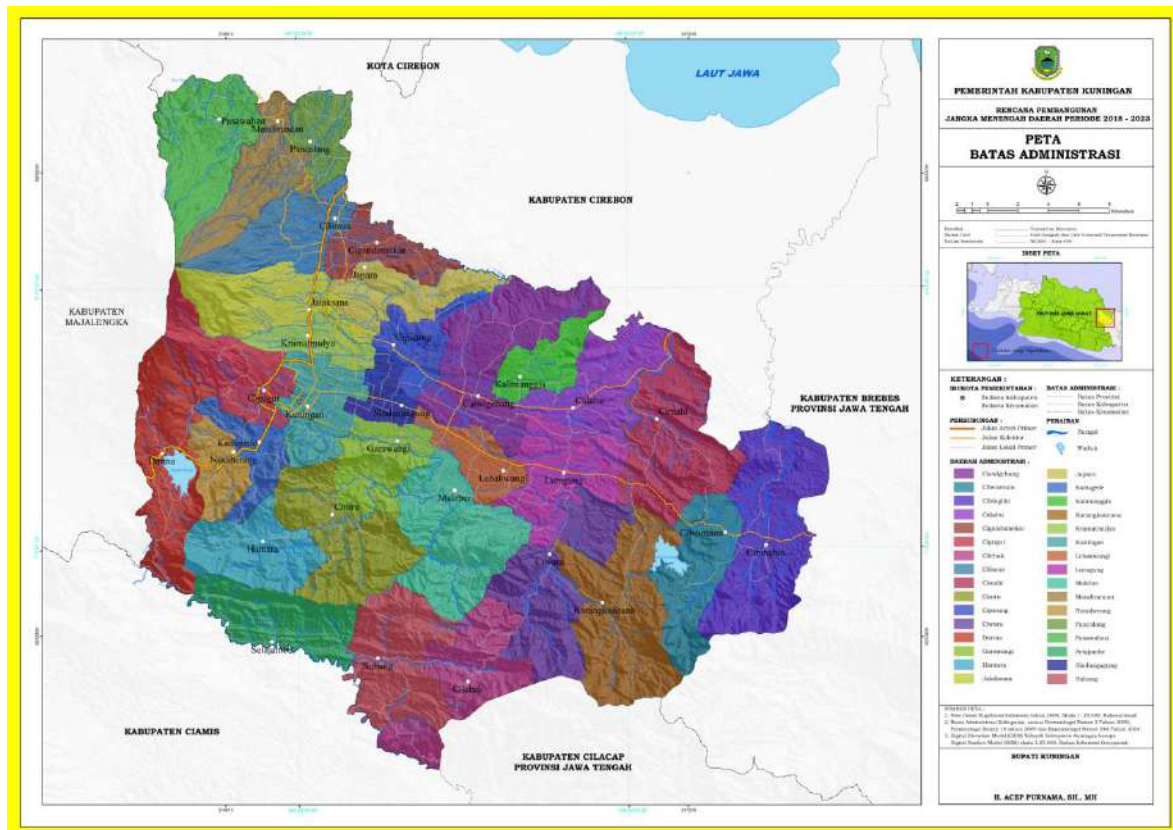
Wilayah administrasi Kabupaten Kuningan terbagi dalam 32 kecamatan, 361 desa dan 15 kelurahan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Kabupaten Kuningan Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Darma	Bakom, Cageur, Cikupa, Cimenga, Cipasung, Darma, Gunungsirah, Jagara, Karanganyar, Karangsari, Kawahmanuk, Paninggaran, Parung, Sagarahiang, Sakertabarat, Sakertatimur, Situsari, Sukarasa, dan Tugumulya.
2	Kadugede	Babatan, Bayuning, Ciherang, Ciketak, Cipondok, Cisukadana, Kadugede, Margabakti, Nangka, Sindangjawa, Tinggar, dan Windujanten.
3	Nusaherang	Ciasih, Cikadu, Haurkuning, Jambar, Kertawirama, Kertayuga, Nusaherang, dan Windusari.
4	Ciniru	Cijemit, Ciniru, Cipedes, Gunungmanik, Longkewang, Mungkaldatar, Pamupukan, Pinara, dan Rambatan.
5	Hantara	Bunigeulis, Cikondang, Citapen, Hantara, Pakapasangirang, Pakapasanhilir, Pasiragung, dan Tundangan.
6	Selajambe	Bagawat, Cantilan, Ciberung, Jamberama, Kutawaringin, Padahurip, dan Selajambe.
7	Subang	Bangunjaya, Gunungaci, Jatisari, Pamulihan, Situgede, Subang, dan Tangkolo.
8	Cilebak	Bungurberes, Cilebak, Cilimusari, Jalatrang, Legokherang, Mandapajaya, dan Patala.
9	Ciwaru	Andamui, Baok, Cilayung, Citikur, Citundun, Ciwaru, Garajati, Karangbaru, Lebakherang, Linggajaya, Sagaranten, dan Sumberjaya.
10	Karangkencana	Cihanjaro, Jabranti, Kaduagung, Karangkencana, Margacina, Segong, Simpayjaya, Sukasari, dan Tanjungkerta.
11	Cibingbin	Bantarpanjang, Ciangir, Cibingbin, Cipondok, Cisaat, Citenjo, Dukuhbadag, Sindangjawa, Sukaharja, dan Sukamaju.
12	Cibeureum	Cibeureum, Cimara, Kawungsari, Randusari, Sukadana, Sukarapih, Sumurwiru, dan Tarikolot.
13	Luragung	Benda, Cigedang, Cikaduwetan, Cikandang, Cirahayu, Dukuhmaja, Dukuhpicung, Gunungkarung, Luragunglandeuh, Luragungtonggoh, Margasari, Panyosogan, Sindangsari, Sindangsuka, Walaharcageur, dan Wilanagara.
14	Cimahi	Cikeusal, Cileuya, Cimahi, Cimulya, Gunungsari, Kananga, Margamukti, Mekarjaya, Mulyajaya, dan Sukajaya.
15	Cidahu	Bunder, Cibulan, Cidahu, Cieurih, Cihideunggirang, Cihideunghilir, Cikeusik, Datar, Jatimulya, Kertawinangun, Legok, dan Nenggela.
16	Kalimanggis	Cipancur, Kalimanggiskulon, Kalimanggiswetan, Kertawana, Partawangunan, dan Wanasaraya.
17	Ciawigebang	Ciawigebang, Ciawilor, Cigarukgak, Cihaur, Cihurip, Cijagamulya, Cikubangmulya, Ciomas, Ciputat, Dukuhdalem, Geresik, Kadurama, Kapandayan, Kramatmulya, Karangkamulyan, Lebaksiuh, Mekarjaya, Padarama, Pajawanlor, Pamijahan, Pangkalan, Sidaraja, Sukadana, dan Sukaraja.

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
18	Cipicung	Cimaranten, Cipicung, Karoya, Mekarsari, Muncangela, Sunganangan, Salareuma, Susukan, Sukamukti, dan Pamulihan.
19	Lebakwangi	Bendungan, Cinagara, Cineumbeuy, Cipetir, Langseb, Lebakwangi, Mancagar, Manggari, Mekarwangi, Pagundan, Pajawankidul, Pasayangan, dan Sindang.
20	Maleber	Buniasih, Cikahuripan, Cipakem, Ciporang, Dukuhtengah, Galaherang, Garahaji, Giriwaringin, Karangtengah, Kutamandarakan, Kutaraja, Maleber, Mandalajaya, Mekarsari, Padamulya, dan Parakan.
21	Garawangi	Cikananga, Cirukem, Citiusari, Garawangi, Gewok, Kadatuan, Kramatwangi, Kutakembaran, Lengkong, Mancagar, Mekarmulya, Pakembangan, Purwasari, Sukaimut, Sukamulya, Tambakbaya, dan Tembong.
22	Sindangagung	Babakanreuma, Balong, Dukuhlor, Kaduagung, Kertaunggaran, Kertawangunan, Kertayasa, Mekarmukti, Sindangagung, Sindangsari, Taraju, dan Tirtawangunan.
23	Kuningan	Ancaran, Awirarangan, Cibuang, Cigintung, Cijoho, Ciporang, Cirendang, Citangtu, Karangtawang, Kasturi, Kedungarum, Kuningan, Padarek, Purwawinangun, Winduhaji, dan Windusengkahan.
24	Cigugur	Babakanmulya, Cigadung, Cigugur, Cileuleuy, Cipari, Cisantana, Gunungkeling, Puncak, Sukamulya, dan Winduherang.
25	Kramatmulya	Bojong, Cibentang, Cikaso, Cikubangsari, Cilaja, Cilowa, Gandasoli, Gereba, Kalapagunung, Karangmangu, Kramatmulya, Pajambon, Ragawacana, dan Widasari.
26	Jalaksana	Babakanmulya, Ciniru, Jalaksana, Maniskidul, Manislur, Nangerang, Padamenak, Peusing, Sadamantra, Sangkanherang, Sayana, Sembawa, Sidamulya, Sindangbarang, dan Sukamukti.
27	Japara	Cengal, Cikeleng, Citapen, Dukuhdalem, Garatengah, Japara, Kalimati, Rajadanu, Singkup, dan Wano.
28	Cilimus	Bandorasakulon, Bandorasawetan, Bojong, Caracas, Cibeureum, Cilimus, Kaliaren, Linggairindah, Linggajati, Linggamekar, Linggasana, Sampora, dan Setianegara.
29	Cigandamekar	Babakanjati, Bunigeulis, Cibuntu, Indapatra, Jambugeulis, Karangmuncang, Koreak, Panawuan, Sangkanmulya, Sangkanurip, dan Timbang.
30	Mandirancan	Cirea, Kartawinangun, Mandirancan, Nanggela, Nangerangjaya, Pakembangan, Randobawagirang, Randobawailir, Salakadomas, Seda, Sukasari, dan Trijaya.
31	Pancalang	Danalampan, Kahiyangan, Mekarjaya, Pancalan, Patalagan, Rajawetan, Sarewu, Silebu, Sindangkempeng, Sumbakeling, Tajurbuntu, Tarikolot, dan Tenjolayar.
32	Pasawahan	Cibuntu, Cidahu, Cimara, Ciwiru, Kaduella, Padabeunghar, Padamatang, Paniis, Pasawahan, dan Singkup.

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan, 2018



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2018

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Kuningan

2.1.1.2 Topografi

- **Ketinggian Wilayah**

Ketinggian wilayah merupakan tinggi suatu titik di atas bidang acuan yang biasanya digunakan tinggi rata-rata dari permukaan laut. Ketinggian permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian barat dan bagian selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut (mdpl), sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian timur dengan ketinggian antara 120 mdpl sampai dengan 222 mdpl.

Kondisi wilayah Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ciremai (lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut) sangat bervariasi yaitu dengan ketinggian antara 250 - 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi itu pun menyebabkan Kabupaten Kuningan mempunyai kemiringan

yang bervariasi. Berikut dapat dilihat luasan berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kuningan pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2
Luas Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	0 - 500 mdpl	79.634,00	66,69
2	500 – 1.000 mdpl	32.451,44	27,18
3	1.000 – 2.000 mdpl	6.232,08	5,22
4	2.000 – 3.000 mdpl	1.083,88	0,91
5	> 3000 mdpl	7,92	0,01
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kuningan

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat dijelaskan bahwa ketinggian wilayah Kabupaten Kuningan terluas berada pada ketinggian diantara 0 – 500 mdpl seluas 79.634,00 hektar atau 66,69 % dari luas Kabupaten Kuningan, sedangkan ketinggian wilayah dengan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 mdpl seluas 7,92 hektar atau 0,01 % dari luas Kabupaten Kuningan.

▪ **Morfologi Wilayah**

Morfologi wilayah merupakan struktur luar dari batu-batuan dalam hubungan dengan perkembangan ciri topografis atau dengan kata lain ilmu yang mempelajari tentang batuan dan bentuk luar bumi. Adapun luas wilayah berdasarkan klasifikasi morfologi di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3
Luas Berdasarkan Morfologi

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1	Datar	3.718,47	3,11
2	Landai	26.093,89	21,85
3	Berombak	32.383,29	27,12
4	Berbukit, Bergelombang	49.195,99	41,20
5	Bergunung	8.017,68	6,71
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kuningan, 2018

Berdasarkan Tabel 2.3. dapat dijelaskan bahwa morfologi Kabupaten Kuningan terdiri atas datar, landai, berombak, berbukit, bergelombang dan bergunung. Secara keseluruhan morfologi berbukit,

bergelombang merupakan yang terluas yaitu sebesar 49.195,99 hektar, sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi datar seluas 3.718,47 hektar.

2.1.1.3 Klimatologi

Iklim merupakan keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode yang lama dan meliputi daerah yang luas. Sedangkan curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah dalam waktu tertentu. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun mencapai 27,3°C, dengan suhu minimum cenderung sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 32°C. Untuk curah hujan, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan yang berkisar antara 2.000-3.000 mm/th. Berikut Tabel 2.4. dapat disajikan luasan wilayah berdasarkan curah hujan di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2.000 - 2.500 mm/tahun	47.705,59	39,95%
2	2.500 - 3.000 mm/tahun	12.637,70	10,58%
3	> 3.000 mm/tahun	59.066,03	49,47%
Jumlah		119.409,31	100,00%

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kuningan, 2018

Berdasarkan Tabel 2.4. dapat dijelaskan bahwa dari luas Kabupaten Kuningan seluas 119.409,31 hektar, sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki curah hujan >3.000 mm/tahun yaitu seluas 59.066,03 hektar. Sedangkan luas wilayah terkecil yaitu 12.637,70 hektar merupakan wilayah yang memiliki curah hujan diantara 2.500-3.000 mm/tahun.

2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Menurut Arsyad (1989) penggunaan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Adapun berdasarkan hasil interpretasi data citra, penggunaan

lahan di Kabupaten Kuningan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.5. di bawah ini.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan
Tahun 2016

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
1	Danau/Situ	689,12	0,58%
2	Gedung/Bangunan	9,85	0,01%
3	Hutan Rimba	14.870,10	12,45%
4	Padang Rumput	124,03	0,10%
5	Perkebunan/Kebun	31.342,10	26,25%
6	Permukiman dan Tempat Kegiatan	11.753,60	9,84%
7	Sawah Irigasi	19.418,00	16,26%
8	Sawah Tadah Hujan	15.946,00	13,35%
9	Semak Belukar	10.918,20	9,14%
10	Sungai	889,45	0,74%
11	Tegalan/Ladang	13.429,70	11,25%
12	Vegetasi Non Budidaya Lainnya	19,25	0,02%
Jumlah		119.409,3	100,00%

Sumber: Updating Peta RBI Tahun 2017, BIG

Berdasarkan Tabel 2.5. dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan terluas di Kabupaten Kuningan yaitu perkebunan dengan luasan 31.342,10 hektar, sedangkan penggunaan lahan terkecil berupa gedung/bangunan seluas 9,85 hektar.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031, Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang strategis untuk dikembangkan, antara lain dilihat dari aspek sebagai berikut :

1. Kabupaten Kuningan berada pada lintasan jalan nasional yang menghubungkan PKN Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan PKN Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah, sehingga berpotensi untuk pelayanan jasa arus pergerakan orang/barang, pengembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah.

- 
2. Kabupaten Kuningan berdekatan dengan Kota Cirebon sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang menjadi pusat pelayanan bagi wilayah Kabupaten Kuningan dan sekitarnya, sehingga dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan Kabupaten Kuningan.
 3. Keberadaan Kabupaten Kuningan dekat dengan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, yang memiliki potensi besar terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan sebagai prasarana penunjang transportasi bagi Kabupaten Kuningan.
 4. Kabupaten Kuningan termasuk Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan). Salah satu sektor unggulan Kabupaten Kuningan dibanding dengan daerah lainnya, yaitu sektor pariwisata dan pertanian yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya.
 5. Kabupaten Kuningan termasuk Kawasan Cibening (Cirebon-Brebes-Kuningan) dengan pusat pengembangan wilayah timur Kabupaten Kuningan tepatnya di Cibingbin sebagai kawasan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah.
 6. Kabupaten Kuningan termasuk salah satu wilayah pengembangan kawasan Metropolitan Cirebon Raya yang berfungsi sebagai daerah penyangga.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan diantaranya adalah gerakan tanah letusan gunungapi, dan banjir.

Berikut dapat dijelaskan terkait potensi rawan bencana di Kabupaten Kuningan yaitu :

▪ Gerakan Tanah

Berdasarkan Peta Revisi RTRW Kabupaten Kuningan (2018) kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi menjadi kawasan rawan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, dan

tinggi. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 2.6. di bawah ini.

Tabel 2.6
Luas Kawasan Rawan Gerakan Tanah

No	Kawasan Rawan Gerakan Tanah	Luas (ha)
1	Sangat Rendah	6.843,67
2	Rendah	42.138,68
3	Menengah	53.368,90
4	Tinggi	15.893,92

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kuningan, 2018

Berdasarkan Tabel 2.6. diatas, kawasan rawan gerakan tanah menengah dan tinggi tersebar di seluruh kecamatan.

▪ **Letusan Gunung Api**

Keberadaan Gunung Ciremai yang termasuk jenis gunung api aktif sejak tahun 1960 selain merupakan asset alam yang sangat berharga, namun memiliki risiko bencana alam letusan gunung (erruption), sehingga memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana.

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kuningan (2018) luasan kawasan rawan bencana gunung api di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 2.7. di bawah ini.

Tabel 2.7
Luas Kawasan Rawan Bencana
Gunung Api Ciremai

No	Tipologi Rawan Gerakan Gunung Api	Luas (ha)
1	Kawasan Rawan Bencana I Gunungapi Ciremai yang berpotensi terlanda aliran lahar hujan	2.503,86
2	Kawasan Rawan Bencana II Gunungapi Ciremai yang berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan	4.461,09
3	Kawasan Rawan Bencana III Gunungapi Ciremai yang selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun	232,10
Jumlah		7.197,05

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kuningan, 2018

▪ **Banjir**

Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta faktor-faktor kerusakan

lingkungan seperti kritisnya daerah resapan air, pendangkalan sungai dan kurang berfungsinya saluran drainase. Lokasi potensi banjir akibat luapan air sungai yaitu di Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cibingbin.

2.1.4 Demografi

Penduduk Kuningan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 0,6 % setiap tahunnya. Bahkan tahun 2017-2019 laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan hingga 0,59 %, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Informasi Demografi Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Demografi					
1. Jumlah Penduduk (jiwa)	1.055.417	1.061.886	1.068.201	1.074.497	1.080.804
a. Laki-laki	530.575	533.873	537.106	540.181	543.415
b. Perempuan	524.842	528.013	531.095	534.316	537.389
c. Rasio	101,09	101,11	101,13	101,10	101,12
2. Luas Wilayah (km ²)	1.195,71				
3. Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)	882	888	893	898	905
4. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,60	0,61	0,59	0,59	0,59
5. Jumlah Rumah Tangga	270.773	272.433	274.053	275.668	
6. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (jiwa)	1.055.417	1.061.886	1.068.201	1.074.497	1.080.804
a. 0-14	271.971	269.797	267.566	265.446	263.352
b. 15-64	697.216	702.657	707.743	712.377	716.626
c. 65+	86.230	89.432	92.892	96.674	100.826
7. Tingkat pendidikan penduduk usia 10 Tahun ke atas menurut jenis kelamin (%)					
- Laki-laki					
a. < SD	12,23	12,22	14,29	16,60	
b. SD Sederajat	48,69	46,88	45,35	42,11	
c. SLTP Sederajat	18,21	17,46	17,91	17,94	
d. SLTA Sederajat	15,19	16,07	18,00	18,83	
e. Akademi/Perguruan Tinggi	5,68	7,37	4,45	4,51	
- Perempuan					
a. < SD	15,10	14,11	14,25	17,95	
b. SD Sederajat	49,68	49,27	50,21	43,44	

INDIKATOR	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
c. SLTP Sederajat	17,07	16,53	18,03	18,10	
d. SLTA Sederajat	12,25	12,81	14,79	13,64	
e. Akademi/Perguruan Tinggi	5,89	7,28	2,70	6,86	
8. Angka Beban Tanggungan (ABT)	51,38	51,12	50,93	50,83	50,82

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2020

Keterangan:

***) Proyeksi Penduduk masih menggunakan tahun dasar Sensus Penduduk 2010 (SP2010)**

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan Kabupaten Kuningan dari Tahun 2014 sampai tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan hamper pada semua sektor. Hanya satu sektor yang mengalami sedikit fluktuatif yaitu sektor pertambangan dan penggalan. Lebih rinci tentang PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kuningan
Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.868,83	2.900,32	3.031,84	3.196,98	3.379,28
B	Pertambangan dan Penggalan	226,71	228,22	227,76	228,13	229,36
C	Industri Pengolahan	299,12	318,14	340,89	357,83	376,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,28	12,65	13,40	13,95	14,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	11,23	11,92	12,61	13,53	14,53
F	Konstruksi	1.093,96	1.184,79	1.227,21	1.334,59	1.452,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.186,75	2.257,76	2.353,69	2.441,34	2.541,67
H	Transportasi dan Pergudangan	1.695,41	1.847,31	1.974,10	2.077,60	2.190,20
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	214,09	232,46	251,11	272,53	296,44
J	Informasi dan Komunikasi	540,35	625,00	695,96	772,13	841,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	628,61	682,81	746,64	783,18	823,96
L	Real Estate	380,43	399,59	426,50	465,75	507,04

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018*
M,N	Jasa Perusahaan	50,96	55,01	59,86	65,46	71,74
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	488,83	499,80	514,89	523,69	537,05
P	Jasa Pendidikan	1.084,79	1.240,75	1.364,00	1.509,51	1.663,63
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	188,12	214,66	234,42	257,39	277,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	414,93	464,48	502,90	553,05	603,00
PDRB		12.385,382	13.175,672	13.977.774	14.866,619	15.821,95

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2019

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2014–2018
(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.720,38	4.069,41	4.439,44	4.868,26	5.518,24
B	Pertambangan dan Penggalian	285,35	306,42	307,91	370,20	305,31
C	Industri Pengolahan	355,27	395,68	439,42	473,64	508,87
D	Pengadaan Listrik & Gas	10,93	13,36	15,86	19,07	21,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	12,68	14,21	16,15	18,85	21,84
F	Konstruksi	1.318,98	1.524,86	1.612,94	1.797,32	2.022,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.488,29	2.640,93	2.800,77	3.001,19	3.238,07
H	Transportasi dan Pergudangan	2.098,80	2.585,60	2.862,96	3.103,89	3.351,58
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	260,09	292,59	326,65	370,20	420,08
J	Informasi dan Komunikasi	512,43	592,41	660,71	743,31	813,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	795,60	910,95	1.040,88	1.154,28	1.275,98
L	Real Estate	419,40	445,47	482,82	534,64	590,34
M,N	Jasa Perusahaan	59,55	66,31	73,01	81,75	94,66
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	672,08	760,26	799,50	854,35	913,75
P	Jasa Pendidikan	1.342,64	1.619,23	1.835,06	2.172,06	2.579,72
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	208,47	252,87	287,54	324,72	359,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	437,84	496,12	561,65	645,71	735,13
PDRB		14.998,96	16.986,67	18.563,29	20.463,99	25.090,47

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2019

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018

NO	Sektor	2014	2015	2016	2017 *)	2018 *)
		%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,8	23,9	23,9	23,8	24,2
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,9	1,8	1,7	1,5	1,3
3.	Industri Pengolahan	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6.	Konstruksi	8,8	9,0	8,7	8,8	8,9
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	16,6	15,6	15,1	14,7	14,2
8.	Transportasi dan Pergudangan	14,0	15,2	15,4	15,2	14,7
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
10.	Informasi dan Komunikasi	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,3	5,4	5,6	5,6	5,6
12.	Real Estate	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
13.	Jasa Perusahaan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4,5	4,5	4,3	4,2	4,0
15.	Jasa Pendidikan	9,0	9,5	9,9	10,6	11,3
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
17.	Jasa Lainnya	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2019, BPS Kabupaten Kuningan

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pada hampir seluruh sektor dalam PDRB, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi serta Jasa Keuangan dan Asuransi, yang telah berimplikasi kepada pendapatan masyarakat, walaupun di sisi lain terdapat juga sebagian sektor yang turun yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi; Real Estate; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Disamping itu ada pula beberapa sektor yang stagnan atau tidak ada perubahan signifikan diantaranya sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah; dan Jasa Perusahaan.

2.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Nilai PDRB per Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 14,30 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 21,20 juta rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran.

Tabel 2.12
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (juta rupiah)

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018*
PDRB Perkapita ADHB	14,30	16.09	17,48	19,14	21,20

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2020; *) : Data Sementara

2.2.3 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan diukur dengan indeks gini yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) pengeluaran yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini di Kabupaten Kuningan relatif rendah, hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang dapat ditekan dari 0,370 pada tahun 2014 menjadi 0,397 pada tahun 2018. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.13. berikut ini.

Tabel 2.13
Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Gini Ratio	0,370	0,344	0,332	0,320	0,397

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2020

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk menilai capaian kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tren capaian pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan selama 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional. Meskipun dinamika pembangunan manusia di Kabupaten

Kuningan terus meningkat, yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun capaiannya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukkan masih berstatus sedang. Artinya, masih perlu akselerasi untuk mencapai kategori tinggi dengan capaian lebih dari 70.

IPM Kabupaten Kuningan beserta Indeks Kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Indikator IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2015 -2019
(Metode Baru)

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup (UHH)	72,64	72,76	72,88	73,01	73,23
Indeks Kesehatan	80,99	81,17	81,35	81,55	81,89
Angka Melek Huruf (AMH)	98,71	98,79	*)	*)	*)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,20	7,34	7,35	7,51	7,37
Indeks Pendidikan	57,42	57,91	58,00	58,57	58,12
Pengeluaran per Kapita Setahun (ribu rupiah)	8.516	8.580	8.736	8.918	9.731
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,19	67,51	67,78	68,28	69,10

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Ket : *) tidak dihitung lagi

Capaian IPM Kabupaten Kuningan saat ini masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Perbandingan IPM Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
dan Nasional

Uraian	IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Kuningan	67,19	67,51	67,78	68,28	69,10
Provinsi Jawa Barat	69,50	70,19	70,69	71,30	72,03
Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: diolah dari data BPS, 2020

2.2.5 Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih terbilang tinggi walaupun selama kurun 5 tahun cenderung menurun, dari persentase penduduk miskin sebesar 13,97% pada tahun 2015 menurun menjadi 11,41% pada tahun 2019. Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat dan nasional. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16
Angka Kemiskinan
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	147,20	144,10	141,60	131,20	123,20
2	Garis Kemiskinan	276.154	289.901	302.061	332.483	340.775
3	Persentase Penduduk Miskin	13,97	13,59	13,27	12,22	11,41

Sumber: Buku Kabupaten Kuningan Dalam Angka, BPS 2020

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan memang belum signifikan, terlihat dari Tahun 2015 hingga 2019, angka kemiskinan rata-rata hanya turun sekitar 0,64%.

2.2.6 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf oleh BPS didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Data ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa

banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan, dapat digunakan sebagai tolak ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan buta huruf; Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia lainnya; Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat, dan lain-lain.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	783.466	792.089	N/A	801.855	808.215
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	841.490	896.910	800.635	809.056	817.452
3	Angka Melek Huruf	98,71	98,79	*)	99,11	98,87

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2019
Ket. Mulai Tahun 2017, Angka Melek huruf tidak dihitung lagi

Tingginya angka melek huruf menggambarkan bekerjanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Di Kabupaten Kuningan, angka melek huruf sudah terbilang tinggi, di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat 98,78. Ada trend positif pada perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Kuningan dari Tahun 2015-2019, naik dengan cukup signifikan setiap tahunnya.

2.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator yang digunakan dalam perhitungan angka rata-rata lama sekolah adalah: *Pertama*, partisipasi sekolah. *Kedua*, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki. *Ketiga*, ijazah tertinggi yang dimiliki. *Keempat*, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kuningan cukup baik, yang menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Harapan Lama Sekolah	12,03	12,04	12,06	12,07	12,10
Rata-Rata Lama Sekolah	7,20	7,34	7,35	7,51	7,38

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kuningan, BPS 2020

2.2.8 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar

merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Kasar
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

APK	2015	2016	2017	2018	2019
APK SD/MI	108,65	99,83	106,95	99,65	100,35
APK SMP/MTs	86,24	88,26	88,60	88,74	96,43
APK SMA/MA/SMK	72,88	67,14	75,25	79,12	77,40

Sumber: Kabupaten Kuningan Dalam Angka, BPS 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan nilai APK pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APK SD/MI tertinggi sebesar 108,65 di tahun 2015, terendah sebesar 99,65 di tahun 2018, APK SMP/MTs tertinggi sebesar 96,43 di tahun 2019, terendah sebesar 86,24 di tahun 2015. APK SMA/MA/SMK tertinggi sebesar 79,12 di tahun 2018, terendah sebesar 67,14 di tahun 2016.

2.2.9 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Sedangkan nilai APM pada berbagai jenjang pendidikan ada yang cenderung turun dan ada yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. APM SD/MI sebesar 100 di tahun 2015, turun menjadi 95,57 di tahun 2019. APM SMP/MTs sebesar 81,58 di tahun 2015, turun menjadi 79,60 di tahun 2019. APM SMA/MA/SMK sebesar 61,44 di tahun 2015, terus meningkat menjadi 66,79 di tahun 2019.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

APM	2015	2016	2017	2018	2019
APM SD/MI	100,00	97,89	96,46	95,48	95,57
APM SMP/MTs	81,58	73,64	75,50	77,84	79,60
APM SMA/MA/SMK	61,44	60,40	63,16	67,45	66,79

Sumber: Kabupaten Kuningan Dalam Angka, BPS 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

2.2.10 Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Kuningan selama tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan. Jumlah kematian bayi terdapat 6 jumlah kasus kematian bayi per seribu kelahiran pada tahun 2015 menurun menjadi 2,90 kasus pada tahun 2019. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Jumlah Kematian Bayi
Kabupaten Kuningan 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kasus kematian bayi (per 1000 kasus)	6,10	5,63	4,61	3,93	3,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2020

2.2.11 Jumlah Kasus Kematian Ibu

Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kuningan berdasarkan data beberapa tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel di bawah menunjukkan kematian ibu terus cenderung menurun dari 27 kasus pada tahun 2015 menjadi 23 Kasus pada tahun 2019. Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Jumlah Kasus Kematian Ibu
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kasus kematian ibu (per 100.000 kasus)	27	26	24	22	23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2020

2.2.12 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya.

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kuningan telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai menjadi 73,35 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 73,35 tahun. Peningkatan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kuningan ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Usia Harapan Hidup	72,64	72,76	72,88	73,01	73,35

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kuningan, 2020 BPS

2.2.13 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Tabel 2.24
Jumlah Gizi Buruk Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Gizi Buruk (%)	0,10	0,1	0,10	0,61	0,53
Bayi Lahir	88.784	87.900	83.597	89.288	66.202
Penderita Gizi Buruk	82	53	77	437	349

Sumber: Profil Kesehatan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Tren persentase Gizi buruk pada balita dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus meningkat. Dari 0,10 persen pada tahun 2015 menjadi 0,53 persen pada Tahun 2019.

2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Berdasarkan data BPS Tahun 2019, dari 818.808 jiwa penduduk usia kerja 502.051 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 316.757 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 453.781 jiwa terdiri dari 303.852 jiwa laki-laki dan 149.929 jiwa perempuan.

Tabel 2.25
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ketenagakerjaan					
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja Seminggu yang lalu					
1. Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin (jiwa)	784.812	840.717	801.518	810.422	818.808
- Laki-laki	390.654	422.643	399.056	403.419	407.610
- Perempuan	394.158	418.074	402.462	407.003	411.198
a. Angkatan Kerja	471.002	506.370	462.403	475.284	502.051
- Laki-laki	318.729	348.024	311.898	321.101	335.211
- Perempuan	152.273	158.346	150.505	154.183	166.840
(1) Bekerja	435.712	469.895	425.700	432.549	453.781
- Laki-laki	294.502	323.656	289.748	293.720	303.852
- Perempuan	141.210	146.239	135.952	138.829	149.929
(2) Mencari Kerja	35.290	36.475	36.703	42.735	48.270
- Laki-laki	24.227	24.368	22.150	27.381	31.359
- Perempuan	11.063	12.107	14.553	15.354	16.911
b. Bukan Angkatan Kerja	313.810	334.347	339.115	335.138	316.757
- Laki-laki	71.925	74.619	87.158	82.318	72.399
- Perempuan	241.885	259.728	251.957	252.820	244.358
(1) Sekolah	54.912	64.103	74.130	68.123	59.944
- Laki-laki	26.628	31.042	39.552	34.897	31.541
- Perempuan	28.284	33.061	34.578	33.226	28.403
(2) Mengurus Rumah Tangga	194.876	214.886	215.808	225.996	219.099
- Laki-laki	7.976	9.129	11.486	19.895	17.729

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Perempuan	186.900	205.757	204.322	206.101	201.370
(3) Lainnya	64.022	55.358	49.177	41.019	37.714
- Laki-laki	37.321	34.448	36.120	27.526	23.129
- Perempuan	26.701	20.910	13.057	13.493	14.585
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen)	60,01	60,23	57,69	58,65	61,31
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	7,49	7,20	7,94	8,99	9,83
4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (persen)	92,51	92,80	92,06	91,01	90,39
5. Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (jiwa)	435.712	469.895	425.700	372.135	N/A
- Laki-laki	294.502	323.656	289.748	249.040	N/A
- Perempuan	141.210	146.239	135.952	123.095	N/A
a. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	121.854	121.764	101.600	93.601	N/A
- Laki-laki	76.502	81.251	70.169	71.398	N/A
- Perempuan	45.352	40.513	31.431	22.203	N/A
b. Industri Pengolahan	30.068	35.928	35.855	40.795	N/A
- Laki-laki	22.735	24.081	20.735	21.762	N/A
- Perempuan	7.333	11.847	15.120	19.033	N/A
c. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	150.257	160.849	145.526	119.420	N/A
- Laki-laki	91.904	100.636	89.759	67.292	N/A
- Perempuan	58.353	60.213	55.767	52.128	N/A
d. Jasa Kemasyarakatan	65.464	69.808	63.419	54.828	N/A
- Laki-laki	36.172	37.983	32.393	26.704	N/A
- Perempuan	29.292	31.826	31.026	28.124	N/A
e. Lainnya (Pertambangan dan Penggalan, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)	68.069	81.546	79.300	63.491	N/A
- Laki-laki	67.189	79.706	76.692	61.884	N/A
- Perempuan	880	1.840	2.608	1.607	N/A
6. Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (jiwa)	435.712	469.895	425.700	437.150	421.568
- Laki-laki	294.502	323.656	289.748	298.319	297.864
- Perempuan	141.210	146.239	135.952	138.831	123.704
a. Berusaha Sendiri	78.025	96.113	98.302	77.764	112.506
- Laki-laki	52.022	64.730	64.825	50.491	69.038
- Perempuan	26.003	31.383	33.477	27.273	43.468
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	89.190	83.127	62.666	83.688	72.670
- Laki-laki	65.785	63.173	48.253	55.738	60.080
- Perempuan	23.405	19.954	14.413	27.950	12.590

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
c. Berusaha dibantu buruh tetap	26.530	23.130	15.551	26.930	19.629
- Laki-laki	21.196	19.491	13.988	20.921	17.089
- Perempuan	5.334	3.639	1.563	6.009	2.540
d. Buruh/ Karyawan	128.926	143.168	133.236	158.078	152.069
- Laki-laki	93.402	101.863	90.476	108.677	100.960
- Perempuan	35.524	41.305	42.760	49.401	51.109
e. Pekerja Bebas	62.455	69.953	64.899	57.615	26.927
- Laki-laki	50.933	57.988	53.745	46.130	18.446
- Perempuan	11.522	11.965	11.154	11.485	8.481
f. Pekerja Tak Dibayar	50.586	54.404	51.046	33.075	37.767
- Laki-laki	11.164	16.411	18.461	16.362	32.251
- Perempuan	39.422	37.993	32.585	16.713	5.516
7. Menurut Status Pekerjaan Utama Formal/ Informal dan Jenis Kelamin (jiwa)	435.712	469.895	425.700	437.150	N/A
a. Formal	155.456	166.297	148.787	185.008	N/A
- Laki-laki	114.598	121.353	104.464	129.598	N/A
- Perempuan	40.858	44.944	44.323	55.410	N/A
b. Informal	280.256	303.598	276.913	252.142	N/A
- Laki-laki	179.904	202.303	185.284	168.721	N/A
- Perempuan	100.352	101.295	91.629	83.421	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2020

2.2.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tabel 2.25.1
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,77	-	86,34	86,62	86,92
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,59	-	72,39	73,05	70,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

2.2.16 Keluarga Pra Sejahtera

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	29,88	28,91	29,4	3,84	3,56

Sumber : Sumber : DPPKBPP&PA, 2020

2.2.17 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan melibatkan akademisi merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.27
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25	88,65	89,75	82,08	83,40

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2020

2.2.18 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Tabel 2.27.1
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Skor Pola Pangan Harapan (Persen)	74,60	82,50	82,45	81,20

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, 2020

2.2.19 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bidang pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.

Kontribusi Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Kuningan mencakup sub sektor Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian;

Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Subsektor Perikanan. Pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, kontribusi sector ini mengalami fluktuasi. Data dapat dilihat pada Tabel 2.9. dan 2.10. diatas.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Negara agar dimungkinkan untuk diakses oleh warga, terutama pada jenjang pendidikan dasar, dimana jenjang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar. Kondisi pendidikan di Kabupaten Kuningan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, terutama dari sisi ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan hingga akses masyarakat terhadap pendidikan.

Berikut adalah sajian data-data terkait dengan sektor pendidikan di Kabupaten Kuningan.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2018

No.	Informasi Demografi	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
A.	Penduduk Usia Sekolah				
1	7 - 12 tahun	54,46	53,74	48,75	48,92
2	13 - 15 tahun	23,30	23,70	27,13	29,13
3	16 - 18 tahun	22,24	22,56	24,12	21,95
B.	Partisipasi Sekolah (%)				
1	Tidak/Belum Sekolah	3,16	4,75	4,55	5,64
2	Masih Sekolah	25,30	22,17	21,74	21,14
3	Tidak Bersekolah Lagi	71,54	73,08	73,71	73,22
C.	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%)				
1	Laki-laki	0,69	1,69	0,53	1,13
2	Perempuan	1,88	3,20	2,87	2,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, 2019

Angka partisipasi sekolah penduduk Kuningan sudah terbilang tinggi, menggambarkan kesadaran akan pendidikan yang sudah baik, akan tetapi sayangnya masih terjadi ketimpangan akses terhadap pendidikan berdasarkan jenis kelamin, dimana berdasarkan data di atas tampak bahwa buta huruf lebih banyak dialami oleh perempuan bahkan lebih dari dua kali lipat dari angka buta huruf laki-laki.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Tahun 2016-2018

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	APS 7-12	99,83	100,00	99,25
2	APS 13-15	88,26	88,99	88,67
3	APS 16-18	67,14	74,88	76,50

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2019

Terkait dengan angka partisipasi, BPS menjelaskan bahwa angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Di Kabupaten Kuningan tercatat APM pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten yaitu SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B terbilang tinggi, berbeda dengan APM untuk level pendidikan atas yang terbilang masih sangat rendah. Selain itu, di level pendidikan atas juga masih terlihat tingginya angka putus sekolah yang cukup rentan. Selain akses terhadap pendidikan, juga yang penting untuk diperhatikan adalah sarana dan prasarana pendidikan. Tabel berikut menyajikan data yang terkait dengan kondisi ruang kelas yang ada di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.30
Kondisi Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kuningan Tahun 2019

Satuan Pendidikan	Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
TK	332	44	28	402
SD	3.110	1.273	748	4.794
SMP	1.268	97	32	1.292

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Ada masalah penting terkait dengan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kuningan, yaitu banyaknya ruang kelas yang tidak representatif sebagai arena belajar siswa. Untuk tingkat SD misalnya, 42% ruang kelas rusak, baik rusak ringan maupun berat. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat satuan pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Terkait dengan rasio murid dan sekolah, tabel berikut menggambarkan ketersediaan infrastruktur sekolah di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar 2015-2018

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD				
A	Jumlah gedung sekolah	649	649	651	652
B	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	104.375	102.986	102.986	N/A
C	Rasio	1: 160	1: 160	1: 158	
2	SMP				
A	Jumlah gedung sekolah	94	95	102	103
B	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	40.612	40.907	40.613	N/A
C	Rasio	1: 432	1: 430	1: 398	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2018
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2018

Jumlah SD terbilang banyak di Kabupaten Kuningan, dengan rasio 1:158 pada Tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar tingkat SD harusnya sudah mulai mudah. Sedangkan untuk tingkat SMP, rasio jumlah sekolah dan jumlah murid jauh lebih tinggi, artinya, terjadi kepadatan jumlah murid dalam satu sekolah dan berpotensi akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah.

c. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar

Tabel 2.32
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD					
A	Jumlah Guru	6.316	6.297	6.069	6.119	6.628
B	Jumlah Murid	104.375	102.986	102.557	102.081	102.147
C	Rasio	1:0,061	1:0,061	1:0,059	1:0,060	1:0,065



2	SMP					
A	Jumlah Guru	2.376	2.359	2.242	2.319	2.427
B	Jumlah Murid	40.612	40.907	40.613	40.206	40.480
C	Rasio	1:0,059	1:0,058	1:0,055	1:0,058	1:0,060

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2020

Rasio guru dan murid masih kurang baik, yaitu rata-rata 1:0,060 yang artinya rata-rata 1 orang guru mengampu 15 orang murid. Namun penting dilihat lebih jauh soal sebaran guru, apakah sudah terdistribusi secara adil untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang ada, terutama antara desa dan kota.

d. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan data, angka putus sekolah dasar (SD/MI) di tahun 2015 sebanyak 0,01 persen, capaian kondisi akhir di tahun 2019 tetap sebanyak 0,01 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah tahun 2015 sebanyak 0,32 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2019 menjadi 0,15 persen.

Tabel 2.33
Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Dasar (SD)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,32	0,30	0,49	0,18	0,15
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0,39	**)	**)	**)	**)

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kuningan , 2020

Ket: **) Data tidak ada

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Tabel 2.34
Angka Kelulusan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Sekolah Dasar (SD/MI)	100	100	100	100	100
	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	100	100	100	100	100
	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	100	100	*)	*)	*)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan 2019
Ket : *) Ditarik ke tingkat Provinsi

Berdasarkan tabel di atas, angka kelulusan sekolah dasar (SD/MI) sebesar 100 persen untuk setiap tahunnya. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka kelulusan tiap tahunnya sebesar 100 persen. Berikutnya di tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka kelulusan tahun 2015 sampai 2016 sebesar 100 persen, sedangkan untuk tahun 2017 sampai 2019 tidak ada datanya karena kewenangannya ditarik ke tingkat Provinsi.

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan secara komprehensif meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative, sehingga sektor kesehatan juga harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya keempat jenis tindakan tersebut. Dalam bidang kesehatan, beberapa ukuran yang digunakan untuk melihat kualitas kesehatan yang ada, meliputi: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka usia harapan hidup, angka balita gizi buruk, dan jumlah fasilitas kesehatan.

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan

pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Di Kabupaten Kuningan, kasus kematian bayi terbilang tinggi pada tahun 2015, namun berangsur-angsur turun pada tahun-tahun berikutnya walaupun ada kenaikan sedikit pada tahun 2019, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bayi Lahir Hidup	20.973	19.893	19.525	19.825	19.454
2	Kematian Bayi per Tahun	128	112	90	50	57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2020

Masih terbilang tingginya angka kematian bayi ini memberikan gambaran tentang pentingnya memperhatikan persoalan akses dan kualitas kesehatan guna meminimalisir kejadian tersebut.

2.3.1.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, termasuk seorang ibu hamil harus dipastikan kesehatannya. Banyak kematian perempuan terjadi pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Informasi mengenai tingginya *Mumps Measles Rubella* (MMR) akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan

suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Kabupaten Kuningan mencatat masih terdapat angka kematian ibu hamil dan melahirkan yang tinggi di tahun 2015, masih tinggi di tahun 2016 dan ada penurunan di tahun 2017 dan 2018, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus per 100 ribu)	27	26	24	22	23
Jumlah Ibu Hamil/melahirkan	20.973	19.893	23.367		19.396

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2019 ; LKPJ AMJ Bupati 2013-2018

2.3.1.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk

Persoalan gizi buruk berhubungan erat dengan masalah ketersediaan pangan sebuah keluarga, sejauh mana kebutuhan pangan keluarga tercukupi dan memenuhi standar gizi yang cukup.

Pemerintah melalui kebijakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) pada goals kedua menyebutkan komitmen Pemerintah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan gizi buruk menjadi salah satu tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, termasuk oleh daerah.

Di Kabupaten Kuningan, angka gizi buruk terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlahnya masih terbilang banyak, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Angka Gizi Buruk di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Gizi Buruk (%)	0,10	0,08	0,10	0,61	0,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2020

2.3.1.2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang harus tersedia dan terdistribusi secara adil baik antara kota maupun desa. Kabupaten Kuningan sudah memiliki beberapa fasilitas kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Kuningan tahun 2015-2019

No	Nama fasilitas	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Sakit	7	8	8	9	11
2	Poned	24	24	24	24	24
3	Puskesmas	61	61	61	108	107
4	Posyandu	1.417	1.419	1.423	1.424	1.426
5	Balai Pengobatan	13	15	26	25	25
6	Poskesdes	195	209	242	244	244

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2020

Tercatat 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, dimana Puskesmas berjumlah 107, artinya hampir seluruh kecamatan sudah memiliki penyedia layanan kesehatan yang sudah cukup representatif bagi masyarakat. Sedangkan untuk Poskesdes yang merupakan layanan publik di tingkat desa yang merupakan kewenangan desa. Dari 361 desa yang ada di Kuningan, sudah terdapat 244 Poskesdes yang merupakan fase awal bagi masyarakat dalam memeriksakan kesehatannya, dengan demikian masih cukup banyak juga desa yang belum membentuk fasilitas kesehatan ini, yang sesungguhnya penting bagi tindakan promoting dan preventif.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Jalan dan Jembatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 260/KPTS.DPUPR-259/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Kuningan, panjang jalan kabupaten kurang lebih 800,99 km (250 ruas jalan). Jumlah jembatan di Kabupaten Kuningan sebanyak 114 buah jembatan. Sampai dengan akhir tahun 2018, tingkat kemantapan jalan/jembatan di Kabupaten Kuningan mencapai kurang lebih 80,9 %.

Disamping itu, di Kabupaten Kuningan terdapat jalan nasional kurang lebih 35,42 km (7 ruas jalan) dan jalan provinsi kurang lebih 86,32 km (12 ruas jalan).

2.3.1.3.2 Infrastruktur Sumber Daya Air

Infrastruktur sumberdaya air meliputi sumber air dan prasarana sumberdaya air. Sumber air di Kabupaten Kuningan terdiri dari sungai, mata air, situ/embung dan waduk. Prasarana sumberdaya air Kabupaten berupa sistem jaringan irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

Kabupaten Kuningan memiliki empat sungai besar yaitu Sungai Cisanggarung, Cijangkelok, Citaal, Cisande, dan 735 titik mata air, 113 situ/embung dan 2 waduk yang berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian, pariwisata dan sumber air baku.

Selain itu, terdapat juga infrastruktur irigasi yang dibangun dalam rangka penguatan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kuningan. Jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Kuningan sebanyak 79 DI dengan luas total 27.999 hektar yang terdiri dari 67 DI kewenangan kabupaten dan 12 DI kewenangan provinsi. Kondisi Jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Inventarisasi dan Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Kuningan
Tahun 2018

1. Bangunan Utama

No.	Bangunan Utama	Jumlah		Kondisi					
				Bangunan			Pintu		
		Bangunan	Pintu	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
				bh	bh	bh	bh	bh	bh
1	Bendung Tetap	738	631	452	142	144	209	187	235
2	Bendung Gerak	1	4	1	-	-	4	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan, 2018

2. Saluran Irigasi

No	Saluran	Jumlah		Kondisi					
				Tanah			Lining		
		Tanah	Lining	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1	Sal. Induk	25.887	35.064	2.254	21.275	2.358	27.478	5.467	2.119
2	Sal. Sekunder	162.947	172.510	46.652	56.648	59.647	103.596	32.866	36.048
3	Sal. Tersier	292.749	115.096	124.003	88.700	80.047	63.830	24.615	26.651
4	Pembuang	13.870	132	1.683	5.822	6.365	68	64	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan, 2018

3. Bangunan Irigasi

No.	Bangunan	Jumlah		Kondisi					
		Buah	Pintu	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
		bh	bh	bh	bh	bh	bh	bh	bh
1	Bagi	122	51	78	20	24	20	9	23
2	Bagi Sadap	41	27	32	2	7	13	9	5
3	Sadap	680	459	398	172	110	141	143	174
4	Kantong Lumpur	66	47	31	21	12	10	15	22
5	Pengatur	26	17	17	3	6	8	2	7
6	Gorong - gorong	187	2	135	34	18	2	-	-
7	Got Miring	11	-	6	4	1	-	-	-
8	Terjunan	51	-	36	9	1	-	-	-
9	Pelimpah Samping	82	6	54	18	10	5	-	1
10	Pembilas	26	22	22	1	3	10	9	3
11	Jembatan	192	-	180	10	2	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan, 2018

2.3.1.3.3 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, RTRW Kabupaten Kuningan sedang dalam proses revisi lima tahunan pertama sejak ditetapkan.

Salah satu kebijakan tata ruang yang bersifat strategis dalam revisi RTRW, antara lain telah merencanakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi berupa KSK Pariwisata Waduk Darma dan sekitarnya serta KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kebun Raya Kuningan dan sekitarnya di Kecamatan Pasawahan.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga ke perdesaan. Namun, perkembangannya belum sepenuhnya sesuai dengan data backlog dan standar permukiman yang layak huni, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Data jumlah rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Jumlah Rumah dan RTLH Per Kecamatan
Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Unit
1.	Darma	10.853	785
2.	Kadugede	6.091	272
3.	Nusaherang	4.730	136
4.	Ciniru	4.993	346
5.	Hantara	3.772	229
6.	Salajambe	4.077	331
7.	Subang	5.432	409
8.	Cilebak	2.451	188
9.	Ciwaru	8.462	605

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Unit
10.	Karangkencana	5.698	317
11.	Cibingbin	10.362	1.753
12.	Cibeureum	6.441	780
13.	Luragung	12.337	609
14.	Cimahi	8.458	1.384
15.	Cidahu	11.143	304
16.	Kalimanggis	8.920	416
17.	Ciawigebang	20.629	1.070
18.	Cipicung	6.655	234
19.	Lebakwangi	8.766	625
20.	Maleber	11.734	1.432
21.	Garawangi	9.916	448
22.	Sindangagung	8.572	234
23.	Kuningan	25.678	792
24.	Cigugur	11.757	316
25.	Kramatmulya	10.989	365
26.	Jalaksana	12.786	224
27.	Japara	4.626	196
28.	Cilimus	12.199	352
29.	Cigandamekar	8.112	293
30.	Mandirancan	5.599	225
31.	Pancalang	3.896	653
32.	Pasawahan	6.239	208
Jumlah		282.373	16.531

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan dan Dinsos, 2015

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dilakukan berbagai upaya penertiban peraturan yang ada di tingkat daerah oleh Pemerintah Kabupaten, terutama yang menyangkut soal perijinan dan administrasi. Beberapa catatan atas penertiban tersebut, tabel berikut menggambarkan tentang upaya penyelesaian kasus yang ada.

Tabel 2.41
Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada
Lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Urusan Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	77 kasus Pelanggaran Perda, penyelesaian melalui Tindakan Non Yustisi	61 kasus Pelanggaran Perda, penyelesaian melalui Tindakan Non Yustisi	119 kasus Pelanggaran Perda telah diselesaikan, antara lain: - melalui Tindakan	- Ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan	- Pengendalian Kantramtibmas, dengan upaya Peningkatan cakupan Penengakan

Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
dan Perlindungan Masyarakat lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan	seperti; (Pembinaan, Surat Teguran, Surat Pernyataan dan Penghentian Sementara)	/Non Litigasi (Pembinaan, Surat Teguran, Surat Pernyataan dan Penghentian Sementara)	Non Yustisi / Non Litigasi (Pembinaan, Surat Teguran, Surat Pernyataan dan Penghentian Sementara), sebanyak 102 kasus; - melalui Tindakan Yustisi / Litigasi (Persidangan dan Pengadilan kategori Tindak Pidana Ringan) sebanyak 15 kasus; - melalui Tindak Pidana Biasa (P21) sebanyak 2 Kasus	sebanyak 130 kasus; - Dalam hal pembinaan, pengawasan dan penyuluhan hukum, ditemukan sebanyak 216 kasus pelanggaran produk hukum legislasi daerah Kabupaten Kuningan tersebut; - Ditemukan 22 PEKAT. - penyelesaian melalui Tindakan Non Yustisi / Non Litigasi (Pembinaan, Surat Teguran, Surat Pernyataan dan Penghentian Sementara)	Perda dan Perkada di wilayah 5 eks Kewedanan, baik secara non yustisi dan berkontribusi pada peningkatan PAD dari pengenaan denda administrasi, biaya proses perizinan dan pengenaan retribusi IMB; - melaksanakan pembinaan terhadap gangguan PEKAT di 5 wilayah eks kewedanan (berhasil menjangkit 76 org, terdiri dari: 10 orang PSK, 66 PGOT serta 18 botol miras dari 45 kali pelaksanaan kegiatan.
Persentase Penegakan perundang-undangan daerah (Perda dan Perkada)	80%	80%	85%	90%	92%

Sumber : Sat Pol PP Kab Kuningan, 2019

Berbagai kasus yang ada diupayakan diselesaikan melalui tindakan non litigasi guna meminimalisir konflik dengan masyarakat.

2.3.1.6 Sosial

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini, dan hal itu rentan memunculkan persoalan-persoalan

sosial. Dinas Sosial mencatat beberapa persoalan sosial yang ada, antara lain tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Anak Terlantar	1.424	914	904	1.640	1.640
Lanjut Usia/Jompo	6.120	3.035	3.238	4.769	4.777
Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum	22	22	21	385	385
Korban Narkotika	106	106	97	20	24
Penyandang Cacat	4.867	3.193	3.505	4.086	5.524
Gelandangan dan Pengemis	248	168	184	70	73
Tuna Susila	155	20	21	27	28
Fakir Miskin	94.594	94.594	94.786	50.184	52.785
Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan	11	11	22	76	23
Orang dengan HIV/AIDS	42	42	42	50	51
Bekas Narapidana	349	349	349	222	234
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	10.210	6.231	7.177	5.392	5.462
Keluarga berumah Tidak Layak Huni	17.358	16.531	16.486	16.436	12.705
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	230	230	230	432	1.536
Anak Balita Terlantar	321	303	309	242	242
Anak Jalanan	11	21	22	72	72

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Anak terlantar pada tahun 2016 turun secara signifikan hanya tinggal 914 orang, akan tetapi yang mengkhawatirkan justru persoalan narkoba yang naik drastis pada Tahun 2015 yang naik hampir lima kali lipat dari tahun sebelumnya dan bertahan pada angka yang sama di Tahun 2016. Ini pun yang mampu terekam oleh dinas sosial, belum lagi yang belum terbaca oleh Pemerintah Daerah. Fakir miskin naik 2 kali lipat jumlahnya dalam kurun waktu 5 tahun, menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum membaik. Keluarga yang bermasalah sosial psikologis juga meningkat drastis di tahun 2014 dan mulai berkurang di tahun 2015 dan 2016.

Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan upaya mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial yang telah diberikan tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Jumlah PMKS dan Sarana Sosial
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	19.506	31.933	32.899	49.338	39,90%
2	Jumlah Sarana Sosial	47	47	38	44	38

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Salah satu tantangan serius di Kabupaten Kuningan adalah tingginya angka migrasi terutama di kecamatan-kecamatan tertentu. Banyak penduduk usia produktif yang mencari sumber penghidupan di luar daerah mengingat sulitnya mencari pekerjaan di daerahnya sendiri. Walhasil, angka pengangguran pun terbilang tinggi di Kuningan dan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah.

2.3.1.7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81,59	38,63	67	33	81,59	38,63	39,62	19,03	40,94	20,38
(persen) TPAK (L+P) (persen)	60,01		60,23		57,69		58,65		61,31	

Sumber: data 2013 – 2014 (Pusdatinaker), BPS data 2015 – 2020 (Kuningan dalam Angka)

Tabel di atas menggambarkan ada persoalan yang masih cukup besar terkait dengan partisipasi angkatan kerja. Tantangan besar berikutnya adalah masih sangat rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, dan kondisi ini menjadi rentan terhadap posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi terhadap KDRT.

2.3.1.7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

BPS mendefinisikan pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sejak tahun 2015, angka pengangguran di Kabupaten Kuningan cenderung terus meningkat selama kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.45
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
2015	2016	2017	2018	2019
7,49	7,72	7,94	8,99	9,61

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2020, Ket. : Angka pengangguran tahun 2016 adalah angka median antara tahun 2015 dan 2017 dikarenakan angka tahun 2016 tidak publis.

Meski geliat sektor wisata sudah sangat tinggi, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja di dalamnya. Tabel di atas menggambarkan bahwa harus ada upaya dari Pemerintah Daerah secara masif untuk membuka peluang-peluang sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mainstreaming keadilan gender sudah mulai kuat menjadi perspektif dalam kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip inklusi sosial yang menjadi perspektif dalam penyusunan RPJMD ini salah satunya turut memperhatikan ruang-ruang yang memungkinkan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Berikut adalah gambaran tentang kondisi partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Tabel 2.46
Indikator Partisipasi Perempuan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah/lembaga Publik					
a. Jumlah PNS Perempuan	6.416	5.961	5.941	5.941	5.480
b. Jumlah Anggota DPRD Perempuan	13	13	13	13	14
c. Jumlah Kepala Desa Perempuan	22	20	31	31	18
d. Jumlah BPD Perempuan	789	789	187	187	476
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	98,75%	99,05%	52,60%	52,61%	52,62%
Partisipasi angkatan kerja Perempuan	379.400	398.370	N/A	N/A	47,33%

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kuningan 2015-2018

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
IPG	85,77%	N/A	86,34%	86,62
IDG	69,59%	N/A	72,39%	73,05

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Angka partisipasi perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun IPG dan IDG masih terbilang rendah, tahun 2017 capaian IPG Kabupaten Kuningan lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2.3.1.9. Pangan

2.3.1.9.1 Ketersediaan Pangan Utama

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk bertahan hidup, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memastikan kecukupan pangan bagi penduduk. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Tabel 2.48
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Pangan				
Utama (kg/jiwa/tahun)				
1. Beras	201.067	246.139	255.570	N/A
2. Daging	15.204	15.971	26.112	28.394
3. Telur	6.732	6.732	6.341	7.399
4. Susu	11.995	11.995	15.760	21.317
5. Ikan	15.467	16.774	248.346	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2019

Ada persoalan genting Pemerintah Daerah saat ini terkait kecukupan pangan, dimana pangan utama seperti beras, daging dan susu mengalami penurunan kuantitas secara signifikan.

2.3.1.9.2 Jumlah Desa Rawan Pangan

Berdasarkan data di atas, implikasi yang muncul berikutnya adalah soal kerawanan pangan yang dialami oleh masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan menlansir data tentang desa-desa yang mengalami rawan pangan dari 2012-2016, sebagai berikut.

Tabel 2.49
Desa Rawan Pangan
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2016

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa
Karangkencana	Cihanjaro, Simpayjaya, Jabranti, Tanjungkerta				
Ciwaru	Cilayung, Sagaranten, Lebakherang, Andamui, Karangbaru, Citikur, Garajati				
Cibingbin	Cibingbin, Sukaharja, Ciangir, Cipondok, Cisaat				
Cibeureum	Randusari				
Cimahi	Sukajaya, Cimulya, Margamukti, Cimahi, Kananga, Cikeusal				
Subang	Gunungaci, Situgede				
Selajambe	Kutawaringin				
Cilebak	Patala				
Cidahu	Jatimulya, Cihideunggirang, Cidahu				
Kalimanggis	Kalimanggiswetan				
Sindangagung	Kertayasa, Dukuhlor, Balong, Mekarmukti				
Hantara	Pasiragung				
Kramatmulya	Karangmangu				
Luragung	Margasari, Panyosogan, Sindangsuka				
Pancalang	Tarikolot				
Japara	Kalimati, Singkup, Garatengah, Wano				
Jalaksana	Peusing, Sindangbarang				
Maleber	Cipakem, Giriwaringin, Mekarsari, Cikahuripan, Parakan, Mandalajaya				
Darma	Situsari, Kawahmanuk, Tugumulya, Sakertabarat, Cimenga				
Cipicung	Suganangan, Sukamukti, Pamulihan				
Ciawigebang	Padarama, Sukadana, Cihaur, Karangkamulyan, Sukaraja, Cikubangmulya, Kadurama, Dukuhdalem, Ciputat, Cigarukgak				
Pasawahan	Padabeunghar				
Nusaherang	Haurkuning				
Kadugede	Nangka				
Garawangi	Kadatuan, Cirukem, Lengkong, Citiusari, Mancagar, Tembong				
Cigugur	Cisantana				
Ciniru	Pinara				
JUMLAH	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa

Sumber: diolah dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2017

Keterangan:

- Desa di area hutan produksi
- Desa di area hutan produksi terbatas
- Desa di area hutan konservasi

Tabel di atas menggambarkan ada kondisi yang tidak lazim sesungguhnya dari data yang ada: **Pertama**, dari tahun ke tahun jumlah desa yang mengalami rawan pangan selalu konsisten selama 5 tahun

terakhir, yaitu ada di 82 desa dengan desa yang sama. Artinya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuningan belum mampu mengatasi persoalan ke rawan pangan di 82 desa tersebut. **Kedua**, mayoritas (47 desa) yang mengalami rawan pangan berada di kawasan atau sekitar hutan, dan lebih banyak yang berada di area sekitar hutan produksi (21 desa).

2.3.1.9.3 Konsumsi Beras Perkapita

Data ketersediaan beras menunjukkan penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya sebagaimana tergambar pada tabel di atas, akan tetapi sebaliknya, data konsumsi beras terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menandakan ada ketergantungan masyarakat Kuningan terhadap beras, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50
Konsumsi Beras perkapita (kg/kapita/tahun)
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018
Konsumsi Beras perkapita (kg/kapita/tahun)	94,29	94,21	109,5	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2019

Kondisi demikian berpotensi terjadi kerawanan pangan beras diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat karena antara produksi dan konsumsi terjadi *gap*.

2.3.1.10 Pertanahan

Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu prasyarat penting untuk terlaksananya pembangunan fisik. Sebelum proses pengadaan tanah seyogyanya dilakukan kajian atau studi kelayakan dengan mempertimbangkan aspek teknis, geografis, sosial budaya dan lingkungan.

Tanah yang digunakan untuk pembangunan akan berubah statusnya menjadi aset pemerintah daerah. Penambahan aset berupa tanah pada tahun 2014 sebesar 116.646 m², 2015 sebesar 13.000 m², 2016 sebesar 182.138 m², 2017 sebesar 181.624 m².

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup yang berkembang di Kabupaten Kuningan diantaranya berupa pencemaran air, persampahan, banjir dan longsor, perubahan fungsi lahan serta kebakaran hutan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Meskipun dampak tersebut diatas belum meluas, namun perlu diupayakan penanganan secara serius yang melibatkan para pihak dan multi sektor, sejak perencanaan sampai pengawasan. Tidak kalah penting penyusunan database tentang kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan sangat diperlukan sebagai basis perencanaan pembangunan ke depan.

Salah satu isu lingkungan yang terdokumentasikan saat ini adalah data tentang layanan persampahan disajikan pada Tabel 2.51. berikut ini.

Tabel 2.51
Jumlah Volume Sampah yang Terangkut serta Cakupan Pelayanan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

No	Persampahan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Timbunan Sampah (m ³ /hari)	284	279	283	565 ton
2	Sampah Terangkut (m ³ /hari)	163	165	174	83 ton
3	Cakupan Layanan (kec)	11	11	11	12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2019

2.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap warga negara berhak memiliki identitas diri, dan dalam rangka itu, Pemerintah Kabupaten menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dengan memberikan kartu identitas diri kepada warganya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Data Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Tahun	JENIS DATA					
	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	Jumlah Wajib KTP >17 Tahun atau Sudah/pernah Menikah	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran
	L	P	Jumlah			
2015	567.375	547.102	1.114.477	752.529	813.059	22.256
2016	571.984	552.893	1.124.877	762.994	821.226	25.014
2017	575.281	557.329	1.132.610	782.362	830.679	25.490
2018	580.676	562.448	1.143.124	821.960	855.351	28.559
2019	543.415	537.389	1.165.401	852.986	861.965	946.854

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Desa dilaksanakan melalui fasilitasi berupa pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan Desa agar tepat sasaran dan tepat pengelolaan. Indikator pemberdayaan masyarakat desa disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase desa Berkembang/IDM	30	40	50	80	70,63
Persentase Swadaya Masyarakat dalam Membangun Desa	34	42	45	75	
Jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang aktif (Bumdes)	66	65	124	200	206
Tingkat partisipasi perempuan/ organisasi dalam pembangunan desa (lembaga)	5	5	5	50	
Jumlah aparat desa yang dilatih (orang)	272	361	361	361	

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2018; LKPJ ATA 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase desa berkembang cenderung meningkat dari 30,00% tahun 2015 menjadi 70,63% desa pada tahun 2019.

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rata – rata jumlah anak di Kabupaten Kuningan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah 3 orang. Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Kuningan pada periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Rata rata Jumlah Anak
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

b. Cakupan Peserta KB aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Tabel 2.55
Cakupan Peserta KB Aktif
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
PUS	218.811	219.218	217.098	N/A
Cakupan Peserta KB (%)	73.53	71.85	70.91	71,31
Jumlah Alat kontrasepsi terdistribusi (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2019

Peserta KB aktif di Kabupaten Kuningan selama periode tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Cakupan peserta KB tahun 2015 sebesar 73,53 mengalami penurunan menjadi 71,85% pada tahun 2016, selanjutnya mengalami penurunan lagi tahun 2017 menjadi 70,91% dan naik lagi 71,31% pada tahun 2018. Ini menunjukkan perlunya terus-menerus dilakukan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran PUS untuk menjadi peserta KB yang aktif.

2.3.1.15 Perhubungan

Sarana prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten kuningan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.56
Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019

Sarana Prasarana/ Fasilitas	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Terminal Type A	1	1	1	1	1
Jumlah Sub Terminal	10	10	9	9	9
Jumlah Rambu Lalin	1.683	2.239	2.312	2.482	2.578
Jumlah Traffic Light	7	9	9	9	9
Jumlah Warning Light	27	35	36	35	37
Jumlah Lampu PJU	4.093	4.093	4.343	5.321	7131
Panjang Pagar Pengaman	592	1.424	1.836	1.836	1.836
Shelter (Buah)	13	13	13	13	13
Jumlah Trayek Layanan	58	58	58	73	73

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, 2019

Berkaitan dengan isu perhubungan yang dapat dianggap krusial di Kabupaten Kuningan saat ini adalah penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan disekitar jalan protokol ketika banyak pengunjung.

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang komunikasi dan informatika, diuraikan mengenai keberadaan web site Pemerintah Kabupaten dan desa, pameran dan indeks keterbukaan informasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Ketersediaan Sarana dan Indikator Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 – 2019

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
KOMUNIKASI						
1.	Informasi Pembangunan					
	a. Website Resmi Pemkab	1	1	1	1	-
	~ Bagian/ Kantor/ Dinas	30	30	30	30	-
	~ Asda	3	3	3	3	-
	~ Bagian	10	10	10	10	-
	~ Kecamatan	32	32	32	32	32
	~ Desa		30	30	75	70
	b. Tabloid Bulanan (Info Kuningan)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	c. Pameran	1	1	1	1	1

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
	Pembangunan					
	d. Radio	16	15	19	15	
	e. Info Publik	3	9	9	10	
	f. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1.026	1.169	1.169	1.165	1.165
	g. Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	221	237	237	239	241
2.	Akses Komunikasi					
	a. Desa Berfasilitas Internet (Desa Pinter)	-	-	-		
	b. Alat Komunikasi Melalui Seluler			-		
	~ Jumlah BTS	252	260	260	260	283
	~ Jumlah Operator	6	6	6	10	19
3.	Keterbukaan Informasi Publik					
	a. Indeks Keterbukaan Informasi					
	~ Berkala		7	7	7	7.2
	~ Setiap Saat		18	25	18	18
	~ Serta Merta		1	5	1	1
	b. Pejabat Pengelola informasi & Dokumentasi					
	~ PPID Utama		1	1	1	1
	~ PPID SKPD	1	32	32	30	30
	~ PPID Kecamatan	32	32	32	32	32
	c. Jumlah Kritik dan Saran Yang Masuk Melalui Website Resmi Pemkab	24	17	22	12	12
	d. Jumlah Pengunjung Website	125.580	167.499	168.355	178.956	301.305
INFORMATIKA						
1.	Jaringan Antar SKPD					
	a. Wireles				9	7
	b. Fiber Optik	32	31	32	54	56
2.	Aplikasi					
	a. Kepegawaian			1		
	b. Keuangan			1		
	c. Aset			1		

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Pengadaan Barang Secara Elektronik					
	a. Jumlah Paket	637	433	303	152	20
	b. Jumlah Efisiensi	34.560.934.193	84.657.154.193	15.875.927.297	7.933.632.115	3.176.955.731
	Presentase	9.15%	22.39%	6,34%	5,95%	22,76%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, 2019

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sektor KUKM merupakan sektor strategis yang dapat menumbuhkan insentif ekonomi dalam masyarakat sekaligus menyerap tenaga kerja. Serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Pembinaan koperasi dan UKM diarahkan kepada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, permodalan, kelembagaan, serta teknologi dan informasi.

Perkembangan KUKM di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.58
Indikator kinerja KUKM Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 - 2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Wirausahawan (org)	20	10	30	33	
Jumlah UMKM yang dibina (buah)	250	250	410	400	
Jumlah Koperasi Aktif (buah)	457	440	444	444	477
Jumlah Koperasi Sehat (buah)	74	80	80	55	
Jumlah Koperasi yang dibina (buah)	440	445	455	444	
Jumlah Koperasi yang memberikan pelayanan terhadap usaha UMKM (Buah)	6	6	6	444	
Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT (produk)	40	-	-	50	
Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk Halal (produk)	40	-	60	25	
Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah (buah)	10	45	50	350	

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2018; LKPJ ATA 2019

2.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel 2.59
Jumlah Nilai Investasi dan Kerjasama Investasi
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah nilai investasi (Rp. 000)	397.813.949	576.411.621	499.440.686	1.207.852.417	1.651.656.587.075
Jumlah kerjasama investasi	3	3	2	1	

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2017; LKPJ ATA 2019

Kabupaten Kuningan merupakan daerah agraris dan pariwisata, sehingga tidak sembarangan industri dapat berdiri di wilayah ini. Sehingga hanya investasi yang ramah lingkungan yang diterima dan dilaksanakan pada zonasi tertentu saja. Data-data di atas menunjang kondisi tersebut, di mana besaran investasi pada periode tahun 2015-2019 secara umum meningkat namun dengan nilai investasi yang kecil tiap tahunnya. Pada tahun 2015 senilai 397.813.949.000 dan Kondisi akhir realisasi investasi di tahun 2019 sebesar 1.651.656.587.000.

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Tantangan besar yang dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata saat ini adalah tingginya angka migrasi yang berdampak pada tidak optimalnya peran pemuda dalam banyak sektor pembangunan, termasuk olahraga dan pariwisata. Secara umum peran masyarakat juga masih rendah dalam dunia olahraga.

Tabel 2.60
Prasarana Olahraga yang Dimiliki
Pemda Kabupaten Kuningan tahun 2015-2018

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan (kecamatan)	32	32	32	32
Jumlah sarana prasarana olahraga (buah)	839	839	1.092	1.092
Jumlah kegiatan keolahragaan yang difasilitasi (jenis)	10	12	14	15

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2017; LKPJ AMT ATA 2018

2.3.1.20 Kebudayaan

Arah Kebijakan pengembangan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Kuningan adalah:

- Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan pelestarian budaya lokal, aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, seni dan perfilman daerah;
- Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya daerah;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Seni dan Budaya dengan arah kebijakan (1) Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya dan pariwisata serta masyarakat; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya.

Tabel 2.61
Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 - 2018

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (unit)	128	128	128	143
Frekuensi Festival Seni dan Budaya (kali)	23	23	25	26
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (unit)	10	13	15	17
Jumlah Kerjasama yang terbangun (MOU)	2	2	2	2

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2018

2.3.1.21 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten” yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dan dokumen statistik daerah lainnya yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Ketersediaan data-data statistik daerah tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Produk dari penyelenggaraan urusan statistik diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Suseda	V	V	-	V
2	PDRB Kabupaten Kuningan	V	V	V	V
3	Kuningan Satu Data	V	V	V	V
4	Kuningan Dalam Angka	V	V	V	V
5	Profil Kabupaten Kuningan	V		V	V
6	Data Spasial		V	V	V
7	Peta Kemiskinan			-	-
8	Pembangunan Manusia Berbasis Budaya			-	
10	Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah		V	V	V

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
11	Evaluasi Kegiatan MDGs/ SDGs	V			V
12	Strategi pencapaian Wajar Dikdas 12 Tahun		V	-	-
13	Sinergitas Perencanaan Sosbud			V	-
14	Pengendalian IPM			-	-
15	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah			-	V
16	Survey Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Pemda	V	V	V	V
17	Perencanaan Kawasan Rawan Air			-	-
19	RP3KP	V			-
20	Review RTRW Kabupaten Kuningan		V		-
21	Penyusunan Peta Portable Administrasi Kabupaten Kuningan				-
22	Profil Infrastruktur dan Tata Ruang		V		-
23	RAD AMPL		V		-
24	Review BPS				-
25	Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)				-
26	KLHS Review TRW		V		-
27	KLHS RDTR (5 Kaw)				-
28	KLHS RPJMD				V
29	RKPD Kabupaten Kuningan	V	V	V	V
30	RKPDP	V	V	V	V
31	RPJMD 2014-2018	V			
-34	Reorientasi Strategi Pembangunan bidang perencanaanPerekonomian Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kabupaten Kuningan	V			-
35	RAD Ekowisata				-
36	Kajian IPM tahun 2017			V	
37	Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur Selatan Perkotaan bagi Keberlanjutan Optimalisasi Fungsi Terminal Type A Kertawangunan			V	
38	Kajian dan Terapan Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Usaha Pertanian			V	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2019

2.3.1.22 Persandian

Persandian Kabupaten Kuningan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya urusan persandian lebih dititikberatkan kepada pengamanan dan pengelolaan informasi Pemerintahan Daerah.

2.3.1.23 Perpustakaan

Koleksi buku di perpustakaan daerah terus mengalami peningkatan jumlah, pada tahun 2018 jumlah buku bertambah cukup banyak, begitu juga terjadi peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan di tahun yang sama. sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.63
Data Perpustakaan di Kabupaten Kuningan 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah Koleksi buku di Perpustakaan Daerah	29.710 Eksemplar	40.568 Eksemplar	49.248 Eksemplar	49.248 Eksemplar
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	6.375 orang	691.161 orang	701.492 Orang	817.982
Jumlah Buku Keluar/dipinjam per tahun	2.150	2.282	3.605	3.605

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2019

Tabel di atas menggambarkan ada perkembangan yang sangat signifikan atas kesadaran masyarakat membaca dan semakin tingginya minat masyarakat untuk mengakses pengetahuan melalui perpustakaan. Perkembangan positif ini menjadi input yang baik bagi Pemerintah Daerah untuk terus melakukan penataan atas perpustakaan daerah, mengingat antusias masyarakat ke perpustakaan.

2.3.1.24 Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Tahun 2018 seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan sudah melakukan pengelolaan arsip secara baku, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip secara Baku	77,78 %	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2019.

b. Peningkatan SDM Pengelola Arsip

Tahun demi tahun Pemerintah daerah terus melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan arsip, mulai dari tingkat SKPD, sekolah/ perguruan tinggi hingga level desa, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.65
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	- 50 Desa/Kel - 50 Sekolah	- 60 SKPD - 50 Sekolah - 50 Desa/Kel	- 50 SKPD - 50 Sekolah - 50 Desa/Kel	- 50 SKPD - 50 Sekolah - 50 Desa/Kel

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2019

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Jawa Barat. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Kuningan adalah jenis perikanan darat atau air tawar. Meski sektor perikanan bukan menjadi unggulan daerah, akan tetapi sektor ini menjadi penyangga pangan daerah. Capaian produksi perikanan menunjukkan *trend* yang positif setiap

tahunnya sehingga dapat menjadi usaha ekonomi produktif tradisional masyarakat di perairan lahan milik maupun perairan umum.

Pengembangan sektor perikanan dilaksanakan melalui pembinaan, penyediaan bibit unggul, *re-stocking* benih ikan di perairan umum dan pelarangan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya ikan di perairan umum.

Tabel 2.66
Sarana Prasarana Perikanan di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 - 2018

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Sarana prasarana Perikanan (Unit)	18	25	30	35
Produksi ikan (Ton)	15,466	16,577	17,072	17.266
Pasar ikan yang dibangun (Pasar)	2	2	2	-

Sumber : LKPJ AMJ Bupati 2013-2018; LKPJ ATA 2019

2.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat strategis di Kabupaten Kuningan, mengingat ada banyak sumber daya alam yang sudah terkelola dengan baik dan mendatangkan banyak wisatawan. Selain wisata alam, ada juga wisata budaya, sejarah dan wisata buatan lainnya, yang secara perlahan sudah mulai bergerak maju. Banyaknya jenis obyek dan daya tarik wisata ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah, diantaranya:

- a. Kabupaten Kuningan memiliki banyak objek dan daya tarik wisata yang beragam sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Kuningan, sehingga kegiatan pariwisata ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Kuningan. Beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kuningan adalah:
 - Wisata alam yang memiliki 21 obyek dan daya tarik wisata yaitu Waduk Darma, Balong Keramat Darmaloka, Talaga Remis, Balong Ikan Cigugur, Pemandian Cibulan, Curug Lambah Cilengkrang, Curug Landung, Curug Bangkong, Curug Ciputri, Curug Sidomba, Balong Dalem, Balong Kambang, Situ Cicerem, Air Panas Ciniru, Air Panas

Ciangir, Air Panas Subang, Gua Indrakila, Lainggarjati Indah, Sangkanurip Alami, Kolam Renang Sanggariang, Wisata Pedesaan Sitonjul.

- Wisata budaya yang terdiri dari 6 obyek dan daya tarik wisata yaitu Gedung Perundingan Linggarjati, Gedung Syahrir, Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Gua Maria, Taman Purbakala Cipari, Seni dan budaya daerah.
 - Wisata minat khusus yang memiliki 11 obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Nasional Gunung Ciremai, Gunung Mayana, Buper Palutungan, Buper Cibunar, Buper Cibeureum, Buper Paniis, Arung Jeram Cisanggarung, Kebun Raya Kuningan (KRK), Agro Wisata Cikananga, Open Space Gallery, Situs-situs.
- b. Potensi besar objek pariwisata untuk dikembangkan yang terlokasi dalam satu wilayah yaitu sebelah barat Kuningan, sehingga bila dijadikan *tourisme-lingkage* akan sangat atraktif dan menarik, dengan berbagai jenis pariwisata. Hal ini didukung oleh jumlah dan persebaran hotel dan penginapan serta fasilitas yang disediakan, sehingga perlu adanya jalan lintas penghubung untuk mempermudah akses antar lintas wisata.
- c. Sektor pariwisata mempunyai peran terbesar terutama diberikan oleh jasa pariwisata alam, karena memiliki potensi wisata alami seperti; pegunungan, hutan, desa wisata, pemandian air panas, air terjun/curug, goa, waduk/telaga, dan sebagainya. Hal ini juga memberikan kesempatan kerja yang cukup besar dengan tumbuhnya kegiatan lainnya di sektor pariwisata, misalnya tumbuhnya hotel/penginapan, restoran, toko souvenir/cinderamata di sekitar obyek wisata.
- d. Terpusatnya beberapa obyek dan daya tarik wisata pada satu bagian wilayah memudahkan pelaku wisata melakukan kunjungan dan memberikan *multiplier effect* bagi kegiatan penunjangnya.

Meski sektor pariwisata menjadi andalan daerah saat ini, sayangnya sektor ini belum mampu berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan. Tercatat pada APBD Tahun 2017, sumbangan dari pajak hotel dan restoran baru mencapai Rp 8,7 Miliar atau 3% dari jumlah PAD. Begitu pula dengan retribusi dari tempat rekreasi dan olahraga yang baru mencapai Rp 569 juta.

Pertama, wisata alam yang ada di Kabupaten Kuningan terbilang sangat banyak, diantaranya: Waduk Darma, Balong Keramat Darmaloka, Talaga Remis, Balong Ikan Cigugur, Pemandian Cibulan, Curug Lembah Cilengkrang, Curug Landung, Curug Sidomba, Curug Bangkong, Balong Dalem, Balong Kambang, Situ Cicerem, Air Panas Ciniru, Air Panas Ciangir, Air Panas Subang, Gua Indrakila, Taman Wisata Linggarjati Indah, Sangkanurip dan Sitonjul dan masih banyak lagi. **Kedua**, wisata budaya, meliputi: Gedung Perundingan Linggarjati yang berlokasi di Desa linggarjati Kecamatan Cilimus, Gedung syahril yang terletak di Desa Bandoraasa Wetan Kecamatan Cilimus, Gedung Paseban tri Panca Tunggal yang terletak di Jalan Raya Suka Mulya Kacamatan Cigugur, Gua Maria terletak di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, Taman Purbakala Cipari serta Seni dan Budaya Daerah lainnya. **Ketiga**, wisata minat khusus, yang terdiri dari: Taman Nasional Gunung Ceremai, Gunung Mayana, Bumi perkemahan Palutungan, Bumper Cibeureum, Bumper Paniis, Arung Jeram Cisanggarung, Kebun Raya Kuningan (KRK), Agro wisata Cikananga, Open Space Gallery dan situs-situs lainnya yang masih ada.

Kekayaan potensi wisata di Kabupaten Kuningan menarik banyak wisatawan masuk ke Kabupaten Kuningan, dan berdampak pada semakin maraknya berdiri sarana dan prasarana pendukung, seperti: hotel, penginapan, homestay, restoran dan lain-lain, yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Potensi Sarana Prasarana Pariwisata di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 - 2018

No	Sarana	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Hotel Berbintang				
	a. 2	2	2	2	2
	b. 1	1	1	1	1
	c. 1	1	1	1	1
2	Hotel Non Bintang	44	35	35	35
3	Restoran/Rumah Makan	38	38	35	35

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, 2018; Kuningan satu data, 2018

Tabel 2.68
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 - 2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan Wisata	2.752.852	3.066.376	1.124.948	4.002.124	4.235.408

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, 2018; Kuningan satu data, 2020

2.3.2.3 Pertanian

Berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031, tercatat bahwa secara geografis Kabupaten Kuningan yang terbagi menjadi dua kelompok ketinggian yaitu dataran tinggi di bagian barat dan utara dan dataran rendah di bagian timur dan selatan, menggambarkan bahwa memiliki potensi pertanian tanaman dataran tinggi maupun dataran rendah. Hal ini ditunjang dengan cukupnya curah hujan dan persediaan air tanah dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan dioptimalisasikannya produksi pertanian di Kabupaten Kuningan. Lahan sawah yang mengandalkan pengairannya dari tadah hujan hanya sekitar 8.258 Ha dari total 29.078 Ha artinya lebih dari dua per tiga lahan sawah sudah memiliki sistem pengairan yang cukup baik dan memungkinkan untuk dioptimalkannya hasil pertanian bahan makanan pokok. Kabupaten Kuningan dikenal sebagai salah satu daerah yang surplus bahan makanan pokok, hal ini dapat dilihat dari produktivitas pertanian yang cukup baik dimana sistem pengairan lahan sawah menjadi salah satu faktor penunjang. Beberapa potensi strategis sektor pertanian, antara lain:

- a. Keanekaragaman di sektor pertanian dan sub sektornya, memang berpotensi dikembangkan di Kabupaten Kuningan, bahkan mengalami surplus di beberapa kecamatan yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan tiap penduduknya maupun dapat diekspor ke wilayah lain.
- b. Sektor pertanian dengan kegiatan yang berlangsung pada seluruh sub-sistemnya berfokus pada sub-sistem pengolahan (agroindustri) yang secara keseluruhan mewujudkan kawasan agropolitan yang padu dan telah ditetapkan dalam Masterplan Agropolitan yang berupa penetapan distrik, komoditi dan produk unggulan pertanian di Kabupaten Kuningan.

- 
- c. Kabupaten Kuningan merupakan wilayah agropolitan yang dibuktikan dengan pangsa (*share*) terbesarnya berasal dari sektor pertanian yang memiliki kesempatan kerja, produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang relatif tinggi sebagai implikasi dari tingginya tingkat penerapan teknologi; serta didominasi oleh unit-unit kegiatan basis yang sebagian besar produknya dipasarkan ke luar daerah (ekspor regional).
 - d. Beberapa industri di Kabupaten Kuningan yang saat ini telah berorientasi ekspor ke pasar luar wilayah, diantaranya : PT Palma Indonesia, Mandiri Jaya, PT Galih Estetika, serta CV Jati Welas serta beberapa jenis industri unggulan di Kabupaten Kuningan dengan pasar regional dan merupakan produk unggulan, diantaranya : industri minyak atsiri dan pasta ubi jalar, industri sirup jeruk nipis, industri tape ketan, dan industri bawang goreng, yang mengolah komoditas pertanian dengan menciptakan nilai tambah dalam bentuk produk jadi.
 - e. Beberapa produk unggulan memiliki daya saing yang tinggi seperti industri kasur Palembang dan industri tahu dan tape ketan yang memiliki kualitas lebih baik dari pada industri tahu Sumedang dan industri tape ketan di wilayah sekitarnya yang disebabkan air yang digunakan dalam proses pembuatan tahu dan tape ketan di Kabupaten Kuningan lebih bagus.
 - f. Sektor pertanian dalam kerangka agropolitan mengolah komoditi pertanian unggulan menjadi produk jadi untuk dijual, sehingga sektor pertanian ini mempunyai *forward* dan *backward linkage* yang dapat menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) dengan sektor-sektor lainnya.
 - g. *Core business* di Kabupaten Kuningan yang membentuk struktur perekonomian terbesar dan mendongkrak pendapatan regionalnya adalah sektor pertanian yang berpotensi dikembangkan dengan keterkaitan ke depan seperti mata rantai yang kuat dengan sektor perdagangan yang mengarah pada kegiatan agribisnis.

Selain itu, penting diperhatikan juga, bahwa berdasarkan data penggunaan lahan tampak bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan didominasi oleh lahan pertanian, baik pertanian lahan basah (24,87%)

maupun pertanian lahan kering (6,30%). Data tersebut menggambarkan bahwa pertanian merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap capaian ekonomi lokal. Akan tetapi, meski pertanian menjadi sektor penyangga utama perekonomian daerah, seringkali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani itu sendiri. Indikator yang biasa digunakan untuk mendalami kondisi ini, diantaranya: **Pertama**, bagaimana struktur penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Kuningan, apakah lahan pertanian dikuasai oleh petani yang selama ini menggarap lahan pertanian atau sebaliknya justru dimiliki oleh segelintir orang atau para tuan tanah saja. **Kedua**, bagaimana produksi pertanian selama ini, sudahkan petani surplus? Atau justru impas atau defisit. Untuk mengukur ini, dapat menggunakan ukuran Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Pengertian dari nilai NTP adalah sebagai berikut ini:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel. 2.69
Produktivitas dan Kontribusi Sektor Pertanian
terhadap PDRB Kabupaten Kuningan Tahun 2015 - 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)	62,02	62,62	62,71	62,41
2	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	23,96	23,92	23,81	N/A

Sumber : BPS Kab. Kuningan (PDRB 2013-2017) dan Dinas Pertanian 2018

2.3.2.4 Kehutanan

Kabupaten Kuningan memiliki sumberdaya hutan yang melimpah, yang penyebaran sumberdaya tersebut hampir di seluruh kecamatan. Potensi kehutanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan diantaranya, yaitu hutan negara seluas 33.479,92 ha terdiri atas :

- a. Taman Nasional Gunung Ciremai 8.837 Ha
- b. Hutan produksi 24.634 Ha
- c. Taman Wisata Alam Linggarjati 8,92 Ha

Selain hutan Negara terdapat juga hutan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 8.021 Ha.

2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kuningan memiliki beberapa potensi sumber daya energi dan mineral, diantaranya:

- a. Sumberdaya mineral yang meliputi pasir, andesit, bentonit, onyx dan marmer, sirtu, kaolin, diatomit, tras, kalsit, batu gamping dan emas yang hampir semuanya telah diusahakan/ditambang, sehingga kegiatan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kuningan.
- b. Potensi energi baru terbarukan yang sedang menjadi sorotan adalah potensi Panas Bumi/Geothermal yang berada di Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, dan yang terletak di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Pemanfatan bahan galian yang sudah intensif dilakukan terutama adalah bahan galian golongan C, yang lokasinya tergambar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.70
Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Kuningan

No	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan	Ket.
1	Batu Gampling	Luragung	Gunungkarung	Sumberdaya	
			Cirahayu		
			Luragung		
2	Bentonit	Luragung	Cikaduwetan	Tereka 490 m3	
		Cimahi	Karangkencana		
		Ciawigebang	Bendungan	Sumberdaya	
3	Kalsit	Ciniru	Rambatan	Sumberdaya	
4	Lempung	Ciniru	Bunigeulis, Tundagan	Sumberdaya	
5	Andesit	Jalaksana	Sidamulya	Cadangan Hipotenik	Tambang Rakyat
		Cigugur	Cisantana	251.583.445 m3	
6	Diatomit	Darma	Wadukdarma,	Hipotenik	
			Kawahmanuk	25,000 Tons	
7	Kaolin	Luragung	Margamukti	Hipotenik	
				25,000 Tons	
8	Onyx	Ciniru	Ciniru, Rambatan,	Sumberdaya	
			Cipedak		
9	Pasir	Cigugur	Cisantana	Cadangan Hipotenik	Tambang Rakyat
	Gunung Api	Cilimus	Linggasana, Linggajati	Cadangan Hipotenik	
		Mandirancan	Mandirancan,	50.606.950 Ton	
			Kertawinangun		
		Pasawahan	Cibuntu, Singkup		
10	Pasir	Cidahu	S. Ciparay, S. Ciberes, S. Cisanggarung, S. Cihirup		
		Ciawigebang		Sumberdaya telah diusahakan	
		Lebakwangi			
		Luragung			
11	Sirtu	Garawangi	S. Cisanggarung	Cadangan Hipotenik	
		Ciniru	S. Cipedak	650.000 m3	
12	Tras	Jalaksana	Nanggerang	Sumberdaya	
13	Emas	Ciniru	Citapen	Sumberdaya	
		Hantara	Gunungmanik	Sumberdaya	KP
		Lebakwangi	Cipakem		Penelitian
14	Panas bumi/ Geothermal	Cigandamekar	Sangkanurip	Sumberdaya	Dalam proses oleh Dep. ESDM
		Kramatmulya	Pajambon	Sumberdaya	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2018

2.3.2.6 Perdagangan

Realisasi PAD dari sektor pasar tradisional mengalami penurunan dari tahun ke tahun terlebih pada dua tahun terakhir. Hal ini ditengarai karena semakin marak berdirinya pasar modern, terutama di Tahun 2017 yang mencapai 140 pasar modern. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Target dan Realisasi PAD dari Pasar Kabupaten Kuningan

Pasar	2015 (ribu rupiah)	2016 (ribu rupiah)	2017 (ribu rupiah)	2018 (ribu rupiah)
Pasar Kepuh	296.648	275.450	276.277,5	276.487
Pasar Baru	170.045	162.120	170.617,5	170.617,5
Pasar Cilimus				
Pasar Ciputat	31.500	13.125		
Pasar Kadugede	4.800	4.800	4.800	16.146
Pasar Langlangbuana		11.067	10.478	4.800

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2019

Tabel 2.72
**Jumlah Pasar Modern dan Tradisional di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2018**

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Toko Modern	94	94	140	140
Pasar Tradisional	32	32	32	32

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2019

2.3.2.7 Perindustrian

Tabel 2.73
**Data Sektor Industri Kabupaten Kuningan
Tahun 2017-2018**

No	Indikator	Tahun	
		2017	2018
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	357,8 Miliar	N/A
2	Pertumbuhan Industri	0,38 %	N/A
3	Industri besar	0	N/A
4	Industri menengah	3,837	N/A
5	Industri kecil dan mikro	7,439	N/A

Sumber : Kuningan Satu Data, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PDRB, dan SUSEDA

2.3.2.8 Transmigrasi

Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang dikenal dengan jumlah migrasi yang tinggi, namun mayoritas adalah transmigrasi yang sifatnya tidak resmi dan tidak tercatat oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan transmigran yang resmi dan tercatat jumlahnya sangat sedikit, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Jumlah Transmigran
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

No	Transmigran	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
		Orang			
1	Jumlah Transmigran yang Dibina	60	60	30	40
2	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan secara resmi oleh Pemkab	20	20	35	8

Sumber : Bidang Transmigrasi Disnakertransos, 2018; LKPPJ ATA 2019

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1 Perencanaan

Pelaksanaan fungsi perencanaan secara umum dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang di koordinasikan melalui musyawarah pembangunan di semua tingkatan dari mulai desa, kecamatan dan kabupaten. Dalam perencanaan pembangunan daerah dititikberatkan kepada penyusunan program dan kegiatan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyediaan data dan informasi serta kajian permasalahan pembangunan yang terdiri dari bidang ekonomi, infrastruktur lingkungan hidup dan lingkungan, sosial budaya dan pemerintahan.

Tabel 2.75
Kinerja Perencanaan per Program
Kabupaten Kuningan 2015-2018

Indikator Kinerja (outcome)	2015	2016	2017	2018
<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				
Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	5	5	15	22
<i>Program Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan</i>				
Indikator Kinerja (outcome)	2015	2016	2017	2018

Jumlah SKPD yang dikoordinasi (SKPD)	17	17	17	31
<i>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</i>				
Indikator Kinerja (outcome)	2015	2016	2017	2018
Jumlah SKPD yang dikoordinasi (SKPD)	4	4	3	4
<i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i>				
Jumlah SKPD yang dikoordinasi (SKPD)	9	9	8	8
<i>Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana</i>				
Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	-	-	-	-
<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>				
Jumlah Dokumen Perencanaan (MOU)	1	1	2	-
<i>Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan Wilayah</i>				
Cakupan Wilayah Pengembangan (PKL)	5	5	5	2
Cakupan Wilayah Pengembangan (PKLP)	2	2	2	2
<i>Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Perekonomian Daerah</i>				
Prosentase koordinasi (%)	100	100	100	100

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Kuningan 2014-2018; LKPJ ATA 2019

2.3.3.2 Keuangan

Tujuan fungsi keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan agar dapat berjalan efisien, efektif tepat sasaran dan tercapainya target yang direncanakan. Hal ini sebagai upaya memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang diprogramkan. Beberapa indikator kinerja keuangan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.76
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2018

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah melaluipengendalian objek dan wajib pajak daerah (%)	9,66	10,63	11,69	13,27
Cakupan sosialisasi pajak dan retribusi (%)	100	100	100	100
Cakupan pembinaan PBB (desa)	376	376	376	376
Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah (%)	100	100	100	100
Capaian sistem informasi manajemen keuangan daerah (%)	100	100	100	100
Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah (buah)	1	1	1	1
Jumlah paket laporan kinerja pemerintah daerah (paket)	1	1	1	1

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2014-2018; LKPJ ATA 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati. Namun bila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kabupaten Kuningan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kuningan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2.3.3.3 Pengawasan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan fungsi pengawasan terus ditingkatkan, baik pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun pengawasan langsung oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah di semua tingkatan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Beberapa indikator kinerja pengawasan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.77
Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2018

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Jumlah pegawai yang dilatih(%)	100	100	100	100
Prosentase SKPD yang diawasi (%)	100	100	100	100
Jumlah SKPD yang di bina dlm administrasi keuangan (%)	100	100	100	100
Jumlah Objek Pengawasan (%)	100	100	100	100
Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (%)	97	96	74	91,5
Cakupan LAKIP yang terevaluasi (%)	100	100	100	100
Prosentase SKPD yang menyelenggarakan SPIP (%)	100	100	100	100

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2014-2018

2.3.3.4 Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.78
Nilai SAKIP
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Nilai SAKIP	CC	CC	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Pemda Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan yang signifikan dari C di Tahun 2013 kemudian meraih nilai B di Tahun 2018. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuningan semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.79
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Peringkat/Skor/ Status LPPD	71/3,0981/ Sangat Tinggi	9/3,4301/ Sangat Tinggi	7/3,4975/ Sangat Tinggi

Sumber: website www.kemendagri.go.id

2.3.4 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu forum komunikasi Ormas, Orsos, dan LSM.

b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa penyusunan data base partai politik, verifikasi bantuan partai politik, sosialisasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu bagi pemilih pemula, Forum komunikasi generasi muda partai politik, pendampingan pengurus partai politik, serta sosialisasi pemilih pemula.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan

ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Perbulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2.80
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Pengeluaran perkapita sebulan	2015		2016		2017		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Makanan	386.350	53,53	396.894	54,67	462.013	61,36	502.458	53,32
Bukan Makanan	335.436	46,47	329.121	45,33	290.995	38,64	439.871	46,68
Total	721.786	100	726.015	100	753.008	100	942.329	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kabupaten Kuningan

meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp.721.786, terus meningkat sehingga mencapai sebesar Rp. 942.329 di tahun 2018.

Persentase pengeluaran untuk makanan tertinggi sebesar 61,36 persen di tahun 2017, terendah sebesar 53,32 persen di tahun 2018. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan tertinggi sebesar 46,68 persen di tahun 2018, terendah sebesar 38,64 persen di tahun 2017.

2.4.2 Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Aksi demonstrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan kerugian. Namun, demonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Tabel 2.81
Jumlah Demonstrasi (unjuk rasa)
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018

Tahun	Kategori Demonstrasi					Jumlah	Situasi
	Ideologi	Politik	Ekonomi	Sosbud	Keamanan		
2015	-	7	8	1	-	16	aman
2016	1	9	3	4	1	19	aman
2017	-	4	1	1	-	6	aman
2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	aman

Sumber: Kuningan Satu Data 2019

2.4.3 Rasio Ketergantungan

Masalah ketenagakerjaan tidak hanya melihat dari TPT dan jumlah penduduk bekerja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan rasio ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan

salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya.

Tabel 2.82
Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %
1	0 – 14	25,77	25,41	25,05	24,70	22,74
2	15 – 64	66,46	66,17	66,26	66,30	66,99
3	65+	7,77	8,42	8,70	9	10,27
4	Angka Beban Tanggungan	51,38	51,12	50,93	50,83	50,82

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Selama periode 2015-2019 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan sebesar 51,38 di tahun 2015, terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 menjadi sebesar 50,82. Artinya pada tahun 2019 adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 50 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Kuningan periode RPJMD 2013-2018, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83

**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
	- Adhb	12.907,08	14.297,20	16.094,75	17.481,43	19.141,75	N/A
	- adhk 2010	11.170,56	11.805,90	12.483,85	13.163,16	13.917,44	N/A
2	Indeks Daya Beli (Pengeluaran)	64,62	64,79	65,23	65,46	66,01	66,64
3	Indeks Gini	0,37	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,25	6,33	6,38	6,09	6,36	6,45
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PENDIDIKAN						
1	Jumlah PAUD (unit)	758	797	786	786	836	836
2	Jumlah Siswa (orang)	22.916	24.096	24.840	26.374	25.925	31.765
3	RLS (poin) (Perhitungan baru)	6,98	7,04	7,20	7,34	7,44	7,51
4	APK SD (%)	100	100,88	100,94	100,19	100,11	100,25
5	APM SD (%)	99,78	99,81	99,83	99,84	99,85	99,87
6	Angka Putus Sekolah SD (%)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Angka Kelulusan SD (%)	100	100	100	100	100	100
8	APK SMP/MTs (%)	98,85	99,92	98,94	98,97	98,99	99,05
9	APM SMP/MTs (%)	90,52	90,57	90,91	90,60	91,17	91,19
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,5	0,33	0,32	0,30	0,49	0,18
11	Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	100	100	100	100
12	APKSMA/SMK/Aliyah (%)	-	71,69	74,81	79,31	)*	)*
13	APMSMA/SMK/Aliyah (%)	51,96	54,60	54,67	61,34	)*	)*
14	APS SMA/SMK/Aliyah (%)	-	0,50	0,44	0,39	)*	)*
15	Angka KelulusanSMA/SMK/Aliyah (%)	100	100	100	100	)*	)*
16	Akreditasi Sekolah (sekolah)	-	517	675	698	991	953
17	Sapras (kondisi baik):						
	- SD(%)	81	87,05	84	82,32	84,23	84,47
	- SMP(%)	89	93,54	93,86	95,41	97,52	97,60

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- SMA(%)	82	83	96,43	94,55	)*	)*
18	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 (%)	79,39	82,95	83,42	87,14	90,42	93,54
19	Guru Bersertifikasi Pendidik(%)	59,78	69,72	69,91	70,41	81,76	89,03
20	AMH(%)	98,10	98,51	98,71	98,79	)**	)**
21	Jumlah Peserta Kober Keaksaraan Fungsional (org)	500	340	591	600	631	500
22	Jumlah Kober Paket B (kelompok)	45	42	42	42	17	25
23	Jumlah Kober Paket C (kelompok)	25	23	23	23	17	25
KESEHATAN							
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,21	72,24	72,64	72,76	72,88	73,01
2	Cakupan Balita Gizi Buruk mendptkan Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	88,81	87,08	86,62	88,73	87,10	105,7
4	Angka Kematian Ibu (kasus per 100 ribu)	18	23	27	26	24	22
5	Angka Kematian Bayi (Kasus per 1000)	7,10	4,90	4,34	5,64	4,61	3,93
6	Prevalensi Peserta KB aktif (%)	78,33	77,55	73,91	73,13	74,43	69,81
7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) (%)	59,57	24,20	86,44	91,49	91,5	87
8	Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita (%)	45,62	44,86	48,13	60,58	24,30	42,47
9	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
10	Persentase terpenuhinya dokumen dalam layanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
11	Prosentase pelayanan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100
12	Porsentase Koordinasi Program (%)	75	-	-	-	100	100
13	Cakupan desa/kelurahan Siaga aktif (%)	100	100	100	100	100	100
14	Prosentase akses air minum berkualitas (%)	67	79	79	78	90	89,22
15	Prosentase jumlah penduduk yang menggunakan Jamban keluarga (%)	71	78	78	82	86	85,,6
16	Prosentase SPAL (%)	60	67	70	71	71	75
17	Penemuan Penderita Baru TB BTA + (%)	74,96	77,21	83,11	76,70	80,51	76,04
18	Prosentase DB yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah dana untuk pengadaan obat pelayanan (Rp)	2,7 M		8 M	6 M	4M	5,5 M
20	Jumlah Apotik/Sarana Farmasi yang dibina (%)	100	100	53	88	88	88
21	Jumlah sarana prasarana RSUD sesuai	70	89,46	93,21	104,21	97,58	-

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	standar (%)						
22	Cakupan pemeliharaan sarana rumah sakit (%)	48	99,85	97,24	94,70	97,78	-
23	Tercapainya akreditasi pelayanan kesehatan RSU versi 2012 (%)	-	-	-	-	100	-
24	Dokumen Naskah kerjasama (MoU) (Dokumen)	-	5	14	10	22	22
PUPR							
1	Jumlah jalan yang dibangun (km)	17,8	8,18	17,65	10,53	41,92	9,83
2	Kondisi jalan baik(%)	69,93	51,33	51,96	50,03	40,13	40,04
3	Rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten (km)	82,91	126,78	209,68	89,51	387,98	242,10
4	Jumlah peralatan kebinamargaan yang dipelihara (paket)	1	2	2	2	2	2
5	Jumlah DI yang dipelihara (DI)	10	43	67	36	29	18
6	Jumlah embung yang dibangun (lokasi)	48	1	1	-	-	4
7	Rehab Situ (buah)	48	6	4	4	2	3
8	Cakupan desa dalam pengembangan dan penyediaan air baku (desa)	5	7	6	12	45	51
9	Pembuatan TPT	2	17	17	26	31	9
10	Jumlah dokumen tata ruang (dokumen)	5	3	6	12	6	11
PERUMAHAN RAKYAT							
1	Jumlah Perumahan (unit)	5000	-	-	-	100	-
2	Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani (unit)	2.088	1.041	1.003	559	400	1.786
3	Kawasan Kumuh (%)	0,35	0,29	0,14	0,13	0,12,	0,05
4	<i>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum:</i>						
	- Jumlah Lokasi (lokasi)	8	33	16	45	30	38
5	Jumlah Sarana Prasarana Pemerintah (unit)	10	65	97	93	72	66
6	Jumlah Saluran Drainase dan Sanitasi (desa)	5	16	63	51	53	24
7	Jumlah Tembok Tebing yang dibangun (lokasi)	20	-	3	-	-	-
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Jumlah PKL yang dibina (lokasi)	6	6	6	6	6	16
2	Tingkat Pengendalian Katrantibmas	5	5	5	5	5	5

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(wilayah)						
3	Jumlah Pembinaan terhadap gangguan penyakit masyarakat (wilayah)	5	5	5	5	5	5
	Sosial						
1	Jumlah PMKS yang dibina (orang)	1300	350	779	919	1.150	2.107
2	Jumlah penyandang cacat/inklusi yang dibantu (orang)	74	40	60	75	75	135
3	Jumlah Rutilahu yang ditangani (Rumah)	2082	-	-	-	50	50
4	Jumlah Kube FM yang dibina (Kelompok)	75	-	46	15	34	72
5	Jumlah lembaga sosial yang difasilitasi (organisasi)	50	10	-	3	10	30
6	Jumlah bimbingan sosial dan UEP Karang Taruna (kali)	2	1	1	1	1	2
7	Jumlah Panti Asuhan yang di fasilitasi (Panti)	39	20	-	10	5	30
8	Jumlah Panti Jompo yang di fasilitasi (panti)	1	20	-	10	5	1
9	Tingkat Pemahaman nilai-nilai kepahlawanan (%)	50	50	60	70	80	50
10	Jumlah Anggota TAGANA yang dibina (orang)	30	60	-	65	40	60
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,52	5,13	7,49	7,72	7,94	8,99
2	Pelayanan kepada pencari kerja/ tahun (orang)	-	8.330	8.468	7.328	8.068	13.290
3	Pencari kerja yang berpartisipasi dalam pemeran bursa kerja/Job fair per tahun (orang)	-	-	5.000	5.000	5.500	3.073
4	Tingkat keterserapan cakupan penganggur musiman (%)	-	20	20	20	20	20
5	Wirausahawan baru yang sesuai dengan keahliannya per tahun (orang)	-	144	356	628	470	168
6	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja melalui pelatihan (paket)	-	27	47	68	59	68
7	Tenaga kerja yang terserp sesuai dengan pasar kerja dan keahliannya per tahun (orang)	-	1.527	1.573	2.106	4.372	9.267
8	Peningkatan kapasitas pendidikan tenaga kerja produktif :						
	- Terampil SLTP- SLTA (orang)	-	8.122	8.256	7.145	7.866	10.759
	- Ahli S1 - S2 (orang)	-	208	212	183	202	2.532
9	Tingkat kenaikan upah minimum Kabupaten	-	16,92	22,16	11,50	8,25	8,03

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kuningan (%)						
10	Pembinaan pengusaha dalam pemahaman ketenagakerjaan/tahun (orang)	-	50	50	50	100	100
11	pembinaan pengusaha dan pekerja mengenai SMK 3/tahun (orang)	-	-	-	-	50	100
12	Pembinaan dan perlindungan dalam hubungan Industrial (%)	-	10	20	20	20	20
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Partisipasi perempuan dalam jabatan pemerintahan/publik (%)	12	-	-	23,79	24,02	30,20
2	Prosentase anggaran responsif gender (%)	30	5,23	5,27	5,27	8,42	11,48
3	Jumlah desa lokasi P2WKSS (desa)	63	62	63	64	65	68
4	Jumlah kelompok perempuan yang dibina (kelompok)	2	2	1	4	1	24
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	33,30	31,38	27,91	31,27	43,89	48,00
	Pangan						
1	Skor pola pangan harapan (%)	75,60	74,60	74,60	82,50	82,80	81,20
2	Ketersediaan energi per kapita (%)	126	138	99,50	100	98	100
3	Ketersediaan protein per kapita (%)	132	144,20	107,10	100	154	100
	Lingkungan Hidup						
1	Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah (%)	30,80	31,17	31,54	31,92	32,29	32,29
2	Rasio Kawasan Lindung (%)	39,63	30,12	30,61	31,10	31,61	31,61
3	Persentase Tingkat Pencemaran:						
	- Zat Tersuspensi (TSS) (Mg/l)	10	9,75	9,50	9,45	9,40	10
	- BOD (Mg/l)	2,3	2,2	2,15	2,10	2,05	7,28
	- COD (Mg/l)	10	9,75	9,50	9,45	9,40	22,60
4	Volume Penanganan Sampah (%)	67,24	28,50	59,13	78,82	81,71	86,21
5	Jumlah Lokasi Ekowisata (Lokasi)	2	1	1	1	2	2
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Jumlah layanan kependudukan dan catatan sipil (Kec. Dan Desa)	32 Kec / 376 desa/ Kel	32 Kec / 376 desa/ kel	32 Kec / 376 desa/ kel	32 Kec / 376 desa/ kel	32 Kec / 376 desa/ Kel	32 Kec / 376 desa/ kel
2	Kepemilikan KTP (%)	84,81	76,02	91,90	93,23	94,18	94,76
3	Cakupan Pengembangan Pelayanan SIAK	33	33	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(Unit)						
4	Prosentase Pembinaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil (%)	100	100	100	100	100	100
5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk (%)	60,87	74,07	76,53	74,62	75,72	77,52
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Jumlah pengeluaran penduduk perkapita (Rp 000)	8.393	8.516	8.516	8.580	8.736	8.918
2	Prosentase desa Berkembang/IDM (%)	30	20	30	40	50	80
3	Prosentase Swadaya Masyarakat dalam Membangun Desa (%)	21	22	34	42	45	75
4	Jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang aktif (Bumdes)	48	54	66	65	124	200
5	Tingkat partisipasi perempuan/organisasi dalam pembangunan desa (Lembaga)	5	5	5	5	5	50
6	Jumlah aparat desa yang dilatih (Orang)	100	270	272	361	361	361
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Cakupan Peserta KB (%)	71,68	73.06	73.53	71.85	70.91	71.31
2	Jumlah Alat kontrasepsi terdistribusi (%)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Remaja yang dibinaintentang kesehatan reproduksi (org)	100	90	92	94	1700	2100
4	Cakupan Kelompok Institusi Masyarakat (lembaga) dalam bidang KB dan KS	337	379	379	379	379	380
5	Prosentase Keluarga prasejahtera (%)	13,24	28.96	29.88	28.91	29.4	4.99
6	LPP (%)	0,60	0,60	0,60	0,61	0,59	0,59
Perhubungan							
1	Cakupan Pelayanan Angkutan (bulan)	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah Fasilitas lalu lintas/Rambu-rambu (unit)	1015	225	394	619	694	2.482
3	Jumlah lampu penerangan jalan umum (titik)	850	374	572	946	1546	1.380
4	Jumlah Sarana Penunjang Keamanan (titik)	250	374	572	946	1546	1.380
5	Jumlah Petugas Parkir yang di bina (org)	250	515	780	1060	1340	400
6	Jumlah pemilik kendaraan bermotor yang dibina (org)	60	0	0	16	28	0
Komunikasi dan Informatika							
1	Cakupan Layanan Informasi (Kecamatan)	32	32	32	32	32	32
2	Jumlah Kerjasama media massa (Media)	53	54	56	58	59	58

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jumlah SDM yang dilatih (orang)	200	250	300	350	403	330
4	Jumlah Publikasi LPPD (Paket)	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Pameran (Paket)	1	1	1	1	1	1
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
1	Jumlah Wirausahawan (org)	25	18	20	10	30	37
2	Jumlah UMKM yang dibina (buah)	250	300	250	250	410	462
3	Jumlah UMKM yang produktif dan berdaya saing (buah)	20	35	10	-	-	37
4	Jumlah Koperasi Aktif (buah)	413	440	457	440	444	547
5	Jumlah Koperasi Sehat (buah)	59	64	74	80	80	150
6	Jumlah Koperasi yang dibina (buah)	419	440	440	445	455	547
7	Jumlah Koperasi yang memberikan pelayanan terhadap usaha UMKM (Buah)	3	10	6	6	6	10
8	Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT (produk)	25	40	40	-	-	50
9	Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk Halal (produk)	25	40	40	-	60	85
10	Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah (buah)	25	30	10	45	50	71
11	Jumlah Produk Unggulan KUMKM yang dipromosikan melalui berbagai media (produk)	25	8	13	12	17	40
12	Jumlah Pameran Produk Unggulan(kali)	5	2	5	5	5	6
Penanaman Modal							
1	Jumlah nilai investasi (Rp. 000)	359.967.762.200	448.839.079	397.813.949	576.411.621	499.440.686	1.719.593.858.571
2	Jumlah kerjasama investasi	3	3	3	3	2	1
3	Jumlah potensi investasi (lokasi)	5	5	5	6	5	6
4	Cakupan pelayanan perijinan (lokasi)	32	32	32	32	32	32
5	Persentasi perizinan (%)	100	103,87	88,7	114,5	105,5	74,96
Kepemudaan dan Olahraga							
1	Cakupan Pembinaan Kepada Organisasi Kepemudaan (kecamatan)	32	32	32	32	32	32
2	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (buah)	837	839	839	839	1.092	1.112
3	Jumlah Kegiatan Keolahragaan yang Difasilitasi (jenis)	9	9	10	12	14	9
4	Cakupan Pembinaan Kepada Organisasi Kepemudaan (kecamatan)	32	32	32	32	32	32

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kebudayaan						
1	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (unit)	200	12	128	128	128	143
2	Frekuensi Festival Seni Dan Budaya (kali)	4	16	23	23	25	25
3	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni &Budaya (unit)	4	10	10	13	15	17
4	Jumlah Kerjasama yang terbangun (MOU)	1	1	2	2	2	2
	Perpustakaan						
1	Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan desa (Desa)	5	10	-	20	5	50
2	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah (Orang)	9.149	6.375	662.369	691.161	701.492	817.982
	Kearsipan						
1	Cakupan penerapan standar pengelolaan arsip (%)	50	71	77	100	100	100
2	Volume arsip yang tersimpan (buah)	1500	1395	1395	1395	1094	1094 box, 299 Odner
	URUSAN PILIHAN						
	Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah sarana prasarana Perikanan (Unit)	10	12	18	25	30	35
2	Jumlah produksi ikan (Ton)	10.300.67	11.975	15,466	16,577	17,072	17.266.
3	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						
4	Jumlah Benih (Ekor 000)	3.000	4.000	4.200	4.500	5.000	49.800
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						
6	Terpenuhinya kawasan PUD yang Produktif dan konservatif (Klmpk/ Situ)	-	5	5	10	10	-
7	Jumlah ikan yang disebar di Perairan umum (Situ)	20	40	40	50	60	52
8	Jumlah Pasar ikan yang dibangun (Pasar)	1	1	2	2	2	-
	Pariwisata						
1	Jumlah Promosi Pariwisata (kegiatan)	5	3	3	3	3	3
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (org)	1.147.396	1.788.329	1.836.407	2.752.852	2.627.369	4.002.124
3	Jumlah Destinasi Pariwisata	46	-	45	50	58	65
4	Cakupan Sarana Prasarana Pariwsata	2	-	4	2	2	12
	Pertanian						
1	Peningkatan pengetahuan, sikap dan	78,25	81	85	90	95	95

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	keterampilan tenaga penyuluh (%)						
2	Alsintan produksi prod pangan (traktor, unit)	200	12	13	36	22	24
3	Alsin pengolahan hasil pertanian (power treser, unit)	4	16	13	32	18	9
4	Tingkat penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (paket)	4	5	6	7	8	8
5	Peningkatan Kesejahteraan Petani:- Kelas kemampuan kelompok (%)	Pemula = 56,24% Lanjut = 40,71% Madya = 2,99% Utama = 0,06%	20% untuk semua tingkat kelas kelompok	20% untuk semua tingkat kelas kelompok	20% untuk semua tingkat kelas kelompok	20% untuk semua tingkat kelas kelompok	20% untuk semua tingkat kelas kelompok
6	- Jumlah Kelompok Tani yang dapat difasilitasi (jml kelompok)	5	22	38	38	38	54
7	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan:						
	- Padi (kwintal/ha)	61,90	62,0	62,6	62,6	62,9	62,41
	- Ubi jalar (kwintal/ha)	217	235,0	212,7	233,9	228,3	224,4
	- Bawang merah (kwintal/ha)	73	96,3	96,67	103	102,29	91,68
	- Mangga (kwintal/ha)	392.850	128.940	321.089	129.195	298.218	34.784
	- Salak (kwintal/ha)	8.566	-	63.730	60.080	13.235	10.684
	- kopi (kwintal/ha)	19.002,20	4.499,4	5.703,9	597,9	1.149	1.307
	- Cengkeh (kwintal/ha)	26.641	1.759,9	2.274	332,8	403	615
	- Tebu (kwintal/ha)	11.139,70	3.134,0	13.096,1	2.097,6	285.083	241.203
	- Pala (kwintal/ha)	55	58,71	57,96	55,05	52	65
8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						
	- Produksi daging (ton)	17.533	17.533	15.204	15.971	26.081	27.182
	- Produksi komoditas telur (ton)	7.429	7.806	6.732	6.732	6.339	7.146
	- Produksi komoditas susu (ton)	11.279	11.729	11.995	11.995	15.760	21.317
9	Tersedianya data Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan (%)	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat penerapan pengendalian hama terpadu (%)	100	100	100	100	100	100
11	pameran produk pertanian (kali)	2	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Perdagangan						
1	Jumlah UDKM yang dibina (unit)	50	50	75	100	110	140
2	Jumlah Pasar Desa yang Direvitalisasi (unit)	5	3	3	-	6	6
3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	4.332.441,06	4.323.541,57	5.788.115,69	7.643.898,07	6.740.407,06	4.958.557,88
4	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina (org)	6	8	10	10	10	80
5	Sarana Prasarana SRG (paket)	2	3	3	24	2	-
	Perindustrian						
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
2	Jumlah IKM yang di Bina	1	28	33	35	25	76
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						
4	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang dibina (jenis)	4	7	7	7	7	7
5	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi						
6	Jumlah TTG/ Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan (IKM)	1	5	4	3	5	47
	Transmigrasi						
1	Target peningkatan kesejahteraan masyarakat Translok (KK)	-	40	40	60	40	80
2	Target penjajagan calon lokasi diSumatra Selatan dan Bengkulu (lokasi)	-	2	2	2	2	1
3	Target sosialisasi ProgramTransmigrasi (orang)	-	100	100	100	50	50
4	Target pemberangkatan transmigran (KK)	-	10	10	10	12	2
5	Target pemenuhan kebutuhan alat pengolah pertanian melalui stimulant (KK)	-	10	10	10	12	2
	Pengawasan						
1	Jumlah pegawai yang dilatih(%)	70	100	100	100	100	100
2	Prosentase SKPD yang diawasi (%)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah SKPD yang di bina dlm administrasi keuangan (%)	5	100	100	100	100	100
4	Jumlah Objek Pengawasan (%)	80	100	100	100	100	100
5	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (%)	100	100	97	96	74	91,5

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Cakupan LAKIP yang terevaluasi (%)	100	100	100	100	100	100
7	Prosentase SKPD yang menyelenggarakan SPIP (%)	7	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan						
1	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>						
	Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	5	5	5	5	15	22
2	<i>Program Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan</i>						
	Jumlah SKPD yang dikoordinasi (SKPD)	17	17	17	17	17	31
3	<i>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</i>						
	Jumlah SKPD yang dikoordinasi (SKPD)	4	4	4	4	3	4
4	<i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i>						
	Jumlah SKPD yang dikoordinasi (SKPD)	10	9	9	9	8	8
5	<i>Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana</i>						
	Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	1	1	-	-	-	-
6	<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>						
	Jumlah Dokumen Perencanaan (MOU)	1	5	1	1	2	-
7	<i>Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan Wilayah</i>						
	Cakupan Wilayah Pengembangan (PKL)	5	5	5	5	5	5
	Cakupan Wilayah Pengembangan (PKLP)	2	2	2	2	2	2
8	<i>Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Perekonomian Daerah</i>						
	Prosentase koordinasi (%)	100	100	100	100	100	100
	Keuangan						
1	Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah melaluipengendalian objek dan wajib pajak daerah (%)		10,69	9,66	10,63	15,62	13,27
2	Cakupan sosialisasi pajak dan retribusi (%)		100	100	100	100	100
3	Cakupan pembinaan PBB (desa)		376	376	376	376	376
4	Luas lahan bersertifikat (%)		100	100	100	95	85
5	Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah (%)		100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Capaian sistem informasi manajemen keuangan daerah (%)		100	100	100	100	100
7	Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah (buah)		1	1	1	1	1
8	Peningkatan sarana prasarana aparatur (kegiatan)		100	100	100	100	100
9	Jumlah paket laporan kinerja pemerintah daerah (paket)		1	1	1	1	1
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1	Program pendidikan Kedinasan						
	Jumlah Pegawai yang difasilitasi (Orang)		185	29	42	46	36
	Jumlah Aparatur yang terbina (%)	-	10.819	100	100	100	100
2	Tingkat Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat (%)	14.898	14.668	14.042	13.160	12.422	11.190
3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	86.40	100	100	100	100	100
4	Prosentase Pegawai yang dilayani (%)	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase Layanan (%)	100	100	100	100	100	100
6	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah Kegiatan Pemilihan Pegawai Teladan (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1
Penanggulangan Bencana Daerah		Kondisi Awal	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah papan informasi rawan bencana (unit)	40	75	80	0	70	74
2	Jumlah bantuan logistik bagi masyarakat korban bencana (paket)	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah sarana prasarana yang dibangun kembali (paket)	1	1	1	1	1	1
4	Cakupan desa/kelurahan yang ditangani (kec)	9	30	30	31	30	30
5	Cakupan rumah yang direhabilitasi (paket)	1	1	1	1	1	1
6	Cakupan bangunan yang direkonstruksi (peserta)	200	-	-	-	32	0
Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Tingkat pemahaman Pengembangan Wawasan Kebangsaan masyarakat (%)	70	72,50	75	77	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	63	66,62	-	-	-	71,42
3	- Pengguna hak pilih (org)		569.912	-	-	-	603.711
4	- Suara tidak sah (suara)		7.754	-	-	-	30.999
5	- Suara Sah (suara)		562.158	-	-	-	572..712
6	Kualitas Komunikasi Pengendalian Trantib (paket)	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah Tomas dan Toga yang dibina/Difasilitasi (org)	6	180	300	540	720	900
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Pembangunan Manusia (%)	66,16	66,63	67,19	67,51	67,78	68,28
2	Laju Pertambahan Penduduk (%)	0,61	0,60	0,60	0,61	0,59	0,59
3	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Kondisi Baik dan Sedang)	79,09	85,03	85,82	86,77	80,90	81,94
4	Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah (%)						
5	Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)	112,517	202,841	229,201	253,442	384,719	299,998
6	Indeks Pendidikan (%)	55,79	56,82	57,42	57,91	58,00	58,57

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2018; LKPJ ATA 2018

2.5 Capaian Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kuningan

RPJPD Kabupaten Kuningan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025. Pelaksanaan pembangunan sejak Tahun 2005 sampai dengan 2017 menjadi informasi yang sangat penting untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

Berikut ini tahapan dan capaian pelaksanaan RPJP Kabupaten Kuningan 2005-2019 (data sampai 2017).

1. Periode 2005 - 2009 : Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumberdaya manusia. Pada tahapan ini sasaran pokok pelaksanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan yang berkualitas tinggi khususnya yang ditunjukkan oleh indikator tingkat pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan, dan moralitas masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dan drainase, serta infrastruktur yang mendukung langsung pengembangan agropolitan dan pariwisata daerah.

Capaian periode 2005-2009, sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada periode ini yaitu pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Indikator penting capaian di bidang infrastruktur adalah kondisi jalan, panjang jalan kabupaten yang telah dilapisi aspal di tahun 2009 sepanjang 306 Km (73,55%) dari total 416,10 Km panjang jalan kabupaten. Berdasarkan kondisinya, kondisi jalan di Kabupaten Kuningan dalam keadaan baik dan sedang pada tahun 2009 adalah sepanjang 365 Km (87,74%).

Ketersediaan SDM yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuningan secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk

melalui jalur pendidikan dan berbagai program seperti wajib belajar 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) tahun untuk mempercepat kualitas SDM. Untuk sarana prasarana pendidikan diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2009 jumlah SD/MI sebanyak 764 buah, dengan rasio murid dan guru sebesar 16,69%. Banyaknya SMP/MTS sejumlah 136 buah dengan rasio murid dan guru sebesar 17,78%. Banyaknya sekolah SMA/SMK/MA adalah 73 unit, dengan rasio murid dan guru 12,22%.

Pembangunan Kesehatan adalah upaya penting dalam pengembangan SDM, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat dan status kesehatan yaitu diantaranya dengan meningkatkan sarana dan fasilitas kesehatan, pada tahun 2009 jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kuningan adalah 6 buah, Rumah Sakit bersalin 1 buah, dan Puskesmas sebanyak 237 buah (termasuk pustu dan pusling) dan posyandu sebanyak 1.383 buah. Semua sarana tersebut sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, tercermin dari persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis telah menunjukkan peningkatan menjadi 86,67%. Indikasi lainnya adalah menurunnya kasus gizi buruk dari 999 bayi pada tahun 2007 menjadi 296 bayi pada tahun 2009, serta tingginya persentase bayi yang mendapat imunisasi dan kunjungan pemeriksaan ibu hamil.

Upaya lain yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM adalah melalui program Keluarga Berencana. Dari sisi sarana penunjang, pada tahun 2009 tercatat terdapat sebanyak 113 unit Klinik Keluarga Berencana, sedangkan sarana pendukung lainnya yaitu pos KB desa sebanyak 373 unit. Akseptor KB aktif juga mengalami peningkatan, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 171.112 peserta Akseptor KB aktif, yang sebagian besar diantaranya menggunakan alat suntik KB.

2. Periode 2010 – 2014 : Pemantapan Produktivitas dan Pemerataan

Pembangunan Daerah. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian dan jasa pariwisata yang melebihi rata-rata Jawa Barat; mewujudkan pemerataan yang optimal dalam distribusi pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan antar wilayah kecamatan dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat; dan mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Peningkatan produktivitas yang pesat merupakan pendorong utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahap selanjutnya. Sedangkan pemerataan pembangunan merupakan tangga utama untuk mencapai masyarakat yang makmur dalam keadilan.

Capaian periode 2010-2014, keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia. Capaian IPM pada tahun 2014 adalah 66,63% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 66,16% dengan indeks pengeluaran sebesar 64,79% dan pengeluaran per kapita per tahun penduduk sebesar Rp. 8.393.000. Pada tahun 2014 pengangguran dapat ditekan pada angka 5,13% dan tingkat kemiskinan pada angka 12,72%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tahun 2014 mencapai 6,32%, dan pengeluaran rumah tangga dengan proporsi pengeluaran makanan pada tahun 2014 sekitar 63,43% sedangkan yang bukan makanan sekitar 36,57%, proporsi demikian memperlihatkan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan relatif sejahtera, tetapi jika dilihat dari indeks gini rasio menunjukkan kecenderungan makin tidak meratanya pengeluaran rumah tangga antar golongan pengeluaran rumah tangga. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian untuk kebijakan pembangunan tahap berikutnya.

3. Periode 2015 – 2019 : Pemantapan Kemandirian Masyarakat.

Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.

Capaian periode 2015-2017, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyadari pesatnya perkembangan pertanian dan pariwisata akan berimplikasi pada kemandirian daerah sesuai dengan *corre bussines* masyarakat Kabupaten Kuningan yang bertumpu pada kedua sektor tersebut, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kedua sektor tersebut. Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHB 2010 Tahun 2017 adalah Rp. 4.868,26 Miliar, masih merupakan sektor andalan utama perekonomian Kabupaten Kuningan dengan persentase distribusi pada PDRB sebesar 23,81%. Sektor pertanian tersebut meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan.

Luas lahan sawah tahun 2017 adalah 26.323 Ha, berupa sawah irigasi 19.504 Ha dan sawah tadah hujan 6.819 Ha. Pada tahun 2017, luas panen padi sawah mengalami kenaikan dari 60.020 Ha pada tahun 2016 menjadi 65.828 Ha pada tahun 2017, produksi pun ikut meningkat dari 384.132 Ton pada tahun 2016 menjadi 414.054 Ton pada tahun 2017. Produksi perkebunan pada tahun 2017, beberapa komoditi yang mengalami mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya diantaranya cengkih, pala, aren, pinang, lada, tembakau

dan nilam. Sementara pada bidang peternakan, produksi daging ternak pada 2017 di kabupaten kuningan mencapai 3.970,10 ton, untuk produksi telur unggas dan susu sapi pada tahun 2017 di kabupaten mencapai 21.686.748,64 ton. Selanjutnya di bidang perikanan menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan, hal ini dapat dipahami karena secara geografi wilayah kabupaten kuningan terutama bagian barat dan utara didukung oleh sumber air yang cukup untuk pengelolaan kegiatan budidaya perikanan. Data produksi ikan menurut tempat penangkapan/pemeliharaan untuk kolam produksinya meningkat dari 12.041,1 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 12.945,9 ton pada tahun 2017. Kolam air deras meningkat dari 570,2 ton pada tahun 2016 menjadi 703,3 ton pada tahun 2017, jaring terapung mengalami sedikit penurunan dari jumlah 3.976 ton pada tahun 2016 menjadi 3.071,5 pada tahun 2017, keramba meningkat dari 81,8 ton pada 2016 menjadi 90,4 ton di tahun 2017 dan sawah/minapadi meningkat dari 190,2 ton pada 2016 menjadi 261,5 ton pada tahun 2017.

Potensi kedua setelah pertanian adalah pariwisata, Kabupaten kuningan mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan sektor ini, hal ini didukung oleh kondisi geografis yang berupa pengunungan dengan berbagai keindahan alam serta sumber-sumber mata air alami yang ada. Disamping itu juga terdapat wisata sejarah serta situs purbakala. Sehingga menjadikan kabupaten kuningan sebagai tempat tujuan wisata baik ketika liburan panjang maupun liburan akhir pekan. Sepanjang tahun 2017, tercatat sebanyak 2.022.590 wisatawan yang mengunjungi objek daya tarik wisata di kabupaten kuningan, terdiri dari 2.022.265 orang wisatawan nusantara dan 325 orang wisatawan mancanegara.

2.6 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kontinue mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan

evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh berbagai data dan informasi pembangunan daerah. Informasi capaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018. Berdasarkan RPJMD 2014–2018 ditetapkan sejumlah indikator kinerja sasaran yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Sampai dengan Tahun 2018, secara garis besar pencapaian IKD dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014– 2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84

Target dan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	PDRB per Kapita (juta rupiah)												
	- PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku	Rp. juta	11.289.925,18	11.560.260,53	14.297.19 7,38	11.837.069,02	16.094,75 1,85	12.120.505,64	17.481.43 0,36	12.410.729,10	19.141.75 1,60	12.707.901,92	N/A
	- PDRB per Kapita atas dasar harga konstan	Rp. juta	4.430.618,21	4.481.764,86	11.805.90 1,25	4.533.501,95	12.483.85 3,99	4.585.836,28	13.163.15 8,98	4.638.774,76	13.917.43 6,02	4.692.324,36	N/A
2	Indeks Daya Beli (Pengeluaran)	%	58,83	58.84-59.06	64,79	59.07-59.28	65,23	59.29-59.51	65,46	59.52-59.74	66,01	59.75-59.96	67,91
3	Indeks Gini (poin)	poin	0,297	0,31	0,34	0,31	0,33	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4,99	6,33	5,04	6,38	5,08	6,09	5,12	6,36	5,16	6,45
B	ASPEK PELAYANAN UMUM												
	Urusan Wajib												
1	Pendidikan												
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8.67	8.74-8.76	7,04	8.82-8.85	7,20	8.90-8.92	7,34	8.94-8.96	7,44	9.02-9.95	7,36
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.78	99.8	99,81	99.82	99,83	99.84	99,84	99.86	99,85	99.88	99,87
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,52	90,69	90,57	90,86	90,91	91,03	90,60	91,20	91,17	91,37	91,19
4	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	53,49	54,01	54,60	56,15	54,67	58,37	61,34	60,68	Kewenan gan di tarik Provinsi	63,07	Kewenan gan di tarik Provinsi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
5	Angka Melek Huruf	%	98,10	98.19-98.27	98,51	98.32-98.40	98,71	98.45-98.53	98,79	98.58-98.66	N/A	98.71-98.79	N/A
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kewenan gan di tarik Provinsi	100	Kewenan gan di tarik Provinsi
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1	%	79,39	81,01	82,95	82,66	83,42	84,34	87,14	86,06	90,42	87,82	93,54
10	Guru Bersertifikasi Pendidik	%	59,76	70,00	69,72	80,00	69,91	85,00	70,14	90	81,76	100	89,03
11	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan (Kondisi Baik)												
	- SD	%	81,38	81,83	87,05	82,27	84,00	82,72	82,32	83,17	84,23	83,62	84,47
	- SMP	%	86,72	87,42	93,54	88,12	93,86	88,83	95,41	89,54	97,52	90,26	97,60
	- SMA	%	81,93	84,39	83	85,33	96,43	86,3	94,55	87,76	Kewenan gan di tarik Provinsi	89,22	Kewenan gan di tarik Provinsi
2	Kesehatan												
1	Angka Harapan Hidup	tahun	70,94	70,98-71,02	72,24	71,04-71,08	72,64	71,10-71,14	72,76	71,16-71,20	72,88	71,22-71,26	73,11
2	Angka Kematian Bayi	kasus per seribu	7,10	5,40	4,90	5,04	4,34	4,69	5,64	4,37	4,61	4,07	3,93
3	Angka Kematian Ibu	kasus per 100 ribu	16	14	23	12	27	10	26	8	24	6	22
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	88,81	88,85	87,08	88,90	86,62	88,95	88,73	89,10	87,10	89,25	105,7
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	59,57	69,94	24,20	77,65	86,44	85,36	91,49	93,07	91,50	100	87
7	Penemuan Penderita Baru TB BTA +	%	74,96	74,25	77,21	74,03	83,11	73,87	76,70	73,56	80,51	73,36	74,1
8	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Prevalensi peserta KB aktif	%	78,33	79,13	77,55	79,93	73,91	80,73	73,13	81,53	74,43	82,33	69,81
3	Lingkungan Hidup												
1	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah	%	30,80	31,17	31,17	31,54	31,54	31,92	31,92	32,29	32,29	32,66	32,29
2	Volume Penanganan sampah	%	67,24	69,29	28,50	71,34	59,13	73,39	78,82	75,44	81,71	77,36	86,21
3	Persentase Tingkat pencemaran :												
4	Zat Tersuspensi (TSS)	Mg/l	10	9,75	9,75	9,50	9,50	9,45	9,45	9,40	9,40	9,35	10
5	BOD	Mg/l	2,3	2,20	2,20	2,15	2,15	2,10	2,10	2,05	2,05	2,00	7,28
6	COD	Mg/l	10	9,75	9,75	9,50	9,50	9,45	9,45	9,40	9,40	9,35	22,60
4	Pekerjaan Umum												
1	Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	69,93	71,55	51,33	78,01	51,96	82,42	50,03	84,12	40,13	85,59	40,04
5	Penataan Ruang												
1	Dokumen tata ruang	dokumen RDTR	5	5	3	6	6	5	12	3	6	2	11
6	Perencanaan Pembangunan												

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	5	6	5	5	5	5	5	5	15	5	22
2	Cakupan Pengendalian Perencanaan Pembangunan (kec.)	kecamatan	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
7	Perumahan												
1	Kawasan Kumuh	%	0,35	0,27	0,29	0,22	0,14	0,19	0,13	0,14	0,12	0,10	0,05
2	Rumah tidak layak huni yang ditangani	rumah	2.088	5.000	1.041	4.500	1.003	3.800	559	2.500	400	2.000	1.786
8	Kepemudaan dan Olahraga												
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	buah	837	838	839	839	839	839	839	839	1092	839	1112
2	Cakupan Pembinaan kepada Organisasi Kepemudaan	kecamatan	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
9	Penanaman Modal												
1	Nilai Investasi PMDN&PMA (Rp.000)	Rp.	359.967.762.200	395.964.538.420	448.839.079	435.560.992.262	397.813.949	479.117.091.488	576.411.621	527.028.800.637	499.440.686	579.731.680.701	1.719.595.858.571
10	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah												
1	Jumlah Koperasi Aktif	buah	419	425	440	430	457	435	440	440	444	445	547
2	Jumlah koperasi sehat	buah	59	64	64	69	74	74	80	79	80	84	150
3	Jumlah Usaha UMKM yang dibina	buah	250	250	300	250	250	250	250	250	410	250	462
4	Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas produk	buah	25	40	40	40	40	50	-	50	-	50	50
5	Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas produk HALAL	buah	25	40	40	40	40	40	-	40	60	40	85

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
6	Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah	buah	25	30	30	35	10	40	45	45	50	50	71
11	Kependudukan dan Catatan Sipil												
1	Kepemilikan KTP	%	84,81	87,84	76,02	90,87	91,90	93,90	93,23	96,93	94,18	100	94,76
2	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	%	60,87	63,17	74,07	65,57	76,53	68,05	74,62	70,63	75,72	73,31	77,52
12	Ketenagakerjaan												
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,52	5,3	5,1	5,2	7,5	5,1	8,9	5,0	7,9	4,9	8,9
13	Ketahanan Pangan												
1	Skor pola pangan harapan	%	75,8	76,5	74,6	77,5	74,6	78,5	82,5	79	83	80	84
2	Ketersediaan energi perkapita	kal	126	129	138	131	100	134	100	136	98	139	100
3	Ketersediaan protein perkapita	kal	132	135	144	137	107	140	100	143	154	146	100
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1	Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik	%	12	16		19		23	24	26	24	30	30
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	33,30	34,78	31,38	36,26	27,91	37,74	31,27	39,22	43,89	40,70	48,00
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
1	Cakupan peserta KB aktif	%	71,68	71,86	73,06	72,04	73,53	72,22	71,85	72,40	70,91	72,60	71,81
2	Persentase Keluarga Miskin	%	14,20	12,76	28,96	12,28	29,88	11,80	28,91	11,32	29,40	10,84	4,99
16	Komunikasi dan Informatika												

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
1	Jumlah kerjasama media massa	%	53	53	54	55	56	55	58	55	59	55	58
2	Cakupan Layanan Informasi	kecamatan	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
1	Tingkat pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	%	70	72,50	72,50	75,00	75,00	77,50	77,00	80,00	80,00	82,50	80,00
18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1	Jumlah produk hukum	buah	12	16	68	14	64	12	83	18	117	16	70
19	Sosial												
1	Jumlah PMKS yang dibina	orang	1.300	1.450	350	1.525	779	1.650	919	1.690	1.150	1.925	2.107
2	Jumlah Penyandang inklusi yang dibantu	orang	74	75	40	80	60	100	75	120	75	150	135
20	Kebudayaan												
1	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	4	7	10	8	10	10	13	12	15	15	17
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	200	256	12	271	128	293	128	300	128	302	148
3	Frekuensi festival seni dan budaya	kali	4	7	16	9	23	12	23	14	25	15	25
21	Kearsipan												
1	Penerapan Standar Pengelolaan Arsip	%	50	50	71	55	77	55	100	60	100	65	100
2	Volume Arsip yang Tersimpan	buah	1.500	1.650	1395	1.800	1395	1395	1395	2.100	1094	2.250	1094

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
													299 odner
22	Perpustakaan												
1	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	orang	9,149	10,049	6375	10,949	662369	11,849	691161	12,749	701492	13,649	817.982
	Urusan Pilihan												
1	Kelautan dan Perikanan												
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	10.387	10.906	11.975	11.451	15.466	12.024	16.577	12.625	17.072	13.256,00	17.266
2	Produksi Benih Ikan	ekor	3.000.000	3.200.000	4.000.000	3.400.000	4.200.000	3.600.000	4500000	3.800.000	5000000	4.000.000	49.800.000
2	Pertanian												
1	Produktivitas Padi	kwintal / Ha	61.90	62.87	62	63.81	62,60	64.77	62,60	65.74	62,90	66.73	62,41
2	Produktivitas Ubi Jalar	kwintal / Ha	217	220.28	235	223.58	212,70	226.93	233,90	230.34	228,30	233.79	224,4
3	Produksi Daging	ton	17.533	17.884	17.533	18.241	15.204	18.606	15.971	18.978	26.112	119.358	27.182
4	Produksi Susu	ton	11.279	11.505	11.729	11.735	11.995	11.969	11.995	12.209	15.760	12.453	21.317
5	Produksi Telur	ton	7.429	7.962	7.806	8.121	6.732	8.284	6.732	8.449	6.341	8.618	7.146
6	Produktivitas Bawang Merah	kwintal / Ha	73	74,05	96,3	75,17	96,67	76,29	103	77,44	102,29	78,60	91,68
3	Energi dan Sumberdaya Mineral												
1	PDRB sektor pertambangan	Rp. Miliyar	93.04315	101.297,66	226,71	110.284,5	228,22	120.068,61	227,75	130.720,75	228,13	142.317,91	N/A
4	Pariwisata												
1	Kunjungan Wisatawan	orang	1.788.329	1.824.095	1.788.329	1.860.577	1.836.407	1.916.394	2.752.852	1.973.886	2.627.369	2.052.841	4.002.124
2	Destinasi Wisata	objek	46	46	46	47	45	46	50	48	58	48	65
5	Industri												

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian									
			Tahun 2013	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
1	Jumlah produk unggulan daerah	jenis	8	9	7	10	7	10	7	11	7	11	7
6	Perdagangan												
1	PDRB sektor industri pengolahan	Rp. miliar	225.667,89	233.032,75	299,12	239.412,48	318,14	245.039,80	340,89	250.073,61	357,83	254.627,24	N/A
2	PDRB sektor Perdagangan, Hotel, Restoran	Rp. juta	2.497.500,40	2.761.174,10	2.186.750,7	3.028.873,60	2.257.758,4	3.300.598,90	2.353.688,1	3.576.350,00	N/A	3.856.126,90	N/A
3	Ekspor bersih perdagangan	US \$	4.332.441,08	4.410.425,02- 4.419.089,90	4.323.541,57	4.423.422,34- 4.440.752,11	5.788.115,69	4.445.084,55- 4.462.414,31	7.643.898,1	4.466.746,75- 4.484.076,52	6.740.407,06	4.488.408,96- 4.505.738,72	4.958.557,88
4	Jumlah UDMKM yang dibina	unit	50	50	50	75	75	75	100	100	110	100	140
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH												
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	66,16	66,50	66,63	66,60	67,19	67,00	67,51	67,50	67,78	68,00	68,55
2	Laju Pertumbuhan Penduduk/ LPP	%	0,462	0,445	0,60	0,428	0,60	0,411	0,61	0,394	0,59	0,377	0,59
3	Pendapatan Asli Daerah	Rp. milyar	112,33	142,85	202,841	159,99	229,201	180,82	253,442	207,52	384,719	242,16	299,998
4	Indeks Pendidikan	%	55,79	56,50	56,82	57,00	57,42	85,18-85,34	57,91	57,50	58,00	58,00	58,07

Sumber: LKPJ AMJ Bupati 2013-2018; Kajian IPM Kab. Kuningan Tahun 2019

2.7 Kinerja BUMD

a. PD BPR Kuningan

PD BPR Kuningan yang berlokasi di Jl. Sudirman No.88 Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kuningan yang didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Kelembagaan penggabungan usaha (merger) PD BPR Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 19 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah BPR Kuningan Merger.

Fungsi PD BPR Kuningan adalah mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Kuningan.

Sebagai perusahaan daerah, PD BPR Kuningan melakukan kegiatan usahanya berpedoman kepada 2 (dua) orientasi yaitu ;

1. Orientasi terhadap laba (*profit oriented*), yaitu mendapatkan laba operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban penyeteroran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Orientasi terhadap kepedulian social (*social oriented*), yaitu mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan akan modal kerja masyarakat pelaku bisnis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kuningan.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, PD. BPR Kuningan mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, memberiklan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, beroperasi dengan system imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2017 total aktiva tercatat sebesar Rp.145.116.254.768,00 atau meningkat 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih pada tahun 2017 tercatat

Rp.1.730.149.756,00 atau meningkat 54,69% dibanding laba tahun sebelumnya. Rasio likuiditas berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 tercatat 332,52 sedangkan rasio solvabilitas 119,64%.

b. PTLKM Kuningan

PD PK Kuningan, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan.

PD PK Kuningan merupakan hasil penggabungan usaha (Konsolidasi) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 580/Kep-27-Invest & BUMD/2015 tentang konsolidasi 2 (dua) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di daerah Kabupaten Kuningan menjadi Perusahaan daerah Perkreditan Kecamatan Kuningan tanggal 2 Januari 2015.

Penggabungan usaha (Konsolidasi) PD PK Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.35 tahun 2010 Tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan (PD) BPR dan Perusahaan Daerah (PD) Perkreditan Kecamatan (PK). PD PK Kuningan berkedudukan di Jl. Raya Kramatmulya No.44 Kuningan.

PD PK Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 telah dilakukan bentuk badan hukum dari PDPK menjadi PT LKM berdasarkan Akta Notaris Zainul Rochman, SH. Dengan Akta Nomor.296 Tanggal 28 Oktober 2015 tanggal 13 Desember 2015 dengan PJOK Nomor 1 tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PTLKM).

Sebagai Perusahaan Daerah, PT LKM Kuningan melakukan kegiatan usahanya berpedoman kepada dua orientasi yaitu :

1. Orientasi terhadap laba (*profit oriented*), yaitu mendapatkan laba operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban penyeteroran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Orientasi terhadap kepedulian sosial (*social oriented*), yaitu mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan akan modal kerja masyarakat pelaku bisnis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kuningan.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, PD. LKM Kuningan mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (Deposito), memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

Kinerja Keuangan PTLKM Kuningan berdasarkan hasil audit tahun 2017 aset total tercatat sebesar Rp.8.677.505.593,00 serta membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp.17.472.020,00. Rasio likuiditas tercatat sebesar 110,70 sedangkan rasio solvabilitas 136,59%

c. PDAM Tirta Kamuning Kuningan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kuningan (PDAM Tirta Kamuning) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kuningan Nomor: 02/HK.021.2/II/1983 tanggal 2 Maret 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 15 tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kuningan Nomor 15 Tahun 2008, maksud dan tujuan pendirian PDAM Tirta Kamuning adalah :

1. Menyediakan kebutuhan pokok air bersih yang cukup bagi pelanggan.
2. Memelihara kelangsungan hidup PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dengan memungut sejumlah uang dari pelanggan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan untuk membiayai seluruh kegiatan Perusahaan.

Struktur Organisasi PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan jumlah asset tercatat sebesar Rp.57.745.208.583,00 dengan perolehan laba tahun 2017 sebesar Rp.2.357.917.640,00. Rasio likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendek sebesar 2,70 sedangkan rasio solvabilitas sebesar 7.72.

d. PDAU Darma Putra Kertaraharja

Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, kemudian diberi nama PDAU Darma Putra Kertaraharja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, kemudian terjadi perubahan nama menjadi PDAU Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kuningan.

PDAU Kuningan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai usaha di bidang :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Energi
3. Agribisnis
4. Pariwisata
5. Aneka Jasa

Ikut sertadalam pembangunan ekonomi nasional

- Menunjang pembangunan daerah
- Ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional
- Memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata
- Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk masyarakat

- Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi masyarakat
- Mendorong mekanisme pasar yang sehat
- Mendorong peningkatan daya beli masyarakat
- Mendorong adanya keterbukaan informasi pasar

PDAU Kuningan berkedudukan di Komplek Taman Kota Cirendang, Jl. Siliwangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat No. Telp. +622328881389, email : darmaputra@pdaukuningan.com.

Total asset berdasarkan laporan keuangan PDAU Kabupaten Kuningan yang telah diaudit pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.2.347.672.171,00, dan membubukan laba bersih sebesar Rp.8.508.892,00. Dilihat dari sisi laba yang diperoleh pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang masih mencatat kerugian sebesar Rp.529.645.276,00. Rasio likuiditas PDAU Kabupaten Kuningan sebesar 34,58, sedangkan rasio solvabilitas tercatat sebesar 61,70.

2.8 Kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018, diantaranya.

Tabel 2.85
Kerjasama Daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018

No urut	Tanggal Penerimaan	No PKS/MoU	Judul Naskah Kerjasama	SKPD yang Menangani	Jangka waktu perpanjangan
1	04-01-2018	<u>PKS/04/2018</u> 84/KNG-OPS/2018	Pks Pemkab. Kng dg PT. BJB ttg Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Daerah Kab. Kng Th. 2018	BPKAD	1 tahun
2	12-01-2018	<u>PKS/07/2018</u> 01/MOU PBH.CRB/II/2018	PKS Dishub Kng dg LBH Peradi ttg Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang/Kelompok Orang Miskin Penduduk Kab. Kng	Bag. Hukum	1 tahun
3	30-01-2018	PKS/10/2018	PKS Pemkab Kng dg Zaenal Abidin ttg Sewa Toko Milik Pemkab Kng di Lingk. Stadion Mashud	BPKAD	5 tahun

No urut	Tanggal Penerimaan	No PKS/MoU	Judul Naskah Kerjasama	SKPD yang Menangani	Jangka waktu perpanjangan
			Wisnusaputra Kab. Kng		
4	30-01-2017	PKS/11/2018	PKS Pemkab Kng dg Elah Helayati ttg Sewa Toko Milik Pemkab Kng di Lingk. Stadion Mashud Wisnusaputra Kab. Kng	BPKAD	5 tahun
5	31-01-2018	PKS/12/2018	PKS Pemkab Kng dg PT.BJB, Tbk Cab. Kng ttg Sewa Tanah Hak Pakai Milik Pemkab. Kng	BPKAD	5 tahun
6	05-02-2018	<u>MOU /13/2018</u> 369/STP- CORSELA/I/2018	PKS Pemkab Kng dg PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan air dari sumber mata air Telaga Remis Kec. Pasawahan Kab. Kng	Bag. Hukum	7 tahun
7	12-02-2018	<u>20/I/CN/P</u> MOU/15/2018	Kesepakatan Bersama Kantor Perwakilan BI Cirebon dg Pemkab Kng ttg Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah, Pengendalian Inflasi, Penerapan Penggunaan Rupiah dan Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai di Kab. Kng	BPKAD	1 tahun
8	16-03-2018	PKS/16/2018	PKS Pemkab Kng dg Kompepar Taman Wisata alam dan bumi perkemahan “Talaga Surian” Desa Puncak Kecamatan Cigugur	BPKAD	5 tahun
9	16-03-2018	<u>PKS/17/2018</u> PKS/02/2018	PKS Pemkab Kng dg Kantor Hukum MS. Bakhri & Patners ttg Kerjasama di Bidang Hukum	Bag. Hukum	1 tahun
10.	03-09-2018	PPKD/32/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Ar-Rohmah ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.1	BPKAD	5 tahun
11.	03-09-2018	PPKD/33/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Berkah Indah ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.2	BPKAD	5 tahun
12.	03-09-2018	PPKD/34/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Pakaian dan Sepatu ttg	BPKAD	5 tahun

No urut	Tanggal Penerimaan	No PKS/MoU	Judul Naskah Kerjasama	SKPD yang Menangani	Jangka waktu perpanjangan
			sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.3 dan 4		
13.	03-09-2018	PPKD/35/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Pakaian ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.5	BPKAD	5 tahun
14.	03-09-2018	PPKD/36/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Baso Idola ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.6 dan 7	BPKAD	5 tahun
15.	03-09-2018	PPKD/37/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Asia Silver ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.8	BPKAD	5 tahun
16.	03-09-2018	PPKD/38/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Sinar Kencana ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.9	BPKAD	5 tahun
17.	03-09-2018	PPKD/39/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Korea Silver ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.10	BPKAD	5 tahun
18.	03-09-2018	PPKD/40/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Momtaaz ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.11 dan 12	BPKAD	5 tahun
19.	03-09-2018	PPKD/41/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Leo ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.13	BPKAD	5 tahun
20.	03-09-2018	PPKD/42/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Sunda Permai ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.14 dan 15	BPKAD	5 tahun
21.	03-09-2018	PPKD/43/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Manggis Putra ttg sewa bangunan toko Siliwangi	BPKAD	5 tahun

No urut	Tanggal Penerimaan	No PKS/MoU	Judul Naskah Kerjasama	SKPD yang Menangani	Jangka waktu perpanjangan
			Barat No.17,18,19		
22.	03-09-2018	PPKD/44/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Ikan ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.20 dan 21	BPKAD	5 tahun
23.	03-09-2018	PPKD/45/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Karmina ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.22 dan 23	BPKAD	5 tahun
24.	03-09-2018	PPKD/46/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Karmina Gordyn ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.24	BPKAD	5 tahun
25.	03-09-2018	PPKD/47/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Emas Macan ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.25 dan 26	BPKAD	5 tahun
26.	03-09-2018	PPKD/48/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Sembilan ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.27	BPKAD	5 tahun
27.	03-09-2018	PPKD/49/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko City ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.28 dan 29	BPKAD	5 tahun
28.	03-09-2018	PPKD/50/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Emas Sawo ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.30	BPKAD	5 tahun
29.	03-09-2018	PPKD/51/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Keris ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.31	BPKAD	5 tahun
30.	03-09-2018	PPKD/52/2018	Perjanjian Pemakain Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Emas Leo ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.32	BPKAD	5 tahun

No urut	Tanggal Penerimaan	No PKS/MoU	Judul Naskah Kerjasama	SKPD yang Menangani	Jangka waktu perpanjangan
31.	03-09-2018	PPKD/53/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Gaya Baru ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.33	BPKAD	5 tahun
32.	03-09-2018	PPKD/54/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Gaya Silver ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.34	BPKAD	5 tahun
33.	03-09-2018	PPKD/55/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha PT.Bank Danamon, Tbk ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.35,36	BPKAD	5 tahun
34..	03-09-2018	PPKD/56/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Kuliner dan Pakaian ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.37	BPKAD	5 tahun
35.	03-09-2018	PPKD/57/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Padaterang ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.38	BPKAD	5 tahun
36.	03-09-2018	PPKD/58/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Anita ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.39 dan 40	BPKAD	5 tahun
37.	03-09-2018	PPKD/59/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Apel ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.41	BPKAD	5 tahun
38.	03-09-2018	PPKD/60/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg PT. BPD Jabar Banten, tbk ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.42	BPKAD	5 tahun
39.	03-09-2018	PPKD/61/2018	Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Silver Cantik ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.43	BPKAD	5 tahun
40.	03-09-2018	PPKD/62/2018	Perjanjian Pemakain	BPKAD	5 tahun

No urut	Tanggal Penerimaan	No PKS/MoU	Judul Naskah Kerjasama	SKPD yang Menangani	Jangka waktu perpanjangan
			Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Aneka Pakaian ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.44 dan 45		
41.	03-09-2018	PPKD/63/2018	Perjanjian Pemakain Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Anekasari ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.46	BPKAD	5 tahun
42.	03-09-2018	PPKD/64/2018	Perjanjian Pemakain Kekayaan Daerah Pemkab Kng dg Pengusaha Toko Prapatan ttg sewa bangunan toko Siliwangi Barat No.47	BPKAD	5 tahun
43.	03-09-2018	<u>37/MOU/BPPT-PEMKAB.KNG/IX/2018</u> MOU/66/2018	Kesepakatan Bersama antara Badan Pengkajian, Penerapan dan Pemasarakan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kab.Kng	Diskominfo	1 tahun

2.9 Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan dan Arahkan Rekomendasi terhadap RPJMD menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan

Isu utama pembangunan berkelanjutan menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan didasarkan pada hasil kesepakatan tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan dengan para pemangku kepentingan pada saat FGD dan konsultasi publik. Isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan antara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan (Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun);
2. Pengurangan Tingkat Pengangguran (Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua);
3. Pembangunan Sektor Industri (Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi dan mendukung Tujuan 8 Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua);

4. Mitigasi Bencana (Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan);
5. Peningkatan Akses Sanitasi (Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan);
6. Pemerataan Pembangunan (Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara); dan
7. Penyediaan data TPB.

Selanjutnya karena keterbatasan data yang tersedia, terhadap isu utama tersebut dilakukan analisis untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan sesuai arahan Permendagri 7/2018. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak termasuk pada isu utama, rumusan skenario yang diberikan berupa “dipertahankan” untuk yang saat ini sudah mencapai target indikator TPB, “didukung” untuk yang sejalan dengan TPB, “ditingkatkan” untuk yang saat ini masih di bawah target indikator TPB, dan “disediakan” untuk yang datanya tidak tersedia.

2.9.1 Proyeksi Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan

a. Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan sebesar 12,22 persen pada tahun 2018. Angka tersebut lebih besar dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional dimana secara berurutan masing-masing sebesar 7,45 persen dan 9,82 persen.

Tabel 2.86
Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018(persen)

No.	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Persentase Penduduk Miskin	13,97	13,59	13,27	12,22

Sumber : BPS Jabar

Apabila tidak dilakukan upaya tambahan, proyeksi persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan dari tahun 2018-2023 dan tahun 2030 ditampilkan pada **tabel 2.87**. Ada dua asumsi laju kenaikan persentase penduduk miskin yaitu sebesar 0,03 persen yang didasarkan pada analisis kecenderungan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dan laju penurunan sebesar 2,54 persen yang didasarkan pada analisis kecenderungan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Asumsi kedua diambil dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2015 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan sudah mulai berangsur-angsur menurun dari tahun ke tahun. Namun, hasil akhir keduanya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih belum bisa mencapai target TPB sehingga diperlukan upaya tambahan untuk mengintervensi hasil akhir tersebut.

Tabel 2.87
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kuningan (dalam persen)

No	Kenaikan Rata-Rata	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
1	0,03 % /tahun (2012-2017)	13,27	13,28	13,28	13,28	13,29	13,29	13,32
No	Kenaikan Rata-Rata	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
2	-2,54 % /tahun (2015-2017)	12,93	12,61	12,29	11,97	11,67	11,37	9,50
Perpres 59 Tahun 2017								7-8

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan perkembangannya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan **Tabel 2.88**. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kuningan sebesar 7,94 Persen dan berada di bawah tingkat pengangguran provinsi Jawa Barat yakni sebesar 8,22 persen. Namun, pada Agustus Tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kuningan sebesar 8,99 persen (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat). Angka tersebut berada di atas tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 8,17 persen.

Tabel 2.88
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2015 - 2018 (dalam persen)

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,49	7,20	7,94	8,99

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan sebesar 2,34 persen per tahun. Tanpa adanya upaya tambahan untuk mengatasi masalah ini, maka tiap tahun tingkat pengangguran di Kabupaten Kuningan akan cenderung mengalami peningkatan sedangkan TPB menargetkan mengalami penurunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penyediaan lapangan kerja terutama yang sifatnya padat karya.

c. Pembangunan Industri Pengolahan (Manufacturing)

Pembangunan Industri Pengolahan merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kuningan. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengamanatkan agar sektor ini mengalami peningkatan di tahun 2030. Industri yang diharapkan berkembang di Kabupaten Kuningan terutama adalah industri yang ramah lingkungan dan padat karya. Perkembangan nilai dan kontribusi sektor industri di Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.89.

Tabel 2.89
Nilai dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2018

No	PDRB Manufacturing	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)				
	Nilai (Miliar Rupiah)	395,68	439,42	473,64	395,68
	Kontribusi (Persen)	2,33	2,37	2,32	2,33
2	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010				
	Nilai (Miliar Rupiah)	318,14	340,89	357,83	318,14
	Kontribusi (Persen)	2,41	2,44	2,41	2,41

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Kuningan memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kontribusinya masih sangat kecil sehingga masih perlu dilakukan upaya tambahan. Tanpa ada upaya tambahan, nilai kontribusinya cenderung stagnan di angka 2,4 persen (ADHK) atau 2,3 persen (ADHB). Di daerah lain, sektor ini berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan memanfaatkan sektor basis di Kabupaten Kuningan, diharapkan adanya industri pengolahan akan menciptakan efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor yang lain sehingga PDRB per kapitanya semakin tumbuh pesat. PDRB Per Kapita di Kabupaten Kuningan ditampilkan dalam Tabel 2.90.

Tabel 2.90
PDRB Per Kapita di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 – 2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
ADHB	16.094.751,85	17.481.430,36	19.141.751,60
ADHK 2010	12.483.853,99	13.163.158,98	13.917.436,02

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Secara umum PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita ADHB dan ADHK sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata keduanya secara berturut-turut masing-masing sebesar 10,36 persen dan 5,65 persen per tahun. Meskipun tanpa ada upaya tambahan diperkirakan tahun 2030 nilai PDRB ADHB Kabupaten Kuningan sudah mencapai target TPB yakni di atas 50 juta rupiah, namun kenaikan yang pesat tersebut bisa jadi termasuk kenaikan semu sebab masih dipengaruhi faktor inflasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB ADHK pada tahun 2030 yang masih jauh di bawah 50 juta rupiah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Proyeksi PDRB Kabupaten Kuningan
(dalam Ribu Rupiah)

No	PDRB	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
1	ADHB	21.125,62	23.315,09	25.731,49	28.398,32	31.341,54	34.589,80	68.983,01
2	ADHK	14.703,83	15.534,67	16.412,44	17.339,82	18.319,60	19.354,74	28.437,19

Sumber : Data olah Bappeda, 2018

d. Mitigasi Bencana

Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kuningan yaitu banjir *cileuncang*, longsor, rayapan dan amblasan tanah/batuan. Hampir setiap tahun saat musim hujan, bencana tersebut menimpa Kabupaten Kuningan terutama di wilayah bagian selatan dan timur. Di antara kerugian yang ditimbulkan yaitu rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan dan permukiman. Mengingat di zaman sekarang cuaca sudah tidak menentu, maka perlu dilakukan upaya antisipasi penanggulangan bencana baik sebelum maupun setelah terjadinya bencana. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.

e. Peningkatan Akses Sanitasi

Dalam hal ini, sanitasi yang dimaksud meliputi persampahan, air limbah domestik dan drainase permukiman. Berdasarkan data yang ada, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 mencapai 87,77 persen (sumber : Dinas PRPP Kabupaten Kuningan).

Angka tersebut belum menggambarkan berapa persen rumah tinggal yang akses sanitasinya dasar, layak atau aman, mengingat bahwa :

- a. masih terdapat tempat pengelolaan sampah “siluman” meskipun daerah tersebut sudah terlayani angkutan persampahan. Hal ini berarti bahwa sampah yang terlayani hanya yang lokasinya mudah diakses kendaraan layanan angkutan sampah.
- b. baru sebagian rumah tangga yang terlayani IPAL dan belum terdapat IPLT di Kabupaten Kuningan, lalu dibuang kemana air limbah domestik yang tidak terlayani IPAL dan IPLT?
- c. jalan-jalan di lingkungan permukiman cenderung cepat rusak saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa saluran drainase di permukiman tersebut masih belum sepenuhnya baik.

f. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Salah satu metode untuk mengetahui adanya ketimpangan wilayah yaitu dengan melihat nilai gini ratio. Berdasarkan data yang ada, ketimpangan di Kabupaten Kuningan termasuk pada kategori sedang karena berada pada kisaran 0,3 hingga 0,5 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.93. Meskipun demikian, sejak tahun 2015 nilai gini ratio Kabupaten Kuningan sudah mencapai target TPB yakni sudah di bawah 0,36 dan cenderung terus mengalami perbaikan.

Tabel 2.92
Gini Ratio Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 - 2018

Indikator	2015	2016	2017	2018
Indeks Gini Ratio	0,34	0,33	0,32	0,32

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Isu ini sangat mendukung visi Bupati dan wakil bupati terpilih yakni “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”. Perlu dilakukan upaya-upaya terobosan dalam membangun desa-desa di Kabupaten Kuningan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

g. Penyediaan Data TPB

Berdasarkan hasil pengkajian TPB, didapat informasi bahwa banyak data yang tidak tersedia di BPS Kabupaten Kuningan maupun di perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyediaan data TPB. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui perangkat daerahnya harus mulai mengubah cara dalam menyelenggarakan pembangunan. Jika semula pembangunan dilakukan atas dasar kebiasaan di masa lalu, maka sekarang pembangunan harus dilakukan berdasarkan data yang benar dan valid. Hal ini ditujukan agar pembangunan di Kabupaten Kuningan semakin tepat sasaran.

2.10 Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Setelah melakukan analisis proyeksi terhadap isu utama Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan, langkah selanjutnya yaitu merumuskan upaya tambahan untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya tambahan tersebut berupa rekomendasi arahan program yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kuningan.

Menurut Permendagri 7/2018, upaya tambahan disusun dengan memperhatikan:

1. pencapaian target tanpa upaya tambahan;
2. pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
3. potensi, daya saing dan inovasi daerah;
4. daya dukung dan daya tampung daerah; dan
5. pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tabel 2.93
Keterkaitan Isu Utama dengan Jasa Ekosistem

No	Isu Utama	TPB	Jasa Ekosistem	Keterangan
1	Penanggulangan Kemiskinan	Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Level jasa ekosistem pengatur mitigasi di Kabupaten Kuningan	Kebencanaan di Kabupaten Kuningan : letusan gunungapi, banjir <i>cileuncang</i> , gerakan

No	Isu Utama	TPB	Jasa Ekosistem	Keterangan
			: 32,05 % rendah, 47,23 %sedang dan 17,34 % tinggi	tanah terutama longsor
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	-	
3	Pembangunan Industri Pengolahan	Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi dan mendukung Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Jasa ekosistem penyedia Air, jasa ekosistem kualitas udara Level jasa ekosistem air di Kabupaten Kuningan : 37,99 % rendah, dan 60,72 % sedang Level jasa ekosistem kualitas udara di Kabupaten Kuningan : 43,59 % rendah, dan 53,36 % sedang Level jasa ekosistem pengatur iklim di Kabupaten Kuningan : 36,56 % rendah, dan 60,55 % sedang	Industri membutuhkan ketersediaan air sehingga penempatan lokasi selain harus didasarkan pada analisis kesesuaian lahan pada RTRW juga diarahkan pada industri yang tidak terlalu membutuhkan/ menggunakan banyak air, rendah karbon, dan ramah lingkungan
4	Mitigasi Bencana	Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi	Pembangunan infrastruktur di kawasan rentan bencana secara teknis harus dibedakan dengan di kawasan tidak rentan bencana, perlu pengendalian pemanfaatan ruang, dan pembangunan berbasis mitigasi bencana
5	Peningkatan	Tujuan 6 Menjamin	Jasa ekosistem	Sanitasi harus

No	Isu Utama	TPB	Jasa Ekosistem	Keterangan
	Akses Sanitasi	Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	penyedia Air, Level jasa ekosistem pengatur limbah di Kabupaten Kuningan : 81,57 % rendah, dan 16,7% sedang Level jasa ekosistem regenerasi tanah di Kabupaten Kuningan : 28,86 % rendah, 41,97 %sedang dan 28,37 % tinggi	didukung dengan ketersediaan air sehingga program terkait penyediaan air perlu didorong, perlu dibangun infrastruktur air limbah, persampahan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan
6	Pemerataan Pembangunan	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	-	Nilai Gini ratio Kabupaten Kuningan sebesar 0,32, sedangkan target TPB : 0,36
7	Penyediaan data TPB	Semua Tujuan	-	

Rumusan skenario untuk isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Rumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

No.	Isu Utama	TPB	Arahan Program	Indikasi Sasaran Program	Keterangan
1	Penanggulangan Kemiskinan	Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Fakir Miskin dan PMKS	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial, pendampingan psikososial korban bencana sosial.	
			Optimalisasi TNP2K	Efektifnya penanggulangan kemiskinan, terlibatnya semua bidang dan sektor dalam penanggulangan kemiskinan (ekonomi, sosial,	

No.	Isu Utama	TPB	Arahan Program	Indikasi Sasaran Program	Keterangan
				infrastruktur/ LH), menurunnya penduduk miskin	
			Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Nol persen kawasan kumuh	
2	Pengurangan Tingkat Pengangguran	Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya lapangan kerja sektor formal dan informal, turunnya tingkat pengangguran terbuka	
			Pengembangan Kewirausahaan UMKM	Tersedianya Bantuan alat dan modal usaha	
			Peningkatan Promosi dan Investasi Usaha	Tersedianya lapangan kerja padat karya, menurunnya tingkat pengangguran terbuka	
			Pelatihan keterampilan kerja	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	
			Pengembangan industri pariwisata	Meningkatnya lapangan kerja sektor pariwisata, kunjungan wisata, kontribusi dan PAD sektor pariwisata,	
3	Pembangunan Sektor Industri	Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi dan mendukung Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	Pembangunan pusat pertumbuhan berbasis industri	Tersedianya kawasan industri/sentra industri yang ramah lingkungan, tersedianya lapangan kerja industri manufaktur, meningkatnya PDRB perkapita Kabupaten Kuningan	Lokasi disesuaikan dengan rencana tata ruang
			Pengembangan IMKM	Meningkatnya lapangan kerja di sektor IMKM,	

No.	Isu Utama	TPB	Arahan Program	Indikasi Sasaran Program	Keterangan
		Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
4	Mitigasi Bencana	Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Pasca Bencana	pelayanan SPM untuk penanggulangan bencana	Lokasi diutamakan pada kawasan rentan/rawan bencana sesuai data sektor dan RTRW
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya dokumen pengurangan risiko bencana, dan sistem peringatan dini, menurunnya kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
			Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rasio rumah tidak layak huni semakin menurun	Rumah tidak layak huni rentan terkena dampak bencana
			Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya perda rencana umum dan rencana rinci tata ruang	
5	Peningkatan Akses Sanitasi	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan sanitasi (air limbah domestik, persampahan dan drainase permukiman) Pengembangan Kinerja Air Minum (untuk menunjang sanitasi)	Tersedianya data rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak/aman yang dapat dipertanggungjawabkan, meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak, 100 persen akses sanitasi di 2030, meningkatnya layanan IPAL, terbangunnya IPLT dan layanannya, meningkatnya layanan sampah, berkurangnya timbulan sampah	
			Pengembangan Lingkungan Sehat	meningkatnya populasi yang memiliki fasilitas	

No.	Isu Utama	TPB	Arahan Program	Indikasi Sasaran Program	Keterangan
				CTPS, meningkatnya desa STBM, ODF,	
6	Pemerataan Pembangunan	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	Pembangunan berbasis potensi desa	Semakin menurunnya nilai gini ratio	
7	Penyediaan data TPB	Semua Indikator yang diminta dalam TPB	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan Pembangunan; Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan; Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam; Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi Pembangunan; Penelitian dan pengembangan	Tersedianya Data kebutuhan TPB, e-planning, e-budgeting, dll yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terkoordinasinya pencapaian TPB Meningkatkan inovasi daerah	

Tabel 2.95
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Program Unggulan Bupati

No.	Program Unggulan	Rekomendasi Kebijakan
1	Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas (1000 RK); Pembangunan Ruang Kelas Baru (300 RKB); Pembangunan Perpustakaan (100 Ruang); dan Pemberian Beasiswa (1.000 Orang).	Program ini perlu didukung karena sejalan dengan Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, diharapkan akan meningkatkan APK, APM, rata-rata lama sekolah, dll. Namun, pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru dapat disesuaikan dengan karakteristik kebencanaan di Kabupaten Kuningan.
2	Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur, yaitu 1.000 KM Jalan dan Jembatan Kabupaten/ Desa; Pemeliharaan Daerah Irigasi 18.000 hektar; 25 Desa Wisata;	Program ini perlu didukung karena sejalan dengan Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi, dan Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai

No.	Program Unggulan	Rekomendasi Kebijakan
	dan 100 Desa Pinunjul.	Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Diharapkan program ini dapat meningkatkan akses ekonomi, meningkatkan produktivitas tanaman pangan, mendorong berkembangnya industri pariwisata, dan semakin mensejahterakan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya dapat disesuaikan dengan karakteristik kebencanaan di Kabupaten Kuningan. Level jasa ekosistem pengatur pangan di Kabupaten Kuningan : 32,22 % rendah, dan 43,64 % sedang
3	Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha untuk 1.000 Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan 1.000 Bantuan Modal Usaha Kecil.	Program ini perlu didukung karena sejalan dengan Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
4	Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui Ketersediaan ruang-ruang kreativitas masyarakat meliputi seluruh bidang; dan Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masjid, salah satunya yaitu ketersediaan Alqur'an melalui wakaf 1.000 mushaf Alqur'an.	Program ini perlu didukung karena sejalan dengan Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.
5	Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui Ketersediaan <i>ambulance</i> gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan; dan Revitalisasi 1.423 Posyandu.	Program ini perlu didukung karena sejalan dengan Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Namun, perlu dipertimbangkan mengenai
6	Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.	Program ini perlu didukung karena sejalan dengan Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

2.11 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah telah menyeleraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selanjutnya telah ditetapkan, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada 4 Juli 2017. Perpres ini menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.

Bagi Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tujuan SDGs harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari target perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri dari 17 tujuan, berikut dengan target intinya yaitu:

Tujuan I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun

- Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, target tingkat kemiskinan pada Tahun 2018 adalah 7-8%. Sedangkan capaian di Kabupaten Kuningan pada tahun yang sama (berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kuningan, Tahun 2018) sebesar 12,22%, yang lebih besar dari target SDG's nasional, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada Tahun 2018. Karena capaian 61,7% (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2018) lebih rendah dari 95%, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

- Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada Tahun 2018 menjadi 17%. Karena Capaian 0,26% (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Tahun 2018) lebih kecil dari 17% Target SDG's, artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita pada Tahun 2018 menjadi 9,5%. Karena Capaian 1,45% (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Tahun 2018) lebih kecil dari 9,5% Target SDG's, artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

- Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada Tahun 2018 menjadi 306 sesuai target SDGs. Karena capaian 123 angka kematian ibu (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Tahun 2018) lebih kecil dari 306, artinyatarget SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada Tahun 2018 menjadi 95%. Karena capaian 100% lebih besar (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Tahun 2018) dari 95% Target SDG's artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada Tahun 2018 menjadi 245. Karena capaian 78 lebih kecil dari 245 Target SDG's, artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada Tahun 2018 menjadi 66%. Karena capaian 74,4% lebih besar dari 66% Target SDG's, artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk Semua

- Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat pada Tahun 2018 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). Karena capaian 96,46% lebih besar dari 94,78% Target SDG's, artinya target SDG's *telah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada Tahun 2018 menjadi 82.2%. Karena capaian 75,50% lebih kecil dari 82.2% Target SDG's artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan
- Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada Tahun 2018 menjadi 91,63% (2015: 82,42%). Karena capaian 79,12% lebih kecil dari 91,63% artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada Tahun 2018 menjadi 8,8 Tahun. Karena capaian 7,35 lebih kecil dari 8,8, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2016 sebesar 85,89%, sedangkan capaian nasional pada tahun tersebut sebesar 90,82%. Hal ini berarti capaian IPG Kabupaten Kuningan masih *belum tercapai*, karena masih dibawah capaian nasional.
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2016 mencapai 61 kasus, 50 % adalah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, Tahun 2016).
- Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada Tahun 2018 menjadi 21 Tahun. Karena

capaian 18,7 lebih kecil dari 21 Target SDG's, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

- Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD 30%. Karena capaian 26% lebih kecil dari 30% Target SDG's, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

- Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada Tahun 2018 menjadi 100% (2014: 70%). Karena capaian 69,67% lebih kecil dari 100% Target SDG's, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada Tahun 2018 menjadi 100%. Karena capaian 69,67% lebih kecil dari 100%, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan VII. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

- Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada Tahun 2018. Karena capaian 99,89% lebih besar dari 96,6% Target SDG's artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

- Meningkatnya persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada Tahun 2018. Karena capaian 34,95% lebih kecil dari 51% Target SDG's, artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

- Meningkatnya persentase kondisi jalan baik mencapai 100% pada Tahun 2018. Karena Capaian 80,91% lebih kecil dari 100% Target SDG's. artinya target SDG's *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara

- Koefisien Gini pada Tahun 2018 menjadi 0,36. Karena capaian 0,320 lebih kecil dari 0,360 Target SDG's, artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

- Meningkatnya rumah layak huni 80%. Karena capaian 97,04% lebih besar dari 80% Target SDG's artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada Tahun 2018. Karena Capaian 81,71% lebih besar dari 80% Target SDG's, artinya target SDG's *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

- Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada Tahun 2018 2015: 100 juta ton). Penanganan limbah medis di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu dibakar dengan incenerator untuk limbah padat dan diolah dengan menggunakan IPAL untuk limbah cairnya. Kabupaten Kuningan mempunyai 2 (Dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 5 (Lima) Rumah Sakit Swasta, dan 37 Puskesmas.

Tujuan XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

- Membuat daftar kecamatan yang masuk zona bencana alam. Tercatat ada 20 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan longsor. Sebanyak 13 kecamatan diantaranya berada dalam kategori pergerakan tanah tinggi. Dari 20 kecamatan itu, 7 kecamatan masuk pada potensi gerakan tanah menengah, dan 13 kecamatan sisanya masuk potensi gerakan tanah tinggi.
- Mewaspada kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan beberapa wilayah lainnya di seputar lereng Gunung.

Tujuan XIV. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada Tahun 2018. Kabupaten Kuningan, tidak memiliki pantai laut. Sehingga Produksi perikanan berasal dari budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya sawah. Luas lahan perikanan budidaya menurut jenis budidaya. Pemerintah Kabupaten Kuningan membuat Target Daerah : 21.692 Ton dan ternyata Jumlah Produksi Ikan (Ton) yang dicapai : 18.662 Ton, sehingga Persentase Produksi perikanan berjumlah 86,03% (2017).

Tujuan XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga 30%. Karena capaian 30,79% lebih besar dari 30% Target SDG's, artinya target SDG's sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

- Temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2016 sebanyak 525 temuan, dengan rekomendasi sebanyak 367 rekomendasi. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan semester I Tahun 2016, sebanyak 367 temuan. Jumlah Temuan BPK RI yang belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut sebanyak 97 temuan. Jumlah temuan BPK RI yang belum ditindaklanjuti sebanyak 61 temuan. Sehingga rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 88,38 %.
- Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir menjadi 77,4% pada Tahun 2018. Karena capaian 90,82% lebih besar dari 77,40% Target SDG's, artinya target SDG's sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.
- Keberadaan PERDA/PerBup tentang Konsultasi Publik, dimana telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Informasi, media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (websiteKabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) dan Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat.

Tujuan XVII. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

- Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per Tahun (2015: 10,7%). Untuk Tahun 2018 Target penerimaan PBB Kabupaten Kuningan sebesar Rp.26,5 Miliar. Hingga minggu kedua bulan Desember 2018 penerimaan mencapai Rp.25,32 Miliar atau 96% (kuninganmass.com, 12 Desember 2018).
- Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antar peradaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia. Kerjasama dengan daerah lain, dibuktikan dengan Jumlah Memorandum of

Understanding/MoU yang masih berlaku per Tahun 2016, sebanyak 29 MoU.

2.12 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan selama periode 2017-2018 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel.2.96
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kuningan
Tahun 2017 - 2018

No	Indikator	Target %	Realisasi (%)	
			2017	2018
I	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan			
1	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	81,27	90,4
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	87,7	101,38
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	90,61	98,09
4	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	94,1	88,7
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	98,1	92,48
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	45,2	53,78
7	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun	100	62,3	74,45

No	Indikator	Target %	Realisasi (%)	
			2017	2018
	waktu satu tahun			
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	30,5	74,84
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	58,2	25,5
10	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	50,54	60,39
11	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	83	81,95
12	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	99,9	56,76
II	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial			
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	27,73	62,66
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80	1,89	0,51
3	Persentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	51,28	71,43
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60	60	-
5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	100	100
6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	100	100
7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	5,48	59,52
III	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman &			

No	Indikator	Target %	Realisasi (%)	
			2017	2018
	Ketertiban Masyarakat			
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100	100	100
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3	3,75	4,13
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1	0,595	0,56
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80	30	14,49
5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75	100	26,29
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	52	51,72
7	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran	90	20	57,14
IV	Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	100	263,6	139,7
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70	97	97
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100	1,98	2,14
4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100	100	-
5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60	60	80,9
6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60	60	-
7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60	60	-
8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	100	88,94	90,85
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60	60	-
10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	50	5	-

No	Indikator	Target %	Realisasi (%)	
			2017	2018
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20	20	-
12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70	70	-
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50	50	-
14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10	10	65,5
15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100	100	100
16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100	100	
17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100	100	100
18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100	100	100
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	100	100
20	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100	100	
21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100	100	
22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100	100	
23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25	25	5,8

V	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Tingkat	Target	Satuan	Realisasi
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP	SD	1	Pemukiman	100%
		MI	1	Pemukiman	1
		SMP	1	Pemukiman	100%

V	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Tingkat	Target	Satuan	Realisasi
	SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	MTs	1	Pemukiman	1
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	650	Sekolah	100%
		MI	91	Sekolah	
		SMP	94	Sekolah	100%
		MTS	58	Sekolah	
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	94	Sekolah	83,87%
		MTS	58	Sekolah	
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	650	Sekolah	43,25%
		MI	91	Sekolah	25
		SMP	94	Sekolah	29,03%
		MTs	58	Sekolah	
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	650	Sekolah	81,36%
		MI	91	Sekolah	
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	94	Sekolah	26,88%
		MTs	58	Sekolah	
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	659	Sekolah	92,45%
		MI	91	Sekolah	
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	94	Sekolah	72,04%
		MTS	58	Sekolah	
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B.	SMP	94	Sekolah	45,16%
		MTs	58	Sekolah	

V	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Tingkat	Target	Satuan	Realisasi
	Indonesia, B. Inggris, dan PKn				
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	650	Sekolah	81,36%
		MI	91	Sekolah	
11.	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	94	Sekolah	77,42%
		MTs	58	Sekolah	
12.	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	1	Kabupaten	100%
		MI		Kabupaten	
13.	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;		100	Kabupaten	1
			50	Sekolah	100%
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	650	Sekolah	100%
		MI	91	Sekolah	
		SMP	94	Sekolah	100%
		MTs	58	Sekolah	

Tabel 2.97
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kuningan
Tahun 2019

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Sebagai Berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian Target (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)	100	96,88
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2,77
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	76,08

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Sebagai Berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun (%)	Jumlah Absolut	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan layanan Kesehatan	19.514	100	18.436	94,48
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	18.627	100	19.183	102,98
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.356	100	18.551	95,84
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	86.436	100	82.374	95,30
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang Mendapatkan layanan kesehatan	46.687	100	39.811	85,27
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	664.429	100	378.299	56,94
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	151.272	100	99.065	65,49
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	389.107	100	119.046	30,59
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetesmellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	56.404	100	14.529	25,76
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.271	100	1.553	68,38

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun (%)	Jumlah Absolut	%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	12.153	100	10.385	85,45
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	24.187	100	19.109	79,01

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian Target (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	90,85
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pengolahan Air limbah domestik	100	83,34

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian Target (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	31,11

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian Target (%)
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi Akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	16,85

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian Target (%)
1.	Pelayanan ketentraman Dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	13
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	29,92

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan faktor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan pengelolaan keuangan merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Regulasi pengelolaan keuangan disandarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja

keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah serta perkembangan belanja daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

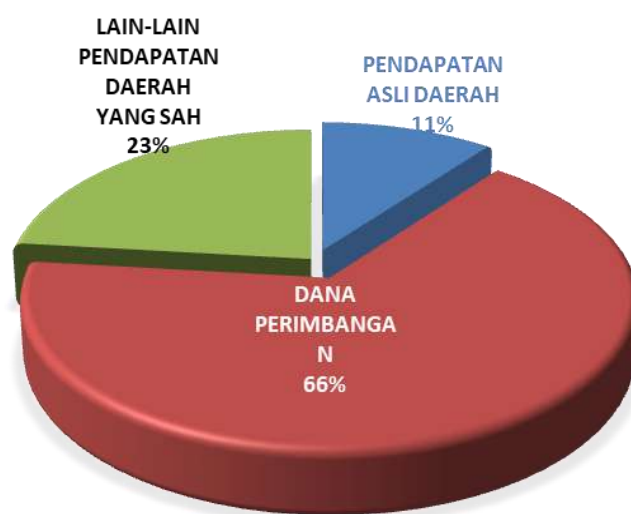
Sesuai ketentuan, sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan PEMDA lainnya dan Bagi Hasil Retribusi Provinsi.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan selama periode tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 1,897 triliun, sedangkan pada akhir tahun 2018 penerimaan pendapatan terealisasi sebesar Rp.2,529triliun. Kenaikan pendapatan ini diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan dari Rp.202,84miliar pada tahun 2014 menjadi Rp.303,21miliar pada tahun

2018; Dana Perimbangan dari Rp.1,269 triliun menjadi Rp.1,662triliun; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Rp.425,16miliar menjadi Rp.568,41miliar.

Apabila mencermati data yang ada, pendapatan daerah Kabupaten Kuningan masih sangat tergantung kepada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari masih besarnya proporsi danaperimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah



Gambar 3.1

Rata-rata Realisasi Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kontribusi

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan terhadap APBD tidak signifikan,

rata-rata per tahun baru sebesar 10,48%, yang dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan masih sangat kecil. Sedangkan rata-rata kontribusi Dana Perimbangan sekitar 66,28% dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang Sah sebesar 23,24%.

Sementara itu pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kuningan rata-rata selama 5 tahun sebesar 9,71%. Dengan rincian; Pendapatan Asli daerah (PAD) tumbuh rata-rata 30,59%, Dana Perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 37,21% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh rata-rata sebesar 23,31%.

Gambaran lebih rinci tentang kondisi pendapatan daerah Kabupaten Kuningan selama tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

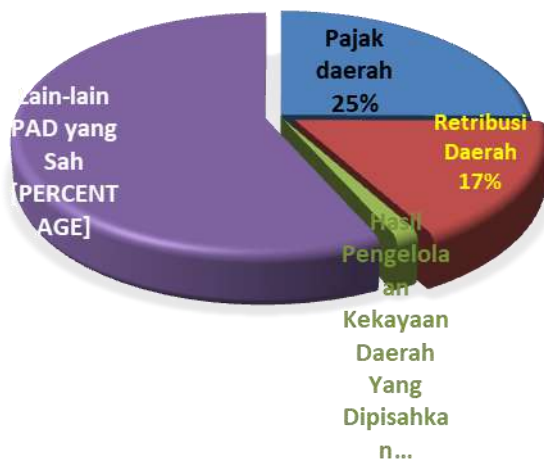
No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PENDAPATAN	1,897,299,065,386	2,373,001,450,080	2,429,460,737,294	2,616,709,699,944	2,529,670,838,802	9.71%
1,1	Pendapatan Asli Daerah	202,841,317,368	229,170,387,972	253,441,689,733	384,398,431,333	303,218,052,848	30.59%
1.1.1	Pajak Daerah	49,184,733,633	58,450,803,077	67,933,216,064	79,630,915,285	88,075,990,758	23.31%
1.1.2	Retribusi Daerah	40,133,135,754	38,769,625,494	38,015,060,600	37,748,101,889	45,084,552,192	15.35%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,653,159,176	3,053,863,854	3,142,130,883	3,619,287,974	4,666,909,366	16.28%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	110,870,288,805	128,896,095,547	144,351,282,186	263,400,126,185	165,390,600,532	35.98%
1,2	Dana Perimbangan	1,269,296,362,722	1,374,529,144,140	1,717,088,119,273	1,721,906,216,207	1,662,033,402,705	37.21%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	82,655,179,722	54,922,543,140	78,384,642,360	74,480,198,732	65,003,429,164	-0.78%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,112,271,883,000	1,127,612,951,000	1,218,601,913,000	1,197,194,996,000	1,197,194,996,000	3.82%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	74,369,300,000	191,993,650,000	420,101,563,913	450,231,021,475	399,834,977,541	58.53%
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	425,161,385,296	769,301,917,968	458,930,928,288	510,405,052,404	564,419,383,249	23.31%
1.3.1	Hibah	2,000,000,000	109,359,733,000	254,723,703,558	6,436,000,000	126,038,840,000	1472.36%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	78,078,954,746	98,160,080,509	102,280,026,830	108,337,995,389	116,324,447,550	22.63%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295,462,581,000	399,686,389,000	-	294,605,211,000	262,301,673,000	10.74%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	49,619,849,550	162,095,715,459	101,927,197,900	101,025,846,015	59,754,422,699	19.57%

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh rata-rata 30,59% per tahun

dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada Lain-lain PAD yang Sah yang mencapai sebesar 35,98%. Disusul dengan retribusi daerah yang tumbuh rata-rata sebesar 16,28%, pajak daerah sebesar 23,31% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 16,28%.

Sedangkan kontribusi masing-masing komponen



Gambar 3.2

Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen
Pendapatan Asli Daerah

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 37,21%. Dimana Dana Alokasi Khusus tumbuh rata-rata sebesar 58,53% tiap tahunnya; Dana Alokasi Umum rata-rata 3,82% serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak tumbuh rata-rata sebesar minus (-0,78%).

Sedangkan kontribusi masing-masing komponen Dana Perimbangan sebagaimana gambar 3.3 di samping ini.



Gambar 3.3

Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen
Dana Perimbangan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata 23,31% tiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena melonjaknya pendapatan dari Dana Hibah yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.472%. Sedangkan kontribusi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.4

Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Belanja Daerah

Kinerja APBD yang ditunjukkan oleh belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana halnya pendapatan daerah, belanja daerah pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belanja Daerah tumbuh rata-rata sekitar 9,66% per tahun, dengan rincian belanja tidak

langsung tumbuh sebesar 8,11% dan belanja langsung tumbuh sebesar 13,41%.

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga. Peningkatan belanja tidak langsung yang berjalan konstan terjadi pada belanja pegawai yang tumbuh rata-rata 2,51% per tahun, sedangkan Belanja Tidak Terduga tumbuh cukup signifikan dengan rata-rata 215,38% per tahun, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik tumbuh rata-rata 90,95% per tahun, serta disusul dengan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa denganrealisasi rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 63,43%.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pada belanja langsung peningkatan realisasi rata-rata pertumbuhan yang signifikan terjadi pada pos belanja barang dan jasa yang naik rata-rata 27,64%kemudian realisasi belanja modal rata-rata naik sebesar 3,27% dan belanja pegawai denganrealisasi rata-rata pertumbuhannya naik tiap tahunnya sebesar 7,0%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Kuningan cenderung meningkat tiap tahunnya diluar Pembiayaan Daerah. Sedangkan proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsungnya rata-rata 64,42% berbanding 35,58%. Dengan demikian maka belanja tidak langsung masih mengambil porsi yang cukup besar.Hal tersebut terjadi karena masih besarnya belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

Realisasi rata-rata pertumbuhan belanja daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
2	BELANJA DAERAH	1,804,797,895,347	2,353,037,105,144	2,500,049,473,524	2,629,565,733,050	2,508,505,986,044	9.66%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,201,528,093,511	1,451,480,307,124	1,620,546,319,736	1,607,067,746,797	1,607,923,705,493	8.11%
2.1.1	Belanja Pegawai	1,131,236,823,005	1,208,833,465,541	1,238,167,487,961	1,122,732,992,436	1,141,047,682,112	2.51%
2.1.4	Belanja Hibah	14,429,879,700	9,126,361,350	14,613,000,000	51,872,290,332	35,009,514,280	38.29%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,955,500,000	3,427,250,000	4,294,000,000	3,574,500,000	10,816,000,000	46.38%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	2,070,936,435	1,597,576,833	2,548,389,575	3,991,616,229	11,717,482,326	63.43%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Parpol	46,967,910,000	227,494,215,400	359,681,419,200	423,677,407,800	396,891,957,500	90.95%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	867,044,371	1,001,438,000	1,242,023,000	1,218,940,000	12,441,069,275	215.38%
2.2	BELANJA LANGSUNG	603,269,801,836	901,556,798,020	879,503,153,788	1,022,497,986,253	900,582,280,551	13.41%
2.2.1	Belanja Pegawai	91,917,955,086	62,764,475,019	77,226,534,109	87,317,944,192	89,687,338,831	7.00%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295,741,156,253	445,281,620,699	473,719,157,199	607,302,211,434	589,232,872,759	27.64%
2.2.3	Belanja Modal	215,610,690,497	393,510,702,302	328,557,462,480	327,877,830,627	221,662,068,961	3.27%

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2017-2018

No.	Uraian	2017	2018
A	Pendapatan Umum Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah	384,398,431,333	303,218,052,848
2	Dana Bagi Hasil	74,480,198,732	65,003,429,164
3	Dana Alokasi Umum	1,197,194,996,000	1,197,194,996,000
	Jumlah A	1,656,073,626,065	1,565,416,478,012
B	Belanja Pegawai		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	781,239,526,448	778,091,301,447
2	Tambahan Penghasilan PNS	327,172,185,000	388,517,992,713
	Jumlah B	1,108,411,711,448	1,166,609,294,160
	Kemampuan Keuangan Daerah	547,661,914,617	398,807,183,852

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.547,661,914,617,- nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang. Sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp.398,807,183,852,- yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Kuningan terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan rata rata sebesar (-4,44%). Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,25%, dengan rincian masing-masing komponen; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan rata-rata 12,91%, Pencairan Dana Cadangan tidak ada kenaikan.

Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 99,26%. Dengan rata-rata pertumbuhan paling besar yaitu pada komponen Pembayaran Pokok Utang sebesar 274,58%. Selanjutnya Penyertaan Modal/Investasi Daerah sebesar 64,02%, kemudian Pembentukan Dana Cadangan sebesar 20,0%.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah disajikan pada Tabel 3.4 yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan disajikan di bawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	62,693,138,780	143,735,363,187	130,611,059,655	60,265,990,365	13,258,843,543	-4.44%
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68,923,620,632	155,235,363,187	163,699,708,123	60,265,990,365	49,247,699,580	8.25%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	68,787,581,332	155,235,363,187	163,699,708,123	60,265,990,365	49,247,699,580	12.91%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-		
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	136,039,300	-	-	-		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,230,481,852	11,500,000,000	33,088,648,468	8,784,857,679	35,988,856,037	99.37%
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	10,000,000,000	-		20.00%
6.2.2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	4,500,000,000	11,500,000,000	18,839,443,983	7,000,000,000	10,449,081,000	64.02%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1,730,481,852	-	4,249,204,485	1,784,857,679	25,539,775,037	274.58%

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Selama periode tahun 2014-2018, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan mencapai -6,96% (*negatif sebilan koma sembilan puluh lima persen*) yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Kuningan menurun sebesar 6,96% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Penurunan jumlah aset tersebut dikarenakan cukup besarnya akumulasi penyusutan. Demikian juga Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Kuningan selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,44%.

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan selama kurun waktu 2014-2018 dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	126,854,082,068	144,854,268,546	38,668,338,158	28,951,454,850	21,460,733,127	-4.93%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	51,834,167	524,451,616	522,678,788	447,547,285	220,654,980	153.50%
Kas Di Bendahara Penerimaan	14,583,190	289,443,264	94,575,712	76,172,494	11,151,078	324.50%
Kas Di BLUD	14,558,992,145	3,468,178,326	5,239,352,499	216,296,475	2,493,879,452	1415.55%
Kas Di Bendahara Kapitasi JKN Puskesmas	13,889,690,426	14,671,405,144	15,924,258,380	9,367,401,360	10,269,498,091	16.52%
Kas Di Bendahara BOS		110,434,039	215,766,940	35,118,188	22,631,202	15.22%
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pajak	7,986,177,156	10,768,485,200	13,125,411,195	14,821,333,644	14,517,895,192	10.59%
Piutang Retribusi	44,846,478	58,776,078	60,261,962	75,187,108	72,783,815	23.11%
Belanja Di Bayar Dimuka	166,112,920	205,376,565	240,092,221			
Bagian lancar Pinjaman kpd Perusahaan Daerah						
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	45,784,250	843,750				-28.03%
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan						-20.00%
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	254,540,825	251,690,825	240,780,825	250,945,318	221,647,343	2.03%
Piutang Lainnya	3,672,088,134	16,836,714,128	38,792,156,322	30,769,767,571	40,624,488,364	90.48%
Penyisihan Piutang	-	(953,494,907)	(2,727,712,250)	(2,106,441,712)	(11,502,916,703)	101.88%
Persediaan	15,327,903,953	16,749,097,860	22,312,901,465	27,323,779,215	27,637,787,020	22.86%
JUMLAH ASET LANCAR	182,866,635,712	207,835,670,434	132,708,862,217	110,228,561,796	106,050,232,960.59	9.38%

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya				202,042,068	202,042,068	0.00%
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih				(202,042,068)	(202,042,068)	-20.00%
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN				0	0	-20.00%
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30,103,086,340	39,907,339,299	59,468,672,841	68,905,583,140	83,525,223,307	26.35%
Investasi Permanen lainnya						
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	30,103,086,340	39,907,339,299	59,468,672,841	68,905,583,140	83,525,223,307	26.35%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	30,103,086,340	39,907,339,299	59,468,672,841	68,905,583,140	83,525,223,307	26.19%
ASET TETAP						
Tanah	622,766,140,903	639,857,721,867	657,621,564,536	644,679,933,085	656,977,788,005	-5.09%
Peralatan dan Mesin	241,892,515,241	298,885,530,457	348,075,171,527	410,980,532,749	448,148,974,820	16.72%
Gedung dan Bangunan	934,853,763,760	1,013,670,755,311	1,113,852,478,910	1,138,843,017,591	1,215,243,281,069	6.44%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,315,834,205,605	1,540,831,962,506	1,710,238,307,017	1,830,670,944,427	1,892,512,340,668	8.76%
Aset tetap Lainnya	36,508,154,717	34,709,883,940	42,229,394,649	52,919,484,410	64,642,934,214	14.03%
Konstruksi Dalam Perjalanan	7,060,600,000	12,319,080,000	17,238,433,000	19,666,353,000	19,666,353,000	25.70%
Akumulasi Penyusutan	-	(1,036,912,677,223)	(1,961,285,042,261)	(2,107,151,795,739)	(2,192,513,814,398)	0.13%
JUMLAH ASET TETAP	3,158,915,380,226	2,503,362,256,858	1,927,970,307,378	1,990,608,469,523	2,104,677,857,380	-7.75%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan			10,000,000,000	10,000,000,000		0.00%
JUMLAH DANA CADANGAN			10,000,000,000	10,000,000,000		0.00%

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tuntutan Ganti Rugi						
Aset Tak Berwujud	2,571,655,500	2,729,395,945	5,313,770,367	5,745,850,367	7,230,234,637	46.96%
Aset lain-lain	27,339,044,889	39,702,707,651	39,816,469,737	16,964,965,811	8,985,041,381	437.17%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				(14,427,757,412)	(12,785,447,780)	-22.28%
JUMLAH ASET LAINNYA	29,910,700,389	42,432,103,596	45,130,240,104	8,283,058,766	3,429,828,238	473.50%
JUMLAH ASET	3,401,795,802,667	2,793,537,370,187	2,175,278,082,540	2,188,025,673,225	2,297,683,141,886	-6.96%
Kewajiban						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88,532,712	108,038,773	396,880,112	446,291,072	54,851,629	57.10%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						0.00%
Pendapatan Diterima Dimuka				827,048,353		0.00%
Utang Belanja		2,335,268,357	450,066,576	677,373,473	8,119,312,143	196.34%
Utang Jangka Pendek lainnya	67,341,003,398	82,811,192,998	101,983,468,465	105,904,616,262	626,584,226	12.46%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	67,429,536,110	85,254,500,128	102,830,415,153	107,855,329,160	85,747,942,580	9.65%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan						
Utang Jangka panjang lainnya						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
JUMLAH KEWAJIBAN	67,429,536,110	85,254,500,128	102,830,415,153	107,855,329,160	94,548,690,578	10.44%
EKUITAS	3,334,366,266,557	2,708,282,870,059	2,072,447,667,387	2,080,170,344,063	2,203,134,451,307	-7.32%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,401,795,802,667	2,793,537,370,187	2,175,278,082,540	2,188,025,673,223	2,297,683,141,885	-6.69%

Untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain berupa *rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang*.

Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar (*current ratio*) Kabupaten Kuningan selama kurun waktu tahun 2014-2018 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan rasio cepat (*quick ratio*) Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai nilai lebih dari satu. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Kuningan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Lancar (current ratio)	2.71	2.44	1.29	1.02	1.12
2	Rasio Cepat (quick ratio)	2.71	2.44	1.29	1.02	1.12
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0.02	0.03	0.05	0.05	0.04
4	Rasio Total Hutang terhadap Modal	0.02	0.03	0.05	0.05	0.04

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,34%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Kabupaten Kuningan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

a. Kebijakan Pendapatan

Pengelolaankeuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasipendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalammemanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasisumber pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan konstribusi pendapatan daerah;
- 3) Optimalisasipengelolaan aset daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- 5) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsidalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah(target), sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut;

- 1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
- 3) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 4) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 5) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; dan
- 6) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.

b. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- 1) Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
- 2) Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- 4) Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Transper Dana Cadangan;

- 3) Penerimaan Pinjaman Daerah; maupun
- 4) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Melalui kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa; adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan; peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum, serta mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal / investasi daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui kinerja suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin besar realisasi belanja, maka akan semakin bagus kinerja suatu daerah.

Selain itu analisis proporsi realisasi terhadap anggaran digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Realisasi rata-rata penyerapan belanja daerah kurun waktu 2014-2018 sebesar 94,81%. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung rata-rata penyerapannya sebesar 95,46% dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 93,66%. Penyerapan anggaran paling tinggi yaitu pada Belanja

Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa dengan rata-rata sebesar 106,76%, kemudian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pememerintah Desa/Partai politik yang mencapai rata-rata sebesar 99,87% dan sedangkan yang terkecil rata-rata penyerapannya terjadi pada Belanja Tidak Terduga yang hanya mencapai rata-rata sebesar 47,71%.

Penyerapan pada Belanja Langsung rata-rata mencapai 93,66%, yaitu Belanja Pegawai rata-rata 98,06%, Belanja Barang dan Jasa rata-rata sebesar 93,05, dan Belanja Modal rata-rata sebesar 93,41%.

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja ditampilkan pada Tabel 3.7 di bawah. Sedangkan gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kuningan ditampilkan pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

	URAIAN	2014			2015			2016		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	1,929,431,137,502	1,804,797,895,347	93.54%	2,570,692,479,702	2,353,037,105,144	91.53%	2,629,794,855,500	2,500,049,473,524	95.07%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,269,235,480,857	1,201,528,093,511	94.67%	1,597,102,664,341	1,451,480,307,124	90.88%	1,686,811,909,775	1,620,546,319,736	96.07%
1	Belanja Pegawai	1,186,713,748,364	1,131,236,823,005	95.33%	1,342,071,892,053	1,208,833,465,541	90.07%	1,303,641,005,529	1,238,167,487,961	94.98%
2	Belanja Hibah	14,474,000,000	14,429,879,700	99.70%	9,380,000,000	9,126,361,350	97.30%	14,623,000,000	14,613,000,000	99.93%
3	Belanja Bantuan Sosial	6,305,000,000	5,955,500,000	94.46%	5,091,000,000	3,427,250,000	67.32%	4,396,000,000	4,294,000,000	97.68%
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	2,100,000,000	2,070,936,435	98.62%	1,600,150,000	1,597,576,833	99.84%	2,550,274,700	2,548,389,575	99.93%
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Parpol	47,073,746,000	46,967,910,000	99.78%	227,818,169,400	227,494,215,400	99.86%	359,929,627,200	359,681,419,200	99.93%
6	Belanja Tidak Terduga	12,568,986,493	867,044,371	6.90%	11,141,452,888	1,001,438,000	8.99%	1,672,002,346	1,242,023,000	74.28%
B	BELANJA LANGSUNG	660,195,656,645	603,269,801,836	91.38%	973,589,815,361	901,556,798,020	92.60%	942,982,945,725	879,503,153,788	93.27%
1	Belanja Pegawai	89,566,079,841	91,917,955,086	102.63%	65,085,747,750	62,764,475,019	96.43%	79,344,632,874	77,226,534,109	97.33%
2	Belanja Barang dan Jasa	327,619,406,210	295,741,156,253	90.27%	486,011,569,840	445,281,620,699	91.62%	504,633,421,508	473,719,157,199	93.87%
3	Belanja Modal	243,010,170,594	215,610,690,497	88.72%	422,492,497,771	393,510,702,302	93.14%	359,004,891,343	328,557,462,480	91.52%

No.	URAIAN	2017			2018			Rata-rata pertumbuhan	Rata-rata Penyerapan
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
	BELANJA DAERAH	2,690,237,453,983	2,629,565,733,050	97.74%	2,608,015,270,723	2,508,505,986,044	96.18%	9.66%	94.81%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,631,212,220,441	1,607,067,746,797	98.52%	1,655,236,976,111	1,607,923,705,493	97.14%	8.11%	95.46%
1	Belanja Pegawai	1,144,887,482,059	1,122,732,992,436	98.06%	1,188,183,713,787	1,141,047,682,112	96.03%	2.51%	94.89%
2	Belanja Hibah	52,416,200,000	51,872,290,332	98.96%	35,949,400,000	35,009,514,280	97.39%	38.29%	98.65%
3	Belanja Bantuan Sosial	3,906,000,000	3,574,500,000	91.51%	11,066,000,000	10,816,000,000	97.74%	46.38%	89.74%
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	3,993,443,481	3,991,616,229	99.95%	8,651,000,000	11,717,482,326	135.45%	63.43%	106.76%
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Parpol	423,906,634,800	423,677,407,800	99.95%	397,623,010,400	396,891,957,500	99.82%	90.95%	99.87%
6	Belanja Tidak Terduga	2,102,460,101	1,218,940,000	57.98%	13,763,851,924	12,441,069,275	90.39%	215.38%	47.71%
B	BELANJA LANGSUNG	1,059,025,233,542	1,022,497,986,253	96.55%	952,778,294,612	900,582,280,551	94.52%	13.41%	93.66%
1	Belanja Pegawai	89,463,985,250	87,317,944,192	97.57%	93,136,621,984	89,687,338,831	96.30%	7.00%	98.06%
2	Belanja Barang dan Jasa	634,172,423,109	607,332,301,434	95.77%	628,543,042,725	589,232,872,759	93.75%	27.64%	93.05%
3	Belanja Modal	335,388,825,183	327,877,830,627	97.76%	231,098,629,903	221,662,068,961	95.92%	3.27%	93.41%

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	909,246,214,240	1,208,833,465,541	1,238,137,487,961	1,122,732,992,436	1,141,047,682,112
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	634,357,823,889	841,169,714,815	868,438,034,809	781,239,526,448	769,225,556,778
2	Belanja Tambahan Penghasilan	266,614,157,866	358,840,934,057	360,447,851,121	327,172,185,000	352,325,611,720
3	Biaya Pemungutan Pajak					
4	Insentif Pemungutan Pajak	2,298,397,913	2,534,640,862	3,104,435,267	3,392,607,482	3,457,231,068
5	Insentif Pemungutan Retribusi	1,562,910,581	1,908,175,807	1,977,166,764	2,210,553,506	2,509,632,546
6	Belanja Penerimaan lainnya DPRD	4,412,923,992	4,380,000,000	4,170,000,000	8,718,120,000	13,529,650,000
B	Belanja langsung	82,318,517,185	98,730,315,089	133,873,342,472	150,957,501,147	150,703,036,184
1	Belanja Honorarium PNS	13,417,918,301	6,540,805,000	24,942,842,000	31,029,523,250	30,971,620,625
2	Belanja Honorarium Non PNS	18,282,942,667	22,002,844,750	31,369,198,000	31,819,729,212	36,549,724,000
3	Belanja Uang Lembur	4,832,096,959	6,673,365,000	7,660,830,000	8,179,165,000	4,297,230,000
4	Belanja Pegawai BLUD	1,407,646,644	1,878,700,000	1,821,557,766	2,839,591,568	3,575,120,164
	Belanja pegawai Non BLUD	7,663,853,950	10,890,352,719	11,424,356,343	13,412,335,162	14,231,644,042
5	Belanja Pakaian dinas dan Atribunya	411,592,586	846,729,600	409,521,000	663,742,400	438,595,000
6	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1,736,920,713	2,362,532,160	2,791,801,500	2,947,821,500	2,964,440,490
7	Belanja Perjalanan Dinas	18,645,144,142	23,823,276,338	30,944,273,377	32,107,693,598	33,043,783,556
8	Belanja pengadaan alat angkut darat bermotor	3,226,885,874	7,214,667,000	3,526,587,100	4,282,356,500	4,060,930,880
9	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	3,646,710,311	4,372,176,815	4,908,741,575	7,696,653,684	4,621,264,800
10	Belanja modal pengadaan komputer	4,560,445,852	5,613,380,907	8,236,434,481	7,396,193,802	6,902,744,427
11	Belanja modal pengadaan Mebeulair	2,189,672,557	3,108,030,800	2,744,594,290	4,358,238,471	3,330,931,200
12	Belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek PNS	2,296,686,629	3,403,454,000	3,092,605,040	4,224,457,000	5,715,007,000

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengambil cenderung terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 54,75%, tahun 2015 naik menjadi 55,30%, tahun 2016 turun menjadi 54,16% dan tahun 2017 turun menjadi sebesar 48,28%. Kemudian naik kembali pada Tahun 2018 sebesar 49,12%.

Namun demikian, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur masih mengambil porsi yang cukup besar dibandingkan dengan belanja pembangunannya, yaitu rata-rata tiap tahunnya mencapai 52,32%. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah kedepan difokuskan untuk meningkatkan belanja pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat serta diupayakan proporsinya untuk terus meningkat.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	
1	2014	991,564,731,425	1,811,028,377,199	54.75%
2	2015	1,307,563,780,630	2,364,537,105,144	55.30%
3	2016	1,372,010,830,433	2,533,138,121,992	54.16%
4	2017	1,273,690,493,583	2,638,350,230,729	48.28%
5	2018	1,291,750,718,296	2,629,565,733,050	49.12%

c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus

dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak langsung	912,251,186,875	1,210,431,042,374	1,241,170,944,161	1,127,658,644,865	1,150,623,671,367	7.17%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	634,357,823,889	841,169,714,815	868,438,034,809	781,239,526,448	769,225,556,778	6.39%
2	Belanja Tambahan Penghasilan	266,614,157,866	358,840,934,057	360,447,851,121	327,172,185,000	352,325,611,720	8.24%
3	Insentif Pemungutan Pajak	2,298,397,913	2,534,640,862	3,104,435,267	3,392,607,482	3,457,231,068	10.57%
4	Insentif Pemungutan Retribusi	1,562,910,581	1,908,175,807	1,977,166,764	2,210,553,506	2,509,632,546	11.99%
5	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	4,412,923,992	4,380,000,000	4,170,000,000	8,718,120,000	13,529,650,000	33.52%
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2,070,936,435	1,142,500,000	2,099,420,000	3,991,616,229	8,641,953,055	48.02%
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	934,036,200	455,076,833	934,036,200	934,036,200	934,036,200	0.00%
B	Pengeluaran Pembiayaan	4,500,000,000	11,500,000,000	18,839,443,983	7,000,000,000	10,449,081,000	64.02%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	4,500,000,000	11,500,000,000	18,839,443,983	7,000,000,000	10,449,081,000	64.02%
	TOTAL A+B	916,751,186,875	1,221,931,042,374	1,260,010,388,144	1,134,658,644,865	1,161,072,752,367	7.36%

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan periode tahun 2014-2018 pada tabel di bawah terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten pada tahun 2014 mencapai surplus Rp.86,27 miliar, kemudian menjadi surplus sebesar Rp.8,46 miliar pada tahun 2015 dan defisit Rp.103,64 miliar pada tahun 2016, kembali defisit menjadi 21,61 miliar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 turun menjadi 21,61 miliar, kemudian turun kembali menjadi 14,82 miliar pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa rencana anggaran APBD lebih besar dari target pengeluaran yang dicanangkan. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun tersebut, secara umum Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 defisit riil dapat ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 100%. Setelah menutup defisit riil, maka dapat diketahui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018. Rincian defisit riil anggaran tahun 2014-2018 Kabupaten Kuningan diuraikan pada tabel 3.11 di bawah.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kuningan periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.12. Dari data tersebut komposisi penutup defisit riil sangat mengandalkan SILPA, dimana periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan.

Sementara itu, analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,897,299,065,386	2,373,001,450,080	2,429,460,737,294	2,616,709,699,944	2,529,670,838,802
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,804,797,895,347	2,353,037,105,144	2,500,049,473,524	2,629,565,733,050	2,508,505,986,044
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,230,481,852	11,500,000,000	33,088,648,468	8,784,857,679	35,988,856,037
A	DEFISIT RIIL	86,270,688,187	8,464,344,936	(103,647,384,698)	(21,618,290,785)	(14,824,003,279)

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
DITUTUP OLEH REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN :						
1	SiLPA	68,787,581,332	155,235,363,187	163,699,708,123	60,265,990,365	49,247,699,580
2	Penerimaan kembali Investasi Bergulir				-	
B.	TOTAL REALISASI PENERIMAAN	68,787,581,332	155,235,363,187	163,699,708,123	60,265,990,365	49,247,699,580

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	2014	% dariSi LPA (%)	2015	% dariSiL PA (%)	2016	% dariSiL PA (%)	2017	% dariSiL PA (%)	2018	% dariSi LPA (%)
<i>Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenanaan</i>	68,787,581,332		155,235,363,187		163,699,708,123		60,265,990,365		49,247,699,580	
Beseumber dari :										
Pelampuaan pendapatan			86,833,901,562	55.94 %			-			
Penghematan Belanja	68,787,581,332	100%	25,434,982,435	16.38 %	163,699,708,123	100%	60,265,990,365	100%	49,247,699,580	100%
Pelampauan Penerima Pembiayaan										
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan			42,966,479,190	27.68 %						
Penghematan Pembiayaan Netto										

3.3 Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kuningan perlu dilakukan analisis terhadap kerangka pendanaan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kuningan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 4,98%, sedangkan Belanja Daerah rata-rata tumbuh sebesar 5.60% per tahun.

Data Realisasi dan proyeksi APBD 2019 dan 2020 disajikan pada tabel 3.14. Data proyeksi APBD tahun 2021-2023 disajikan pada tabel 3.15

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 dan 2020

(Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

URAIAN	Rata-rata Pertumbuhan (%)	APBD 2019	APBD 2020
PENDAPATAN DAERAH	9,71%	2.815.766.099.762	2.867.514.703.620
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30,59%	336.090.666.513	330.335.349.311
Pajak daerah	23,31%	88.695.000.000	80.865.500.000
Retribusi Daerah	15,35%	51.825.297.442	59.239.831.607
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,28%	4.663.606.740	6.853.805.486
Lain-lain PAD Yang Sah	35,98%	190.906.762.331	183.376.212.218
DANA PERIMBANGAN	37,21%	1.779.353.986.450	1.686.010.795.205
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-0,78%	74.205.522.450	101.267.356.205
Dana Alokasi Umum	3,82%	1.239.431.047.000	1.136.000.689.000
Dana Alokasi Khusus	58,53%	465.717.417.000	448.742.750.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23,31%	700.321.446.799	851.168.559.104
Pendapatan Hibah	1472,36%	135.433.216.000	134.107.818.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22,63%	115.763.619.599	142.427.090.820
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,74%	329.482.000.000	350.969.050.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi	19,57%	119.642.611.200	223.664.600.284
BELANJA DAERAH	9,66%	2.767.932.626.300	2.919.657.903.124
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,11%	1.811.312.165.045	1.778.409.948.509
Belanja Pegawai	2,51%	1.276.258.453.156	1.175.767.820.316
Belanja Hibah	38,29%	44.838.000.000	52.425.500.000
Belanja Bantuan Sosial	46,38%	23.946.000.000	39.062.702.694
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	63,43%	14.052.029.744	14.791.250.145
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Partai Politik	90,95%	439.717.682.145	443.562.459.521
Belanja Tidak Terduga	215,38%	12.500.000.000	52.800.215.833
BELANJA LANGSUNG	13,41%	956.620.461.255	1.141.247.954.615
Belanja Pegawai	7,00%	21.638.950.844	49.013.197.144
Belanja Barang dan Jasa	27,64%	653.389.070.267	688.813.306.381
Belanja Modal	3,27%	281.592.440.144	403.421.451.090
PEMBIAYAAN	-4,44%	-47.833.473.462	52.143.199.504
Penerimaan Pembiayaan	8,25%	35.138.503.958	55.143.199.504
Pengeluaran Pembiayaan	99,26%	82.971.977.420	3.000.000.000

Tabel 3.15
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun Anggaran 2021-2023

(Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

URAIAN	RENCANA 2021	RENCANA 2022	RENCANA 2023
PENDAPATAN DAERAH	2.959.650.573.112	3.075.524.554.816	3.219.449.254.054
1. Pendapatan Asli Daerah	341.031.412.197	356.526.300.000	369.670.682.247
a Pajak Daerah	89.225.520.000	98.776.300.000	104.277.250.000
b Retribusi Daerah	69.772.337.411	63.995.600.000	66.221.979.000
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.702.878.965	7.300.000.000	7.810.000.000
d Lain-lain PAD Yang Sah	177.330.675.821	186.454.400.000	191.361.453.247
2. Pendapatan Transfer	2.477.002.847.898	2.568.301.126.149	2.686.646.586.707
a Transfer Pemerintah Pusat	2.076.696.811.052	2.108.479.787.461	2.154.934.181.085
- Dana Perimbangan	1.726.415.313.602	1.738.889.845.087	1.760.756.540.440
- Dana Insentif Daerah	40.000.000.000	50.000.000.000	65.000.000.000
- Dana Desa	310.281.497.450	319.589.942.374	329.177.640.645
b Transfer Antar-Daerah	400.306.036.846	459.821.338.688	531.712.405.622
- Pendapatan Bagi Hasil	150.306.036.846	159.821.338.688	171.712.405.622
- Bantuan Keuangan	250.000.000.000	300.000.000.000	360.000.000.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	141.616.313.017	150.697.128.667	163.131.985.100
a. Hibah	141.616.313.017	150.697.128.667	163.131.985.100
b. Dana Darurat	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.966.150.573.112	3.082.024.554.816	3.285.949.254.054
1. Belanja Operasi	1.986.719.610.008	2.035.378.044.159	2.127.558.347.703
a. Belanja Pegawai	1.246.972.509.623	1.271.911.959.815	1.297.350.199.012
b. Belanja Barang dan Jasa	663.418.553.052	683.321.109.644	696.987.531.836
e. Belanja Hibah	46.753.735.292	49.091.422.057	101.545.993.159
f. Belanja Bantuan Sosial	29.574.812.041	31.053.552.643	31.674.623.696
2. Belanja Modal	500.044.387.831	542.910.072.369	629.847.110.269
a. Belanja Tanah	9.344.752.758	11.213.703.310	14.456.443.972
b. Belanja Peralatan dan Mesin	179.063.592.243	193.388.679.622	224.396.981.566
c. Belanja Bangunan dan Gedung	98.391.164.608	106.262.457.777	122.201.826.443
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.311.774.881	141.816.716.871	165.029.066.281
e. Belanja Aset Tetap lainnya	81.933.103.341	90.228.514.789	103.762.792.008
3. Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
4. Belanja Transfer	464.386.575.273	488.736.438.288	513.543.796.082
a. Belanja Bagi Hasil	18.421.447.296	25.790.026.214	32.079.527.525
b. Belanja Bantuan Keuangan	445.965.127.977	462.946.412.074	481.464.268.557
PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000	6.500.000.000	66.500.000.000
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.000.000.000	30.000.000.000	70.000.000.000
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.500.000.000	23.500.000.000	3.500.000.000

Dari proyeksi-proyeksi tersebut, baik proyeksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, maka perlu adanya kebijakan pendanaan yang akan dilaksanakan. Kebijakan pendanaan tersebut diuraikan, sebagai berikut;

- a. Kebijakan pendapatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain melalui:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
 - 2) Peningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsidalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
 - 3) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - 4) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
 - 5) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yangdiarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.
- b. Kebijakan belanja daerah dipriotitaskan untuk:
 - 1) Belanja Wajib dan mengikat, serta pemenuhan alokasi pelayanan dasar publik.
 - 2) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional.
 - 3) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah,dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah.

Kebijakan belanja tersebut akan difokuskan melalui kebijakan alokasi anggaran yang akan diuraikan pada perhitungan kerangka anggaran.

- c. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Realisasi 2019	Proyeksi 2020
1	Pendapatan	2,815,766,099,762	2,867,514,703,620
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	SiLPA	34,423,696,301	55,143,199,504
	Total Penerimaan	2,850,189,796,063	2,922,657,903,124
	Dikurangi		
4	Belanja Tidak Langsung	1,811,312,165,045	1,778,409,948,509
5	Pengeluaran Pembiayaan	82,971,977,420	3,000,000,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	955,905,653,598	1,141,247,954,615

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Pendapatan	2,959,650,573,112	3,075,524,554,816	3,219,449,254,054
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	40,000,000,000
3	SiLPA	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
	Total Penerimaan	2,989,650,573,112	3,105,524,554,816	3,289,449,254,054
	Dikurangi			
4	Belanja Wajib	1,560,971,230,382	1,595,839,457,032	1,627,756,246,172
5	Pengeluaran Pembiayaan	23,500,000,000	23,500,000,000	3,500,000,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1,405,179,342,730	1,486,185,097,784	1,658,193,007,882

3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

- 1) **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat ;
- 2) **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; serta
- 3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Data yang tersaji pada bab sebelumnya telah memberikan gambaran tentang masih banyaknya tantangan pembangunan Kabupaten Kuningan ke depannya baik pada isu sektoral maupun spasial. Di sisi lain, keterbatasan fiskal juga menjadi persoalan tersendiri.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuningan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk menilai capaian kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tren capaian pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan selama 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional.

Tetapi meskipun dinamika pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat, yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun capaiannya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukkan masih berstatus sedang. Artinya, masih perlu akselerasi untuk mencapai kategori tinggi dengan capaian minimal

70. Akselerasi dibutuhkan terutama untuk bidang Pendidikan dan Ekonomi, yang pencapaiannya masih di bawah rata-rata Jawa Barat.

b. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih terbilang tinggi walaupun selama kurun 6 tahun cenderung menurun, dari persentase penduduk miskin sebesar 13,34% pada tahun 2013 menurun menjadi 12,22% pada tahun 2018. Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 7,25% dan nasional sebesar 9,66%. Dibutuhkan upaya yang cukup keras untuk menurunkan angka kemiskinan ini.

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah Belum Optimal

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Tetapi, Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kuningan pada tahun 20-18 baru mencapai 7,51 tahun. Artinya masih banyak penduduk usia sekolah yang pendidikannya SLTP pun tidak tamat/putus sekolah. Sementara di sisi lain, target wajib belajar 12 tahun harus dipenuhi. Harus ditemukan persoalan utama mengapa para siswa ini tidak bisa melanjutkan sekolah, minimal tamat SLTP.

d. Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting

Dari data yang ada, Kabupaten Kuningan pada tahun 2013 balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 488 atau 0.02 persen dari total balita 21.298 orang balita. Pada tahun 2014 balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 309 atau 0.01 persen dari total balita 21.020 orang balita. Pada tahun 2015 balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 250 atau 0.01 persen dari total balita 21.054 orang balita. Sedangkan di tahun 2016 balita yang mengalami gizi

buruk sebanyak 236 atau 0.01 persen dari total balita 19.893 orang balita, untuk tahun 2017 balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 218 atau 0.01 persen dari total balita 19.525 orang balita. Jika dilihat dari presentasi mungkin balita gizi buruk ini kecil, tetapi dari sisi jumlah cukup banyak balita yang mengalami gizi buruk. Penderita gizi buruk ini pada akhirnya akan menyebabkan tingginya angka stunting (tumbuh kerdil) di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan termasuk daerah yang masuk kategori darurat penanganan stunting di Indonesia.

e. Tingginya angka pengangguran

Tingginya angka pengangguran serta banyaknya penduduk yang bermigrasi di Kabupaten Kuningan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kuningan bukan kota industri, dibutuhkan upaya peningkatan penyediaan program pelatihan yang sesuai bagi kebutuhan kerja setempat atau desa untuk mengurangi angka pengangguran ini.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

PermasalahanUtama:

- 1) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SMA/MA/SMK
- 2) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
- 3) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih di bawah angka RLS nasional (8,62data tahun 2018).

Akar permasalahan dari rendahnya APK dan APM dimaksud, antara lain:

- 1) Kuantitas, kualitas, dan sebaran guru belum maksimal;
- 2) Minat masyarakat terhadap pendidikan usia dini belum maksimal;
- 3) Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun;

- 4) Jaring pengaman bagi keberlanjutan pendidikan bagi penduduk miskin atau terancam miskin belum optimal;
- 5) Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan luar sekolah;
- 6) Kurangnya dukungan para pihak dan akses bagi peserta didik yang memiliki kompetensi baik bidang akademik maupun non akademik;
- 7) Belum adanya kebijakan mengintegrasikan pengembangan budaya lokal dengan sistem pendidikan di Kabupaten Kuningan;
- 8) Belum ada upaya *link and match* antara proses pendidikan kejuruan dengan potensi pengembangan wilayah.

b. Kesehatan

Permasalahan utama pada Bidang Kesehatan adalah belum optimalnya Indeks Kesehatan dan masih perlu ditingkatkan, Hasil identifikasi menunjukkan bahwa akar permasalahan dari belum optimalnya Indeks Kesehatan, antara lain:

- 1) Masih tingginya AKI dan AKB;
- 2) Jumlah kelahiran yang masih tinggi;
- 3) Jumlah kematian ibu dan bayi masih banyak;
- 4) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

c. Sosial

Permasalahan Utama:

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan, di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- 2) Data penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum sepenuhnya valid dan belum terintegrasi antar SKPD;
- 3) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial (aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain).

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah (1) kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, (2) belum optimalnya keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur terbangun, (3) Sebagian wilayah masuk dalam zona kerentanan bencana.

Akar masalahnya adalah :

- 1) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama Kuningan bagian selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi fisik jalan maupun bangunan infrastruktur lainnya;
- 2) Masih terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan bangunan infrastruktur sehingga belum sebanding dengan beban anggaran dengan infrastruktur yang rusak;
- 3) Relokasi bangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar dan berdampak terhadap sosial masyarakat;
- 4) Akses air minum dan sanitasi masih pada tataran akses dasar dan belum merata di seluruh wilayah.
- 5) Bangunan sarana prasarana pemerintah masih banyak yang mengalami kerusakan;
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang;
- 7) Pada kawasan rawan bencana masih banyak aktivitas social masyarakat seperti budidaya tanaman dan bangunan pemukiman.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Utama :

- 1) Masih terdapat kawasan kumuh terutama di perkotaan;
- 2) Masih terdapat rumah tidak layak huni di beberapa kecamatan dan desa;
- 3) Penanganan perumahan/pemukiman dampak bencana belum selesai;

- 4) Masih terdapatnya desa yang belum terpenuhi kebutuhan air bersih aman dan sehat sertasanitasi yang layak;
- 5) Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak.

f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan Utama :

- 1) Penegakan PERDA belum optimal;
- 2) Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
- 3) Belum optimalnya penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING).

4.1.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Permasalahan utama dalam perekonomian Kabupaten Kuningan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi pada periode 2015 – 2016. Tujuh belas kategori sektor ekonomi di Kabupaten Kuningan pada tahun ini tumbuh dengan kecepatan yang cenderung melambat, dalam hal ini apabila pada tahun 2015 pertumbuhan perekonomian adalah sebesar 6,38 persen dan pada tahun 2016 pertumbuhan perekonomian tumbuh sebesar 6,09 persen berarti terjadi pertumbuhan yang cenderung melambat dari perekonomian di dua tahun tersebut sebesar 0,29 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada kesempatan kerja dan peningkatan jumlah pengangguran.

Permasalahan:

- 1) Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam 3 tahun terakhir (2013 – 2015) yang mencapai angka 60,01% sehingga terjadi pelemahan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Kuningan;
- 2) Tingginya pengangguran karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki pencari kerja;
- 3) Angka pengangguran terbuka meningkat cukup tajam dari 6,15 pada tahun 2015 menjadi 7,20 pada tahun 2016;

- 4) Tingginya angka urbanisasi penduduk usia produktif, mengingat sulitnya mencari pekerjaan di daerahnya sendiri.

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa di Kabupaten Kuningan terbilang banyak jumlahnya mencapai 361 desa, dengan jumlah yang besar ini, turut berpengaruh pada sulitnya melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal bagi desa. Oleh karena itu, banyak desa yang ada saat ini masih dihadapkan pada persoalan:

- 1) Rendahnya kapasitas Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kewenangan desa;
- 2) Masih terdapat desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan aset dan potensi desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Belum seluruh desa memiliki BUMDesa, dan masih sedikit BUM Desa yang tata kelolanya baik;
- 5) Belum terintegrasinya pembangunan di tingkat kabupaten dengan desa.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama:

- 1) Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang berpengaruh pada posisi tawar perempuan;
- 2) Komposisi perempuan yang masih belum berimbang dalam lembaga pemerintahan;
- 3) Masih banyak program Perangkat Daerah yang belum mainstreaming gender;
- 4) Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

d. Lingkungan Hidup

Dalam urusan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa permasalahan daerah yang mendesak untuk diselesaikan, salah satunya terkait dengan aktivitas penambangan. Kabupaten Kuningan memiliki beberapa potensi sumberdayamineral/tambang yang hampir semuanya telah diusahakan/ditambang. Kegiatan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kuningan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan.

Permasalahan Utama:

- 1) Belum optimalnya reklamasi pasca penambangan oleh pihak penambang;
- 2) Kewenangan pengawasan terhadap penambang dan pasca penambangan masih kurang;
- 3) Kewenangan izin penambangan ada di pemerintah provinsi, sehingga Kabupaten kurang berperan optimal.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik;
- 5) Masih terjadi pencemaran air dan lingkungan;
- 6) Masih terjadi bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan/lahan.

e. Penanaman Modal

Permasalahan utama:

- 1) Masih kecilnya investasi yang masuk ke Kabupaten Kuningan sehingga berpengaruh pada serapan tenaga kerja;
- 2) Kenaikan investasi belum cukup untuk mendongkrak perekonomian masyarakat;
- 3) Belum tersedianya profil investasi khususnya di desa-desa (fokus pembangunan lima tahun kedepan berbasis desa).
- 4) Kurangnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

- 5) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dalam perizinan usaha dimana masih terjadi tumpang tindih regulasi perizinan antara sektoral dengan lembaga penyelenggara PTSP;
- 6) Waktu kepengurusan izin usaha masih relatif panjang dan persyaratan dan pelayanan jenis perizinan terlalu banyak.

f. Koperasi dan UKM

Permasalahan utama :

- 1) Keberadaan koperasi belum bisa menjawab tantangan kebutuhan ekonomi masyarakat;
- 2) Ketersediaan bahan baku tidak berasal dari produk lokal;
- 3) Masih belum tumbuhnya sentra UKM di Kabupaten Kuningan.

g. Kependudukan dan catatan sipil

Permasalahan utama :

- 1) Belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan;
- 2) Database dan informasi kependudukan belum seluruhnya lengkap;
- 3) Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kependudukan belum optimal.

h. Statistik dan Persandian

Permasalahan utama :

- 1) Terbatasnya kuantitas data statistik;
- 2) Minimnya anggaran dan terbatasnya pengelola statistik untuk pengolahan data statistik;
- 3) Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas;

- 4) Masih diperlukan peningkatankualitas sumber daya manusia berkaitan dengan disiplin keilmuan yang relevan dengan persandian dan keamanan informasi.

i. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama :

- 1) Terbatasnya tenaga profesional pembina olahraga;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana untuk meningkatkan kreativitas pemuda;
- 3) Belum lengkapnya sarana prasarana olahraga.

j. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama :

- 1) Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan baru mencapai 18,02 tahun (belum mencapai 21 tahun);
- 2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan bina keluarga, balita dan anak (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) belum optimal;
- 3) Peran institusi masyarakat sebagai jejaring dan mitra kerja program kependudukan, Kelaarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum optimal.

k. Komunikasi dan Informasi

Permasalahan utama :

- 1) Terbatasnya SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Sarana prasarana untuk pengembangan teknologi informasi belum memadai;
- 3) Belum seluruh desa terjangkau oleh sarana telekomunikasi.

l. Pertanian

Permasalahan utama :

- 1) Belum seluruh tanah milik pemerintah daerah memiliki sertifikat;
- 2) Belum tertibnya dokumenn pertanian

m. Kebudayaan

Permasalahan utama :

- 1) Terbatasnya SDM pengelola kebudayaan;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan budaya lokal.

n. Kearsipan

Permasalahan utama :

- 1) Belum tertibnya pengolahan kearsipan;
- 2) Terbatasnya tenaga arsiparis;
- 3) Tempat khusus penyimpanan arsip belum memadai.

o. Perpustakaan

Permasalahan utama :

- 1) Sarana prasarana perpustakaan umum belum sesuai dengann standar perpustakaan nasional;
- 2) Belum adanya tenaga fungsional pustakawan;
- 3) Minat baca masyarakat masih rendah.

p. Pangan

Permasalahan utama :

- 1) Persoalan akses, distribusi dan keragaman pangan masih rendah;
- 2) Belum meratanya keberadaan lumbung pangan masyarakat.

q. Perhubungan

Permasalahan utama :

- 1) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 2) Perlu dilaksanakan penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan disekitar jalan protokol ketika banyak pengunjung;
- 3) Aksesibilitas transportasi umum dalam kabupaten, terutama wilayah perdesaan, masih terbatas.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

a. Transmigrasi

Permasalahan utama :

- 1) Sarana prasarana transmigrasi lokal belum optimal;
- 2) Pemberdayaan masyarakat transmigran belum optimal

b. Perdagangan

Permasalahan utama :

- 1) Ketersediaan bahan baku tidak berasal dari produk lokal;
- 2) Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar;
- 3) Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 4) Kurangnya pembinaan dan pengembangan Pasar Daerah dan Pasar Desa;
- 5) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta peningkatan dan pengembangan ekspor.

c. Perindustrian

Permasalahan utama adalah:

- 1) Masih belum optimalnya pengembangan industri kreatif terutama di bidang pariwisata;

- 2) Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah di mana masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri;
- 6) Masih rendahnya penerapan teknologi industri oleh IKM dalam penerapan cara produksi yang baik;
- 7) Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam hal peningkatan teknologi produksi, peningkatan inovasi produk, tampilan kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar, pendaftaran merek, penerapan manajemen mutu produk dan manajemen usaha;
- 8) Masih belum tumbuhnya sentra sentra industri IKM di kabupaten kuningan.

d. Pertanian

Pertanian merupakan sumber penghidupan sebagian besar penduduk. Sebagai daerah agraris, idealnya pertanian bisa diandalkan sebagai sektor yang mampu mendorong kesejahteraan penduduk. Akan tetapi pertanian juga dihadapkan pada permasalahan:

- 1) Belum tersedianya sebaran komoditas unggulan per wilayah;
- 2) Belum tersedianya indikator untuk mengukur kesejahteraan petani;
- 3) Belum adanya insentif bagi para petani yang mengembangkan inovasi lokal;
- 4) Penguasaan lahan yang sempit oleh petani;
- 5) Kebijakan pertanian di tingkat nasional belum mampu mendukung produktifitas sektor pertanian;
- 6) Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses produksi;
- 7) Minimnya generasi penerus yang bergerak di isu pertanian.

e. Pariwisata

Permasalahan utama:

- 1) Belum terbentuknya branding pariwisata Kabupaten Kuningan;
- 2) PAD dari sektor pariwisata masih minim;
- 3) Sumber Daya Manusia bidang kepariwisataan masih kurang;
- 4) Belum terintegrasinya antara kebutuhan pariwisata daerah dengan sektor pendidikan kepariwisataan.

f. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama :

- 1) Tingkat produktifitas perikanan masih rendah;
- 2) Diversifikasi pengolahan produk perikanan masih rendah;
- 3) Tingkat konsumsi per kapita masih rendah.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

1. Pengurangan Pengangguran

Isu ini dipilih karena semakin tingginya angka pengangguran serta banyaknya penduduk yang bermigrasi sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada isu ini, yaitu:

- 1) Meningkatnya modal/(sarana prasarana) usaha kecil dan menengah;
- 2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja daerah;
- 3) Meningkatnya kesempatan berusaha;
- 4) Meningkatnya ekonomi produktif pedesaan;

- 5) Tertata dan terbangunnya destinasi wisata;
- 6) Meningkatnya pemakaian produk lokal dalam belanja daerah;
- 7) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah (swadaya, swakelola);
- 8) Meningkatnya kapasitas kelompok swadaya masyarakat;
- 9) Meningkatnya kerjasama antar desa;
- 10) Meningkatnya infrastruktur perdesaan;
- 11) Terbangunnya sarana prasarana penunjang ekonomi;
- 12) Optimalisasi potensi lahan;
- 13) Meningkatnya alokasi ruang untuk investasi;
- 14) Meningkatnya program padat karya infrastruktur.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan yang tinggi serta banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial, maka isu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk saat ini. Sasaran dari isu ini, yaitu:

- 1) Meningkatnya stimulan/bantuan modal awal wirausaha;
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan pedesaan;
- 3) Meningkatnya produktivitas pertanian;
- 4) Meningkatnya kemudahan akses Perbankan;
- 5) Meningkatnya jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin;
- 6) Terpetakannya kemiskinan dan penerapan jaring pengaman sosial;
- 7) Meningkatnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR);
- 8) Tertanganinya Kawasan Kumuh Perkotaan;
- 9) Berkurangnya jumlah RUTILAHU.

3. Peningkatan investasi daerah

Melalui investasi yang masuk ke daerah, diharapkan sektor industri akan berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja, dengan catatan harus tunduk pada kebijakan terkait konservasi. Beberapa sasaran yang diprioritaskan pada isu ini, yaitu:

- 1) Penetapan pusat pertumbuhan wilayah untuk ekonomi lokal;
- 2) Menguatnya jejaring kemitraan antar lembaga dan pelaku ekonomi;
- 3) Meningkatnya daya saing produk lokal;
- 4) Berkembangnya industri kreatif;
- 5) Berkembangnya kelembagaan jaminan pemasaran produk unggulan;
- 6) Kondusifnya iklim investasi daerah;
- 7) Terbangunnya infrastruktur ekonomi strategis.

4. Penerapan E-Government

Isu ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan ketepatan pengelolaan data dan informasi public.

Beberapa sasaran yang digunakan adalah:

- 1) Diterapkannya e-purchasing untuk Pelayanan sektor publik;
- 2) Meningkatnya penerapan IT (e-Planning, e-Budgeting, e-Sakip, e-Monev, e-procurement, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online,) pada SKPD sesuai Tupoksinya;
- 3) Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi publik;
- 4) Diterapkannya SPM di setiap sektor Pelayanan publik;
- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan;
- 6) Pengembangan kualitas SDM;
- 7) Terbangunnya Sistem Informasi Desa (SID).

5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Alam

Isu ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan yang sensitif pada bencana. Sasaran dari isu ini yaitu:

- 1) Ditetapkannya zona pemanfaatan ekonomi terbatas;
- 2) Peningkatan ketahanan ekonomi untuk wilayah rawan bencana;
- 3) Masyarakat Siaga Bencana;
- 4) Internalisasi pemahaman kebencanaan pada masyarakat;
- 5) Pembangunan infrastruktur berbasis bencana alam;
- 6) Pengendalian kerusakan kawasan berfungsi konservasi di luar kawasan hutan;
- 7) Pembangunan kawasan konservasi eks situ;
- 8) Pembangunan konservasi air;
- 9) Peringatan dini kebencanaan.

6. Pengembangan Pariwisata berbasis komunitas dan Desa serta Ekonomi Kreatif

Daerah dan desa memiliki kewenangan yang kuat dalam mengatur sektor wisata, oleh karenanya kewenangan ini harus dimanfaatkan dalam rangka menjadikan sektor sebagai sumber penghidupan bagi penduduk lokal. Beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Pengembangan wisata berbasis potensi lokal (Desa);
- 2) Berkembangnya kurikulum pariwisata pada pendidikan formal dan informal;
- 3) Berkembangnya Desa Wisata dan Wisata Desa;
- 4) Berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif;
- 5) Meningkatnya kualitas SDM pariwisata;
- 6) Roadmap pengembangan pariwisata

7. Peningkatan Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan dipilih karena mendesak untuk segera diselesaikan, mengingat menyangkut kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai, meliputi:

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan dan pertanian;
- 2) Pembangunan jaring pengaman pangan (food stocking);
- 3) Kerjasama dalam pengelolaan lahan;
- 4) Berkembangnya aktifitas on farm dan off farm;
- 5) Terkelolanya tata niaga komoditas pangan;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan lahan.

4.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, direncanakan dapat dicapai selama 15 Tahun sampai dengan 2030. Dimana tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) harus didukung capaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Target: Pengentasan kemiskinan tahun 2030, dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan akses layanan mendasar bagi masyarakat Dengan menurunnya angka kemiskinan;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan khususnya. Target: Mengakhiri kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi tahun 2030. Menjamin akses universal dengan kecukupan makanan bergizi sepanjang tahun. Khususnya menurunnya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada tahun 2019;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Target: tahun 2030 dipastikan masyarakat

- hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua, dengan cara mengurangi angka kematian ibu, epidemik AIDS, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Khususnya meningkatnya prosentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Target: menjamin kualitas pendidikan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Memastikan bahwa pada tahun 2030 semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa mencapai budaya membaca dan menghitung. Memastikan penghargaan keanekaragaman budaya dan kontribusi pelestarian budaya untuk pembangunan berkelanjutan. Khususnya Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Target: kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial secara nasional. Meningkatkan penggunaan pemberdayaan perempuan. Menurunnya pernikahan di bawah umur 17 tahun. Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD;
 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Target: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pada tahun 2030 mencapai akses universal khususnya meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak dan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri;
 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Target: menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Khususnya meningkatnya rasio elektrifikasi;

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Khususnya Meningkatnya prosentase tenaga kerja formal dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Target: membangun infrastruktur tangguh, melakukan promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan serta inovasi. Mendukung pengembangan penelitian dan inovasi. Meningkatkan akses informasi dan teknologi komunikasi, menyediakan akses universal dan terjangkau ke internet pada tahun 2020. Meningkatnya kondisi baik jalan;
10. Menjadikan kota dan permukiman aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target: membuat kota dan permukiman manusia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan, memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan penanganan sampah perkotaan;
11. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Target: memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pengemasan kembali.
12. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Target: mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran manusia dan kapasitas kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini;
13. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Target: Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat,

- 
- mengelola hutan secara lestari, memerangi penebangan hutan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Khususnya meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/ hutan;
14. Memperkuat masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, di semua tingkatan. Target: mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan merata di semua tingkatan. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 15. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Target: memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Mendorong dan mempromosikan kemitraan masyarakat publik swasta dan sipil, serta membangun strategi kemitraan.

4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan Dasar sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan umum masyarakat umum. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan, diantaranya :

1. Bidang Urusan Kesehatan

Terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;

- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif).

2. Bidang Urusan Sosial

Terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

3. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

Terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan, yaitu

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4. Bidang Urusan pendidikan

Terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Pendidikan anak usia dini;
- 2) Pendidikan dasar; dan
- 3) Pendidikan kesetaraan

5. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

6. Bidang Urusan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan, yaitu:

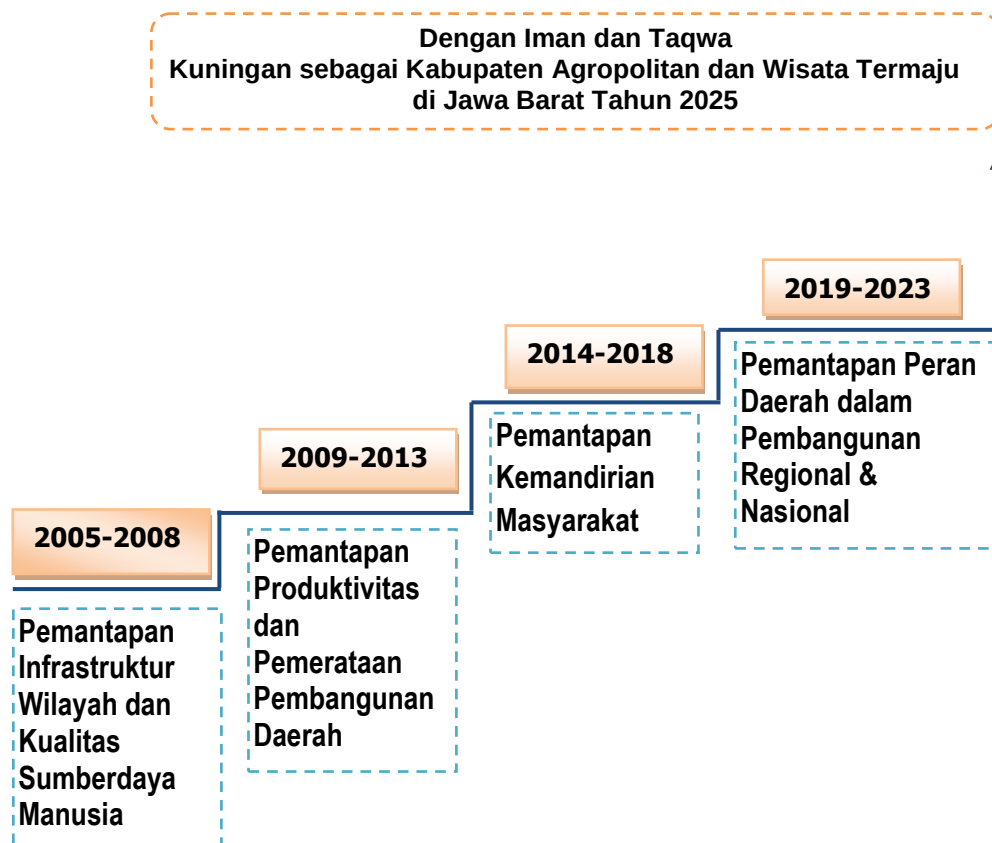
- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 yaitu: **“Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025”**. Visi dan tahapan RPJPD dapat dilihat dalam Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: **“Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”** atau

dalam makna bahasa sunda dapat diartikan “**Kama’uran Kanggo Sadaya Masyarakat, Hirup Kumbuh Nu Agamis Dina Wujud Pangwangunan Nu Pinunjul**”. Makna yang terkandung dalam kata MAJU dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- M (Ma’mur)** : Terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- A (Agamis)** : Dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia..
- JU (Pinunjul)** : Merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras, dan pantang menyerah.

Sedangkan pengertian **Berbasis Desa** yaitu Kuningan sebagai Kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata, sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa. Kesadaran membangun Kuningan dengan membangun desa merupakan warna pembangunan Kuningan Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan *Nu Sajati*;
2. Mewujudkan masyarakat Kuningan *nu Sajati* dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan;
3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia *Nu Sajati*;

4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat;
5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Upaya pencapaian visi-misi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan dengan menggelorakan semangat dan nilai-nilai SAJATI (SANTANA, BASAJAN, SANTIKA) yang juga diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

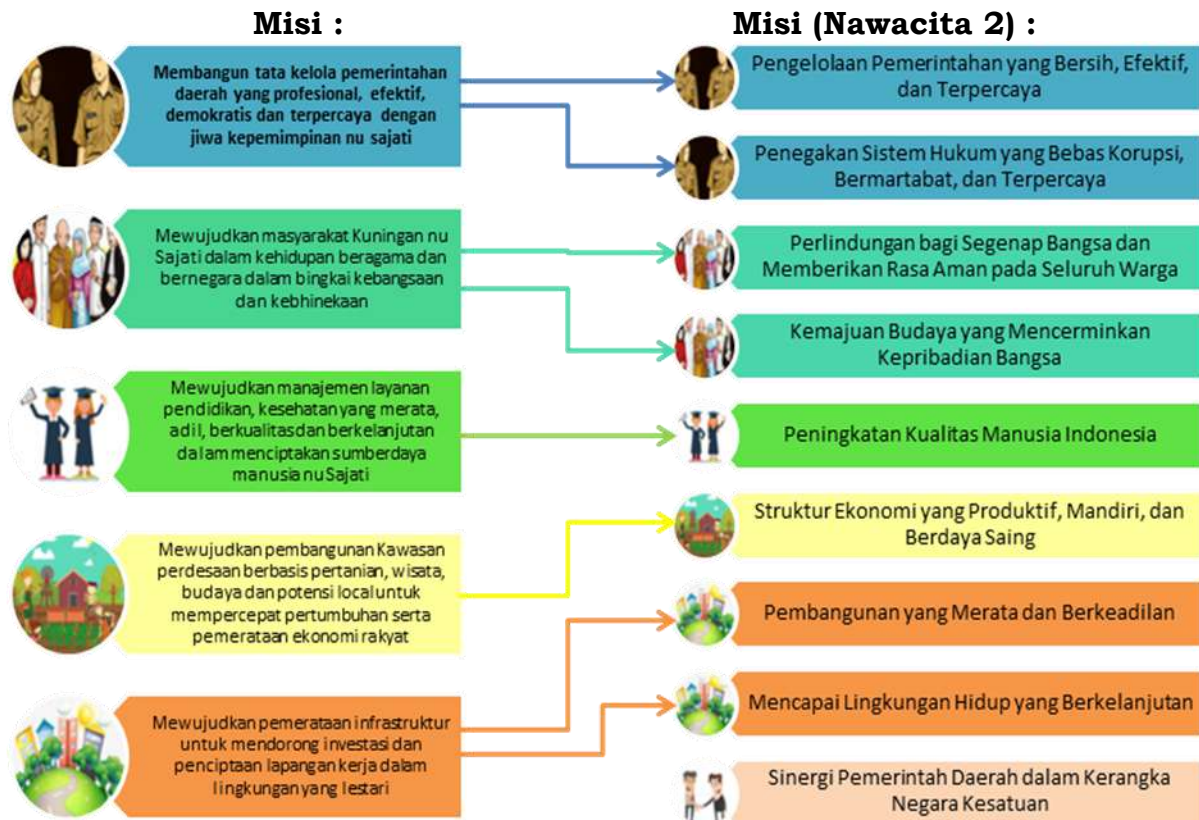


Gambar 5.2 Arti Semangat dan Nilai-nilai SAJATI (Santana, Basajan, Santika)

Jika ditelaah lebih dalam, visi misi Kabupaten Kuningan berkaitan erat dengan Misi Nasional (Nawacita 2) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar 5.3.

Visi :
**“Kuningan MAJU (Ma’mur,
Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa
Tahun 2023”**

Visi Nasional :
**“Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”**



Gambar 5.3 Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Visi Misi Nasional

Misi 1 - Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sajati, terkait dengan Nawacita nomor 1 dan 2, dimana Misi 1 ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dapat dipercaya dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Misi 2 - Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan, terkait dengan Nawacita nomor 3 dan 4, dimana Misi 2 ini bertujuan untuk membangun karakter masyarakat Kuningan yang toleran dan menjunjung nilai kearifan lokal yang selama ini tumbuh, dengan jaminan kondusivitas suasana tertib dan aman oleh pemerintah daerah.

Misi 3 - Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu Sajati, berkaitan dengan Nawacita nomor 5, yang pada dasarnya misi ini bertujuan untuk membangun kualitas masyarakat Kuningan dari sector pendidikan, kesehatan, gender, ekonomi, dan sebagainya.

Misi 4 – Mewujudkan pembangunan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi local untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat, berkaitan dengan Nawacita nomor 6, dimana tujuan akhir dari misi ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan basis masyarakat perdesaan.

Misi 5 – Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari, sejalan dengan Nawacita nomor 7 dan 8 , dimana tujuan akhir dari misi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang produktif serta berdaya dan berdaya saing tinggi.

Jika dilihat dari gambar hanya satu misi nasional yang tidak terkait langsung dengan misi daerah, karena misi tersebut, yaitu “Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan” merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sebagai objek dari misi tersebut pasti mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Misi di atas, akan ditetapkan Tujuan dan Sasaran untuk masing-masing Misi yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran setiap misi disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR			
							2019	2020	2021	2022	2023				
VISI : “KUNINGAN MAJU (MA'MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”															
Misi 1 :Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati.															
1.1.	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan;	Opini BPK	WTP	1.1.1.	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	a.	Nilai SAKIP	Level	B	BB-	BB	BB+	A-	A	A
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85,58			b.	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
						c.	Skor LPPD	Poin	3,4975	3,5035	3,511	3,521	3,531	3,541	3,541
				1.1.2.	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	a.	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
						b.	Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	KTP: 96,10 Akte kelahiran : 81,28	97,76 84	97,77 85	97,78 86	97,79 87	98 88	98 88
				1.1.3.	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	a.	Penerapan e-planning, e-data, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	10
						b.	Meningkatnya Indeks SPBE	Point	2.32	2.11	2.5	2.75	3	3.5	4
		Peningkatan Kinerja Pendapatan Asli Daerah	369,67 Milyar	1.1.4.	Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	a.	Nilai Target PAD	Milyar	344,43	336,09	311,53	341,03	356,52	369,67	369,67

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR		
								2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan <i>nu Sajati</i> dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.															
2.1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama.	Indeks Toleransi Beragama	69,9 – 70,2	2.1.1.	Terwujudnya masyarakat yang agamis	a.	Persentase lembaga/ organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	N/A	20%	5%	35%	20%	20%	20%
						b.	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	N/A	20%	5%	35%	20%	20%	20%
2.2.	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Indeks Rasa Aman	73,6 – 76	2.2.1.	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	a.	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	90	91	92	93	94	95	95
						b.	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	68,78	71,52	-	-	-	75,52	75,52
				2.2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	a.	Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan	buah	128	128	128	128	128	128	128
						b.	Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	Poin	N/A	0,45	0,46	0,47	0,48	0,50	0,50
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia <i>Nu Sajati</i>															
3.1.	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	Indeks Pendidikan	60,77	3.1.1.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	a.	EYS/Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07*	12,24-12,29	12,1	12,14	12,19	12,23	12,23
						b.	MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51*	7,54-7,71	7,41	7,46	7,52	7,6	7,6
						c.	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	67,06*	69,45	67,22	67,56	67,78	68,04	68,04
						d.	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,08*	51,38	49,40	50,24	50,47	50,61	50,61

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
						e.	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	110	238	162	200	200	200	1.000
						f.	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	37	9	70	75	75	71	300
						g.	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	10	20	20	20	20	20	100
						h.	Pemberian beasiswa (1.000 orang)	Orang	485	200	200	150	150	200	1.000
3.2.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	Indeks Kesehatan	82,67	3.2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	a.	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,35	73,28	73,37	73,45	73,53	73,53
						b.	Persentase Balita Stunting	Persen	29	27	20	15	5	2,5	2,5
						c.	Ketersediaan ambulance gratis	Unit	40	0	8	8	8	8	72
						d.	Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	N/A	284	287	284	284	284	1.423
						e.	Angka Kematian Ibu	Kasus	23	23	22	22	21	21	21
						f.	Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 kelahiran	4,06	4,05	4,05	4,04	4,03	4,02	4,02
3.3.	Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul	IPM	69,66	3.3.1.	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan	a.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,22	11,72	13,58	13,38	13,06	12,74	12,74
		Gini Ratio	<0,38	3.3.2.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,53	0,47	0,47	0,37	0,37
				3.3.3.	Meningkatnya PUG	a.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	87,32	87,82	88,32	88,82	88,82
			Persentase penduduk miskin	9,72	3.3.4.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	a.	Prestasi Olahraga tingkat regional (PORDA)	Peringkat	9	-	-	-	8	-

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
									2019	2020	2021	2022	2023	
					b.	Prestasi Olahraga tingkat regional (POPDA)	Peringkat	15	-	-	-	10	-	10
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat														
4.1.	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa	Sistem Perencanaan Ekonomi Pinunjul	4.1.1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi Tematik Desa Pinunjul	a.	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	N/A	1	1	1	1	1
						b.	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis system	Persen	N/A	10	30	30	20	100
		Pembangunan Desa Agro Pinunjul (Berbasis Komoditas)	42 desa/ Komoditas	4.1.2.	Terbangunnya sentra unggulan pertanian	a.	Sentra Unggulan Padi	Desa	N/A	0	0	1	0	1
						b.	Sentra Unggulan Jagung	Desa	N/A	0	0	0	1	1
						c.	Sentra Tanaman Kedelai	Desa	N/A	0	1	1	0	2
						d.	Sentra Unggulan Pertanian Organik	Desa	N/A	1	2	1	0	6
						e.	Sentra Unggulan Sapi Potong	Desa	N/A	0	1	2	1	6
						f.	Sentra Unggulan Sapi Perah	Desa	N/A	1	0	0	0	1
						g.	Sentra Domba	Desa	N/A	0	1	0	2	3
						h.	Sentra Unggulan Itik	Desa	N/A	0	0	0	1	1
						i.	Sentra Unggulan buah-buahan	Desa	N/A	0	2	1	2	7
						j.	Sentra Tanaman Perkebunan Kopi	Desa	N/A	0	1	1	1	3
						k.	Sentra Tanaman Cengkeh	Desa	N/A	0	0	0	1	2
						l.	Sentra tanaman tembakau	Desa	N/A	0	0	1	0	1
						m.	Sentra Tanaman Rempah dan Biofarmaka	Desa	N/A	0	0	1	1	3
						n.	Sentra unggulan Sayuran	Desa	N/A	2	1	1	1	6
		Pembangunan	25 Desa	4.1.3.	Terbangunnya sentra	a.	Desa wisata	Desa	N/A	-	7	7	7	25

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
		Desa Wisata dan Budaya Pinunjul	Wisata dan 1 Desa Budaya Pinunjul		unggulan wisata dan budaya	b.	Kampung Budaya	Desa	N/A	-	1	-	-	-	1
		Pembangunan Desa Pinunjul lainnya	33 Desa Pinunjul	4.1.4.	Terbangunnya sentra unggulan lokal lainnya	a.	Sentra Pengembangan ikan mas	Desa	8	8	8	8	8	64	8
						b.	Sentra Pengembangan ikan nila	Desa	8	8	8	8	8	64	8
						c.	Sentra Pengembangan ikan lele	Desa	9	9	9	9	9	72	9
						d.	Sentra Pengembangan ikan gurame	Desa	7	7	7	7	7	56	7
						e.	Sentra Pengembangan ikan hias	Desa	3	3	3	3	3	18	3
						f.	Sentra Perdagangan	Desa	5	5	5	5	5	25	5
							Desa Industri	Desa	2	5	3	4	4	18	2
						g.	Desa UMKM	Desa	0	0	1	1	1	3	0
						h.	Desa Koperasi	Desa	0	0	1	1	1	3	0
i.						Desa Kuliner Tradisional	Desa	0	0	1	0	0	1	0	
					j.	Desa Pendidikan	Desa	0	2	3	1	1	7	0	
4.2.	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	Desa Pusat Investasi	15 Desa Sentra Investasi	4.2.1.	Meningkatnya investasi skala desa	a.	Jumlah Desa dengan Nilai Investasi>200 juta	Desa	N.A	1	0	4	5	5	15
		LPE	1,51-3,45			b.	TPT	persen	8,99	15,25	13,88	11,51	10,14	10,14	10,14
		Indeks pengeluaran	66,33 – 66,91			c.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	10.111	8.480	3.000	5.670	6.230	7.150	30.530
		Tingkat Pengangguran Terbuka	10,14												
		Lumbung Pangan Desa	10 desa/kel	4.2.2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa	a.	Lumbung Pangan	Buah	N/A	1	0	3	3	3	10
		Pemetaan	30	4.2.3	Meningkatnya	a.	Jumlah lapangan	Paket	N/A	4	5	6	7	8	30

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
		Kebutuhan Keahlian/kualifikasi tenaga kerja berbasis desa	lapangan kerja baru		lapangan kerja di desa		kerja di desa								
						b.	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	N/A	80	100	120	140	160	600
						c.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58,65	59,62	60,61	61,62	62,64	63,68	63,68
			4.2.4.	Menurunnya tingkat pengangguran	a.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang		8.400-8.500	3.836	5.670	6.230	7.150	7.150	
			4.2.5.	Terciptanya wirausaha baru berbasis pesantren	a.	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/Orang	N.A	0	2/40	2/40	2/40	2/40	8/160	
4.3.	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	0,670	4.3.1.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Jumlah BUMDES	Unit	180	14	5	5	10	10	10 (55)
					b.	Status Desa : - Mandiri	Desa Mandiri	3	2	2	18	10	10	15 (57)	
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari															
5.1.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Kemantapan jalan	85,9 %	5.1.1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	a.	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	640	72	70	72	72	72	998
						b.	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	15.000	600	200	600	600	600	17.600
						c.	Akses Air Minum Layak	%	90,85	85.15	88.12	91.09	94.06	97.03	97.03
						d.	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	52,279,27	122.598,00	116.196,89	115.554,73	114.881,47	114.124,74	114.124,74
							Prosentase pelayanan sampah	%	75,29	82,74	80,25	81,09	81,91	81,91	81,91
			Kondisi Baik Irigasi			70 %	e.	Persentase ketersediaan	%	55	55	40	40	50	65

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
							prasarana dan fasilitas perhubungan								
				5.1.2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan	a.	Persentase kemantapan jalan dan jembatan	%	80,9	81,9	78,2	82	83,5	84,9	84,9
						b.	Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik	%	59,01	60	60	62	63	64	64
						c.	Persentase Rumah layak huni	%	94,92	95,63	95,85	96,21	96,56	96,92	96,92
5.2.	Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,142	5.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan	a.	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	N/A	3	9	14	3	3	32
				5.2.2	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari	a.	Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	8	2	0	0	0		10 Pindah kewenang an ke DLH
						b.	Indeks Tutupan Lahan	Point	56,48	56,50	57,25	57,5	57,75	58	58
				5.2.3	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	a.	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	85	85	90%	95%	95%	100%	100%
						b.	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
						c.	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	85	80	90%	95%	95%	100%	100%

5.3 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akibat terjadinya pandemic Covid-19, seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi terdampak. Di sisi lain anggaran pembangunan pemerintah daerah pun dialihkan untuk penanganan pandemi ini, akibatnya target kinerja tidak dapat tercapai, terutama di Tahun 2020. Oleh karenanya pada revisi RPJMD ini, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi telah diproyeksikan kembali Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023 seperti dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini:

Tabel 5.2
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Hasil Revisi)

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	SEBELUM REVISI				HASIL REVISI			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,23	73,31-73,39	73,45-73,56	73,59-73,72	73,73-73,90	73,28	73,37	73,45	73,53
HLS/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07*	12,08	12,34-12,57	12,43-12,72	12,52-12,87	12,62-13,03	12,1	12,14	12,19	12,23
RLS/ Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51*	7,37	7,64-7,75	7,74-7,86	7,83-7,97	7,94-8,08	7,41	7,46	7,52	7,6
Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.918	9.731	9.003-9.039	9.092-9.142	9.181-9.246	9.271-9.352	8.967-9.003	9.042-9.092	9.116-9.181	9.190-9.271
Indeks Kesehatan	Point	81,55	81,89	82,01	82,23	82,45	82,67	81,97	82,23	82,45	82,67
Indeks HLS	Poin	67,06*	67	69,85	70,69	71,63	72,36	67,22	67,56	67,78	68,04
Indeks RLS	Poin	50,08*	49	51,67	52,40	53,12	53,85	49,4	50,24	50,47	50,61
Indeks Pendidikan	Poin	58,57	58,12	60,76	61,54	62,33	63,11	58,31	60,41	60,58	60,77
Indeks Pengeluaran	Poin	66,64	69,31	66,93	67,23	67,53	67,82	66,12-66,39	66,22-66,59	66,23-66,70	66,33-66,91

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	SEBELUM REVISI				HASIL REVISI			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
IPM	Poin	68,28	69,10	69,35	69,81	70,27	70,73	68,39	69,26	69,45	69,66
Prosentase Kemiskinan	Persen	12,22	11,41	11,31	10,76	10,20	9,64	13,58	13,38	13,06	12,74
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,99	9,83	8,25	7,88	7,51	7,14	15,25**	13,88	11,51	10,14
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,45	6,56	≤6,00	≤6,00	≤6,00	≤6,00	-2,42 - 1,51	1,75 - 2,65	1,90 - 3,00	2,00 - 3,45
Indeks Gini Rasio	Poin	0,32	0,34	0,31	0,31	0,31	0,30	<0,38	<0,38	<0,38	<0,38
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60

5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 (Program Unggulan Daerah)

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kuningan merupakan hal-hal yang strategis dan perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

1. Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, yaitu :
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas (1000 RK);
 - b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (300 RKB);
 - c. Pembangunan Perpustakaan (100 Ruang);dan
 - d. Pemberian Beasiswa (1.000 Orang).
2. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur, yaitu :

- a. Penanganan Jalan/Jembatan $\pm$ 1.000 KM;

Program unggulan ini berupa penanganan jalan/jembatan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan/jembatan. Sasarannya meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

Penanganan jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, upaya yang dilakukan diawali dengan usulan dari pemerintah kabupaten ke pusat maupun provinsi.

Untuk penanganan jalan desa diupayakan melalui Program Gerbang Simas dari Dinas PUPR Kabupaten Kuningan dan penataan jalan lingkungan permukiman dari Dinas PRPP Kabupaten Kuningan serta arahan pengalokasian dana desa untuk infrastruktur jalan desa di setiap desa.

- b. Penanganan Jaringan Irigasi untuk melayani Daerah Irigasi seluas $\pm$ 18.000 Hektar;

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang menjadi satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi. Program unggulan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi meliputi bangunan dan saluran irigasi dalam rangka meningkatkan areal layanan irigasi.

- c. 25 Desa Wisata; dan
 - d. 100 Desa Pinunjul.
3. Peningkatan produktifitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha :
- a. 1.000 Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan
 - b. 1.000 Bantuan Modal Usaha Kecil.
4. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui:
- a. Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputi seluruh bidang; dan
 - b. Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mesjid, salah satunya yaituketersediaan Alqur'an melalui wakaf 1.000 mushaf Alquran.
5. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui:
- a. Ketersediaan ambulance gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan; dan
 - b. Revitalisasi 1.423 Posyandu.
6. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.

Program-program unggulan di atas akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah di masing-masing urusan pemerintahan melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya,



sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Untuk program unggulan tersebut, target akhirnya tidak berubah mengingat program ini merupakan janji politik Bupati. Perubahannya hanya di target antara saja, karena pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Integratif

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Permendagri 86, 2017). Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun (Permendagri 86, 2017). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki focus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan focus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
VISI :“KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”							
Misi1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan <i>Nu Sajati</i> .							
1.1.	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan;	1.1.1.	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	1.1.1.1.	Meningkatkan kinerja birokrasi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	a.	Membangun transparansi, akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan
						b.	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah
						c.	Meningkatkan peran APIP
						d.	Meningkatkan Kinerja Birokrasi
		1.1.2.	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	1.1.2.1	Menyediakan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat	a.	Meningkatkan fasilitas, SDM aparatur dan sistem pelayanan publik
						b.	Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pembangunan
				c.	Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan warga masyarakat.		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.1.3.	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	1.1.3.1	Menerapkan Sistem Informasi Terpadu di bidang pelayanan publik	a.	Membangun dan mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis <i>E Government</i>
						b.	Meningkatkan sinergitas antarbirokrasi pemerintahan
		1.1.4	Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1.1.4.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	a.	Mendorong kepatuhan aparatur dan wajib pajak/wajib retribusi terhadap Sistem, Mekanisme dan Prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku
						b.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan <i>nu Sajati</i> dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.							
2.1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama	2.1.1.	Terwujudnya masyarakat yang agamis	2.1.1.1.	Meningkatkan pembinaan dan penguatan pendidikan keagamaan di masyarakat	a.	Meningkatkan pembinaan untuk lembaga keagamaan
						b.	Meningkatkan pembinaan untuk lembaga pendidikan keagamaan
2.2.	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	2.2.1	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	2.2.1.1.	Meningkatkan kondusivitas dan pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	a.	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara
						b.	Memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
						c.	Meningkatkan ketaatan warga



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							masyarakat, aparat, badan hukum terhadap perundang-undangan daerah
		2.2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	2.2.2.1	Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan kebudayaan Kuningan dan Jawa Barat	d.	Meneguhkan sikap kemandirian dan integritas individu
						a.	Membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial
						b.	Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan meningkatkan ruang dialog antar warga
						c.	Memasyarakatkan seni budaya lokal
						d.	Mengenalkan seni budaya lokal di kalangan pelajar
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajat							
3.1.	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	3.1.1.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	3.1.1.1	Peningkatan manajemen dan layanan pendidikan	a	Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
						b.	Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang pendidikan
						c.	Mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis budaya lokal
						d.	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
3.2.	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan	3.2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan	3.2.1.1.	Peningkatan manajemen dan layanan kesehatan	a.	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	kesehatan yang terjangkau		pelayanan kesehatan			b.	Meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan
						c.	Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang kesehatan
						d.	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
3.3.	Menciptakan sumber daya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul	3.3.1.	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan	3.3.1.1.	Percepatan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	a.	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin
						b.	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin
						c.	Meningkatkan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin
		3.3.2.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	3.3.2.1	Pengendalian Fertilitas	a.	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
		3.3.3.	Meningkatnya PUG	3.3.3.1	Meningkatkan SDM dan Kelembagaan berbasis gender	a.	Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan
						b.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		3.3.4.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	3.3.4.1	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	a.	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						b.	Meningkatkan sarana prasarana olah raga
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat							
4.1.	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	4.1.1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi tematik Desa Pinunjul	4.1.1.1	Mengembangkan Perencanaan <i>Bottom Up</i> berbasis kebutuhan dan Potensi Lokal serta pemanfaatan IT	a.	Peningkatan manajemen <i>database</i> ekonomi berbasis sistem data terintegrasi
		4.1.2.	Terbangunnya sentra unggulan pertanian	4.1.2.1.	Memperkuat database potensi unggulan sektoral dan kewilayahan	a.	Pemutakhiran data ekonomi berbasis desa secara regular
				4.1.2.2.	Penguatan kelembagaan pertanian	a.	Peningkatan kapasitas penyuluh dan kelembagaan pertanian
				4.1.2.3.	Meningkatkan produktivitas pertanian	a.	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan peningkatan perlindungan pertanian melalui subsidi/bantuan
						b.	Peningkatan produktivitas perkebunan melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi
						c.	Peningkatan produktivitas hortikultura melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						d.	Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dalam rangka mengurangi resiko bencana
						e.	Peningkatan produktivitas peternakan melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi
		4.1.3	Terbangunnya sentra unggulan wisata dan budaya	4.1.3.1.	Meningkatkan daya dukung SDM dan Ekonomi Kreatif Kepariwisata	a.	Peningkatan kapasitas pelaku, pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif
						a.	Optimalisasi penataan destinasi wisata
				4.1.3.2	Meningkatkan daya dukung infrastruktur kepariwisataan	b.	Peningkatan penyediaan fasilitas di tempat wisata
						a.	Peningkatan media promosi dan pemasaran pariwisata, penyelenggaraan event dan produk wisata
				4.1.3.3	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata, penyelenggaraan event dan produk wisata	b.	Berkembangnya pemasaran ekonomi kreatif di Kabupaten Kuningan
						c.	Peningkatan jejaring kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif
						a.	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya
		4.1.4	Terbangunnya sentra unggulan lokal lainnya	4.1.4.1.	Mewujudkan swasembada ikan	b.	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap
						c.	Meningkatkan pengawasan konservasi dan sumber daya

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							perikanan
						d.	Meningkatkan produksi dan produktivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				4.1.4.2.	Meningkatkan pengembangan pasar untuk komoditas agro dan lainnya	a.	Pengembangan sentra perdagangan agro
				4.1.4.3.	Meningkatkan industri berbasis agro dan potensi lainnya skala lokal	a.	Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
				4.1.4.4.	Meningkatkan UKM skala desa	a.	Peningkatan promosi produk UMKM
						b.	Peningkatan dukungan akses permodalan
						c.	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM
				4.1.4.5.	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian desa	a.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
				4.1.4.6.	Meningkatkan produk unggulan lokal	a.	Pengembangan sentra unggulan local
				4.1.4.7	Meningkatkan sektor jasa pendukung	a.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Pendukung Pendidikan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					pendidikan	b.	Peningkatan infrastruktur pendukung usaha ekonomi berbasis Pendidikan
4.2.	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	4.2.1.	Meningkatnya investasi skala desa	4.2.1.1.	Meningkatkan kemudahan investasi desa	a.	Penyederhanaan prosedur administrasi investasi desa
						b.	Peningkatan kualitas layanan berbasis system
				4.2.1.2.	Meningkatkan penyediaan data dan informasi peluang investasi tingkat desa	a.	Pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara regular
						b.	Peningkatan Kualitas layanan berbasis system
						c.	Peningkatan kemudahan akses informasi profil peluang investasi desa
		4.2.2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa	4.2.1.3.	Peningkatan pelayanan pelatihan bagi para pencari kerja dan tenaga kerja daerah	a.	Penyediaan informasi bursa kerja desa baik formal dan non formal
				4.2.2.1	Menguatkan ketahanan pangan	a.	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan aksesibilitas pangan
						b.	Meningkatkan pengolahan keragaman pangan lokal
						c.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan
		4.2.3	Meningkatnya lapangan kerja di desa	4.2.3.1.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	a.	Peningkatan penyediaan program pelatihan yang sesuai bagi kebutuhan kerja setempat atau desa.



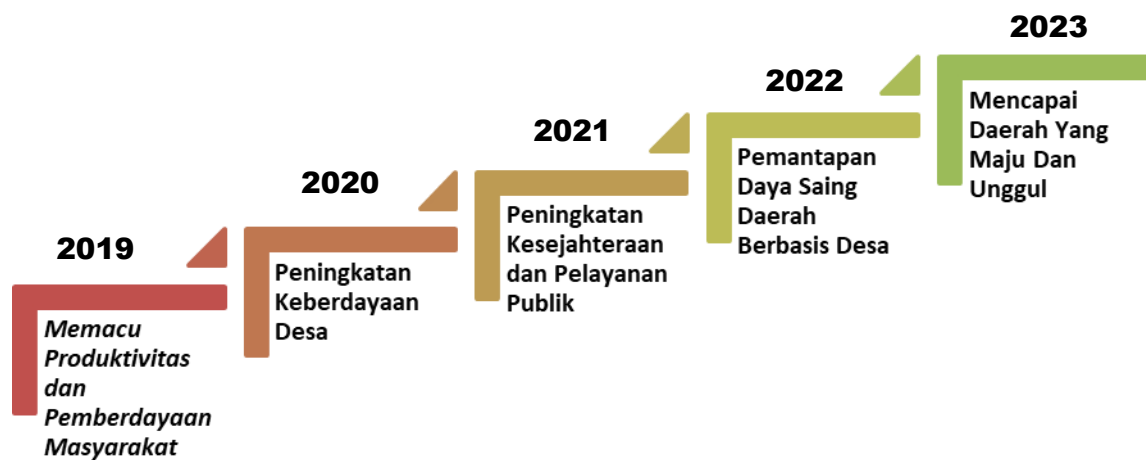
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					bagi angkatan kerja produktif		
		4.2.4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	4.2.4.1	Peningkatan layanan Pelatihan bagi para pencari kerja dan Tenaga Kerja Daerah	a.	Penyediaan informasi bursa kerja desa baik formal dan informal
		4.2.5	Terciptanya wirausaha baru berbasis pesantren	4.2.5.1.	Meningkatkan pengembangan usaha berbasis pesantren melalui bantuan sarana dan prasarana	a.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha berbasis pesantren
4.3.	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	4.3.1.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	4.3.1.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan desa	a.	Membangun infrastruktur desa yang merata dan berkualitas
						b.	Mewujudkan pelayanan sosial dasar desa
				4.3.1.2	Optimalisasi Potensi Sumber daya alam berbasis kawasan	a.	Mengembangkan industri dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal desa dan kerakyatan
						b.	Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari							
5.1.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur	5.1.1.	Meningkatnya konektivitas antar	5.1.1.1	Peningkatan kemantapan jalan,	a.	Pembangunan jalan dan jembatan secara merata.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	daerah		wilayah dan kawasan		jembatan, irigasi dan infrastruktur dasar lainnya	b.	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi dan prasarana sumberdaya air lainnya
						c.	Memperkuat pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman di perdesaan
						d.	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan
						e.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan
		5.1.2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten Kuningan	5.1.2.1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan infrastruktur dasar lainnya	a.	Meningkatkan upaya rehabilitasi/pemeliharaan jalan
						b.	Meningkatkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
						c.	Pengembangan dan perluasan pelayanan infrastruktur dasar lainnya
5.2.	Mewujudkan kelestarian fungsi sumber day aalam dan lingkungan hidup	5.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan	5.2.1.1.	Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah	a.	Meningkatkan upaya penataan ruang daerah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		5.2.2	Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan yang lestari	5.2.2.1.	Meningkatkan pengelolaan SDA LH sesuai daya dukung daya tampung	a.	Meningkatkan pemanfaatan SDA LH denganmelakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan SDA dengan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							menerapkan teknologi ramah lingkungan
						b.	Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah secara terpadu
		5.2.3	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	5.2.3.1.	Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial	a.	Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana
						b.	Peningkatan upaya penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar
						c.	Peningkatan upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Strategi pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan/arrah kebijakan tahunan. Dengan demikian, arah kebijakan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan



B. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023. Penerapan pendekatan spasial ini dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kuningan, selanjutnya diselaraskan dengan kebijakan dan arah pembangunan di Kabupaten Kuningan untuk lima tahun yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan dalam RPJMD mengadopsi perencanaan tata ruang yang meliputi rencana pemanfaatan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sesuai periode pembangunan 2018 sampai 2023.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kuningan dalam RTRW Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 yang perlu diselaraskan dengan arah pembangunan dalam RPJMD 2018-2023, meliputi :

1. pemantapan kawasan konservasi;
2. pengembangan kawasan pertanian terpadu;
3. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
4. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
5. pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki; dan
6. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya.

Dari kebijakan penataan ruang di atas, dirumuskan beberapa strategi dalam penataan ruang sebagai berikut :

1. Strategi dalam rangka pemantapan kawasan konservasi meliputi :
 - a. mengendalikan secara ketat fungsi kawasan lindung;
 - b. mengembangkan KRK sebagai kawasan konservasi ex-situ;
 - c. mengembangkan kegiatan pariwisata alam dan/atau minat khusus di kawasan TNGC, TWA Linggarjati, dan KRK; dan
 - d. mengembangkan model desa konservasi.
2. Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian terpadu meliputi:
 - a. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
 - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
 - d. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan; dan
 - e. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
3. Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
 - b. Mengembangkan kawasan agrowisata;
 - c. mengembangkan zona wisata terpadu di bagian barat wilayah Kabupaten; dan
 - d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

- 
4. Strategi dalam rangka pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Merehabilitasi lahan kritis dan potensial kritis;
 - b. Melindungi kawasan resapan dan mata air untuk mempertahankan ketersediaan air baku; dan
 - c. Memanfaatkan potensi air Waduk Darma untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemenuhan air baku.
 5. Strategi dalam rangka pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki meliputi:
 - a. mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa lainnya;
 - b. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi; dan
 - c. mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana wilayah.
 6. Strategi dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budaya perikanan terpadu dan ramah lingkungan; dan
 - b. mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan.

Disamping itu, kebijakan RTRW Kabupaten Kuningan telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. KSK yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kuningan lima tahun kedepan adalah Kebun Raya Kuningan dan Waduk Darma.

C. Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Kuningan terdampak cukup berat, antara lain:

1. Sektor pariwisata terhenti. Adanya pembatasan warga untuk bepergian, membuat sektor ini yang paling kuat terkena dampaknya. PAD dari sektor ini turun hingga 70%.
2. Bisnis UMKM terhenti. Akibat adanya pembatasan sosial, banyak pelaku UMKM kehilangan pemasukan cukup drastis dan terpaksa merumahkan para pekerjanya, sehingga angka pengangguran meningkat.
3. Pembatasan operasional industri. Kebijakan PSBB di masa Pandemi Covid-19, membuat sektor industri melakukan pembatasan operasional industri. Adanya pembatasan ini berakibat pada pengurangan tenaga kerja (PHK). Akibatnya banyak warga Kuningan yang merantau, kehilangan pekerjaan dan harus pulang kampung. Demikian juga dengan mereka yang bekerja di sector informal, misalnya para pedagang warungan, karena industri ditutup/terbatas jam operasinya, pendapatan berkurang drastis, sehingga dagangannya rugi. Akibatnya perantau yang mudik ini, makin menambah angka pengangguran di daerah.
4. Perubahan sosial budaya masyarakat. Kebijakan *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB memaksa masyarakat harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru di berbagai tataran kehidupan, seperti pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya.
5. *Refocusing* anggaran pemerintah. Dengan telah ditetapkannya UU Nomor 2 tentang UU 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, membuat pemerintah daerah melakukan *refocusing* anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Adanya *refocusing* anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan. *Refocusing* anggaran ini menjadi salah satu alasan terbesar penyusunan Perubahan RPJMD 2018-2023.

Adapun yang menjadi sasaran dari isu ini yaitu:

- 1) Penguatan ketahanan pangan daerah;
- 2) Peningkatan Program Perlindungan Sosial;

- 3) Dukungan kepada pelaku UMKM;
- 4) Pemulihan sektor industri pariwisata;
- 5) Peningkatan fasilitas kesehatan;
- 6) Penyiapan tenaga kerja mandiri; dan
- 7) Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahun 2019 berjumlah 195. Tahun 2019 merupakan tahun transisi perencanaan, dimana RPJMD hasil Pilkada 2019 belum disusun, sehingga program masih mengacu pada RPJMD periode sebelumnya dan arahan RPJMD Teknokratis. Pertengahan tahun 2019, RPJMD hasil Pilkada 2019, telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2020 program disesuaikan dengan visi-misi daerah serta arahan KEMENPAN RI untuk kemudahan pengukuran LAKIP. Untuk tahun 2020 terdapat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Program yang digunakan.

Pada akhir tahun 2019, terbit Permendagri 90 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Permendagri ini menyeragamkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program, kegiatan, sub kegiatan di seluruh Indonesia disesuaikan dengan yang tercantum pada Permendagri 90/2019. Dengan adanya Permendagri ini Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan RENSTRA yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak digunakan lagi.

Program Pembangunan secara lengkap periode 2019, 2020, dan 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Pendidikan Usia Dini	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	Program Pengembangan Kurikulum
3	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)	3	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)	3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Kesehatan Khusus	2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anakserta KB	3	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4	Program Imunisasi dan Surveilans	4	Program Pengembangan lingkungan sehat	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
6	Program Pengadaan, Peningkatan dan	6	Program Pengawasan Obat dan Makanan		

	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	7	Program pembinaan kesehatan primer dan kestrad serta mutu pelayanan kesehatan		
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	Program Pelayanan Perijinan Kesehatan		
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	9	Program Jaminan Kesehatan Daerah		
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11	Program Pengendalian Penyakit Menular		
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		
13	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	13	Program Surveilans dan Imunisasi		
14	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
		15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
		16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD '45 Kuningan		
		17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		
		18	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		

		19	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis		
		20	Program Peningkatan Pelayanan Keperawatan		
		21	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan		
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Tahun 2019			Tahun 2020	Tahun 2021 - 2023	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Program Perencanaan Teknik Kebinamargaan dan Sumberdaya Air	1	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4	Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebinamargaan	4	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5	Program Peningkatan/Pemeliharaan Paralatan Kebinamargaan	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air Lainnya	6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7	Program Perencanaan Tata Ruang	7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya	7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
8	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	8	Program Pengendalian Banjir	8	Program Penataan Bangunan Gedung
9	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi	9	Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

		10	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		11	Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau		
		12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
		14	Program Pembangunan Saluran Drainase Permukiman		
		15	Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan		
		16	Program Perencanaan Teknik Kebinamargaan dan Sumberdaya Air		
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengembangan Perumahan/Permukiman	1	Program Pengembangan Perumahan/Permukiman	1	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	2	Program Peningkatan Kualitas Permukiman	2	Program Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman	3	Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman pasca bencana	4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5	Program Pengembangan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan				
6	Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan				

5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	1	Program Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Perundang-undangan Daerah	1	Program Penanggulangan Bencana
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	Program Pencegahan, penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		
		5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran		
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban		
6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pemberdayaan fakir Miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Program Pemberdayaan Sosial
3	Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	3	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	3	Program Rehabilitasi Sosial
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	5	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	5	Program Penanganan Bencana
6	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	6	Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana	6	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
7	Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	7	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	8	Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik		
9	Program Peningkatan Fungsi Sumber Daya dan Logistik	9	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
10	Program Pemulihan melalui Rehabilitasi				
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	3	Program Penempatan Tenaga Kerja
				4	Program Hubungan Industrial
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	2	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	2	Program Perlindungan Perempuan
				3	Program Peningkatan Kualitas

					Keluarga
3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	3	Program Pengembangan Data dan Informasi PUG	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		4	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		5	Program Pembinaan Anak Terlantar	6	Program Perlindungan Khusus Anak
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2	Program Penguatan Cadangan Pangan	2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		3	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3	2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	2	Program Pengelolaan Tanah Kosong
		3	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3	3	Program Penatagunaan Tanah

				4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	Program Kemitraan Lingkungan Hidup	2	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
5	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	6	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		7	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Pertambangan	7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		8	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan	8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				9	Program Pengelolaan Persampahan

6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Program Pendaftaran Penduduk
2	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3	Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	3	Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	3	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
4	Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil	4	Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil	4	Program Pencatatan Sipil
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2	Program Penataan Desa
3	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan	3	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa
4	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4	Program Peningkatan Teknologi dan Inovasi berbasis SDA Perdesaan	4	Program Peningkatan Kerjasama Desa
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Keluarga Berencana	1	Program Keluarga Berencana	1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	2	Program Pengendalian Penduduk	2	Program Pengendalian Penduduk
3	Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan	3	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Sekolah dan Berbasis Masyarakat	3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

4	Program Ketahanan Keluarga	4	Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		
5	Program Pengendalian Penduduk	5	Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan		
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4	Program Peningkatan Kerjasama Bidang Transportasi Regional		
5	Program Peningkatan Pengelolaan Parkir	5	Program Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
6	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
		7	Program Peningkatan Pengelolaan Parkir		
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	2	Program Aplikasi Informatika
3	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	3	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		
4	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	4	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat		

11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
Tahun 2019			Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro	1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
3	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				4	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4	Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	6	Program Pengembangan UMKM
5	Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM				
12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
Tahun 2019			Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	2	Program Promosi Penanaman Modal
3	Program Peningkatan Informasi Perizinan	3	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	3	Program Pelayanan Penanaman Modal
4	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	4	Program Penataan Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

			Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		5	Program Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Kepemudaan dan Olahraga	1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3	Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2	Program Peningkatan dan Pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan dalam Pembangunan				
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengembangan Data/Informasi	1	Program Pengembangan Data/Informasi	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengelolaan Persandian	1	Program Pengelolaan Persandian	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1	Program Pengembangan Kebudayaan
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3	Program Keragaman Budaya	3	Program Keragaman Budaya	3	Program Pembinaan Sejarah

				4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				5	Program Pengelolaan Permuseuman
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Program Pembinaan Perpustakaan
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1	Program Pengelolaan Arsip
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip	2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
				3	Program Perijinan Penggunaan Arsip
III	Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Pengembangan Kemitraan	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Program Pemasaran Pariwisata
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3		3		3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1	Program Peningkatan Informasi Pertanian	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	3	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3	Program Penyuluhan Pertanian
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4	Program Peningkatan Produksi Peternakan	4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6	Program Peningkatan Produksi Holtikultura		
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	7	Program Pemberdayaan SDM Pertanian		

8	Produksi Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan				
	Tahun 2019		Tahun 2020 - 2023		Tahun 2021-2023
				1.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan				
2	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Pertambangan				
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa	2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa	3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	3	Program Pengembangan Ekspor
				4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023
1	Program Pengembangan Industri Kecil	1	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan	1	Program Pengelolaan Sistem Informasi

	dan Menengah		dan Teknologi Sistem Produksi		Industri Nasional
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		3	Program Penataan Struktur Industri	3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	1	Program Pemberdayaan Masyarakat/Transmigrasi Lokal	1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan Transmigrasi	2	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan Transmigrasi	2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Sekretariat Daerah				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya	1	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	2	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	2	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum		
4	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja		
6	Program Pendidikan Bidang Keagamaan	6	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah		

7	Program Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	8	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah		
9	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		
10	Program Peningkatan Disiplin Daerah	10	Program Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
2	Sekretariat DPRD				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Program Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan, dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3	1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		2	Program Pelayanan Keprotokolan		
		3	Program Publikasi dan Humas		
		4	Program Pelayanan Analisis Informasi		
		5	Program Fasilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
		6	Program Fasilitas Bantuan Sosial		
		7	Program Penguatan Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga		
		8	Program Fasilitas Penunjang dan Kebudayaan		
		9	Program Pendidikan Bidang Keagamaan		
		10	Program Fasilitas Kegiatan Keagamaan		
		11	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan		

		12	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan		
		13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		
		14	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Perencanaan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	2	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam		
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
2	Keuangan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Peningkatan Pajak PBB dan BPHTB	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Program Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Aset Daerah	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja	3	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		

5	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Program Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi		
6	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	6	Program Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
7	Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	7	Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah		
		8	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengelola Pajak		
		9	Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah		
		10	Program Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Aset Daerah		
		11	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		
3	Kepegawaian				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Program Pengembangan Karier Aparatur	1	Program Kepegawaian Daerah
2	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	2	Program Kesejahteraan Aparatur		
3	Program Kesejahteraan Pegawai	3	Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian		
4	Program Peningkatan dan Fasilitasi Keprofesian ASN	4	Program Pemindahan Aparatur		
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		
		6	Program Pengadaan ASN dan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		
		7	Program Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian		

		8	Program Pembinaan Aparatur		
4	Pendidikan dan Pelatihan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Pendidikan Kedinasan	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
5	Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Kajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	Program Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi Pembangunan		
6	Pengelolaan Perbatasan				
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
				1	Program Pengelolaan Perbatasan
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
Inspektorat Daerah					
Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021 - 2023
1	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1	Program Penegakan Integritas dan Reformasi Birokrasi	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Program Pembinaan Objek Pengawasan	2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	3	Program Peningkatan Kapabilitas APIP		
4	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
5	Program Peningkatan Kapabilitas APIP				

VI UNSUR KEWILAYAHAN					
Kecamatan					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
		1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kuningan	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kuningan	2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kuningan	3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kuningan	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kuningan	5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan Kuningan		
		7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Kuningan		
		8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cigugur		
		9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cigugur		
		10	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cigugur		
		11	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cigugur		



		12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cigugur		
		13	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan Cigugur		
		14	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Cigugur		
		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Mandirancan		
		16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Mandirancan		
		17	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Mandirancan		
		18	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Mandirancan		
		19	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Mandirancan		
		20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Lebakwangi		
		21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Lebakwangi		
		22	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Lebakwangi		
		23	Program Peningkatan Pelayanan		



			Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Lebakwangi		
		24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Lebakwangi		
		25	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Selajambe		
		26	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Selajambe		
		27	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Selajambe		
		28	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Selajambe		
		29	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Selajambe		
		30	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Sindangagung		
		31	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Sindangagung		
		32	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Sindangagung		
		33	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Sindangagung		
		34	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec.		

			Sindangagung		
		35	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cibingbin		
		36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cibingbin		
		37	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cibingbin		
		38	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cibingbin		
		39	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cibingbin		
		40	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cipicung		
		41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cipicung		
		42	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cipicung		
		43	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cipicung		
		44	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cipicung		
		45	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Japara		
		46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Japara		



		47	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Japara		
		48	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Japara		
		49	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Japara		
		50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cilebak		
		51	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cilebak		
		52	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cilebak		
		53	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cilebak		
		54	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cilebak		
		55	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cidahu		
		56	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cidahu		
		57	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cidahu		
		58	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cidahu		
		59	Program Penyelenggaraan Urusan		



			Pemerintahan Umum di Kec. Cidahu		
		60	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Jalaksana		
		61	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Jalaksana		
		62	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Jalaksana		
		63	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Jalaksana		
		64	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Jalaksana		
		65	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kramatmulya		
		66	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kramatmulya		
		67	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kramatmulya		
		68	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kramatmulya		
		69	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kramatmulya		
		70	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Maleber		
		71	Program Peningkatan Partisipasi		



			Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Maleber		
		72	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Maleber		
		73	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Maleber		
		74	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Maleber		
		75	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cilimus		
		76	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cilimus		
		77	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cilimus		
		78	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cilimus		
		79	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cilimus		
		80	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Darma		
		81	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Darma		
		82	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Darma		
		83	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		

			(PATEN) di Kec. Darma		
		84	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Darma		
		85	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cimahi		
		86	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cimahi		
		87	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cimahi		
		88	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cimahi		
		89	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cimahi		
		90	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Nusaherang		
		91	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Nusaherang		
		92	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Nusaherang		
		93	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Nusaherang		
		94	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Nusaherang		
		95	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kadugede		



		96	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kadugede		
		97	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kadugede		
		98	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kadugede		
		99	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kadugede		
		100	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kalimantan		
		101	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kalimantan		
		102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kalimantan		
		103	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kalimantan		
		104	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kalimantan		
		105	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Hantara		
		106	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Hantara		
		107	Program Pembinaan dan Pengawasan		

			Pembangunan Desa di Kec. Hantara		
		108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Hantara		
		109	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Hantara		
		110	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cibeureum		
		111	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cibeureum		
		112	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cibeureum		
		113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cibeureum		
		114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cibeureum		
		115	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Pancalang		
		116	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Pancalang		
		117	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Pancalang		
		118	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Pancalang		

		119	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Pancalang		
		120	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Pasawahan		
		121	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Pasawahan		
		122	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Pasawahan		
		123	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Pasawahan		
		124	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Pasawahan		
		125	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Garawangi		
		126	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Garawangi		
		127	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Garawangi		
		128	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Garawangi		
		129	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Garawangi		
		130	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Luragung		
		131	Program Peningkatan Partisipasi		

			Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Luragung		
		132	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Luragung		
		133	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Luragung		
		134	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Luragung		
		135	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Ciwaru		
		136	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Ciwaru		
		137	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Ciwaru		
		138	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Ciwaru		
		139	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Ciwaru		
		140	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Subang		
		141	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Subang		
		142	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Subang		
		143	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		

			(PATEN) di Kec. Subang		
		144	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Subang		
		145	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cigandamekar		
		146	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cigandamekar		
		147	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cigandamekar		
		148	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cigandamekar		
		149	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cigandamekar		
		150	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Karangkencana		
		151	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Karangkencana		
		152	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Karangkencana		
		153	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Karangkencana		



		154	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Karangancana		
		155	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Ciniru		
		156	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Ciniru		
		157	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Ciniru		
		158	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Ciniru		
		159	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Ciniru		
		160	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Ciawigebang		
		161	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Ciawigebang		
		162	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Ciawigebang		
		163	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Ciawigebang		
		164	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Ciawigebang		

VII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa Dan Politik					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021 - 2023	
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6.3. Program Prioritas

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan program unggulan daerah sebagaimana tercantum pada Bab 5 Dokumen RPJMD ini, ditetapkan beberapa program prioritas beserta proyeksi penganggarnya selama 5 tahun ke depan. Dari total 367 program, terdapat program prioritas dengan proyeksi anggarannya sebagaimana disajikan pada tabel 6.3 dan 6.4 dibawah ini.

Tabel 6.3.
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2020

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
VISI : “KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”								
Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati.								
Tujuan :								
1.1	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	a. Opini BPK	Kategori	WTP		WTP		
		b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	82,78		83,48		
Sasaran :								
1.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	a. Nilai SAKIP	Level	BB-		BB		
		b. Maturitas SPIP	Level	3		3		
		c. Skor LPPD	Poin	35,035		3,511		
Program :								
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				1.470.000.000		1.617.000.000	Inspektorat
		1 Jumlah SKPD yang memiliki	SKPD	5		10		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		Nilai LAKIP diatas BB						
		2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	70		75		
		3 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPK	Persen	70		73		
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persen	50		55		
		5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Provinsi	Persen	60		65		
		6 Persentase Review RKPD dan RKA SKPD	Persen	100		100		
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				1.802.500.000		1.982.750.000	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem, Ekonomi dan Adbang)
		1 Jumlah Kemampuan Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	SKPD	31		29		
			Asisten Daerah			3		
			Staf Ahli			3		
			Kabag			3		
			Kec.			32		
			Orang/ Pimpinan			8		
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja				1.101.000.000		1.211.100.000	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Buah	2		2		
Sasaran :								
1.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	a. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	>90		>90		
		b. Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	97,4		97,77		
				84		85		
Program :								
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				4.345.750.000		8.747.000.000	Sekretariat Dewan
		1 Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persen	50		50		
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				3.650.000.000		4.015.000.000	
		1 Jumlah Produk Legislasi	Perda	10		10		
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.400.000.000		1.750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	90		92		
4	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan				1,887,395,300		4.099.639.500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Persentase Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	100		98		
Sasaran :								
1.1.3	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	a. Penerapan e-planning, e-data, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2		2		Bappeda, Bapenda, BPKAD, BAgian PBJ, Bag Administrasi Pembangunan, BAgian Organisasi & PA, BKPSDM, DPMPSTP
Program :								
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.400.000.000		1.750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	90		92		
2	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat				175.000.000		192.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Persen	100		100		
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.200.000.000		1.320.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen			20		
		Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen			50		
4	Program Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran :								
	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	Meningkatnya Indeks SPBE	Point			2,5		
1.1.4	Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Target PAD	Milyar			311,53		
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan <i>nu Sajati</i> dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.								
Tujuan :								
2.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama.	a. Indeks Toleransi Beragama	Poin	68,3 – 68,6		68,7 – 69,0		
Sasaran :								
2.1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis	a. Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20		5%		
		b. Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20		5%		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :								
1	Program Pendidikan Bidang Keagamaan				2.380.000.000		3.200.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		1 Persentase bahan kebijakan pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan	Persen	20		5		
2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan				300.000.000		1.000.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
Tujuan :								
2.2	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	a. Indeks Rasa Aman	Poin	70-71		70-71		
Sasaran :								
2.2.1	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	a. Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	91		92		
		b. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	71,52		-		
2.2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	a. Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan	Buah	128		128		
		b. Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	Poin	0,45		0,46		
Program :								
1	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				300.000.000		330.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	82		83		
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat				400.000.000		440.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan Politik	Orang	500		600		
3	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya				440,000,000		1.419.000.000	
		1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	100		12		
4	Program Pengembangan Nilai Budaya				1,527,000,000		250.000.000	
		1 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	1		2		
5	Program Keragaman Budaya				284,000,000		165.000.000	
		1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	100		100		
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia <i>Nu Sajati</i>								
Tujuan :								
3.1	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	a. Indeks Pendidikan	Poin	60,42		58,31		
Sasaran :								
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	a. EYS/Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,24-12,29		12,1		
		b. MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,54-7,71		7,41		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		c. Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	69,45		67,22		
		d. Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	51,38		49,4		
		e. Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	238		162		
		f. Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	9		70		
		g. Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	20		20		
		h. Pemberian beasiswa (1.000 orang)	Orang	200		200		
Program :								
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun				32.377.976.000		35.615.773.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 APK SD/MI	Persen	100.12		100.13		
		2 APK SMP/MTs	Persen	99.04		99.05		
		3 APM SD/MI	Persen	99.89		99.89		
		4 APM SMP/MTs	Persen	91.21		91.22		
		5 Angka Partisipasi Sekolah :						
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	100.9		100.92		
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100.66		100.68		
		Angka Kelulusan :						
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	100		100		
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100		100		
		Angka Melanjutkan Pendidikan :						
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	99.98		99.98		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	93.27		93.31		
		Rasio Guru Terhadap Murid :						
		- Sekolah Dasar (SD)	Orang	1 : 0.08		1 : 0.08		
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Orang	1:0053		1:0052		
Tujuan :								
3.2	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	a. Indeks Kesehatan	Ruang	238		162		
Sasaran :								
3.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	a. Umur Harapan Hidup	Tahun	73,22-73,29		73,31-73,39		
		b. Persentase Balita Stunting	Persen	27		26		
		c. Ketersediaan ambulance gratis	Unit	0		8		
		d. Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	284		287		
		e. Angka Kematian Ibu	Kasus	23		22		
		f. Angka Kematian Bayi	Poin/ 1.000 kelahiran	4,05		4,05		
Program :								
1	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB				2.083.000.000		2.291.300.000	Dinas Kesehatan
		1 Angka Kematian Bayi	Poin/1000 kelahiran	4		4		
		2 Jumlah Kematian Ibu	Kasus	23		23		
		3 Presentase Balita Stunting	Persen	27		26		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							Dinas Kesehatan
					81.740.945.000		89.915.039.500	
		1 Angka Harapan Hidup	Tahun	73		73		
		2 Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta PBI Melalui JAMKESDA	Orang	267.127		293.84		
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				5.842.396.000		6.600.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Persentase Sarana Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya dalam kondisi yang memenuhi standar	Persen	62		67		
Tujuan :								
3.3	Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul	a. IPM	Poin	69,06		69,35		
		b. Gini Ratio	Poin	0,32		0,31		
		c Persentase penduduk miskin	Persen	11,72		11,22		
Sasaran :								
3.3.1	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan	a. Persentase penduduk miskin	Persen	11,72		11,22		
Program :								
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				212.500.000		233.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 Jumlah Desa yang mendapat	Desa/Kel	376		376		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		Bantuan BPNT						
		2 Jumlah Guru BP dan Siswa SLTP dan SLTA yang dibimbing dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Sekolah	30		30		
		3 Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pendataan	Kecamatan	32		32		
		4 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)	Kelompok	15		15		
		5 Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang dibina	Kelompok	30		30		
		6 Jumlah Pendampingan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	50		40		
		7 Jumlah Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	100		100		
		8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi	Rumah	50		50		
2	Program Pengembangan Perumahan/Permukiman				61.015.000.000		93.150.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Peningkatan Penataan Lingkungan dan Permukiman	Lokasi	211		376		
		2 Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	32		40		
		3 Jumlah Rutilahu yang	Unit	1.678		2.1		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		ditangani bagi MBR						
		Jumlah Panjang Jalan Lingkungan, Rutilahu dan Rumah Khusus yang ditangani	Lokasi/Km			200 / 28,73		
			Unit Rumah			1,748		
		Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Lokasi			-		
			Unit Rumah			-		
			Dokumen			-		
Sasaran :								
3.3.2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59		0,53		
Program :								
1	Program Keluarga Berencana				9.604.472.000		10.564.919.200	Dinas Pengendalian Pendudukk dan Keluarga Berencana
		1 Jumlah Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1000 (Perempuan Usia 15-19) (ASFR)	Rata-rata	2.4		2.36		
		2 Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB		118		118		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR)	Persen	70.87		71.26		
		4 Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	14.63		14.39		
		5 Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	31.92		32.98		
Sasaran :								
3.3.3	Meningkatnya PUG	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,83		87,32		
Program :								
1	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak				580.000.000		638.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 Jumlah desa Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dibina	Desa	3		4		
		2 Jumlah kasus Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditangani	Kasus	29		30		
		3 Jumlah KDRT dan Trafficking yang ditangani	Kasus	14		3		
		4 Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina	Forum Anak	10		18		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		5 Jumlah Kelembagaan PUG (Driver PUG, Kelompok Kerja PUG dan Focal Point PUG) yang di berikan penguatan	Orang	115		115		
		6 Jumlah Penganggaran Responsif Gender yang dibimbing	Orang	30		30		
Sasaran :								
3.3.4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	a. Peringkat Prestasi Olahraga di tingkat regional (PORDA)	Peringkat	-		-		
		b. Peringkat Prestasi Olahraga di tingkat regional (POPDA)	Peringkat	-		-		
Program :								
1	Program Peningkatan dan Pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi				4.123.000.000		4.535.500.000	
		1 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	500		600		
		2 Jumlah event olahraga Tradisional, dan Rekreasi	Event	1		2		
		3 Prestasi Olahraga Tingat Regional	Peringkat					
		a. PORDA	Peringkat	-		-		
		b. POPDA	Peringkat	-		12		
		a. POPWILDA	Peringkat	1		-		
		b.PORPEMDA	Peringkat	6		4		
		c. PORSENITAS	Peringkat	2		2		
		d.POSPEDA	Peringkat	-		1		
		e. ORTAD	Peringkat	5		5		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		4 Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	10		15		
		5 Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	15		20		
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan				603.000.000		352.000.000	
		Jumlah Pemuda Prestasi ditingkat Provinsi	Orang	9		0		
		Jumlah Peserta Pelatihan dan Penguatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	100		100		
		Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persen	60		0		
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	1		0		
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat								
Tujuan :								
4.1	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	a. Perencanaan Sektor Terintegrasi Berbasis Desa	Buah	1		1		
		b. Pembangunan Desa Agro Pinunjul	Desa	-				
		c. Pembangunan Desa Wisata dan Budaya Pinunjul	Desa	-		8		
		d. Pembangunan Desa Pinunjul lainnya	Desa	-				

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
Sasaran :								
4.1.1	Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul	a. Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	1		1		
		b. Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis sistem	Persen	10		30		
Program :								
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				675.000.000		2.950.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi	Persen	100		100		
Sasaran :								
4.1.2	Terbangunnya sentra unggulan pertanian	a. Sentra Unggulan Padi	Desa	0		1		
		b. Sentra Unggulan Jagung	Desa	0		0		
		c. Sentra Tanaman Kedelai	Desa	1		1		
		d. Sentra Unggulan Pertanian Organik	Desa	2		1		
		e. Sentra Unggulan Sapi Potong	Desa	1		2		
		f. Sentra Unggulan Sapi Perah	Desa	0		0		
		g. Sentra Domba	Desa	1		0		
		h. Sentra Unggulan Itik	Desa	0		0		
		i. Sentra buah-buahan	Desa	2		1		
		j. Sentra Tanaman Perkebunan Kopi	Desa	1		1		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		k. Sentra Tanaman Cengkeh	Desa	0		0		
		l. Sentra tanaman tembakau	Desa	0		1		
		m. Sentra tanaman rempah	Desa	0		1		
		n. Sentra Unggulan Sayur	Desa			1		
1	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				6.540.000.000		6.667.500.000	Dinas Pertanian
		1 Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan						
		- Padi	Kw/Ha	62,54		62,24		
		- Jagung	Kw/Ha	53,41		61,71		
		- Kedelai	Kw/Ha	11,78		14,64		
		- Kacang Tanah	Kw/Ha	14,86		15,01		
		- Kacang Hijau	Kw/Ha	11,13		11,26		
		- Ubi Kayu	Kw/Ha	162,29		163,9		
		- Ubi Jalar	Kw/Ha	213,03		213,07		
2	Program Peningkatan Produksi Peternakan				2.875.000.000		3.162.500.000	Dinas Pertanian
		1 Produksi Daging						
		- Sapi	Ton	1286		1312		
		- Domba	Ton	789		805		
		- Ayam Buras	Ton	486		495		
		- Ayam Ras	Ton	25.042		25.543		
		- Itik	Ton	52		53		
		Produksi Telur:						
		- Ayam Buras	Ton	290		296		
		- Ayam Ras Petelur	Ton	6.566		6.698		
		- Itik	Ton	434		442		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		Produksi Susu Sapi	Ton	22.384		23.279		
		Populasi Ternak:						
		Sapi Perah	Ekor	5.353		5.432		
		Sapi Potong	Ekor	29.599		30.037		
		Domba	Ekor	122.531		124.342		
		Kambing	Ekor	7.325		7.434		
		Ayam Ras Petelur	Ekor	623.114		632.322		
		Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.166.381		3.245.541		
3	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				1.000.000.000		3.050.000.000	Dinas Pertanian
		Produktivitas Komoditas Perkebunan						
		- Pala	Kg/Ha	350,1		350,1		
		- Cengkeh	Kg/Ha	753,66		753,66		
		- Kopi Robusta	Kg/Ha	1.272,39		1.272,39		
		- Kopi Arabika	Kg/Ha	900		900		
		- Tembakau	Kg/Ha	1.318,15		1.318,15		
		- Tebu	Kg/Ha	3.796,91		3.796,91		
		- Nilam	Kg/Ha	474,3		474,3		
		- Kelapa	Kg/Ha	1.115,49		1.115,49		
4	Program Peningkatan Produksi Holtikultura				450.000.000		2.250.000.000	Dinas Pertanian
		Produktivitas Komoditas Holtikultura						
		Bawang Merah	Kw/Ha	93,46		94,32		
		Tomat	Kw/Ha	278,53		295,41		
		Cabe Besar	Kw/Ha	89,97		96,16		
		Cabe Rawit	Kw/Ha	190,86		205,38		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		Produksi Buah-buahan:						
		Mangga	Kw	383.335		421.668		
		Rambutan	Kw	16.721		18.393		
		Durian	Kw	40.541		44.595		
5	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan				-		1.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Jumlah Latihan dan Kunjungan Penyuluh	Kunjungan			55,672		
		Kelas Kelompok Tani :						
		Kelompok Tani Pemula	Kelompok			970		
		Kelompok Tani Lanjut	Kelompok			1,234		
		Kelompok Tani Madya	Kelompok			116		
		Kelompok Tani Utama	Kelompok			3		
		Prosentase Kelompok Tani yang difasilitasi	Persen			20		
		1 Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	270,4		271,84		
		2 Pangsa Pangan Lokal	Persen	30		35		
		3 Skor Pola Pangan Harapan	Persen	82,8		83,11		
		4 Ketersediaan Energi PerKapita	Gr	2.125		2.14		
		5 Ketersediaan Protein perKapita	Gr	57,11		59,27		
		6 Pengawasan Pangan	Jenis	8		10		
		7 Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	200		225		
Sasaran :								
4.1.3	Terbangunnya sentra unggulan wisata dan budaya	a. Desa wisata	Desa	-		7		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		b. Kampung Budaya	Desa	-		1		
Program :								
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				3.339.842.000		3.673.826.200	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1 Sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Desa/DTW	1		3		
		2 Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Wisata Desa	DTW	1		3		
2	Program Keragaman Budaya				150.000.000		165.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	100		100		
Sasaran :								
4.1.4	Terbangunnya sentra unggulan lokal lainnya	a. 5 Sentra Pengembangan ikan						
		1. Mas	Desa			8		
		2. Nila	Desa			8		
		3. Lele	Desa			9		
		4. Gurame	Desa			7		
		5. Ikan Hias	Desa			3		
		b. Sentra Perdagangan	Desa	5		2		
		c. Desa Industri	Desa	5		3		
		d. Desa UKM	Desa	0		1		
		e. Desa Koperasi	Desa	0		1		
		f. Desa Kuliner Tradisional	Desa	0		0		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		g. Desa Pendidikan	Desa	2		2		
Program :								
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				1.498.555.000		1.648.410.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Point			103,95		
		1 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.638,95		21.451,85		
		2 Defisit Swasembada Ikan	Ton	7.6		5.7		
		3 Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Ton			600		
		4 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang			22		
		5 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Point			106,12		
		6 Produksi Perikanan Tangkap	Ton			326,29		
		7 Cakupan Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok			15		
		8 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang			1,5		
		9 Peningkatan Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar	Point			102,47		
		10 Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton			188,96		
		11 Tingkat Konsumsi Ikan	(kg/kap/tahun)			25		
		12 Cakupan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok			36		
		13 Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang			2,6		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		14 Rasio Kawasan Perairan Terhadap Total Lindung Luas Nelayan	Ha			201		
		15 Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen			13		
		16 Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok			2		
		17 Peningkatan Produkti Peternakan						
		18 Produksi Daging						
		- Sapi	Ton			1181		
		- Domba	Ton			716		
		- Ayam Buras	Ton			446		
		- Ayam Ras	Ton			17,88		
		- Itik	Ton			50		
		19 Produksi Telur:						
		- Ayam Buras	Ton			266		
		- Ayam Ras Petelur	Ton			5,358		
		- Itik	Ton			398		
		20 Produksi Susu Sapi	Ton			19,787		
		21 Populasi Ternak:						
		Sapi Perah	Ekor			5,432		
		Sapi Potong	Ekor			27,033		
		Domba	Ekor			118,125		
		Kambing	Ekor			6,691		
		Ayam Ras Petelur	Ekor			505,858		
		Ayam Ras Pedaging	Ekor			2.271.879		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri				150.000.000		1.826.600.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	UDKM	0		110		
		2 Sentra Perdagangan	Pasar Desa	0		2		
		3 Jumlah Prosuk IKM yang dipromoaikan	IKM	40		40		
		4 Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Event	5		5		
		5 Jumlah Pelaksanaan Opeasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah	Kali	1		1		
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro				575.000.000		632.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
		1 Jumlah UKM Binaan	UKM	100		150		
		2 Jumlah Wira Usahawan Baru	Orang	-		100		
		3 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Orang	1		1		
		4 Desa Kuliner Tradisional	Desa	0		0		
Tujuan :								
4.2	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	a. Desa Pusat Investasi	Desa	-		1		
		b. LPE	Persen	≥6,00		≥6,00		
		c. Indeks pengeluaran	Poin	66,46		66,93		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		d. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,62		13,88		
		e. Pemetaan Kebutuhan Keahlian/kualifikasi tenaga kerja berbasis desa	paket	4		5		
Sasaran :								
4.2.1	Meningkatnya investasi skala desa	a. Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 M	Desa	1		0		
		b. TPT	persen	8,62		13,88		
		c. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	8.400 - 8.500		3,836		
Program :								
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				150.000.000		300.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi Investasi	2/50		3		
Sasaran :								
4.2.2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa	a. Lumbung pangan	Buah	5		0		
Program :								
1	Penguatan Cadangan Pangan						1.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		1 Penguatan Cadangan Pangan:						

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		-Cadangan pangan Pemerintah	Ton	20		8		
		-Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	100		120		
Sasaran :								
4.2.3	Meningkatnya lapangan kerja didesa	a. Jumlah lapangan kerja di desa	Paket	4		5		
		b. Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	80		100		
Program :								
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				350.000.000		700,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	576		320		
		2 Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	64		96		
Sasaran :								
4.2.4	Menurunnya tingkat pengangguran	a. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	8.400-8.500		3.836		
Program :								
1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja				525.000.000		360.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan terlayani	Orang	11.425		9,125		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Jumlah Pencari Kerja yang Berpartisipasi dalam Pameran Bursa Kerja / Job Fair per tahun	Orang	2.5		0		
		3 Jumlah Penganggur Musiman yang terserap	Orang	176		132		
		4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	8.48		3		
		5 Jumlah Tenaga Kerja Mandiri / Wirausaha Baru	Orang	20		0		
		Penyebarluasan Informasi Peluang Kerja keluar Negeri	Desa			0		
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	Orang			0		
		Penyelesaian Permasalahan PMI	Kasus			0		
Sasaran :								
4.2.5	Terciptanya wirausaha baru berbasis pesantren	a. Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/Orang	0		Feb-40		
Program :								
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				125.000.000		2.050.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Pertumbuhan IKM	IKM	58		104		
		2 Jumlah Peningkatan Produk IKM	IKM	0		25		
		3 Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan	IKM	4		30		
		4 Fasilitasi Sertifikasi S-PIRT	IKM	20		100		
		5 Fasilitasi Pendaftaran Produk Halal	IKM	10		20		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		6 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual KAI	IKM	0		20		
		7 Wiraushawan Baru	Orang	0		50		
		8 Wirausaha Baru berbasis Pesantren	Pesantren/Orang	0		Feb-40		
Tujuan :								
4.3	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Indeks Desa Membangun	Poin	0,65		0,655		
Sasaran :								
4.3.1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Jumlah BUMDES	Unit	14		14		
		b. Status Desa :	Desa Mandiri	2		2		
		- Tertinggal						
		- Berkembang						
		- Maju						
		- Mandiri						
Program :								
1	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan				1.400.000.000		1.540.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1 Jumlah BUMDesa yang mendapat pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa yang Mandiri	Desa	14		14		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari								
Tujuan :								
5.1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	a. Kemantapan Jalan	Persen	81,9		82,9		
		b. Kondisi Baik Irigasi	Persen	60		62		
Sasaran :								
5.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	a. Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	72		72		
		Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	600		600		
		Cakupan pelayanan air minum	Persen	54		54,2		
		Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	122.598,00		116.196,89		
			%	82,74		80,25		
		Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	55		40		
Program :								
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				1.860.000.000		49.820.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 Bertambahnya jaringan jalan	Km	1,56		1		
		2 Bertambahnya jumlah jembatan	Buah	0		2		
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				26.000.000.000		48.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 Jumlah Situ/Embung dalam Kondisi Baik dan Terpelihara	Buah	16		16		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Penataan Kawasan Sempadan Sungai dan Pembangunan/Pemeliharaan TPT Sungai	Buah	5		4		
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				8.719.552.000		8.135.690.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Minum	Lokasi	48		43		
		2 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Limbah	Lokasi	36		42		
4	Program Pengembangan Perumahan/Permukiman				14.000.000.000		62.515.000.000	
		1 Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Rumah	800		748		
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				250.000.000		3.111. 000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase wilayah yang sampahnya ditangani dengan tuntas	Persen	20		30,12		
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				5.500.000.000		2.100.000.000	Dinas Perhubungan
		1 Persentase Ketersediaan Praasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	55		40		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
Sasaran :								
5.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan	a. Persentase kemantapan jalan dan jembatan	Persen	81,9		82,9		
		b. Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik	Persen	60		62		
Program :								
1	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				33.975.000.000		75.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 Jalan dalam kondisi mantap	Km	20		50		
		2 Jembatan dalam kondisi baik	M	75				
2	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				30.000.000.000		78.471.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 Jalan dalam kondisi mantap	Km	20		30		
		2 Jembatan dalam kondisi baik	M	0		65		
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya				25.000.000.000		35.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	60%		62%		
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				11.439.104.000		11.485.817.200	
		1 Cakupan pelayanan air minum	Persen	54		54,2		
		2 Akses Air Limbah Domestik	Persen	64		65		
5	Program Peningkatan Kualitas Permukiman				12.250.000.000		49.500.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
Tujuan :								
5.2	Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,22		66,110		
Sasaran :								
5.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan	a. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	3		9		
Program :								
1	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang				300.000.000		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/tersusun	Dokumen	1		1		
Sasaran :								
5.2.2	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari	a. Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	2		-		
Program :								
1	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup				-		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Rasio LH yang diintervensi		2		29		
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				50.000.000		2.950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase RTH yang dikelola dengan baik/tuntas	Persen	7		20,34		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
Sasaran :									
5.2.3	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	a.	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	Persen	85		90		
		b.	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1		1		
		c.	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Persen	85		90		
Program :									
1	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					400.000.000		440.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	Jumlah Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Desa	-		1		

Tabel 6.4.

**Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023**

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
VISI :“KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”												
Misi 1 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya Dengan Jiwa Kepemimpinan <i>Nu Sajati</i> .												
Tujuan :												
1.1	Mewujudkan Mutu Pelayanan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan	1 Opini BPK	Kategori	WTP		WTP		WTP		WTP		
		2 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	84,18		84,88		85,58		85,58		
Sasaran :												
1.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel	1 Nilai SAKIP	Level	BB+		A-		A		A		
		2 Maturitas SPIP	Level	3		3		3		3		
		3 Skor LPPD	Poin	3,412		3,493		3,522		3,522		
Program :												
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				2.105.000.000		2.241.825.000		2.556.801.413		2.556.801.413	Inspektorat
		1 Jumlah	Peraturan/	3	400.000.000	3	426.000.000	3	485.853.000		485.853.000	Inspektorat

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Kebijakan Pengawasan Yang Diimplementasikan	Keputusan /Pedoman									
		2 Jumlah Asistensi/ Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	3	350.000.000	3	372.750.000	3	425.121.375	9	425.121.375	
		3 Persentase Capaian Reformasi Birokrasi	Persen	55	400.000.000	57	426.000.000	60	485.853.000	60	485.853.000	
		4 Persentase Capaian MCP	Persen	60	450.000.000	65	479.250.000	70	546.584.625	70	546.584.625	
		5 Jumlah SKPD Yang Memiliki Nilai SPIP Level 3	SKPD	5	150.000.000	5	159.750.000	5	182.194.875	15	182.194.875	
		6 Persentase Kepatuhan LHKASN	Persen	55	80.000.000	60	85.200.000	65	97.170.600	65	97.170.600	
		7 Persentase Kepatuhan LHKPN	Persen	80	75.000.000	85	79.875.000	90	91.097.438	90	91.097.438	
		8 Level Kapabilitas APIP	Level	3	200.000.000	3	213.000.000	3	242.926.500	3	242.926.500	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan				9.641.000.000		10.267.665.000		11.710.271.933		11.710.271.933	Inspektorat

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Persentase Hasil Reviu Yang Ditindaklanjuti	Persen	60	3.400.000.000	65	3.621.000.000	70	4.129.750.500	70	4.129.750.500	
		2 Jumlah SKPD Yang Memiliki Nilai LAKIP Minimal BB	Jumlah	5	300.000.000	5	319.500.000	5	364.389.750	15	364.389.750	
		3 Persentase Menurunnya Pelaksanaan Pungli	Persen	10	750.000.000	12	798.750.000	15	910.974.375	15	910.974.375	
		4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Kabupaten, Provinsi Dan Itjen) Yang Ditindaklanjuti	Persen	60	4.666.000.000	65	4.969.290.000	75	5.667.475.245	75	5.667.475.245	
		5 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Ditindaklanjuti	Persen	75	75.000.000	80	79.875.000	85	91.097.438	85	91.097.438	
		6 Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/	Persen	5	150.000.000	10	159.750.000	15	182.194.875	15	182.194.875	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Daerah										
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Tercapainya Skor LPPD	Poin	3,412	350.000.000	3,493	400.000.000	3,522	450.000.000		450.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Tapem)
		2 Jumlah Kerjasama Antar Daerah Yang Dilaksanakan	Dokumen	40	100.000.000	40	105.000.000	40	. 110.000.000	40	. 110.000.000	
		3 Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dan Kelurahan	Desa/Kelurahan	2	100.000.000	6	300.000.000	8	400.000.000	100	400.000.000	
		4 Meningkatkan Jumlah Aparatur Kelurahan Yang Memahami Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan	Aparatur Kelurahan	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	
		5 Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan	Kecamatan	32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	
		6 Ditetapkannya 3	Kecamatan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan										
		7 Terlaksananya Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan	SKPD	30	130.000.000	30	130.000.000	30	130.000.000	30	130.000.000	
		8 Tersedianya Dan Terawatnya Pilar Batas Daerah	Pilar Batas			10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	
		9 Tercapainya Target SPM	Persentase	81	100.000.000	81,5	125.000.000	82	150.000.000			
		10 Tersedianya Buku LKPJ	Persentase	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000			
		11 Terlaksananya Sinergitas Antar Daerah Perbatasan	Persentase	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000			
		12 Terlaksananya Sinergitas Dengan Pemerintah Provinsi	Persentase	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000			
		13 Tersedianya Toponomi	Desa/Kelurahan			188	100.000.000	188	100.000.000			
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan				1.332.210.000		1.465.431.000		1.611.974.100		6.721.715.100	Bagian Keuangan Dan Bagian Umum

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Kinerja											Setda Kab. Kuningan
		1 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan	Buah	2		2		2		10		
Sasaran :												
1.1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik Yang Baik Dan Partisipasi Publik	A Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan	Persen	>90		>90		>90		>90		
		B Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik Dan	Persen	97,78		97,79		98		98		
		Akte Kelahiran 0-18 Tahun		86		87		88		88		
Program :												
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd				11.251.645.000		11.983.001.925		12.257.744.500		12.257.744.500	Sekretariat Dewan
		1 Mengatur Jalannya Roda Pemerintahan	Produk Hukum	10	3.697.295.000	10	3.882.159.750	10	4.067.024.500	10	4.067.024.500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		n Untuk Mensejahterakan Masyarakat										
		2 Terbentuknya Produk-Produk Hukum Daerah	Produk Hukum	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
		3 Meningkatkan Wawasan Pimpinan Dan Anggota DPRD	Kegiatan	5	2.127.050.000	2	2.233.402.500	2	2.585.880.000	2	2.585.880.000	
		4 Terlaksananya Kegiatan Seminar, Lokakarya, Bimtek Pimpinan Dan Anggota DPRD	Kegiatan	1	201.100.000	1	201.100.000	1	201.100.000	1	201.100.000	
		5 Terpenuhinya Koordinasi Dalam Kegiatan Fraksi DPRD	Paket	1	1.035.000.000	1	1.086.750.000	1	1.138.500.000	1	1.138.500.000	
		6 Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Dalam Kegiatan DPRD	Orang	12000	500.000.000	12000	500.000.000	12000	500.000.000	12000	500.000.000	
		7 Meningkatkan Wawasan Terhadap 3	Paket	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Fungsi DPRD										
		8 Terfasilitasinya Semua Aspirasi Yang Masuk	Paket	1	740.400.000	1	777.420.000	1	814.440.000	1	814.440.000	
		9 Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Orang	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.300.000.000		2.200.000.000		2.900.000.000		9.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah
		1 Tingkat Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	93		93		94		94		
3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				3,358,411,000		3,526,481,350		3,702,977,218		3,438,977,218	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		1 Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	78.00	300,000,000	79.00	315,000,000	80.00	330,750,000	80.00	330,750,000	
		2 Kepemilikan KTP-El	Persen	97.78	421,000,000	97.79	442,000,000	98.00	464,000,000	98.00	200,000,000	
		3 Kepemilikan Kartu Identitas	Persen	23.00	175,000,000	23.15	183,750,000	23.25	192,937,500	23.25	192,937,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Anak (KIA)										
		4 Terlaksannya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Orang	408	140,004,000	408	147,204,000	408	154,836,000	408	154,836,000	
		5 Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Desa/Kel	22	412,413,000	25	433,033,650	30	454,685,333	30	454,685,333	
		6 Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan	Paket	1	1,754,890,000	1	1,842,634,500	1	1,934,766,225	1	1,934,766,225	
		7 Terpeliharanya Jaringan SIAK Untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Paket	1	18,104,000	1	19,009,200	1	19,959,660	1	19,959,660	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		8 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk	Kali	4	137,000,000	4	143,850,000	4	151,042,500	4	151,042,500	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				325,000,000		346,125,000		394,755,563		394,755,563	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		1 Meningkatnya Dan Lancarnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kab / Kec.	1 Tk. Kab 32 Kec.	325,000,000	1 Tk. Kab 32 Kec.	346,125,000	1 Tk. Kab 32 Kec.	394,755,563	1 Tk. Kab 32 Kec.	394,755,563	
Sasaran :												
1.1.3	Meningkatnya Kecepatan Dan Ketepatan Pengelolaan Data Dan Informasi Publik	A. Penerapan E-Planning, E-Data, E-Report, E-Budgeting, E-Procurement, E-Sakip, E-Monev, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online	Jenis Aplikasi	2		2		2		10		Bappeda, Bapenda, BPKAD, Bagian PBJ, Bag Administrasi Pembangunan, Bagian organisasi & PA, BKPSDM, DPMPSTP

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		B. Meningkatkan Indeks SPBE	Point	2.75		3		3.5		4		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program :												
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.300.000.000		2.200.000.000		2.900.000.000		9.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		1 Tingkat Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	93		93		94		94		
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3,935,800,000		4.329.380.000		4.762.318.000		4.762.318.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		1 Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persen	100	480.000.000	100	528.000.000	100	580.800.000	100	580.800.000	
		2 Persentase Media Komunikasi Publik Yang Dimanfaatkan	Persen	100	2.010.800.000	100	2.211.880.000	100	2.433.068.000	100	2.433.068.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Persentase Diseminasi Informasi Dan Kemitraan Komunikasi Yang Dilaksanak an	Persen	100	1.445.000.000	100	1.589.500.000	100	1.748.450.000	100	1.748.450.000	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				9,600,000,000		87.560.000.000		88.066.000.000		88.066.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		1 Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100	4.600.000.000	100	5.060.000.000	100	5.566.000.000	100	5.566.000.000	
		2 Jumlah Terbangunny a Command Center	Unit	1	5.000.000.000	-	-	-	-		-	
		3 Jumlah Sarana Prasarana Command Center (Smart City)	Paket	-	-	1	75.000.000.000	1	75.000.000.000		75.000.000.000	
		4 Jumlah Maintenance Command Center	Paket	-	-	1	7.500.000.000	1	7.500.000.000		7.500.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				161,263,877,482		169,327,071,356		177,793,424,924		508,384,373,762	BPKAD
		1 Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	20	161,263,877,482	20	169,327,071,356	20	177,793,424,924	20	508,384,373,762	
5	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,885,000,000		1,979,250,000		2,078,212,500		5,942,462,500	BPKAD
		1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	50	1,885,000,000	75	1,979,250,000	75	2,078,212,500	250	5,942,462,500	
6	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											BKPSDM
Sasaran :												
1.1.4	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	A Nilai Target PAD	Milyar	341,03		356,52		369,67		369,67		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program:												
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6,245,000,000		6.557.250.000		6.885.112.500		6.885.112.500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Aplikasi Pendapatan Daerah Online Yang Diterapkan	Jenis	6	375,000,000	6	393,750,000	6	413,437,500	6	413,437,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Nilai Target PAD	Milyar	341,03	5,870,000,000	356,52	6,163,500,000	369,67	6,471,675,000	369,67	6,471,675,000	
Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu Sajati Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara Dalam Bingkai Kebangsaan Dan Kebhinekaan.												
Tujuan :												
2.1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Toleran, Ramah, Berkualitas Dengan Melibatkan Seluruh Potensi Umat Beragama.	A. Indeks Toleransi Beragama	Poin	69,1 – 69,4		69,5 – 69,8		69,9 – 70,2		69,9 – 70,2		
Sasaran :												
2.1.1	Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis	A. Persentase Lembaga / Organisasi Keagamaan Yang Dibina & Difasilitasi	Persen	35%		20%		20%		20%		Bag. Kesra
		B. Persentase Lembaga Pendidikan Keagamaan Yang Dibina & Difasilitasi	Persen	35%		20%		20%		20%		
Program :												
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										20.715.557.289	Sekretariat Daerah
		1 Persentase Lembaga / Organisasi	Persen	35	1.660.000.000	20	1.767.900.000	20	2.016.289.950	100	2.016.289.950	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Keagamaan Yang Dibina & Difasilitasi										
		2 Persentase Lembaga Pendidikan Keagamaan Yang Dibina & Difasilitasi	Persen	35	10.210.000.000	20	10.873.650.000	20	12.401.397.825	100	12.401.397.825	
Tujuan :												
2.2	Menegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa Dan Bermasyarakat	A Indeks Rasa Aman	Poin	71-73,5		71-73,5		73,6 - 76		73,6 - 76		
Sasaran :												
2.2.1	Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa Dan Bermasyarakat	A Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	93		94		95		95		
		B Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam	Persen	-		-		75,52		75,52		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pemilu										
2.2.2.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dan Seni Budaya Daerah	A Jumlah Budaya Dan Seni Lokal Yang Dilestarikan	Buah	128		128		128		128		
		B Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	Poin	0,47		0,48		0,50		0,50		
Program :												
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	93	442.640.200	94	486.882.220	95	535.570.442	95	535.570.442	
		2 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , Keindahan)	Persen	84	662.000.000	84	728.200.000	85	801.020.000	85	801.020.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA				200.000.000		210.000.000		220.500.000		220.500.000	Bakesbangpol

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
		1 Jumlah Parpol Yang Mendapat Pendidikan Politik	Peserta	50	100.000.000	50	105.000.000	50	110.250.000	50	110.250.000	
		2 Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu	Orang	200	100.000.000	250	105.000.000	300	110.250.000	300	110.250.000	
3	PROGRAM PENBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDYA.				425.000.000		446.250.000		468.563.000		468.563.000	Bakesbangpol
		1 Pelaku Seni/ Penggiat Seni Dan Budayawan Lokal Yang Lestari	Orang	40	150.000.000	45	157.500.000	50	165.375.000	50	165.375.000	
		2 Terjalinnya Rasa Persaudaraa n Antar Umat Beragama	Orang & Tokoh Agama	100	200.000.000	150	210.000.000	150	220.500.000	150	220.500.000	
		3 Tingkat	Persen	100		100		100		100		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Penyeleleasaan Konflik Aliran Kepercayaan			75.000.000		78.750.000		82.688.000		82.688.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONPLIK SOSIAL				400.000.000		420.000.000		441.000.000		441.000.000	
		1 Wilayah Rawan Konflik Yang Terdata	Kecamatan	8	150.000.000	10	157.500.000	11	165.375.000	11	165.375.000	
		2 Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Deteksi Dini Trantribum	Desa/ Kelurahan	376	250.000.000	376	262.500.000	376	275.625.000	376	275.625.000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				6.550.000.000		6.681.000.000		6.821.301.000		6.821.301.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	12	6.000.000.000	13	6.120.000.000	14	6.248.520.000	14	6.248.520.000	
		2 Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Unit	2	450.000.000	2	459.000.000	2	468.639.000	2	468.639.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persentase	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.142.000	100	104.142.000	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				5.670.000.000		5.873.400.000		5.904.851.400		5.904.851.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Seminar Budaya	Kali	4	5.670.000.000	5	5.873.400.000	6	5.904.851.400	6	5.904.851.400	
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				770.000.000		785.400.000		801.893.400		801.893.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Penguatan Fungsi Dan Makna Gedung Bersejarah	Kegiatan	3	770.000.000	4	785.400.000	4	801.893.400	4	801.893.400	
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				10.975.000.000		11.194.500.000		11.429.584.500		11.429.584.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Jumlah Pengunjung Ke Cagar Budaya	Orang	109.130	10.975.000.000	115.904	11.194.500.000	122.204	11.429.584.500	122.204	11.429.584.500	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				300.000.000		306.000.000		312.426.000		312.426.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Bimtek Pamong Budaya	Kali	3	300.000.000	3	306.000.000	4	312.426.000	4	312.426.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 3 : Mewujudkan Manajemen Layanan Pendidikan, Kesehatan Yang Merata, Adil, Berkualitas Dan Berkelanjutan Dalam Menciptakan Sumberdaya Manusia Nu Sajat												
Tujuan												
3.1	Mewujudkan Layanan Pendidikan Yang Adil Dan Berkualitas	A Indeks Pendidikan	Poin	60,41		60,58		60,77		60,77		
Sasaran :												
3.1.1	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan	A EYS/Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,14		12,19		12,23		12,23		
		B MYS/Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,46		7,52		7,6		7,6		
		C Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	67,56		67,78		68,04		68,04		
		D Indeks MYS / Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	50,24		50,47		50,61		50,61		
		E Rehabilitasi Ruang Kelas (1.000 RK)	Ruang	200		200		200		1.000		
		F Pembangunan Ruang Kelas Baru (300 RKB)	Ruang	75		75		71		300		
		G Pembangunan Perpustakaan (100 Ruang)	Ruang	20		20		20		100		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :												
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				621.776.145.94 9		634.211.668.8 69		647.530.113.9 15		647.530.113.9 15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Persentase Anak Yang Mengikuti PAUD	Persen	76,12	93.643.707.000	76,15	95.516.581.14 0	76,2	97.522.429.34 4	76,2	97.522.429.34 4	
		2 APK SD/MI	Persen	100.14	103.188.885.53 3	100.15	105.252.663.2 44	100.16	107.462.969.1 72	100.16	107.462.969.1 72	
		3 APK SMP/Mts	Persen	99.07	66.855.627.450	99.07	68.192.739.99 9	99.08	69.624.787.53 9	99.08	69.624.787.53 9	
		4 APM SD/MI	Persen	99.90	103.188.885.53 3	99.91	105.252.663.2 44	99.93	107.462.969.1 72	99.93	107.462.969.1 72	
		5 APM SMP/Mts	Persen	91.24	66.855.627.450	91.26	68.192.739.99 9	91.27	69.624.787.53 9	91.27	69.624.787.53 9	
		6 Angka Partisipasi Sekolah :										
		- Sekolah Dasar (SD	Persen	100.94	103.188.885.53 3	100.95	105.252.663.2 44	100.96	107.462.969.1 72	100.96	107.462.969.1 72	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Persen	100.68	66.855.627.450	100.69	68.192.739.99 9	100.70	69.624.787.53 9	100.70	69.624.787.53 9	
		7 Angka Kelulusan :										
		- Sekolah Dasar (SD	Persen	100	250.000.000	100	255.000.000	100	260.355.000	100	260.355.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Persen	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.142.000	100	104.142.000	
		8 Angka Melanjutkan Pendidikan :										
		- Sekolah Dasar (SD	Persen	99.98	100.000.000	99.98	102.000.000	99.98	104.142.000	99.98	104.142.000	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Persen	93.33	100.000.000	93.35	102.000.000	93.40	104.142.000	93.40	104.142.000	
		9 Rasio Guru Terhadap Murid :										
		- Sekolah Dasar (SD	Orang	1 : 0.09	793.200.000	1 : 0.10	809.064.000	1 : 0.10	826.054.344		826.054.344	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Orang	1:0051	575.000.000	1:0050	586.500.000	1:0050	598.816.500		598.816.500	
		10 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dan Informal	Orang	1 : 044	2.335.000.000	1 : 051	2.381.700.000	1 : 058	2.431.715.700	1 : 058	2.431.715.700	
		11 Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat	Orang	1.047	13.745.700.000	1.049	14.020.614.000	1.051	14.315.046.894	1.051		
3.2	Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Melalui Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	A Indeks Kesehatan	Ruang	82,23		82,45		82,67		82,67		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Yang Terjangkau											
Sasaran :												
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	A. Umur Harapan Hidup	Tahun	73,37		73,45		73,53		73,53		
		B. Persentase Balita Stunting	Persen	15		5		2,5		2,5		
		C. Ketersediaan Ambulance Gratis	Unit	8		8		8		72		
		D. Revitalisasi 1.423 Posyandu	Unit	284		284		284		1.423		
		E. Angka Kematian Ibu	Kasus	22		21		21		21		
		F. Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 Kelahiran	4,04		4,03		4,02		4,02		
Program :												
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				150.703.095.769		163.507.747.869		175.075.385.262		175.075.385.262	
		1 Jumlah Fasilitas Pelayanan										

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)										
		2 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya	Unit	1	20.000.000.000		-		-	1	-	
		3 Pembangunan Puskesmas	Unit	5	11.000.000.000	3	12.000.000.000	3	12.000.000.000	9	31.500.000.000	
		4 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	3	3.117.689.500	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	6	6.000.000.000	
		5 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya /Pustu	Unit	1	150.000.000	9	1.350.000.000	10	1.500.000.000	20	1.500.000.000	
		6 Pengadaan Prasarana Dan Pendukung	Unit	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10	5.015.000.000	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10 IPAL = 5	3.750.000.000	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10 IPAL = 5	3.750.000.000	Roda 4 = 12/Roda 2 = 30 IPAL =	51.000.000.000	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan		IPAL = 9						19		
		7 Pengadaan Dan Pemeliharaana n Alat Kalibrasi	Unit					1	200.000.000	1	200.000.000	
		8 Pengadan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medic Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1	291.339.675	1	500.000.000	1	650.000.000			
		9 Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	1	6.500.000.000	1	10.000.000.000	1	12.500.000.000			
		10 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	1	8.377.525.000	1	12.500.000.000	1	15.000.000.000			
		11 Persentase Layanan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dasar (SPM Bid. Kesehatan, Jaminan Kesehatan,								100	-	Dinkes

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		KLB, Surveilans Kesehatan, Penyakit Menular Dan Tidak Menular										
		12 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.Kesmas
		13 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	225.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.Kesmas
		14 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	456.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.Kesmas
		15 Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	200.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.Kesmas
		16 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	325.000.000	100	325.000.000	100	400.000.000			Bid.Kesmas
		17 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	100	250.000.000	100	2.300.000.000	100	2.400.000.000			Bid.P2P
		18 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.Kesmas
		19 Pelayanan Kesehatan Penderita	Persen	100	50.000.000	100	6.250.000.000	100	6.300.000.000			Bid.P2P

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Hipertensi										
		20 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	50.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000			Bid.P2P
		21 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000			Bid.P2P
		22 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	1.400.000.000	100	1.550.000.000	100	1.850.000.000			Bid.P2P
		23 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	100	75.000.000	100	355.000.000	100	405.000.000			Bid.P2P
		24 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.P2P
		25 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk	Persen	100		100	200.000.000	100	225.000.000			Bid.P2P

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana										
		26 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100	180.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000			Bid.Kesmas
		27 Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Persen	70	80.220.000	85	90.000.000	100	100.000.000			Bid.Kesmas
		28 Pelayanan Kesehatan Lingkungan			85.000.000	100	270.000.000	100	310.000.000			Bid.Kesmas
		29 Pelayanan Promosi Kesehatan				100	100.000.000	100	125.000.000			Bid.Kesmas
		30 Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	Persen	30	100.000.000	60	100.000.000	100	100.000.000			Bid. Yankes
		31 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persen	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.P2P
		32 Pelayanan Kesehatan Orang	Persen	100	43.750.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.P2P

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
		33 Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	Persen	100	33.750.000	100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.P2P
		34 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			240.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000			Bid. Yankes
		35 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid. Yankes
		36 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Persen	100	1.204.132.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000			Bid.P2P
		37 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	44.938.473.094	100	47.185.396.749	100	49.544.666.586			Bid.SDK
		38 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes Dan Sekolah	Persen	100	39.550.000	100	100.000.000	100	100.000.000			Bid.P2P
		39 Pengambilan	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.P2P

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional										
		40 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persen	60	0	70	750.000.000	80	1.000.000.000			Bid.Kesmas
		41 Penyediaan Telemedicine Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit			1	1.500.000.000	1	1.750.000.000			Bid. Yankes
		42 Operasional Pelayanan Puskesmas		37	42.504.128.500	37	51.567.351.120	37	54.145.718.676			
		43 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000			
		44 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota	Puskesmas	21	2.221.538.000	16	2.500.000.000	37	2.500.000.000			Bid. Yankes
		45 Investigasi Awal Kejadian	Persen	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000			Bid.P2P

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)										
		46 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Persen			100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.P2P
		47 Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)" Pada Nomenklatur Kabupaten/ Kota	37 PKM 12 RS Kader			50	100.000.000	50	100.000.000			Bid. Yankes
		48 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										
		49 Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000			

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		50 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aplikasi	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
		51 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Dan Jaringan Internet	Paket			1	250.000.000	1	250.000.000			
		52 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persen			100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.SDK
		53 Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persen			100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.SDK

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		54 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 RS			100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.Yankes
		55 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	37	100.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000			Bid.Yankes
		56 Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				100	50.000.000	100	50.000.000			Bid.Yankes
Tujuan :												
3.3	Menciptakan Sumberdaya Manusia Yang Santana, Basajan, Santika Dan Unggul	A. IPM	Poin	69,26		69,45		69,66		69,66		
		B. Gini Ratio	Poin	<0,38		<0,38		<0,38		<0,38		
		C. Persentasependuduk Miskin	Persen	10,72		10,22		9,72		9,72		
Sasaran :												
3.3.1	Meningkatnya Upaya	A. Persentase	Persen	13,38		13,06		12,74		12,74		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Penanggulangan Kemiskinan	Penduduk Miskin										
Program :												
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				750.000.000		787.500.000		826.875.000		826.875.000	
		1 Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,38		13,06		12,74		12,74		
		2 Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Pendataan DTKS & Non – DTKS	Kec.	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	
		3 Jumlah Anak Terlantar Yang Ditangani	Orang	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				17.925.000.000		18.821.250.000		19.762.312.500		19.762.312.500	
		1 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)	Kelompok	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan	Orang	100	275.000.000	200	450.000.000	300	675.000.000	300	675.000.000	
		3 Jumlah PSM, Karang Taruna, TKSK Dan Orsos Tingkat Kab. Kuningan Yang Dibina	Orang	100	200.000.000	150	300.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	
		4 Jumlah Desa Yang Mendapat Bhakti Sosial Karang Taruna	Desa	10	150.000.000	15	225.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	
		5 Jumlah TKSK Yang Dibina	Orang	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	
		6 Jumlah Undian Berhadiah Yang Diberi Ijin	Kegiatan	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		7 Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang	Orang	160	150.000.000	160	150.000.000	160	150.000.000	160	150.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Ditangani										
3	Program Pengembangan Perumahan				28.900.000.000		37.275.000.000		37.275.000.000		274.480.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		1 Jumlah Panjang Jalan Lingkungan, Rutilahu Dan Rumah Khusus Yang Ditangani	Lokasi/Km	-		-		-		411 / 60,73		
			Unit Rumah	-		-		-		3.426		
		2 Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah Dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah	Lokasi	15		15		15		45		
			Unit Rumah	1.6		1.9		1.9		5.4		
			Dokumen	16		26		26		68		
Sasaran :												

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.3.2	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	A. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,47		0,47		0,37		0,37		
Program :												
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				7.452.500.000		7.936.912.500		9.052.048.706		9.052.048.706	DPPKBP3A
		1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Dan Jejaringnya Diseluruh Tingkatan Wilayah Yang Melayani KB	Jumlah	119	1.500.000.000	120	1.597.500.000	121	1.821.948.750	121	1.821.948.750	
		2 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevelence Rate (CPR)	Persen	71.61	2.000.000.000	71.94	2.130.000.000	72.24	2.429.265.000	72.24	2.429.265.000	
		3 Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	15,16	1.750.000.000	13.94	1.863.750.000	13.73	2.125.606.875	13.73	2.125.606.875	
		4 Persentase Cakupan	Persen	32,03	2.202.500.000	35.07	2.345.662.500	36.1	2.675.228.081	36.1	2.675.228.081	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
Sasaran :												
3.3.3	Meningkatnya PUG	A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,82		88,32		88,82		88,82		
Program :												
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				800.000.000		852.000.000		971.706.000		971.706.000	DPPKBP3A
		1 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan Yang Dibiina	Orang	50	100.000.000	50	106.500.000	55	121.463.250	255	121.463.250	
		2 Jumlah Perempuan Dalm Politik Yang Dibina	Orang	200	200.000.000	200	213.000.000	200	242.926.500	1.048	242.926.500	
		3 Jumlah Perempuan Dalam Profesi Yang Dibina	Orang	2.704	100.000.000	3.606	106.500.000	4.507	121.463.250	13.521	121.463.250	
		4 Jumlah Penganggara n Responsif	Orang	30	200.000.000	30	213.000.000	30	242.926.500	150	242.926.500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Gender Yang Dibimbing										
		5 Jumlah Kelompok Pemberdayaa n Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Yang Dibina	Kelompok	5	100.000.000	5	106.500.000	5	121.463.250	25	121.463.250	
		6 Jumlah Organsiasi Perempuan Yang Dibina	Organisasi	38	100.000.000	38	106.500.000	38	121.463.250	190	121.463.250	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				200.000.000		213.000.000		242.926.500		242.926.500	DPPKBP3A
		1 Jumlah KDRT Dan Trafficking Yang Ditangani	Kasus	5	200.000.000	7	213.000.000	10	242.926.500	15	242.926.500	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				250.000.000		266.250.000		303.658.125		303.658.125	DPPKBP3A
		1 Jumlah Desa Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS)	Desa	1	250.000.000	1	266.250.000	1	303.658.125	5	303.658.125	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Yang Dibina										
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				150.000.000		159.750.000		182.194.875		182.194.875	DPPKBP3A
		1 Jumlah Dokumen Profil Gender	Jenis	1	150.000.000	1	159.750.000	1	182.194.875	1	182.194.875	
Sasaran :												
3.3.4	Meningkatnyaprestasi pemuda Dan Olahraga	A. Peringkatprestasiolahraga Di Tingkat Regional (PORDA)	Peringkat	-		8		-		8		
		B. Peringkatprestasiolahraga Di Tingkat Regional (POPDA)	Peringkat	-		10		-		10		
Program :												
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Prestasi Ditingkat Provinsi	Orang	5	850.000000	5	1.150.000.000	5	1.400.000.000	15	3.400.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persen	80	22.550.000.000	90	2.800.000.000	100	3.350.000.000	100	28.700.000.000	
		Jumlah Peserta Pelatihan Dan Penguatan	Orang	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	400	1.200.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengembangan Kewirausahaan Pemuda										
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				850.000.000		960.000.000		1.400.000.000		3.400.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan Dan Kepramukaan	Kategori	1	850.000.000	1	960.000.000	1	1.400.000.000	1	3,400.000.000	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Olahraga	Orang	750		800	250.000.000	900	300.000.000	2.750	550.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Jumlah Event Olahraga Tradisional, Dan Rekreasi	Event	2	350.000.000	2	400.000.000	2	475.000.000	7	1.225.000.000	
		Prestasi Olahraga Tingkat Regional	Peringkat		2.203.450.000		2.500.0000.000		2.700.000.000		7.403.450.000	
		A. PORDA	Peringkat	-		8		-		8		
		B. POPDA	Peringkat	-		10		-		10		
		A. POPWILDA	Peringkat	1		-		1		1		
		B.PORPEMDA	Peringkat	3		3		3		3		
		C. PORSENTAS	Peringkat	1		1		1		1		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		D.POSPEDA	Peringkat	1		1		1		1		
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	20	134.362.165.000	22	20.100.000.000	28	23.650.000.000	28	178.112.165.000	
		Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	20	125.000.000	25	200.000.000	30	300.000.000	100	625.000.000	
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata, Budaya Dan Potensi Local Untuk Mempercepat Pertumbuhan Serta Pemerataan Ekonomi Rakyat												
Tujuan :												
4.1	Terbangunnya Desa Pinunjul/Unggul Berdasarkan Karakteristik Local Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	A. Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa	Buah	1		1		1		1		
		B. Pembangunan Desa Agro Pinunjul	Desa							42		
		C. Pembangunan Desa Wisata Dan Budaya Pinunjul	Desa	7		7		4		26		
		D. Pembangunan Desa Pinunjul Lainnya	Desa							33		
Sasaran :												
4.1.1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul	A. Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	1		1		1		1		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		B. Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul Berbasis Sistem	Persen	30		20		10		100		
Program :												
1	Program Perencanaan Perkonomian Dan Sumber Daya Alam				2.450.000.000		2.700.000.000		2.600.000.000		11.375.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah
		1 Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	100		100		100		100		
Sasaran :												
4.1.2	Terbangunnya Sentra Unggulan Pertanian											
		A. Sentra Unggulan Padi	Desa	1		0		0		1		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		B. Sentra Unggulan Jagung	Desa	0		1		0		1		
		C. Sentra Tanaman Kedelai	Desa	1		0		0		2		
		D. Sentra Unggulan Pertanian Organik	Desa	1		0		2		6		
		E. Sentra Unggulan Buah-Buahan	Desa	1		2		2		7		
		F. Sentra Tanaman Perkebunan Kopi	Desa	1		1		0		3		
		G. Sentra Tanaman Cengkeh	Desa	0		1		1		2		
		H. Sentra Tanaman Tembakau	Desa	1		0		0		1		
		I. Sentra Tanaman Rempah Dan Biofarmaka	Desa	1		1		1		3		
		J. Sentra Unggulan Sayuran	Desa	1		1		1		6		
		K. Sentra Unggulan Sapi Potong	Desa	2		1		2		6		
		L. Sentra Unggulan	Desa	0		0		0		1		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Sapi Perah										
		M. Sentra Domba	Desa	0		2		0		3		
		N. Sentra Unggulan Itik	Desa	0		1		0		1		
Program :												
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian											
		1 Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan			6.800.000.000		6.900.000.000		7.000.000.000		27.007.500.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		- Padi	Kw/Ha	60,36		60,48		60,60		60,60		
		- Jagung	Kw/Ha	61,89		62,07		62,25		62,25		
		- Kedelai	Kw/Ha	14,71		14,78		14,85		14,85		
		- Kacang Tanah	Kw/Ha	15,16		15,31		15,49		15,49		
		- Kacang Hijau	Kw/Ha	11,39		11,52		11,65		11,65		
		- Ubi Kayu	Kw/Ha	165,51		167,12		168,73		168,73		
		- Ubi Jalar	Kw/Ha	213,11		213,15		213,19		213,19		
		-Porang	Kw/Ha	200		213,15		213,19		213,19		
		2 Produktivitas Komoditas Perkebunan			3.500.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		16.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		- Pala	Kg/Ha	357,10		364,24		367,89		367,89		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		- Cengkeh	Kg/Ha	1.049,85		1.203,70		1.360,28		1.360,28		
		- Kopi Robusta	Kg/Ha	1.285,11		1.310,82		1.310,82		1.310,82		
		- Kopi Arabika	Kg/Ha	918,09		918,09		927,27		927,27		
		- Tembakau	Kg/Ha	1.344,62		1.358,09		1.371,67		1.371,67		
		- Tebu	Kg/Ha	3.873,23		3.873,23		3.911,96		3.911,96		
		- Nilam	Kg/Ha	483,83		488,67		493,56		493,56		
		- Kelapa	Kg/Ha	1.183,42		1.218,93		1.255,49		1.255,49		
		3 Produktivitas Komoditas Holtikultura			2.500.000.000		2.750.000.000		3.000.000.000		10.950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Bawang Merah	Kw/Ha	95,18		96,04		96,90		96,90		
		Tomat	Kw/Ha	312,30		329,19		346,08		346,08		
		Cabe Besar	Kw/Ha	102,34		108,53		114,71		114,71		
		Cabe Rawit	Kw/Ha	214,97		221,83		226,89		226,89		
		Produksi Buah-Buahan:										
		Mangga	Kw	463.835		506.002		556.602		556.602		
		Rambutan	Kw	20.233		22.072		24.279		24.279		
		Durian	Kw	49.054		53.513		58.865		58.865		
	Program Penyuluhan Pertanian				798.700.000		850.615.500		970.126.978		970.126.978	Dinas Ketahanan Pangan Dan

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
												Pertanian
		Jumlah Latihan Dan Kunjungan Penyuluh	Kunjungan	60.192		65.016		70.272		70.272		
		Kelas Kelompok Tani :										
		Kelompok Tani Pemula	Kelompok	1.019		1.070		1.123		1.123		
		Kelompok Tani Lanjut	Kelompok	1.358		1.493		1.643		1.643		
		Kelompok Tani Madya	Kelompok	127		140		154		154		
		Kelompok Tani Utama	Kelompok	4		6		8		8		
		Cakupan Binaan Kelompok Yang Difasilitasi	Persen	25		30		35		35		
		Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Kelompok	25		30		40		95		
		Penguatan Kelembagaan Hortikultura	Kelompok	10		15		20		45		
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		6.600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		1 Ketersediaan	Kg/Kap./T	274,56		277,31		280,08		280,08		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pangan Utama	h									
		2 Pangsa Pangan Lokal	Persen	40		45		50		50		
		3 Skor Pola Pangan Harapan	Persen	84,35		85,27		86,73		86,73		
		4 Ketersediaan Energi Perkapita	Gr	2.145		2.16		2.185		2.185		
		5 Ketersediaan Protein Perkapita	Gr	60,01		61,37		62,25		62,25		
		6 Pengawasan Pangan	Jenis	10		11		12		12		
		7 Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	225		250		250		250		
Sasaran :												
4.1.3	Terbangunnya Sentra Unggulan Wisata Dan Budaya	A. Desa Wisata	Desa	7		7		4		25		
		B. Kampung Budaya	Desa	-		-		-		1		
Program :												
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				45.310.000.000		20.250.000.000		20.250.000.000		85.810.000.000	Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata
		1 Pengembang an Potensi Desa Wisata Dan Wisata	DTW	3	900.000.000	3	10.250.000.000	3	10.250.000.000	13		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Desa										
		2 Sarana Dan Prasarana Destinasi Pariwisata	Desa/DTW	3	44.410.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	13		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				6.550.000.000		6.681.000.000		6.821.301.000		6.821.301.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	12	6.000.000.000	13	6.120.000.000	14	6.248.520.000	14	6.248.520.000	
		2 Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Unit	2	450.000.000	2	459.000.000	2	468.639.000	2	468.639.000	
		3 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persentase	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.142.000	100	104.142.000	
Sasaran :												
4.1.4	Terbangunnya Sentra Unggulan Lokal Lainnya	A 5 Sentra Pengembangan Ikan										Dinas Perikanan Dan Peternakan
		1. Mas	Desa	8		8		8		40		
		2. Nila	Desa	8		8		8		40		
		3. Lele	Desa	9		9		9		45		
		4. Gurame	Desa	7		7		7		35		
		5. Ikan Hias	Desa	3		3		3		15		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		B Sentra Perdagangan	Desa	5		5		5		25		
		C Desa Industri	Desa	3		4		4		18		
		D Desa UKM	Desa	1		1		1		3		
		E Desa Koperasi	Desa	1		1		1		3		
		F Desa Kuliner Tradisional	Desa	1		0		0		1		
		G Desa Pendidikan	Desa	3		1		1		7		
Program :												
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.700.000.000		4.070.000.000		4.680.500.000		15.597.465.500	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan (Ntpi)	Persen	102,75		103,5		103,72		103,95		
		2 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	23.261,55		25.068,65		26.875,67		26.875,67		
		3 Defisit Swasembada Ikan	Ton	3.800		1.900		0		0		
		4 Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Ton	650		700		800		800		
		5 Jumlah Rumah Tangga	Orang	22.500		23.000		23.500		23.500		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Perikanan (RTP)										
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				1.200.000.000		1.320.000.000		1.518.000.000		4.038.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	101,65		101,95		102,75		103,25		
		2 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	355,66		387,66		419,57		419,57		
		3 Cakupan Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	17		19		21		21		
		4 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang	1.620		1.700		1.835		1.835		
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				1.800.000.000		1.980.000.000		2.277.000.000		6.057.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Pengolah Dan Pemasar	Point	102,1		101,95		101,5		101,5		
		2 Produksi Pengolahan Dan Pemasaran	Ton	204,07		220,4		236,03		236,03		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Hasil Perikanan										
		3 Tingkat Konsumsi Ikan	(Kg/Kap/Tahun)	25		25		25		25		
		4 Cakupan Kelompok Pengolah Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	40		44		48		48		
		5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	2.700		2.800		3.000		3.000		
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				700.000.000		770.000.000		885.500.000		2.355.500.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		1 Rasio Kawasan Perairan Terhadap Total Lindung Luas Nelayan	Ha	202		203		204		204		
		2 Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen	12		11		10		10		
		3 Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	3		4		5		5		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produkti Peternakan			2.230.000.000		2.750.000.000		3.240.000.000		8.220.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		1 Produksi Daging										
		- Sapi	Ton	1216		1252		1290		1290		
		- Domba	Ton	737		759		782		782		
		- Ayam Buras	Ton	468		482		496		496		
		- Ayam Ras	Ton	19.668		20.651		22.716		22.716		
		- Itik	Ton	51		55		56		56		
		Produksi Telur:										
		- Ayam Buras	Ton	279		287		288		288		
		- Ayam Ras Petelur	Ton	5.626		5.907		6.202		6.202		
		- Itik	Ton	423		440		458		458		
		Produksi Susu Sapi	Ton	20.776		21.607		22.687		22.687		
		Populasi Ternak:										
		Sapi Perah	Ekor	5.511		5.590		5.670		5.670		
		Sapi Potong	Ekor	27.884		28.442		29.011		29.011		
		Domba	Ekor	120.488		122.898		125.356		125.356		
		Kambing	Ekor	6.825		6.962		7.101		7.101		
		Ayam Ras Petelur	Ekor	556.444		589.831		625.221		625.221		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.430.911		2.576.766		2.705.604		2.705.604		
7	Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian				1.750.000.000		2.350.000.000		2.600.000.000		6.700.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan	Persen	40		45		50		50		
		Pembangunan Rehabilitasi, Jaringan Irigasi Dan Jalan Usaha Tani Dan Ternak	Unit	3		3		3		3		
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Sapi Pasundan	Ekor	10		10		10		50		
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				600.000.000		700.000.000		700.000.000		2.000.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Sosialisasi Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Desa	10		10		10		10		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Strategis										
		Vaksin Rabies	Ekor	650		800		1.000		1.000		
		Vaksin Flu Burung	Ekor	50.000		50.000		50.000		50.000		
		Pengawasan Produk Makanan Asal Hewan	Sample	350		375		400		500		
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				200.000.000		400.000.000		500.000.000		1.600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Pelaksanaan Opeasi Pasar Murah Dan Bazar Pasar Murah	Kali	1		1		1		5		
10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				1.400.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		5.405.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Prosuk IKM	IKM	40		40		40		190		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Yang Dipromoaikan										
		2 Jumlah Pameran Yang Dilaksanakakan	Event	5		5		5		24		
		3 Optimalisasi Pelayanan Informasi Perdagangan	Kegiatan	1		1		1		3		
11	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi				2.200.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		9.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	500		510		520		520		
Tujuan :												
4.2	Terwujudnya Daya Dukung Investasi Bagi Pembangunan Desa Yang Mendorong Pertumbuhan Lapangan Kerja	A. Desa Pusat Investasi	Desa	3		3		4		4		
		B. LPE	Persen	1,75 - 2,65		1,90 - 3,00		2,00- 3,45		2,00- 3,45		
		C. Indeks Pengeluaran	Poin	66,22- 66,59		66,23- 66,7		66,33- 66,91		66,33- 66,91		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		D. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,51		10,14		10,14		10,14		
		E. Pemetaan Kebutuhan Keahlian/Kualifikasi Tenaga Kerja Berbasis Desa	Paket	6		7		8		30		
Sasaran :												
4.2.1	Meningkatnya Investasi Skala Desa	A. Jumlah Desa Dengan Nilai Investasi >200 Juta	Desa	4		5		5		15		
		B. TPT	Persen	11,51		10,14		10,14		10,14		
		C. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	5.670		6.230		7.159		30.530		
Program :												
1	Program Promosi Penanaman Modal				400.000.000		800.000.000		850.000.000		2.950.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1. Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi Investasi	4		4		4		21		
Sasaran :												
4.2.2	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Pangan Desa	A. Lumbung Pangan	Buah	3		3		3		10		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :												
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				2.650.000.000		2.822.250.000		2.318.776.125		2.318.776.125	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		1 Penguatan Cadangan Pangan:										
		-Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	20		25		30		30		
		-Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	140		160		180		180		
		2 Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap./Th	274		277,31		280,08		280,08		
		3 Pangsa Pangan Lokal	Persen	40		45		50		50		
		4 Skor Pola Pangan Harapan	Persen	84,11		84,53		85,35		85,35		
		5 Ketersediaan Energi Perkapita	Gr	2.145		2.160		2.185		2.185		
		6 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga Dan Akses Pangan	Dokumen	2		2		2		2		
		7 Stabilisasi Harga Dan Pasokan										

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pangan										
		- Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Kelompok	2		2		2		21		
		- Pengembang an Usaha Pangan Masyarakat Dan Toko Tani Indonesia	Kelompok	2		2		2		12		
Sasaran :												
4.2.3	Meningkatnya Lapangan Kerja Didesa	A. Jumlah Lapangan Kerja Di Desa	Paket	6		7		8		30		
		B. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Di Desa	Orang	120		140		160		600		
Program :												
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				2.250.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		8.650.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1		1 Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti	Orang	528		640		880		2944		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pelatihan Berbasis Kompetensi										
		2 Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	96		128		160		544		
Sasaran :												
4.2.4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	A. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	5.670		6.230		7.150		30.530		
Program :												
1	Program Penempatan Tenaga Kerja				2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		1 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dan Terlayani	Orang	11.940		12.482		12.682		57.654		
		2 Jumlah Pencari Kerja Yang Berpartisipas i Dalam Pameran Bursa Kerja / Job Fair Per Tahun	Orang	2.300		2.500		2.750		10.050		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Jumlah Penganggur Musiman Yang Terserap	Orang	132		176		176		792		
		4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	5.670		6.230		7.150		30.530		
		5 Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/Wir usaha Baru	Orang	20		20		40		100		
		6 Penyebarluas an Informasi Peluang Kerja Keluar Negeri	Desa	100		125		151		376		
		7 Pemberdayaa n Pekerja Migran Indonesia	Orang	50		75		100		225		
		8 Penyelesaian Permasalah an PMI	Kasus	10		15		20		45		
Sasaran :												
4.2.5	Terciptanya Wirausaha Baru Berbasis Pesantren	A. Wirausaha Baru Berbasis Pesantren	Pesantren/ Orang	Feb-40		Feb-40		Feb-40		8/160		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :												
1	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri				1.000.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		5.875.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Pertumbuhan IKM	IKM	58		74		200		436		
		2 Jumlah Peningkatan Produk IKM	IKM	9		22		10		66		
		3 Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin Dan Peralatan	IKM	30		30		30		116		
		4 Peningkatan Daya Saing Untuk Produk Home Industri Dan Kemasan	IKM	130		130		130		1.090		
		5 Wirausaha Baru Berbasis Pesantren	Pesantren/Orang	Feb-40		Feb-40		Feb-40		8/160		
Tujuan :												

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4.3	Mempercepat Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	A. Indeks Desa Membangun	Poin	0,660		0,665		0,670		0,670		
Sasaran :												
4.3.1	Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	A Jumlah BUMDES	Unit	5		10		10		10 (55)		
		B Status Desa : - Tertinggal - Berkembang - Maju - Mandiri	Desa Mandiri	18		10		10		57		
Program :												
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				311.038.087.980		342.141.896.778		376.356.086.456		376.356.086.456	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		1 Jumlah Aparatur Desa Yang Dibina Dan Terlatih	Jumlah	833	1.500.000.000	808	1.575.000.000	1083	1.653.750.000	1083	-	
		2 Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	361	308.468.087.980	361	323.891.492.379	361	340.086.066.997	361		
		3 Jumlah	Desa	10	1.070.000.000	10		10		55		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Bumdesa Yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa Yang Mandiri					1.123.500.000		1.179.675.000		-	
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja Dalam Lingkungan Yang Lestari												
Tujuan :												
5.1	Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah	A. Kemantapan Jalan	Persen	83,9		84,9		85,9		85,9		
		B. Kondisi Baik Irigasi	Persen	64		67		70		70		
Sasaran :												
5.1.1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dan Kawasan	A. Penanganan Jalan & Jembatan (Target 1.000 Km)	Km	72		72		72		1.000		
		B. Penanganan Jaringan Irigasi (Target 18.000 Hektar)	Hektar	600		600		600		18.000		
		C. Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	54,90		55,80		56,70		56,70		
		D. Persentase Ketersediaan	Persen	40		50		65		65		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan										
Program :												
1	Program Penyelenggaraan Jalan				84.235.000.000		87.180.000.000		72.000.000.000		295.095.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Bertambahnya Jaringan Jalan	Km	6		7		6		21,42		
		2 Bertambahnya Jumlah Jembatan	Buah	1		0		0		3		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				48.000.000.000		48.000.000.000		48.000.000.000		218.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Jumlah Situ/Embung Dalam Kondisi Baik Dan Terpelihara	Buah	16		16		16		80		
		2 Penataan Kawasan Sempadan Sungai Dan Pembangunan/Pemeliharaan TPT Sungai	Buah	4		4		4		21		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				4.626.356.000		5.146.612.000		5.816.948.000		25.445.158.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Minum	Lokasi	42		43		42		218		
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				4.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		21.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Limbah	Lokasi	41		41		40		200		
5	Program Pengembangan Perumahan				28.900.000.000		37.275.000.000		37.275.000.000		179.965.000.000	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		1 Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah Dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah	Rumah	1.100		1.400		1.400		5.448		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2.310.000.000		2.520.000.000		2.730.000.000		15.160.000.000	Dinas Perhubungan
		1 Persentase Ketersediaan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Persen	40		50		65		65		
Sasaran :												
5.1.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Di Seluruh Wilayah Kabupaten Kuningan	A. Persentase Kemantapan Jalan Dan Jembatan	Persen	83,9		84,9		85,9		85,9		
		B Persentase Jaringan Irigasi Dengan Kondisi Baik	Persen	64		67		70		70		
Program :												
1	Program Penyelenggaraan Jalan				143.885.600.000		143.543.200.000		106.520.000.000		611.395.300.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Jalan Dalam Kondisi Mantap	Km	95		95		70		380		
		2 Jembatan Dalam Kondisi Baik	M	43		33		48		264		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				45.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		205.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	64%		67%		70%		70%		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				5.820.192.000		6.885.201.000		7.651.012.000		31.340.227.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	54,90		55,80		56,70		56,70		
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				6.859.609.920		7.972.460.712		8.706.341.083		35.479.510.915	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Akses Air Limbah Domestik	Persen	66		66		66		66		
5	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh				456.388.000.000		333.700.000.000		333.700.000.000		1.185.538.000.000	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		1 Jumlah Rutilahu Dan PSU Yang Ditangani	Unit Rumah		7.659		3.115		3.115		15.589	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Tujuan :												
5.2	Mewujudkan Kelestarian Fungsi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,454		66,798		67,142		67,142		
Sasaran :												
5.2.1	Terwujudnya Penataan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan	A. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia / Tersusun	Dokumen	14		3		3		32		
Program :												
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia/Tersusun	Dokumen	4		2		2		10		
Sasaran :												
5.2.2	Terwujudnya Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari	A. Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	-		-		-		10		
		B Jumlah Pelayanan Pengelolaan Sampah	Ton	115.554,73		114.881,47		114.124,74		114.124,74		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			%	81,09		81,91		81,91		81,91		
Program :												
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				950.000.000		1.550.000.000		2.850.000.000		6.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Dokumen Kajian Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Disusun	Dokumen	14		19		41		88		
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				3.500.000.000		3.800.000.000		4.250.000.000		14.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase RTH Yang Dikelola Dengan Baik/Tuntas	Persen	24,14		26,21		29,31		100		
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional				6.225.000.000		7.000.000.000		9.000.000.000		22.225.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		1 Tersedianya Sarana Prasarana Untuk Pengelolaan Sampah	Lokasi/ Lokasi TPA	14 / -		15 / -		15 / 1		44 / 1		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Pengelolaan Persampahan				3.111.000.000		3.111.000.000		3.111.000.000		12.694.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase Wilayah Yang Sampahnya Ditangani Dengan Tuntas	Persen	30,31		30,55		30,80		30,80		
Sasaran :												
5.2.3	Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana	A. Persentase Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persen	95		95		100		100		
		B Respons Time Penanganan Kedaruratan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Hari/24 Jam	1		1		1		1		
		C. Persentase Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persen	95		95		100		100		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :												
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				8,300,000,000		8.715.000.000		9.150.750.000		9.150.750.000	BPBD
		A. Indeks Ketahanan / Kapasitas Daerah	Point	0,64	5.825.000.000	0,65	6.116.250.000	0,66	6.422.062.500	0,66	6.422.062.500	
		B Rata-Rata Waktu Penanganan Kedaruratan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Waktu	1 Hari/ 24jam	1.750.000.000	1 Hari/ 24 Jam	1.837.500.000	1 Hari/ 24 Jam	1.929.375.000	1 Hari/ 24 Jam	1.929.375.000	
		C. Persentase Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Persen	70	725.000.000	75	761.250.000	80	799.312.500	80	799.312.500	

Pada kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Kuningan juga mendapat prioritas kegiatan yang menunjang program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Beberapa rencana proyek strategis dan nasional yang berlokasi di Kuningan dan pemanfaatannya akan dirasakan masyarakat Kuningan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 6.5
Rencana Proyek Strategis Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2023

No	Proyek Strategis	Sumber Dana			Keterangan
		APBN	APBD Prov	Swasta	
	Bendungan dan Jaringan Irigasi				
1.	Bendungan Kuningan	√			2021
2.	Bendungan Matenggeng	√			2023
	Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman				
1.	Pembangunan Alun-Alun		√		2020-2021
	Pembangunan Pariwisata Daerah				
1.	Pengembangan pariwisata Waduk Darma		√		2019-2021
2.	Pengembangan Kebun Raya Kuningan		√		2019-2021
3.	Pembangunan Desa Wisata Cibuntu		√		2020
	Perdagangan				



1.	Pembangunan Pasar Kepuh		√		2020
Komunikasi dan informatika					
1.	Pembangunan Command Centre		√		2021

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Kuningan.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs.
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Kuningan untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Kuningan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini.

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kuningan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah akan digunakan sebagaimana tabel 7.1 dan tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun 2019-2020

(Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

No.	Kapasitas Riil / Belanja	2019	2020
I	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	955,905,653,598	1,141,247,954,615
II	BELANJA DAERAH	2,767,932,626,300	2,919,657,903,124
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,811,312,165,045	1,778,409,948,509
	Belanja Pegawai	1,276,258,453,156	1,175,767,820,316
	Belanja Hibah	44,838,000,000	52,425,500,000
	Belanja Bantuan Sosial	23,946,000,000	39,062,702,694
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	14,052,029,744	14,791,250,145
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Partai Politik	439,717,682,145	443,562,459,521
	Belanja Tidak Terduga	12,500,000,000	52,800,215,833
2	BELANJA LANGSUNG	956,620,461,255	1,141,247,954,615
	Belanja Pegawai	21,638,950,844	49,013,197,144
	Belanja Barang dan Jasa	653,389,070,267	688,813,306,381
	Belanja Modal	281,592,440,144	403,421,451,090

Tabel 7.2

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun 2021-2023

(Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

No.	Kapasitas Riil/ Belanja	2021	2022	2023
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1,405,179,342,730	1,486,185,097,784	1,658,193,007,882
1	Belanja Operasi	1,986,719,610,008	2,035,378,044,159	2,127,558,347,703
a.	Belanja Pegawai	1,246,972,509,623	1,271,911,959,815	1,297,350,199,012
b.	Belanja Barang dan Jasa	663,418,553,052	683,321,109,644	696,987,531,836
c.	Belanja Bunga	-	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-	-
e.	Belanja Hibah	46,753,735,292	49,091,422,057	101,545,993,159
f.	Belanja Bantuan Sosial	29,574,812,041	31,053,552,643	31,674,623,696
2	Belanja Modal	500,044,387,831	542,910,072,369	629,847,110,269
a.	Belanja Modal Tanah	9,344,752,758	11,213,703,310	14,456,443,972
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179,063,592,243	193,388,679,622	224,396,981,566
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98,391,164,608	106,262,457,777	122,201,826,443
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	131,311,774,881	141,816,716,871	165,029,066,281
e.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	81,933,103,341	90,228,514,789	103,762,792,008
3	Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
4	Belanja Transfer	464,386,575,273	488,736,438,288	513,543,796,082
a.	Belanja Bagi Hasil	18,421,447,296	25,790,026,214	32,079,527,525
b.	Belanja Bantuan Keuangan	445,965,127,977	462,946,412,074	481,464,268,557

Tabel 7.3

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kuningan Tahun 2019**

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1	Program Pendidikan Usia Dini	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase	35	1,903,292,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun	Siswa	7,000	44,104,381,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase	100	1,071,790,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal	Persentase	100	2,097,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Orang	183	805,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
2	Kesehatan					
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan	Masyarakat Miskin diluar Kuota Jamkesmas	100	59,676,958,128	Dinas Kesehatan
7	Program Kesehatan Khusus	Meningkatnya kemampuan Kader Kesehatan Jiwa yang dilatih	Orang/Kader	100	109,499,000	Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak serta KB dalam upaya penurunan AKI dan AKB	Kasus	100	428,131,000	Dinas Kesehatan
9	Program Imunisasi dan Surveilans	-	-	-	505,023,000	Dinas Kesehatan
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kapasitas manajemen Petugas Gizi	Puskesmas	37	281,625,000	Dinas Kesehatan
11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terlaksananya Kegiatan Rehab Puskesmas	Paket	1	1,700,000,000	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Standarisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kategori	9	569,000,000	Dinas Kesehatan
13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kegiatan penyebarluasan Informasi Kesehatan	Kecamatan/ Puskesmas	32 / 37	587,294,000	Dinas Kesehatan
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat	Masyarakat	100	42,530,000	Dinas Kesehatan
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terselenggaranya kegiatan Program PPTM di Kab. Kuningan	Kader Posbidu	100	1,078,365,000	Dinas Kesehatan
16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	70,350,000	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kualitas pendukung pelayanan kesehatan pada RSUD '45 Kuningan	Item	8,613	115,500,002,304	Rumah Sakit Umum '45
18	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Prosentase Sarpras yang terpenuhi	Persen	72	30.316.251.000	Rumah Sakit Linggajati
19	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Prosentase Pemeliharaan Sarpras RS yang terlaksana	Persen	72	550.000.000	Rumah Sakit Linggajati



No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
	Rumah Sakit					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan	Persentase	100	33,735,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan	Persentase	100	39,945,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Meningkatnya rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase	100	71,315,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan	Persentase	100	7,895,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase	100	36,151,139,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air Lainnya	Persentase	100	19,370,098,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Perencanaan Tata Ruang	Terimplementasikannya penyelenggaraan penataan ruang di Daerah	Persentase	100	1,660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Kab. Kuningan	Persentase	100	235,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Program Pengembangan Perumahan/Permukiman	Jumlah Panjang Jalan yang ditangani	Lokasi/Km	211 Lokasi/ 32 Km	31.650.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah rutilahu yang ditangani bagi MBR	Unit Rumah	1.678	29.365.000.000	
2	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman	Jumlah Panjang Jalan yang ditangani	Lokasi	41 Lokasi/ 8 Km	39.50.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	Lokasi	48	57.19.552.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Akses Air Minum Layak	Persen	85.15		
4	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi	Jumlah Panjang Drainase yang tertangani	Meter	1.500	12.860.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Akses Air Limbah Domestik	Persen	64,41		
5	Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Pemerintahan	Paket	17	37.50.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase	100	805,000,000	Badan Kesbangpol
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi	Persentase	100	1,350,000,000	Badan Kesbangpol



No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
		politiknya				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Berdayanya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusifitas daerah	Persentase	100	1,182,000,000	Badan Kesbangpol
		Terpeliharanya rasa aman dalam masyarakat	Persentase	80	768,260,000	Satpol PP
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terpeliharanya keamanan wilayah dalam masyarakat	Persentase	80	1,598,532,000	Satpol PP
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya trantibum bagi masyarakat daerah	Persentase	100	1,239,888,000	Satpol PP
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terpeliharanya lingkungan masyarakat yang bebas dari PEKAT	Persentase	100	120,000,000	Satpol PP

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
6	Sosial					
1	Program Pemberdayaan fakir Miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase	100	600,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
		Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat miskin dan PMKS	Persentase		520,000,000	Bagian Kesra SETDA
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase	100	2,892,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
3	Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase	100	1,080,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase	100	800,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Terwujudnya pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Persentase	100	200,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
6	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase	100	260,000,000	Dinas Sosial dan PPPA

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
7	Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat di Daerah KRB yang tanggap, tangkas dan tangguh	Persentase	100	2,330,000,000	BPBD
8	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Membangun koordinasi yang lebih baik antara SKPD terkait dengan BPBD dalam penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Persentase	100	2,600,000,000	BPBD
9	Program Peningkatan Fungsi Sumber Daya dan Logistik	Rata-rata kesiapan penanganan bencana dengan cepat	Jam	24	4,330,000,000	BPBD
10	Program Pemulihan melalui Rehabilitasi	Meningkatnya upaya pemulihan pasca bencana	Persentase	80	740,000,000	BPBD
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja					
1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase	100	525,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan di	Persentase	100	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
		Perusahaan				
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase	100	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Terciptanya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase	100	880,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
2	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Terwujudnya penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase	100	1,480,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase	100	400,000,000	Dinas Sosial dan PPPA
3	Pangan					
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Desa	362	3,680,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Pertanahan					
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, pemanfaatan lahan	Terlaksananya pemanfaatan lahan	Persentase	100	9,605,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	pertanahan				
2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3	Persentase	100	200,000,000	Bagian Tapem SETDA
5	Lingkungan Hidup					
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan RTH	Persentase	100	5,315,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk mendukung Kabupaten Konservasi	Persentase	100	2,998,312,000	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase	100	5,855,890,000	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase	32	4,940,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
5	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan	Meningkatnya jasa lingkungan kawasan konservasi	Persentase	100	1,094,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penataan hasil pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Persentase	pen	1,887,395,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pemeliharaan database kependudukan	Persentase	100	606,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	Meningkatnya implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase	100	424,734,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan akta-akta pencatatan sipil	Persentase	100	78,728,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase	100	8,316,220,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase	100	13,694,913,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat pedesaan	Persentase	100	3,544,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur desa	Persentase	100	340,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Program Keluarga Berencana	Terkendalinya tingkat kelahiran (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) melalui kelestarian ber-KB masyarakat	Persentase	100	800,000,000	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan usia kawin pertama (UKP) melalui kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja berbasis sekolah dan	Persentase	100	280,000,000	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana



No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
		masyarakat				
3	Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan	Meningkatnya dukungan, komitmen, wawasan/pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK	Persentase	100	800,000,000	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
4	Program Ketahanan Keluarga	Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	Persentase	100	360,000,000	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
5	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Persentase	100	800,000,000	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
9	Perhubungan					
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Buah	530	145,000,000	Dinas Perhubungan
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Terwujudnya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas	Meter	684	2,120,000,000	Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya pelayanan yang lebih cepat dan efisien	Unit	1	985,000,000	Dinas Perhubungan
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Unit	1	3,210,000,000	Dinas Perhubungan
5	Program Peningkatan Pengelolaan Parkir	Meningkatnya pelayanan perparkiran	Paket	1	180,000,000	Dinas Perhubungan
6	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Paket	1	200,000,000	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika					
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat	Persentase	100	4,054,815,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya kerjasama informasi media massa	Persentase	100	371,962,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya informasi pembangunan	Persentase	100	2,275,000,000	Bagian Humas SETDA

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	496,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui M-Pustaka	Persentase	100	439,900,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas informasi pembangunan kepada masyarakat	Persentase	100	2,580,000,000	Bagian Humas SETDA
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Meningkatnya usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase	100	3,096,571,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase	100	1,193,080,000	Dinas Koperasi dan UKM
3	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Berkembangnya sistem usaha bagi aneka jasa dan perdagangan	Persentase	100	1,322,010,000	Dinas Koperasi dan UKM

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya kapasitas pelaku UKM	Persentase	100	1,476,922,000	Dinas Koperasi dan UKM
5	Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM	Meningkatnya Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM	Persentase	100	50,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
12	Penanaman Modal					
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya data potensi/peluang investasi dan media informasi	Keping CD	100	480,000,000	DPMPPTSP
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Percepatan proses pelayanan perizinan	Tahun	1	2,040,000,000	DPMPPTSP
3	Program Peningkatan Informasi Perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Paket	4	600,000,000	DPMPPTSP
4	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Meningkatnya perencanaan penanaman modal (investasi) sesuai sektor usaha	Dokumen	2	160,000,000	DPMPPTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga					

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Peserta Pelatihan dan penguatan pengembangan kewirausahaan pemuda	Orang	100	100.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	1	75.000.000	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	10	50.000.000	
		Prestasi olahraga tingkat regional a. PORDA b. POPDA c. POPWILDA d. PORPEMDA e. PORSENITAS f. POSPEDA	Peringkat	- - 1 6 2 1	650.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	100	225.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda prestasi ditingkat provinsi	Orang	9	250.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	1	78.000.000	
		Event Olahraga Tradisional, dan Rekreasi	Even	1	150.000.000	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	10	200.000.000	
4	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah pemuda prestasi ditingkat provinsi	Orang	9	100.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14	Statistik					
1	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya kualitas data/inforamsi	Paket	1	371,864,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian					
1	Pengelolaan Persandian	Pemantapan efektivitas pengamanan informasi	-	-	609,311,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan					
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan nilai budaya	Persentase	100	440,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Adanya pemahaman pemeliharaan dan peningkatan tentang seni budaya daerah	Paket	1	1,527,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Keragaman Budaya	Tetapnya situs-situs di kab. Kuningan	Persentase	100	284,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan					
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan	Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan desa dan sekolah	Persentase	100	1,392,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pengelolaan perpustakaan	Persentase	100	1,335,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	Kearsipan					
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan terpercaya melalui	Persentase	100	410,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
		digitalisasi kearsipan				
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terwujudnya pengelolaan arsip yang sesuai dengan jadwal retensi arsip	Persentase	100	678,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
C	Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan					
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Tercapainya pengembangan budidaya ikan air tawar berbasis potensi lokal	Unit	8	880,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tercapainya pengembangan budidaya ikan air tawar berbasis potensi lokal	Unit	50	1,456,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Tercapainya peningkatan sarana prasarana penangkapan perairan umum daratan	Persentase	11	680,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tercapainya optimalisasi unit pengelolaan hasil perikanan	Pokdakan	20	160,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Pariwisata					

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata (wirausahawan berbasis pariwisata)	Orang	20	250.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2		Jaringan Kemitraan	Orang	75	300.000.000	
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang/Persen	3.187.447 /2	695.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Sarana dan prasarana Destinasi Wisata	DTW	1	200.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Pertanian					
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh	Persentase	100	1,166,000,000	Dinas Pertanian
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Persentase	100	57,747,123,216	Dinas Pertanian
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya program penerapan teknologi pertanian	Persentase	100	4,037,000,000	Dinas Pertanian
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kemampuan dan kapasitas petani	Persentase	100	338,000,000	Dinas Pertanian

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah bagi para petani	Persentase	100	8,496,105,024	Dinas Pertanian
6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase	100	9,320,000,000	Dinas Pertanian
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	Menjamin keamanan konsumen atas pangan asal ternak	Persentase	100	2,040,000,000	Dinas Pertanian
8	Produksi Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terpromosikannya produk unggulan hasil pertanian/perkebunan	Persentase	100	1,895,000,000	Dinas Pertanian
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	Meningkatnya kualitas sarana untuk masyarakat miskin	Persentase	100	193,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Pertambangan	Meningkatnya pengelolaan , pembinaan dan pengawasan bidang energi dan pertambangan	Persentase	100	90,250,000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
5	Perdagangan					
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya jaminan perlindungan konsumen	Paket	1	1,413,115,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penjualan produk perdagangan dalam negeri	Persentase	100	1,512,584,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Persentase	100	1,748,592,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya peluang ekspor dari Kab. Kuningan	Persentase	100	482,440,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	Perindustrian					
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya IKM di Kab. Kuningan	Kali	1	3,155,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kualitas kemampuan teknologi industri	Persentase	1	1,635,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Transmigrasi					
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Peningkatan taraf hidup masyarakat transmigrasi lokal	Persentase	100	90,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya program penyelenggaraan transmigrasi antar daerah	Persentase	100	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D	Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	Perencanaan					
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	3,300,000,000	BAPPEDA
2	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Meningkatnya perencanaan sosial budaya dan pemerintahan	Persentase	100	765,000,000	BAPPEDA
3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase	100	2,118,518,016	BAPPEDA
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase	100	2,795,000,000	BAPPEDA
2	Keuangan					
1	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan kegiatan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan dalam dalam melaksanakan program/kegiatan	Orang	180	586,990,000	BPKAD

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
2	Program Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Aset Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase	100	3,851,930,000	BPKAD
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase	100	1,222,430,000	BPKAD
		Adanya pemeliharaan sistem aplikasi perencanaan dan pelaporan keuangan	Persentase	100	292,000,000	Bagian Keuangan dan Sarana SETDA
		Peningkatan capaian kinerja SKPD Daerah	Persentase	100	1,900,000,000	Bagian Tapem SETDA
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase	100	1,365,000,000	BPKAD
5	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100	1,100,444,000	BPKAD
6	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD Kab. Kuningan	-	-	5,534,700,000	BAPPENDA
7	Program Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Meningkatnya PAD Kab. Kuningan	Persentase	100	517,500,000	BAPPENDA

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Kepegawaian					
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase	100	4,740,000,000	BKPSDM
2	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya kualitas Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase	100	280,000,000	BKPSDM
3	Program Kesejahteraan Pegawai	Meningkatnya kesejahteraan aparatur	Persentase	100	760,000,000	BKPSDM
4	Program Peningkatan dan Fasilitasi Keprofesian ASN	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan organisasi Profesi ASN	Persentase	100	160,000,000	BKPSDM
4	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Program Pendidikan Kedinasan	Membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pimpinan perubahan	Persentase	100	1,666,320,000	BKPSDM
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase	100	3,692,800,000	BKPSDM
5	Penelitian dan Pengembangan					
1	Program Kajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Meningkatnya kajian dan penelitian pembangunan daerah	Persentase	100	500,000,000	BAPPEDA

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
6	Pengawasan					
1	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase	100	160,000,000	Inspektorat
2	Program Pembinaan Objek Pengawasan	Terwujudnya pembinaan objek pengawasan	Persentase	100	560,000,000	Inspektorat
3	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	Meningkatnya koordinasi pengawasan	Persentase	100	1,240,000,000	Inspektorat
4	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase	100	1,840,000,000	Inspektorat
5	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Terlaksananya program peningkatan kapabilitas APIP	Persentase	100	840,000,000	Inspektorat
7	Fungsi Lainnya (Kesekretariatan)					
1	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya	Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang baik dan benar	Persentase	100	480,000,000	Bagian Hukum SETDA
2	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Persentase	100	360,000,000	Bagian Hukum SETDA

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksannnya kerjasama penanganan penyelesaian permasalahan hukum	Persentase	100	670,072,000	Bagian Hukum SETDA
4	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Tercapainya pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase	100	225,000,000	Bagian Tapem SETDA
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase	100	1,190,000,000	Bagian Adbang SETDA
		Meningkatnya kinerja perusahaan daerah	Persentase	100	1,740,000,000	Bagian Perekonomian SETDA
		Meningkatnya kinerja pejabat pemerintah daerah	Persentase	100	300,000,000	Bagian Tapem SETDA
6	Program Pendidikan Bidang Keagamaan	Meningkatnya pendidikan bidang keagamaan	Persentase	100	5,696,400,000	Bagian Kesra SETDA
7	Program Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah	Persentase	100	3,125,000,000	Bagian Barjas SETDA
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase	100	1,068,000,000	Bagian Keuangan SETDA



No	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran	Perangkat Daerah
		Memperlancar tugas-tugas kedinasan	Persentase	100	2,400,000,000	Bagian Umum SETDA
9	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKPD	63	1,600,000,000	Bagian Organisasi SETDA
10	Program Peningkatan Disiplin Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kab. Kuningan	SKPD	63	80,000,000	Bagian Organisasi SETDA
11	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya reses	Persentase	100	12,865,560,000	Sekretaris DPRD
JUMLAH					820,674,570,124	

Tabel 7.4.

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kuningan Tahun 2020**

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
I	Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				1.501.709.664.000	
1	Pendidikan				41.341.207.600	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.206.122.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Persentase Anak yang mengikuti PAUD	Persen	74.20		
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun				35.615.773.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 APK SD/MI	Persen	100.13		
		2 APK SMP/MTs	Persen	99.05		
		3 APM SD/MI	Persen	99.91		
		4 APM SMP/MTs	Persen	91.22		
		5 Angka Partisipasi Sekolah :				
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	100.92		
		- Sekolah Menengah Pertama	Persen	100.68		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		(SMP)				
		Angka Kelulusan :				
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	100		
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100		
		Angka Melanjutkan Pendidikan :				
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	99.98		
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	93.31		
		Rasio Guru Terhadap Murid :				
		- Sekolah Dasar (SD)	Orang	1 : 0.08		
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Orang	1:0052		
3	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)				3.014.511.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal	Orang	1 : 037		
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				927.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Orang	(55)		
				14.397		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				577.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat	Orang	1.045		
2	Kesehatan				1.014.094.797.200	
1	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB				2.291.300.000	Dinas Kesehatan
		1 Angka Kematian Bayi	Poin/1000 kelahiran	4		
		2 Jumlah Kematian Ibu	Kasus	23		
		3 Presentase Balita Stunting	Persen	28		
2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				5.043.498.900	Dinas Kesehatan
		Perawatan Balita Gizi Buruk	Persen	100		
3	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				418.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Jumlah Upaya Promotif, Preventif dan Kuratif Serta Adanya Kepengurusan	Kali	5		
4	Program Pengembangan lingkungan sehat				44.000.000	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Persentase Akses Air Minum Berkualitas	Persen	61		
		2 Jumlah Penduduk yang menggunakan Jamban Keluarga	Persen	86		
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				5.613.427.600	Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	Persen	100		
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan				600.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi	Kegiatan	5		
		2 Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Pengolahan dan Konsumsi Pangan yang aman		3		
		3 Penambahan Industri Rumah Tangga Pangan yang terverifikasi		50		
		4 Penambahan Tenaga DFI tersertifikasi		40		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		5 Persentase pengembangan dan Pemanfaatan Tanaman Obat di masyarakat	Persen	8		
7	Program pembinaan kesehatan primer dan kestrad serta mutu pelayanan kesehatan				450.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Persentase sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar	Persen	8		
8	Program Pelayanan Perijinan Kesehatan				100.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Jumlah Perijinana Kesehatan yang Disetujui	Persen	100		
9	Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)				300.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta PBI Melalui JAMKESDA	Orang	38.036		
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				4.905.500.000	Dinas Kesehatan
		1 Peningkatan standar pelayanan kesehatan	Persen	40		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Jumlah Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	2		
11	Program Pengendalian Penyakit Menular				6.580.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Kali	5		
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				500.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Persentase Puskesmas yang mengadakan Pengendalian PTM terpadu	Persen	50		
13	Program Surveilans dan Imunisasi				236.500.000	Dinas Kesehatan
		1 Cakupan Desa/Kelurahan yang diberikan pelayanan Surveilans dan Imunisasi	Persen	85		
14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				89.915.039.500	Dinas Kesehatan
		1 Angka Harapan Hidup	Tahun	73		
		2 Jumlah Penduduk Yang	Orang	293.840		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Menjadi Peserta PBI Melalui JAMKESDA				
15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				6.600.000.000	Dinas Kesehatan
		1 Persentase Sarana Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya dalam kondisi yang memenuhi standar	Persen	67		
16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD '45 Kuningan				140.307.631.200	
		1 Angka Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan RSUD '45	Persen	84		
17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				749.440.400.000	RSUD Linggarjati
		1 Prosentase Sarpras yang terpenuhi	Persen	74		
18	Program Pemeliharaan					RSUD Linggarjati

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				700.000.000	
		1 Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang terlaksana	Persen	74		
19	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis				22.000.000	
		1 Persentase Mutu Pelayanan Medis	Persen	74		
20	Program Peningkatan Pelayanan Keperawatan				22.000.000	
		1 Persentase Peningkatan Pelayanan Keperawatan	Persen	74		
21	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan				5.500.000	
		1 Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Keperawatan	Nilai	74		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				330.049.659.200	
1	Program Perencanaan Teknik Kebinamargaan dan Sumberdaya Air				8.386.652.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Perencanaan Teknis pada Bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	69		
		2 Terlaksananya Perencanaan Teknis pada Bidang Sumberdaya Air	Dokumen	75		
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				49.820.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Bertambahnya jaringan jalan	Km	1		
		2 Bertambahnya jumlah jembatan	Buah	2		
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				75.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jalan dalam kondisi mantap	Km	50		
		2 Jembatan dalam kondisi baik	M			
4	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				78.471.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jalan dalam kondisi mantap	Km	30		
		2 Jembatan dalam kondisi baik	M	66		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
5	Program Peningkatan/Pemeliharaan Paralatan Kebinamargaan				2.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah Peningkatan/Pemeliharaan Alat Berat (Kondisi Baik Alat Berat)	Unit	3		
		2 Jumlah Peningkatan/Pemeliharaan Alat Laboratorium (Kondisi Baik Alat Laboratorium)	Paket	1		
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				35.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	1		
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya				48.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah Situ/Embung dalam Kondisi Baik dan Terpelihara	Buah	16		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Penataan Kawasan Sempadan Sungai dan Pembangunan/Pemeliharaan TPT Sungai	Buah	4		
8	Program Pengendalian Banjir				500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Tertanganinya pengelolaan bahan banjir di beberapa lokasi rawan banjir	Lokasi	25		
9	Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku				500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah sumber-sumber mata air yang terkelola	Titik	5		
10	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang				500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/tersusun	Dokumen	1		
11	Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau				950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Terbangunnya/Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Hektar	19		
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Terkendalinya kegiatan pemanfaatan ruang	Titik/Lokasi	96		
		2 Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4		
13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				19.621.507.200	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	Lokasi	85		
		2 Akses Air Minum Layak	Persen	88,12		
		3 Akses Air Limbah Domestik	Persen	65		
14	Program Pembangunan Saluran Drainase Permukiman				1.600.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah panjang drainase yang tertangani	Meter	1.500		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
15	Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan				8.700.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Pemerintahan	Paket	17		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				110.150.000.000	
1	Program Pengembangan Perumahan/Permukiman				93.150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani	Lokasi/Km	376/40		
		2 Jumlah Rutilahu yang ditangani bagi MBR	Unit Rumah	2.100		
		3 Jumlah Sistem Aplikasi E-Data Base Perumahan/Permukiman	Aplikasi	-		
2	Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh				8.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Hektar/Persen	40/0,033		
3	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman pasca bencana				9.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Rumah yang terdampak bencana yang ditangani	Unit	60		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				3.075.000.000	
1	Program Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Perundang-undangan Daerah				500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	91		
2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				330.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,	Persen	83		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Keindahan)				
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	95		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan				165.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Pemberdayaan Anggota S	Pemberd ayaan	108		
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran				200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Jangkauan Luas WMK yang dapat dilayani	Persen	29		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Persentase Kasus Bencana Kebakaran yang berhasil ditangani dalam Tingkat Waktu Tanggap pada Daerah WMK	Persen	55		
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				440.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Jumlah peserta yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan	Orang	1.300		
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat				440.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan Politik	Orang	600		
8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban				500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Orang	750		
6	Sosial				2.999.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				233.750.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Desa yang mendapat Bantuan BPNT	Desa/Kel	376		
		2 Jumlah Guru BP dan Siswa SLTP dan SLTA yang dibimbing dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Sekolah	30		
		3 Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pendataan	Kecamatan	32		
		4 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)	Kelompok	15		
		5 Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang dibina	Kelompok	30		
		6 Jumlah Pendampingan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	40		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		7 Jumlah Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	100		
		8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi	Rumah	50		
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				761.500.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah eks Korban Penyalahgunaan Napza yang diberikan Pelatihan Manajemen Stres	Orang	30		
		2 Cakupan gedung Kantor yang dipelihara	Unit	-		
		3 Cakupan Rumah Singgah yang di bangun	Unit	-		
		4 Jumlah eks korban penyalahgunaan NAPZA yang diberikan Usaha Eekonomi Produktif	Orang	20		
		5 Jumlah eks korban penyalahgunaan NAPZA yang	Orang	20		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		dibina				
		6 Jumlah Eks Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapat Dukungan Sosial Keluarga Melalui Family Support Therapy	Orang	20		
		7 Jumlah Klien PMKS yang dikirim ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit Jiwa 1 dan Daerah Asal	Orang	60		
		8 Jumlah lansia potensial yang diberikan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	20		
		9 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rehabilitasi Sosial yang di tangani	Institusi	5		
		10 Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) yang ditangani	Orang	160		
		11 Jumlah penyandang disabilitas berat (orang dengan kecacatan berat/ODKB) yang mendapat	Orang	25		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Pelayanan sosial				
		12 Jumlah Penyandang Disabilitas yang di bimbing dan di berikan Usaha Ekonomi produktif	Orang	30		
		13 Jumlah Penyandang Disabilitas yang dibantu	Orang	50		
		14 Jumlah penyandang disabilitas yang dibina melalui optimalisasi loka bina karya (LBK)	Orang	30		
		15 Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat Unit Rehabilitasi Sosial Kelililing (URSK)	Orang	100		
		16 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat Pelayanan sosial kegawatdaruratan	Orang	100		
		17 Jumlah petugas rehabilitasi sosial berbasis masyarakat (RBM) yang dibina	Orang	70		
		18 Jumlah Program Keluarga	Orang	250		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Harapan (PKH) yang diberikan bantuan				
		19 Jumlah rehabilitasi sosial berbasis keluarga penyandang disabilitas (family care) yang ditangani	Orang	60		
		20 Jumlah Rehabilitasi Sosial melalui Operasionalisasi Rumah Singgah yang ditangani	Unit/Lokal	1		
		21 Jumlah Siswa SLTP dan SLTA yang dibina dalam pencegahan Napza	Orang	50		
		22 Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Orang Tua/Wali ODK B	Orang	30		
		23 Jumlah Pelayanan SKTM dan OTDP yang ditangani	Orang	100		
		24 Jumlah anak terlantar yang dibantu	Orang	20		
		25 Jumlah Anak terlantar yang diberikan bimbingan sosial	Orang	20		
		26 Jumlah orang tua anak terlantar yang mendapat	Orang	20		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		bantuan Usaha Ekonomi produktif				
3	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan				33.000.000	Dinas Sosial
		1 Cakupan Makam Mantan Bupati Aruman Wira Nagapati yang terlayani	Buah	1		
		2 Cakupan Makam Pahlawan Haur Duni yang terlayani	Ha/Buah	2/220		
		3 Pengetahuan tentang Pemeliharaan TMP	Paket	1		
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				200.750.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Desa yang mendapat Bhakti Sosial Karang Taruna	Desa	2		
		2 Jumlah karang taruna yang dibina	Orang	50		
		3 Jumlah karang taruna yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Kelompok	10		
		4 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani	Orang	150		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		5 Jumlah PSM, Karang Taruna, TKSK dan Orsos Berprestasi Tingkat Kab. Kuningan yang dibina	Orang	-		
		6 Jumlah SDM PSKS yang di berikan bimbingan sosial	Orang	100		
		7 Jumlah TAGANA yang dibina	Orang	60		
		8 Jumlah TKSK yang dibina	Orang	32		
		9 Jumlah Undian Berhadiah yang diberi ijin	Orang	50		
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo				200.000.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Panti yang Menerima Bantuan	Panti	13		
		2 Jumlah Anak Panti yang dibina	Orang	30		
6	Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana				250.000.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Pengadaan Bufferstock Tanggap Darurat Bencana yang Mendapat Bantuan	Paket	200		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
7	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				440.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 Jumlah Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Desa	2		
8	Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik				605.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 Rata-Rata Penanganan Kedaruratan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Per Hari	1		
9	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				275.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 Persentase Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Persen	94		
II	Urusan Wajib Tidak terkait Pelayanan Dasar				89.101.418.500	
1	Tenaga kerja				1.212.500.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				385.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	656		
		2 Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	80		
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				250.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Kepesertaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Orang	9.925		
		2 Tingkat Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kuningan	Persen	8		
		3 Pembinaan Pengusaha dan Pekerja mengenai SMK 3 tahun	Orang	50		
		4 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Orang	50		
		5 Pembinaan Pelaksanaan	Orang	50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		peraturan Ketenagakerjaan				
		6 Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	15		
		7 Pembinaan LKS Bipartit dan Tripartit	Orang	20		
3	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja				577.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan terlayani	Orang	11.996		
		2 Jumlah Pencari Kerja yang Berpartisipasi dalam Pameran Bursa Kerja / Job Fair per tahun	Orang	2.500		
		3 Jumlah Penganggur Musiman yang terserap	Orang	176		
		4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	8.884		
		5 Jumlah Tenaga Kerja Mandiri / Wirausaha Baru	Orang	20		
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindung Anak				1.469.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				231.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 Jumlah Desa Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dibina	Desa	1		
		2 Jumlah Kader Pemberdayaan Perempuan Desa yang dibina	Orang	90		
		3 Jumlah Perempuan dalam Jabatan yang dibiina	Orang	50		
		4 Jumlah Perempuan dalm Politik yang dibina	Orang	200		
		5 Jumlah Perempuan dalam Profesi yang dibina	Orang	1.803		
2	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan				638.000.000	Dinas Pengendalian

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Anak					Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 Jumlah desa Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dibina	Desa	4		
		2 Jumlah kasus Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditangani	Kasus	26		
		3 Jumlah KDRT dan Trafficking yang ditangani	Kasus	11		
		4 Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina	Forum Anak	5		
		5 Jumlah Kelembagaan PUG (Driver PUG, Kelompok Kerja PUG dan Focal Point PUG) yang di berikan penguatan	Orang	115		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		6 Jumlah Penganggaran Responsif Gender yang dibimbing	Orang	30		
3	Program Pengembangan Data dan Informasi PUG				100.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 Jumlah dokumen profil Gender	Jenis	1		
4	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender				500.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina	Kelompok	5		
		2 Jumlah Organsiasi Perempuan yang dibina	Organisasi	38		
		3 Jumlah Pemberdayaan Perempuan Rawan Kesejahteraan Sosial Ekonomi yang dibina	Orang	30		
		4 Jumlah Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan yang dibina	Orang	15		
3	Pangan				4.819.000.000	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				1.419.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Penanganan Daeran Rawan Pangan	Desa	10		
		2 Penanganan Penduduk Rawan Pangan	Jiwa	1.191		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
2	Penguatan Cadangan Pangan				1.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Penguatan Cadangan Pangan:				
		-Cadangan pangan Pemerintah	Ton	50		
		-Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	120		
3	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan				1.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	272		
		2 Pangsa Pangan Lokal	Persen	35		
		3 Skor Pola Pangan Harapan	Persen	83		
		4 Ketersediaan Energi PerKapita	Gr	2.140		
		5 Ketersediaan Protein perKapita	Gr	59		
		6 Pengawasan Pangan	Jenis	10		
		7 Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	225		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
4	Pertanahan				17.100.000.000	
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Jumlah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	m2	134.011	17.100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	1 Tertibnya administrasi pertanahan dan Peningkatan SDM bidang Pertanahan	kegiatan	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Lingkungan Hidup				3.697.960.000	
1	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Rasio LH yang diintervensi		29	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Kemitraan Lingkungan Hidup	1 Persentase pengelolaan lingkungan hidup berbasis kemitraan	Persen	18	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1 Persentase Area Pencemaran Lingkungan yang diintervensi	Persen	20	302.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2 Persentase Kerusakan Lingkungan yang ditangani	Persen	20		
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1 Persentase RTH yang dikelola dengan baik/tuntas	Persen	7	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	(RTH)					
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Persentase wilayah yang sampahnya ditangani dengan tuntas	Persen	20	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1 Persentase SDA yang dilindungi dan dikonservasi	Persen	15	350.460.000	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Pertambangan	Jumlah Rumah tangga miskin yang dipasang listrik	Rumah	50	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan	1 Persentase wilayah ekowisata yang dikelola dengan lengkap	Persen	19	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.287.639.500	
1	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	81	4.099.639.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 Kepemilikan KTP-El	Persen	98		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
2	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Persentase Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kec.	32	577.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	1 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	Kecamatan	32	346.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil	1 Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	79	264.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.058.500.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 Jumlah Aparatur Desa yang Dibina dan Terlatih	Jumlah	361	935.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Desa	361	6.308.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha	1 Jumlah BUMDesa yang mendapat pendampingan	Desa	14	1.540.000.000	Dinas Pemberdayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Pembangunan Ekonomi Desa yang Mandiri				Masyarakat dan Desa
4	Program Peningkatan Teknologi dan Inovasi berbasis SDA Perdesaan	1 Jumlah Desa yang Mengembangkan TTG	Desa	60	275.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.538.419.200	
1	Program Keluarga Berencana	1 Jumlah Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1000 (Perempuan Usia 15-19) (ASFR)	Rata-rata	2.36	10.564.919.200	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB		118		
		3 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR)	Persen	71.26		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		4 Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	14.39		
		5 Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	32.98		
2	Program Pengendalian Penduduk	1 Jumlah Kebijakan (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk	Perbup	4	275.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Jumlah Kerjasama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah	20		
		3 Jumlah Rumah Data Kependudukan	Jumlah	21		
		4 Jumlah/Cakupan Pembinaan dengan Lembaga Sosial Organisasi	Jumlah	4		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Masyarakat/Koalisi Kependudukan				
		5 Jumlah/Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro di Tingkat Desa	Jumlah	307		
3	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Sekolah dan Berbasis Masyarakat	1 Jumlah/Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa		28	165.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	Jumlah	18.7		
4	Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Jumlah/Cakupan Anggota Binaan Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	27.45	137.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						Anak
		2 Jumlah/Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	64.28		
		3 Jumlah/Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB	Persen	39.38		
		4 Jumlah/Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Persen	58.31		
5	Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan	1 Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor	Jumlah	6.132	396.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PPKBD	Jumlah	380		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		3 Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD	Jumlah	1.462		
9	Perhubungan				7.687.400.000	
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 Persentase Angkutan Umum yang Terevaluasi Dokumen Perjalanannya	Persen	60	66.000.000	Dinas Perhubungan
2	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1 Persentase Kendaraan Bermotor (Wajib Uji) yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	90	297.000.000	Dinas Perhubungan
3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	70	499.400.000	Dinas Perhubungan
4	Program Peningkatan Kerjasama Bidang Transportasi Regional	1 Persentase ketersediaan trayek antar kota	Persen	40	170.000.000	Dinas Perhubungan
5	Program Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara	Persen	65	528.000.000	Dinas Perhubungan
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Persentase Ketersediaan Praasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	60		Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
7	Program Peningkatan Pengelolaan Parkir	1 Persentase Potensi Kawasan Parkir Legal	Persen	70	77.000.000	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika				2.354.000.000	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	2.024.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	82.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1 Persentase Media Komunikasi Publik yang dimanfaatkan	Persen	100	55.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	1 Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Persen	100	192.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				2.172.500.000	
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jumlah UKM Binaan	UKM	150	632.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						Perdagangan
		2 Jumlah Wira Usahawan Baru	Orang	100		
		3 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Orang	1.000		
		4 Desa Kuliner Tradisional	Desa	-		
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jumlah UKM yang memperoleh bantuan Modal Mikro	UKM	10	440.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jumlah Koperasi Aktif	Unit	580	1.045.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2 Jumlah Koperasi Aktif dengan Omzet – diatas 1 Milyar	Unit	85		
4	Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1 Produk Unggulan Inovasi UMKM	Produk	5	55.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						Perdagangan
		2 Jumlah Produk UMKM yang memiliki Legalitas Produk PIRT	Produk	50		
		3 Jumlah Produk UMKM yang memiliki Legalitas Produk Halal	Produk	50		
		4 Bertambahnya Variasi Produk unggulan UMKM	Produk	10		
12	Penanaman Modal				2.140.000.000	
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Data Potensi Investasi dan Jumlah Investor dalam Berinvestasi di Kabupaten Kuningan	Objek Potensi Investasi /Investor	27.454	165.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	1 Jumlah Sasaran Kerjasama Minimal 50 UKM Per-tahun	UKM	50	385.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1 Jumlah Realisasi (PMDN)	Milyar Rp.	3.054.156 .587.075	440.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Jumlah Realisasi (PMA)	Milyar Rp.		315.437.271.496	
4	Program Penataan Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Perda dan Perbup	Dokumen	1 Perbup	400.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	1 Penyerapan Investasi di Kabupaten Kuningan	Milyar Rp.	150	750.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuningan	Orang	3.400		
		3 Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai RTRW	Persen	100		
13	Kepemudaan dan Olahraga				4.887.500.000	
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan				352.000.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1 Jumlah Pemuda Prestasi ditingkat Provinsi	Orang	9		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	2		
		3 Jumlah Peserta Pelatihan dan Penguatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	120		
		4 Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persen	70		
2	Program Peningkatan dan Pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi				4.535.500.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	600		
		2 Jumlah event olahraga Tradisional, dan Rekreasi	Event	2		
	-	3 Prestasi Olahraga Tingkat Regional	Peringkat			
		a. PORDA	Peringkat	-		
		b. POPDA	Peringkat	12		
		a. POPWILDA	Peringkat	-		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		b.PORPEMDA	Peringkat	4		
		c. PORSENITAS	Peringkat	2		
		d.POSPEDA	Peringkat	1		
		4 Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	15		
		5 Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	20		
14	Statistik				165.000.000	
1	Program Pengembangan Data/Informasi	1 Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Desa dan SKPD	20 Desa 10 SKPD	165.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian				165.000.000	
1	Program Pengelolaan Persandian	1 Tingkat Penyelenggaraan Persandian	Kecamatan	32	165.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan				1.834.000.000	
1	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	21	1.419.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Nilai Budaya	1 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	2	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Keragaman Budaya	1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	Persentase	100	165.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		dilestarikan				
17	Perpustakaan				297.000.000	
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan	1 Persentase Koleksi Buku di Perpustakaan	Persen	80	165.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				132.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
18	Kearsipan				236.500.000	
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	137.500.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip	1 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	Persen	100	99.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	KECAMATAN				12.979.499.800	
1	Kecamatan Kuningan				4.150.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec.	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	Kegiatan	9	125.000.000	Kec. Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Kuningan	Desa				
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kuningan	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	100	25.000.000	Kec. Kuningan
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan Kuningan	1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kec. Kuningan	Unit	9	3.116.382.000	Kec. Kuningan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Kuningan	1 Jumlah Kelurahan masyarakat yang diberdayakan	Unit	5	883.618.000	Kec. Kuningan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kuningan	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	16	-	Kec. Kuningan
6	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kuningan	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	7.200	-	Kec. Kuningan
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang	Jenis	21	-	Kec. Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Umum di Kec. Kuningan	Ditindaklanjuti				
2	Kecamatan Cigugur				2.125.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cigugur	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	9	110.000.000	Kec. Cigugur
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cigugur	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	110	15.000.000	Kec. Cigugur
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan Cigugur	1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kec. Cigugur	Unit	7	1.705.224.000	Kec. Cigugur
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Cigugur	1 Jumlah Kelurahan masyarakat yang diberdayakan	Unit	5	294.776.000	Kec. Cigugur
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cigugur	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	-	Kec. Cigugur

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
6	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cigugur	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	7.200	-	Kec. Cigugur
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cigugur	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	21	-	Kec. Cigugur
3	Kecamatan Kalimanggis				291.210.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kalimanggis	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	19	158.000.000	Kec. Kalimanggis
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kalimanggis	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.320	61.000.000	Kec. Kalimanggis
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kalimanggis	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	6	22.210.000	Kec. Kalimanggis
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.350	30.000.000	Kec. Kalimanggis

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kalimanggis					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kalimanggis	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	24	20.000.000	Kec. Kalimanggis
4	Kecamatan Mandirancan				250.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Mandirancan	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	24	184.000.000	Kec. Mandirancan
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Mandirancan	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	3	66.000.000	Kec. Mandirancan
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Mandirancan	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	-	Kec. Mandirancan
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.300	-	Kec. Mandirancan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	(PATEN) di Kec. Mandirancan					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Mandirancan	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	12	-	Kec. Mandirancan
5	Kecamatan Lebakwangi				250.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Lebakwangi	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	2	150.000.000	Kec. Lebakwangi
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Lebakwangi	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	2	100.000.000	Kec. Lebakwangi
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Lebakwangi	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	13	-	Kec. Lebakwangi
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.248	-	Kec. Lebakwangi

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	(PATEN) di Kec. Lebakwangi					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Lebakwangi	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	12	-	Kec. Lebakwangi
6	Kecamatan Selajambe				200.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Selajambe	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	4	150.000.000	Kec. Selajambe
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Selajambe	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	120	50.000.000	Kec. Selajambe
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Selajambe	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	21	-	Kec. Selajambe
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Selajambe	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	100	-	Kec. Selajambe

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Selajambe	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	15	-	Kec. Selajambe
7	Kecamatan Sindangagung				220.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Sindangagung	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	35	130.000.000	Kec. Sindangagung
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Sindangagung	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.600	90.000.000	Kec. Sindangagung
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Sindangagung	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	-	Kec. Sindangagung
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Sindangagung	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	3.100	-	Kec. Sindangagung

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Sindangagung	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	-	Kec. Sindangagung
8	Kecamatan Cibingbin				360.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cibingbin	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	10	250.000.000	Kec. Cibingbin
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cibingbin	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.500	110.000.000	Kec. Cibingbin
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cibingbin	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10		Kec. Cibingbin
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cibingbin	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.600	-	Kec. Cibingbin

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cibingbin	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20	-	Kec. Cibingbin
9	Kecamatan Cipicung				187.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cipicung	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	15	132.000.000	Kec. Cipicung
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cipicung	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.500	55.000.000	Kec. Cipicung
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cipicung	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10		Kec. Cipicung
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cipicung	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.100		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang	Jenis	20		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Umum di Kec. Cipicung	Ditindaklanjuti				
10	Kecamatan Japara				200.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Japara	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	12	155.000.000	Kec. Japara
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Japara	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.000	45.000.000	Kec. Japara
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Japara	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	-	Kec. Japara
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Japara	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.200	-	Kec. Japara
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Japara	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	15		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
11	Kecamatan Cilebak				270.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cilebak	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	20	95.000.000	Kec. Cilebak
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cilebak	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.700	45.000.000	Kec. Cilebak
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cilebak	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	7	-	Kec. Cilebak
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cilebak	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	800	-	Kec. Cilebak
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cilebak	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	17	130.000.000	Kec. Cilebak
12	Kecamatan Cidahu				150.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cidahu	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5	115.000.000	Kec. Cidahu
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cidahu	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.250	35.000.000	Kec. Cidahu
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cidahu	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	-	Kec. Cidahu
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cidahu	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	5.125		Kec. Cidahu
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cidahu	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	1.425	-	Kec. Cidahu
13	Kecamatan Jalaksana				295.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan	Kegiatan	22	238.026.000	Kec. Jalaksana

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Perdesaan di Kec. Jalaksana	Keberdayaan Masyarakat Desa				
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Jalaksana	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.500	56.974.000	Kec. Jalaksana
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Jalaksana	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	15	-	Kec. Jalaksana
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Jalaksana	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.100	-	Kec. Jalaksana
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Jalaksana	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20	-	Kec. Jalaksana
14	Kecamatan Kramatmulya				259.030.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kramatmulya	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5	228.200.000	Kec. Kramatmulya

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kramatmulya	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	100	15.830.000	Kec. Kramatmulya
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kramatmulya	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	14		Kec. Kramatmulya
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kramatmulya	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.500	15.000.000	Kec. Kramatmulya
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kramatmulya	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20	-	Kec. Kramatmulya
15	Kecamatan Maleber				350.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Maleber	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	35	170.000.000	Kec. Maleber

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Maleber	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.500	80.000.000	Kec. Maleber
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Maleber	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	16	100.000.000	Kec. Maleber
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Maleber	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.100	-	Kec. Maleber
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Maleber	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	18	-	Kec. Maleber
16	Kecamatan Cilimus				185.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cilimus	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	25	150.000.000	Kec. Cilimus

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cilimus	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.400	35.000.000	Kec. Cilimus
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cilimus	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	13	-	Kec. Cilimus
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cilimus	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.500		Kec. Cilimus
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cilimus	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25		Kec. Cilimus
17	Kecamatan Darma				230.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Darma	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	25	160.000.000	Kec. Darma

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Darma	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	2.000	70.000.000	Kec. Darma
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Darma	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	19	-	Kec. Darma
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Darma	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	3.700		Kec. Darma
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Darma	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	-	Kec. Darma
18	Kecamatan Cimahi				160.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cimahi	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	50	110.000.000	Kec. Cimahi
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam	Orang	2.100	50.000.000	Kec. Cimahi

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Dalam Membangun Desa di Kec. Cimahi	Membangun Desa				
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cimahi	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	-	Kec. Cimahi
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cimahi	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.100	-	Kec. Cimahi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cimahi	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	35	-	Kec. Cimahi
19	Kecamatan Nusaherang				210.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Nusaherang	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	9	150.000.000	Kec. Nusaherang
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Nusaherang	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	900	60.000.000	Kec. Nusaherang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Nusaherang	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	8		Kec. Nusaherang
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Nusaherang	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.000	-	Kec. Nusaherang
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Nusaherang	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20	-	Kec. Nusaherang
20	Kecamatan Kadugede				140.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Kadugede	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	9	90.000.000	Kec. Kadugede
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Kadugede	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.300	50.000.000	Kec. Kadugede

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Kadugede	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	-	Kec. Kadugede
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Kadugede	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.300	-	Kec. Kadugede
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Kadugede	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20	-	Kec. Kadugede
21	Kecamatan Hantara				129.364.800	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Hantara	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	17	82.408.000	Kec. Hantara
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Hantara	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	850	46.956.800	Kec. Hantara
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan	Desa	8	-	Kec. Hantara

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Desa di Kec. Hantara	Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan				
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Hantara	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.100		Kec. Hantara
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Hantara	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	16	-	Kec. Hantara
22	Kecamatan Cibeureum				215.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cibeureum	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	18	165.000.000	Kec. Cibeureum
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cibeureum	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.000	50.000.000	Kec. Cibeureum
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cibeureum	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan	Desa	8	-	Kec. Cibeureum

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Keuangan Desa/Kelurahan				
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Cibeureum	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.000	-	Kec. Cibeureum
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cibeureum	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	12	-	Kec. Cibeureum
23	Kecamatan Pancalang				199.775.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Pancalang	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	15	130.000.000	Kec. Pancalang
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Pancalang	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.300	69.775.000	Kec. Pancalang
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Pancalang	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	13	-	Kec. Pancalang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Pancalang	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	-	-	Kec. Pancalang
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Pancalang	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	26	-	Kec. Pancalang
24	Kecamatan Pasawahan				290.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Pasawahan	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	25	230.000.000	Kec. Pasawahan
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Pasawahan	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	900	60.000.000	Kec. Pasawahan
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Pasawahan	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	-	Kec. Pasawahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Pasawahan	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.300	-	Kec. Pasawahan
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Pasawahan	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	12	-	Kec. Pasawahan
25	Kecamatan Garawangi				200.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Garawangi	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	8	116.748.000	Kec. Garawangi
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Garawangi	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.400	83.252.000	Kec. Garawangi
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Garawangi	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	17	-	Kec. Garawangi

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Garawangi	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.500	-	Kec. Garawangi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Garawangi	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	-	Kec. Garawangi
26	Kecamatan Luragung				195.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Luragung	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	15	120.000.000	Kec. Luragung
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Luragung	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.200	75.000.000	Kec. Luragung
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Luragung	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	16	-	Kec. Luragung

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Luragung	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.600	-	Kec. Luragung
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Luragung	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20	-	Kec. Luragung
27	Kecamatan Ciwaru				350.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Ciwaru	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5	160.000.000	Kec. Ciwaru
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Ciwaru	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	3.000	190.000.000	Kec. Ciwaru
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Ciwaru	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	-	Kec. Ciwaru

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Ciwaru	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.500	-	Kec. Ciwaru
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Ciwaru	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22	-	Kec. Ciwaru
28	Kecamatan Subang				158.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Subang	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5	123.474.000	Kec. Subang
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Subang	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	2.500	34.526.000	Kec. Subang
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Subang	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	7	-	Kec. Subang
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.500		Kec. Subang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec. Subang					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Subang	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	-	Kec. Subang
29	Kecamatan Cigandamekar				250.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Cigandamekar	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5	150.000.000	Kec. Cigandamekar
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Cigandamekar	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.500	100.000.000	Kec. Cigandamekar
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Cigandamekar	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	11	-	Kec. Cigandamekar
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec.	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.100	-	Kec. Cigandamekar

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Cigandamekar					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Cigandamekar	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22	-	Kec. Cigandamekar
30	Kecamatan Karangkancana				132.620.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Karangkancana	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Jenis	16	102.620.000	Kec. Karangkancana
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Karangkancana	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	1.300	30.000.000	Kec. Karangkancana
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Karangkancana	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	9	-	Kec. Karangkancana
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1.250	-	Kec. Karangkancana

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	(PATEN) di Kec. Karangkencana					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Karangkencana	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22	-	Kec. Karangkencana
31	Kecamatan Ciniru				150.000.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Ciniru	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Jenis	6	90.000.000	Kec. Ciniru
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Ciniru	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	3.000	60.000.000	Kec. Ciniru
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Ciniru	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	9	-	Kec. Ciniru
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2.500	-	Kec. Ciniru

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	(PATEN) di Kec. Ciniru					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Ciniru	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22	-	Kec. Ciniru
32	Kecamatan Ciawigebang				227.500.000	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kec. Ciawigebang	1 Jenis Pelatihan/ Pembinaan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Jenis	22	152.500.000	Kec. Ciawigebang
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kec. Ciawigebang	1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	2.400	75.000.000	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kec. Ciawigebang	1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	24	-	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kec.	1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	3.100	-	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Ciawigebang					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Ciawigebang	1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	-	
III	Urusan Pilihan				34.633.336.700	
1	Kelautan dan Perikanan				1.895.910.500	
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				1.648.410.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21.452		
		2 Defisit Swasembada Ikan	Ton	5.700		
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				165.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	326		
		2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	15		
		3 Proporsi Tangkap Ikan yang berada dalam Batasan	Ton	330		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Biologis yang aman				
		4 Rasio Kawasan Perairan terhadap Total Lindung Luas Nelayan	Ha	201		
		5 Nilai Tukar Nelayan	Rp/Kg	N.A		
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				82.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	189		
		2 Komoditas Unggulan Kelompok				
		- Nila		28		
		- Mas		16		
		- Gurame		17		
		- Lele		15		
		Konsumsi Ikan	Kg/kap./th	25		
		Kebutuhan Konsumsi Ikan	Ton	21.778		
2	Pariwisata				5.043.326.200	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				764.500.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						Pariwisata
		1 Jumlah kunjungan wisata	Persen/Orang	2/3.251.196		
2	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata				605.000.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1 Jumlah SDM Pariwisata	Orang	20		
		2 Jaringan Kemitraan	Orang	75		
		3 Jumlah Kajian Akademis Desa Wisata	Kajian Desa Wisata	5		
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				3.673.826.200	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1 Sarana dan prasarana destinasi pariwisata	DTW	3		
		2 Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Wisata Desa	Desa/DTW	3		
3	Pertanian				17.177.500.000	
1	Program Peningkatan Informasi Pertanian				1.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Data dan Informasi Sektor Pertanian	Bulan	12		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian				357.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Persen	30		
3	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				6.667.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan				
		- Padi	Kw/Ha	63		
		- Jagung	Kw/Ha	54		
		- Kedelai	Kw/Ha	12		
		- Kacang Tanah	Kw/Ha	15		
		- Kacang Hijau	Kw/Ha	11		
		- Ubi Kayu	Kw/Ha	164		
		- Ubi Jalar	Kw/Ha	213		
4	Program Peningkatan Produksi Peternakan				3.162.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Produksi Daging				
		- Sapi	Ton	1.312		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		- Domba	Ton	805		
		- Ayam Buras	Ton	495		
		- Ayam Ras	Ton	25.543		
		- Itik	Ton	53		
		Produksi Telur:				
		- Ayam Buras	Ton	296		
		- Ayam Ras Petelur	Ton	6.698		
		- Itik	Ton	442		
		Produksi Susu Sapi	Ton	23.279		
		Populasi Ternak:				
		Sapi Perah	Ekor	5.432		
		Sapi Potong	Ekor	30.037		
		Domba	Ekor	124.342		
		Kambing	Ekor	7.434		
		Ayam Ras Petelur	Ekor	632.322		
		Ayam Ras Pedaging	Ekor	#####		
5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				3.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas Komoditas Perkebunan				
		- Pala	Kg/Ha	350		
		- Cengkeh	Kg/Ha	754		
		- Kopi Robusta	Kg/Ha	1.272		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		- Kopi Arabika	Kg/Ha	900		
		- Tembakau	Kg/Ha	1.318		
		- Tebu	Kg/Ha	3.797		
		- Nilam	Kg/Ha	474		
		- Kelapa	Kg/Ha	1.115		
6	Program Peningkatan Produksi Holtikultura				2.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas Komoditas Holtikultura				
		Bawang Merah	Kw/Ha	94		
		Tomat	Kw/Ha	295		
		Cabe Besar	Kw/Ha	96		
		Cabe Rawit	Kw/Ha	205		
		Produksi Buah-buahan:				
		Mangga	Kw	421.668		
		Rambutan	Kw	18.393		
		Durian	Kw	44.595		
7	Program Pemberdayaan SDM Pertanian				440.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Jumlah Latihan dan Kunjungan yang dilaksanakan oleh Penyuluh	Kali	13.536		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Meningkatnya Kelas Kelompok Tani:				
		Pemula	Orang	920		
		Lanjut	Orang	1.120		
		Madya	Orang	92		
		Utama	Orang	3		
		Cakupan Binaan Kelompok yang difasilitasi	Persen	13		
4	Perdagangan				7.201.600.000	
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri				1.826.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	UDKM	110		
		2 Sentra Perdagangan	Pasar Desa	2		
		3 Jumlah Prospek IKM yang dipromosikan	IKM	40		
		4 Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Event	5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		5 Jumlah Pelaksanaan Opeasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah	Kali	1		
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa				3.225.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Jumlah Pasar yang Direvitalisasi yang Berstandar SNI	Pasar	3		
		2 Jumlah Pengadaan Pasar Berstandar SNI	Pasar	4		
		3 Optimalisasi Pelayanan	Pasar	3		
3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				1.850.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Jumlah UTTP yang ditera/Tera ulang	UTTP	11.000		
		2 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kecamat an	8		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		3 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Metrologi Legal	Paket	1		
		4 Jumlah Pengawasan Alat UTP	Kali(kunjungan)	32		
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				300.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Nilai Ekspor Perdagangan	Rupiah			
5	Perindustrian				3.150.000.000	
1	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi				825.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Jumlah Peningkatan Daya Saing/Standarisasi Produk	Produk	128		
		2 Penerapan RPIK di Kabupaten Kuningan	Persen	60		
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan				2.050.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Menengah					Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Jumlah Pertumbuhan IKM	IKM	104		
		2 Jumlah Peningkatan Produk IKM	IKM	25		
		3 Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan	IKM	30		
		4 Fasilitasi Sertifikasi S-PIRT	IKM	100		
		5 Fasilitasi Pendaftaran Produk Halal	IKM	20		
		6 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual KAI	IKM	20		
		7 Wiraushawan Baru	Orang	50		
		8 Wirausaha Baru berbasis Pesantren	Pesantren/Orang	14.642		
3	Program Penataan Struktur Industri				175.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Penerapan Standar Industri Hijau pada Pabrik	Persen	60		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Penerapan Industri 4.0	Persen	20		
4	Program Penataan Struktur Industri				100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1 Standar Industri Hijau dan Industri 4.0 di Kab. Kuningan	Persen	5		
6	Transmigrasi				165.000.000	
1	Program Pemberdayaan Masyarakat/Transmigrasi Lokal				82.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Masyarakat Transmigrasi Lokal	Orang	40		
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan Transmigrasi				82.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Penyelenggaraan Transmigrasi antar Daerah	KK	4		
IV	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.136.188.400	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
1	Perencanaan				7.584.700.000	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	92		
2	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan				1.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan renstra PD lingkup Bidang Sosbudpem	Persen	100		
3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan				1.734.700.000	Badan Perencanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Sumberdaya Alam					Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah lingkup Bidang Fisik	Persen	100		
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				2.950.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi	Persen	100		
2	Keuangan				9.485.488.400	
1	Program Peningkatan Pajak					Badan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	PBB dan BPHTB				2.477.000.000	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Presentase target Penerimaan PBB dan BPHTB yang Terealisasi	Persen	97		
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.320.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1 Meningkatnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan	1		
		2 Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	Persen	100		
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah				725.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Peningkatan Motivasi Para Pengusaha Hotel, Restoran, Hiburan, MBLB, PPAT/PPATS untuk terus	Pengusaha	50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak				
			PPAT	18		
			PPA	32		
4	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				3.195.500.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Persentase target Penerimaan PAD yang terealisasi	Persen	92		
5	Program Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi				170.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Aplikasi yang dibangun dalam pengelolaan pajak daerah	Aplikasi	7		
6	Program Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				100.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah pajak dan retribusi yang diperiksa	Jenis Pajak	9		
			Retribusi	1		
7	Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah				165.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Kegiatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah	Kegiatan	4		
8	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengelola Pajak					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9	Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah				150.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Jenis Pajak yang dilayani	Jenis Pajak	9		
10	Program Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Aset Daerah				577.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Peningkatan Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Aset Daerah	Kegiatan	10		
11	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				605.488.400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1 Meningkatnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi	2		
3	Kepegawaian				6.158.000.000	
1	Program Pengembangan Karier Aparatur				165.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Peningkatan Karier Aparatur	Orang	5.375		
2	Program Kesejahteraan Aparatur				638.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Kesejahteraan Aparatur	Orang	5.535		
3	Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian				650.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Pelayanan Kepegawaian	Oranng	280		
4	Program Pemindahan Aparatur				1.150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Pemindahan Aparatur	Oranng	212		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1.485.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Orang	654		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
6	Program Pengadaan ASN dan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS				220.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Pengadaan ASN Daerah dan meningkatnya kualitas fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Orang	1.657		
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian				700.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian	Data PNS	11.000		
8	Program Pembinaan Aparatur				1.150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Disiplin dan Kinerja Aparatur	SKPD	63		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
			Orang	250		
4	Pendidikan dan Pelatihan				4.450.000.000	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.450.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	654		
5	Penelitian dan Pengembangan Daerah				3.900.000.000	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				2.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Jumlah Kajian	Jenis	8		
2	Program Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi Pembangunan				1.900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						Daerah
		1 Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
6	Pengawasan				2.558.000.000	
1	Program Penegakan Integritas dan Reformasi Birokrasi				600.000.000	Inspektorat
		1 Jumlah SKPD yang memiliki Nilai SPIP Level 3	SKPD	10		
		2 Persentase Capaian Reformasi Birokrasi	Persen	56		
		3 Persentase Kepatuhan LHKASN	Persen	45		
		4 Persentase Kepatuhan LHKPN	Persen	75		
		5 Persentase Kepatuhan LP2P	Persen	65		
2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				1.617.000.000	Inspektorat

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah SKPD yang memiliki Nilai LAKIP diatas BB	SKPD	10		
		2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	75		
		3 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPK	Persen	73		
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persen	55		
		5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Provinsi	Persen	65		
		6 Persentase Review RKPD dan RKA SKPD	Persen	100		
2	Program Peningkatan Kapabilitas APIP				341.000.000	Inspektorat
		1 Level Kapabilitas APIP	Level	2		
		2 Jumlah Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kecamatan	32		
			SKPD	10		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		3 Jumlah Pengawasan Internal dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	SKPD	63		
		4 Jumlah Sarana dan Informasi Pembangunan	Buah	10		
		5 Persentase Kualitas, Kuantitas Kinerja Perusahaan Daerah	Persen	75		
		2 Jumlah Kelompok Sasaran Kegiatan dalam upaya meningkatnya Kualitas Kompetensi PPTK Lingkup SETDA	Orang	73		
		3 Persentase Kualitas, Kuantitas Sistem Pelaporan Kinerja	Persen	70		
v	Fungsi Lainnya				38.285.146.000	
1	(Kesekretariatan)				38.285.146.000	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya				264.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Produk Hukum yang dikaji	Dokumen	19		
2	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat				198.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		1 Persentase Masyarakat sadar Hukum	Persen	100		
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum				368.896.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		1 Persentase Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang difasilitasi	Persen	100		
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				1.982.750.000	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem, Ekonomi dan Adbang)
		1 Jumlah Kemampuan Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	SKPD	31		
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja				1.211.100.000	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Buah	2		
6	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah				178.750.000	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
		1 Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	1		
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				44.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		1 Jumlah Kegiatan Disiplin Aparatur dilingkungan PEMKAB Kuningan	GDD	12		
8	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah				836.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		1 Persentase Penataan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persen	25		
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah				2.578.400.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum, Bag. Keuangan)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Buah	4		
		2 Jumlah Kelompok Sasaran Kegiatan dalam upaya meningkatnya pelayanan Aparatur dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Orang	73		
		3 Persentase Kualitas Pelayanan dan Kinerja bagi PNS dan Non PNS	Persen	70		
		4 Presentase Pelayanan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Persen	100		
10	Program Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				1.773.750.000	Sekretariat Daerah (Bagian Barjas)
		1 Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persen	25		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2 Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pihak/Orang	13		
		3 Jumlah Kepala Desa dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PBJ Desa dalam pemahaman peraturan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	20		
			Desa	70		
		4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Bagian Pengadaan Barang/jasa	Persen	65		
		5 Peningkatan Jumlah OPD yang sudah diberikan Bimbingan Teknis, Advokasi dan Fasilitas e-procurement di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Persen	65		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
11	Program Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan, dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3				200.000.000	Bagian Tata Pemerintahan Setda
		1 Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan	Desa	40		
12	Program Pelayanan Keprotokolan				150.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
		1 Jumlah Orang yang diberikan Pembekalan Keprotokolan	Orang	100		
13	Program Publikasi dan Kehumasan				1.450.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
		1 Jumlah Media Publikasi Hasil Pembangunan	Kegiatan	8		
14	Program Pelayanan Analisis Informasi				2.675.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
		1 Jumlah Pelayanan Informasi	Informasi	11		
15	Program Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				450.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Persentase PSKS	Persen	20		
16	Program Fasilitasi Bantuan Sosial				350.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		1 Persentase Pihak yang berperan aktif dalam restorasi social	Persen	20		
17	Program Penguatan Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga				900.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		1 Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	20		
18	Program Fasilitasi Penunjang dan Kebudayaan				2.200.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		1 Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Persen	20		
19	Program Pendidikan Bidang Keagamaan				3.200.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		1 Persentase bahan kebijakan pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan	Persen	20		
20	Program Fasilitasi Kegiatan					Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Keagamaan				1.925.000.000	(Bag. Kesra)
		1 Persentase bahan kebijakan pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan	Persen	20		
21	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan				1.350.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		1 Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman dan Pengalaman Keagamaan	Persen	20		
22	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan				1.237.500.000	Sekretariat Daerah
		1 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Buah	2		
		2 Jumlah Kelompok Sasaran Kegiatan dalam upaya meningkatnya Kualitas Kompetensi PPTK Lingkup SETDA	Orang	73		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		3 Persentase Kualitas, Kuantitas Sistem Pelaporan Kinerja	Persen	70		
23	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				2.352.036.600	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
		1 Terbentuknya Peraturan Daerah	Produk Hukum	10		
23	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				10.409.963.400	Sekretariat Dewan
		1 Terpenuhi tugas dan fungsi Alat Kelengkapan Anggota Dewan	Kegiatan	28		
		2 Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Orang	76.500		
		3 Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	Orang	1.050		
		4 Terlaksananya Kegiatan Seminar Bimtek dan Lokakarya Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan	Kegiatan	2		
		5 Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota	Kegiatan	2		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		DPRD ke Luar Daerah Provinsi				
		6 Terserapnya Aspirasi Masyarakat dalam Kegiatan DPRD	Orang	12.000		
		7 Terfasilitasinya Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD	Paket	1		
		8 Tersosialisasinya 3 (tiga) Fungsi DPRD	Paket	1		
		9 Terselenggaranya Kursus Singkat bagi Anggota Badan Anggaran	Orang	15		
JUMLAH					1.697.865.753.600	

Tabel 7.5.

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kuningan Tahun 2021 - 2023**

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.056.724.179.012	-	1.983.397.492.585	-	1.834.917.366.362	-	3.915.062.657.194	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				628.026.145.949		640.586.668.869		654.038.988.915		654.038.988.915	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				621.776.145.949		634.211.668.869		647.530.113.915		647.530.113.915	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Pendidikan		60,41		60,58		60,77		60,77		
		EYS/Harapan Lama Sekolah		12,14		12,19		12,23		12,23		
		MYS/Rata-rata Lama Sekolah		7,46		7,52		7,6		7,6		
		Indeks EYS		67,56		67,78		68,04		68,04		
		Indeks MYS		50,24		50,47		50,61		50,61		
		Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)		200		200		200		200		
		Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)		75		75		71		71		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembangunan perpustakaan (100 ruang)		20		20		20		20		
		Pemberian beasiswa (1.000) orang		150		150		200		1000		
		1 Persentase Anak yang mengikuti PAUD	Persen	76,12	93.643.707.000	76,15	95.516.581.140	76,2	97.522.429.344	76,2	97.522.429.344	
		2 APK SD/MI	Persen	100.14	103.188.885.533	100.15	105.252.663.244	100.16	107.462.969.172	100.16	107.462.969.172	
		3 APK SMP/MTs	Persen	99.07	66.855.627.450	99.07	68.192.739.999	99.08	69.624.787.539	99.08	69.624.787.539	
		4 APM SD/MI	Persen	99.90	103.188.885.533	99.91	105.252.663.244	99.93	107.462.969.172	99.93	107.462.969.172	
		5 APM SMP/MTs	Persen	91.24	66.855.627.450	91.26	68.192.739.999	91.27	69.624.787.539	91.27	69.624.787.539	
		6 Angka Partisipasi Sekolah :										
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	100.94	103.188.885.533	100.95	105.252.663.244	100.96	107.462.969.172	100.96	107.462.969.172	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100.68	66.855.627.450	100.69	68.192.739.999	100.70	69.624.787.539	100.70	69.624.787.539	
		7 Angka Kelulusan :										
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	100	250.000.000	100	255.000.000	100	260.355.000	100	260.355.000	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.142.000	100	104.142.000	
		8 Angka Melanjutkan Pendidikan :										
		- Sekolah Dasar (SD)	Persen	99.98	100.000.000	99.98	102.000.000	99.98	104.142.000	99.98	104.142.000	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	93.33	100.000.000	93.35	102.000.000	93.40	104.142.000	93.40	104.142.000	
		9 Rasio Guru Terhadap Murid :										

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		- Sekolah Dasar (SD)	Orang	1 : 0.09	793.200.000	1 : 0.10	809.064.000	1 : 0.10	826.054.344		826.054.344	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Orang	1:0051	575.000.000	1:0050	586.500.000	1:0050	598.816.500		598.816.500	
		1 0 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal	Orang	1 : 044	2.335.000.000	1 : 051	2.381.700.000	1 : 058	2.431.715.700	1 : 058	2.431.715.700	
		1 1 Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat	Orang	1.047	13.745.700.000	1.049	14.020.614.000	1.051	14.315.046.894	1.051		
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				6.250.000.000		6.375.000.000		6.508.875.000		6.508.875.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Orang	-50	6.250.000.000	-55	6.375.000.000	-50	6.508.875.000	14.132	6.508.875.000	
				14.447		14.502		14.552			-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				448.276.475.143		487.529.150.004		533.156.566.364		656.664.280.86	
		Indeks Kesehatan	Poin	82,23		82,45		82,67		82,67		
		Umur Harapan Hidup	Tahun	73,37		73,45		73,53		73,53		
		Ketersediaan ambulance gratis	Unit	8		8		8		8		
		Persentase Balita Stunting	Persen	15		5		2,5		2,5		
		Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	284		284		284				
		Angka Kematian Ibu	Kasus	22		21		21		21		
		Angka Kematian Bayi	Poin/1000 Kelahiran Hidup	4,04		4,03		4,02		4,02		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				446.867.475.143		485.566.150.004		530.842.639.864		654.350.354.364	
		1 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)										Dinkes
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	1	20.000.000.000		-		-	1	20.000.000.000	
		Pembangunan Puskesmas	Unit	4	12.000.000.000	2	8.000.000.000	2	8.000.000.000	8	28.000.000.000	
		Pengembangan Puskesmas	Unit	1	4.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	3	8.000.000.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	3	3.117.689.500	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	9	9.117.689.500	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	1	291.339.675							
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya /Pustu	Unit	1	150.000.000	9	1.350.000.000	10	1.500.000.000	20	1.500.000.000	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10 IPAL = 9	5.015.000.000	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10 IPAL = 5	3.750.000.000	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10 IPAL = 5	3.750.000.000	Roda 4 = 12/Roda 2 = 30 IPAL = 19	51.000.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Unit					1	200.000.000	1	200.000.000	
		Pengadaan Alat kesehatan/Alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	1	5.901.000.000	1	500.000.000	1	650.000.000	3	5.912.500.000	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	1	6.500.000.000	1	10.000.000.000	1	12.500.000.000	3	29.000.000.000	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	1	8.377.525.000	1	12.500.000.000	1	15.000.000.000	3	35.877.525.000	
		2 Persentase layanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dasar (SPM Bid. Kesehatan, Jaminan Kesehatan, KLB, Surveilans Kesehatan, Penyakit Menular dan Tidak Menular									-	Dinkes
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	225.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	456.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	200.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	325.000.000	100	325.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	100	250.000.000	100	2.300.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	50.000.000	100	6.250.000.000	100	6.300.000.000	100	6.300.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	50.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	1.400.000.000	100	1.550.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	100	75.000.000	100	355.000.000	100	405.000.000	100	405.000.000	
		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen	100		100	200.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persen	100	180.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persen	70	80.220.000	85	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen		85.000.000	100	270.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	
		Pelayanan Promosi	Jml Keg.:	2	50.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Kesehatan	1. Media Elektronik									
			2. Media Cetak									
			3. Roadshow									
		Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persen	30	100.000.000	60	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persen	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	persen	100	43.750.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persen	100	33.750.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persen		240.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100	1.204.132.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	44.938.473.094	100	47.185.396.749	100	49.544.666.586	100	49.544.666.586	
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persen	100	39.550.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	persen	60		70	750.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit			1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	2	3.250.000.000	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas	37	42.504.128.500	37	51.567.351.120	37	54.145.718.676	37	54.145.718.676	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Puskesmas	21	2.221.538.000	16	2.500.000.000	37	2.500.000.000	37	2.500.000.000	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persen	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persen			100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
		Penyediaan dan	Persen			50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)" pada Nomenklatur Kabupaten/Kota	(37 PKM 12 RS Kader)									
		3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aplikasi	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Paket			1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	persen			100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	persen			100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 RS			100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	37	100.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen		100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		1 Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	90	1.627.780.000	96	2.800.000.000	100	5.374.215.488	95	5.374.215.488,00	RSUD'45 Kuningan
		2 Presentase Pengadaan Alat Kesehatan / Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	92	9.268.261.917	96	10.195.088.108	100	11.214.596.918	100	11.214.596.918,00	RSUD'45 Kuningan
		3 Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	10.938.342.461	100	10.938.342.461	100	10.938.342.461	100	10.938.342.461	RSUD'45 Kuningan
		4 Angka Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan RSUD'45	Persen	85,5	127.660.540.238	87,5	134.043.567.249	89,5	140.745.745.611	89,5	140.745.745.611	RSUD'45 Kuningan
		5 Persentase pemenuhan UKP dan UKM RS	Persen	90	155.968.454.758	95	166.106.404.317	100	189.444.354.124	100	189.444.354.124	RSUD Linggajati
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				649.000.000		833.000.000		883.926.500		883.926.500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										Dinkes
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	100	209.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persen	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	150.000.000	100	420.000.000	100	441.000.000	100	441.000.000	Dinkes
		3 Tingkat kelulusan standar akreditasi RS (IKU RS)	Persen	82	200.000.000	83	213.000.000	85	242.926.500	85	242.926.500	RSUD Linggajati
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				185.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	Dinkes

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kali	100	120.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	
		2 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kali	50	65.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				760.000.000		900.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinkes
		1 Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Persen	50	200.000.000	60	250.000.000	75	350.000.000	75	350.000.000	
		2 Persentase Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persen	50	250.000.000	55	300.000.000	65	350.000.000	65	350.000.000	
		3 Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Persen	35	310.000.000	40	350.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN				588.302.557.920		610.130.073.712		382.169.301.083		1,907,501,591,915	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PENATAAN RUANG											
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				94.135.000.000		99.150.000.000		99.150.000.000		376,640,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Terlaksananya Perencanaan Teknis pada Bidang Sumberdaya Air	Dokumen	50	135.000.000	55	150.000.000	65	150.000.000	245	640,000,000	
		2 Jumlah Situ/Embung dalam Kondisi Baik dan Terpelihara	Buah	16	32.000.000.000	16	32.000.000.000	16	32.000.000.000	64	128,000,000,000	
		3 Penataan Kawasan Sempadan Sungai dan Pembangunan/Pemeliharaan TPT Sungai	Buah	4	16.000.000.000	4	16.000.000.000	4	16.000.000.000	16	64,000,000,000	
		4 Tertanganinya pengelolaan bahan banjir di beberapa lokasi rawan banjir	Lokasi	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	100	2,000,000,000	
		5 Jumlah sumber-sumber mata air yang terkelola	Titik	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	20	2,000,000,000	
		6 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	64	45.000.000.000	67	50.000.000.000	70	50.000.000.000	70	180,000,000,000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR				10.446.548.000		12.031.813.000		13.467.960.000		45.346.281.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	MINUM											
		1 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Minum	Lokasi	42	4.626.356.000	43	5.146.612.000	42	5.816.948.000	170	19.725.606.000	
		2 Akses air minum layak	Persen	91.09	5.820.192.000	94.06	6.885.201.000	97.03	7.651.012.000	97.03	25.620.675.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				6.225.000.000		7.000.000.000		54.000.000.000		67.225.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Tersedianya sarana prasarana untuk pengelolaan sampah	Lokasi	14	6.225.000.000	15	7.000.000.000	15	9.000.000.000	44	22.225.000.000	
								1 Lokasi TPA	45.000.000.000	1 Lokasi TPA	45.000.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10.859.609.920		12.972.460.712		13.706.341.083		47.759.958.915	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah Peningkatan Kinerja Air Limbah	Lokasi	41	4.000.000.000	41	5.000.000.000	40	5.000.000.000	164	18.000.000.000	
		2 Akses Air Limbah Domestik	Persen	66	6.859.609.920	66	7.972.460.712	66	8.706.341.083	66	29.759.958.915	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.800.000.000		2.050.000.000		2.200.000.000		7.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah panjang drainase yang tertangani	Meter	1.500	1.800.000.000	1.500	2.050.000.000	1.500	2.200.000.000	6000	7.650.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				3.700.000.000		3.700.000.000		2.200.000.000		13.300.000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah Pembangunan/Penataan Fasilitas Umum dan Pemerintahan	Paket	7	3.700.000.000	7	3.700.000.000	6	2.200.000.000	27	13.300.000.00	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.000.000.000		5.000.000.000		4.000.000.000		19.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Pemerintahan	Paket	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	12	4.000.000.000	42	19.000.000.00	
8	PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN				454.511.400.000		467.050.800.000		192.120.000.000		1,325,155,352,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Terlaksananya Perencanaan Teknis pada Bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	61	226.390.800.000	48	236.327.600.000	40	13.600.000.000	218	484,500,052,000	
		2 Bertambahnya jaringan jalan	Km	6	67.140.000.000	7	87.180.000.000	6	72.000.000.000	21	239.320.000.000	
		3 Bertambahnya jumlah jembatan	Buah	1	17.095.000.000	-	0	-	0	3	53.915.000.000	
		4 Jalan dalam kondisi mantap	Km	95	142.500.000.000	95	142.500.000.000	70	105.000.000.000	340	540.000.000.000	
		5 Jembatan dalam kondisi baik	m	43	1.385.600.000	33	1.043.200.000	48	1.520.000.000	190	7.420.300.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				925.000.000		475.000.000		625.000.000		2.625.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Fasilitas pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Orang	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	800	1.200.000.000	
		2 Pembinaan dan Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	BUJK	75	100.000.000	0	0	75	100.000.000	225	300,000,000	
		3 Pelaksanaan Pengembangan Jasa Kontruksi	Paket	8	525.000.000	3	175.000.000	4	225.000.000	23	1.125.000.000	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/tersusun	Dokumen	14	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	9	2.000.000.000	
		2 Terkendalinya kegiatan pemanfaatan ruang	Lokasi	96	200.000.000	96	200.000.000	96	200.000.000	384	800,000,000	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				353.238.000.000		201.575.000.000		220.600.000.000		775.413.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				28.900.000.000		37.275.000.000		37.275.000.000		103.450.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	rumah	1.100	28.900.000.000	1.400	37.275.000.000	1.400	37.275.000.000	3.900	103.450.000.000	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				97.650.000.000		60.250.000.000		79.250.000.000		237,150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Penyusunan dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan	Kegiatan / Dokumen	6 Kegiatan /2 Dokumen	2.200.000.000	6 Kegiatan	1.200.000.000	6 Kegiatan	1.200.000.000	18 Kegiatan / 2 Dokumen	4,600,000,000	
		2 Jumlah Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kegiatan	3	950.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	9	3,050,000,000	
		3 Jumlah Rutilahu yang ditangani	Unit Rumah	1.000	17.500.000.000	1.000	2/0.000.000.000	1.000	20.000.000.000	3.000	57.500.000.000	
		4 Jumlah Pengurangan / Luas Kawasan Kumuh	Ha / %	77 / 0,231	77.000.000.000	38 / 0,199	38.000.000.000	57 / 0,152	57.000.000.000	181,5 Ha/0,152	172,000,000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				456.388.000		333.700.000		333.700.000		1.185.538.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Rutilahu dan PSU yang ditangani	Unit rumah	7.659	456.388.000	3.115	333.700.000	3.115	333.700.000	15.589	1.185.538.000.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				20.300.000.000		20.350.000.000		20.375.000.000		61.025.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 Jumlah Perencanaan PSU Perumahan	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	
		2 Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	44,27	20.000.000.000	44	20.000.000.000	43	20.000.000.000	131,27	60.000.000.000	
		3 Jumlah Dokumen Serah Terima Aset PSU Perumahan	Dokumen	15	150.000.000	15	200.000.000	15	225.000.000	45	575.000.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.056.000.000		17.576.600.000		18.898.510.000		18.898.510.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.834.513.800		8.617.965.180		9.479.761.698		9.479.761.698	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	93	442.640.200	94	486.882.220	95	535.570.442	95	535.570.442	
		2 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	84	662.000.000	84	728.200.000	85	801.020.000	85	801.020.000	
		3 Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	95	271.840.400	95	299.024.440	96	328.926.884	96	328.926.884	
		4 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Pemberdayaan Anggota S	Pemberdayaan	109	6.458.053.200	110	7.103.858.520	111	7.814.244.372	545	7.814.244.372	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				8.300.000.000		8.715.000.000		9.150.750.000		9.150.750.000	BPBD
		1 IndeksKetahanan/ Kapasitas Daerah	Point	0,64	5.825.000.000	0,65	6.116.250.000	0,66	6.422.062.500	0,66	6.422.062.500	
		2 Rata-rata Waktupenanganankekuratanpemuhankebutuhdasar	waktu	1 hari/ 24jam	1.750.000.000	1 hari/ 24jam	1.837.500.000	1 hari/ 24jam	1.929.375.000	1 hari/ 24jam	1.929.375.000	
		3 PersentaseKajianKebutuhanpascaBencana	persen	70	725.000.000	75	761.250.000	80	799.312.500	80	799.312.500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON-KEBAKARAN				221.486.200		243.634.820		267.998.302		267.998.302	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Jangkauan Luas WMK yang dapat dilayani	Persen	44	75.000.000	73	82.500.000	88	90.750.000	88	90.750.000	-
		2 Persentase Kasus Bencana Kebakaran yang berhasil ditangani dalam Tingkat Waktu Tanggap pada Daerah WMK	Persen	60	50.000.000	65	55.000.000	80	60.500.000	80	60.500.000	
		3 Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Orang	125	71.486.200	150	78.634.820	175	86.498.242	175	86.498.242	
		4 Jumlah dalam pencegahan dan penganggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	125	25.000.000	150	27.500.000	175	30.250.000	175	30.250.000	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				22.375.000.000		24.575.000.000		25.125.000.000		25.125.000.000	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				17.925.000.000		18.275.000.000		18.675.000.000		18.675.000.000	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)	Kelompok	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	
		2 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan	Orang	100	275.000.000	200	450.000.000	300	675.000.000	300	675.000.000	
		3 Jumlah PSM, Karang Taruna, TKS dan Orsos Tingkat Kab. Kuningan yang dibina	Orang	100	200.000.000	150	300.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	
		4 Jumlah Desa yang mendapat Bhakti Sosial Karang Taruna	Desa	10	150.000.000	15	225.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	
		5 Jumlah TKS yang dibina	Orang	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	
		6 Jumlah Undian Berhadiah yang diberi ijin	Kegiatan	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		7 Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) yang ditangani	Orang	160	150.000.000	160	150.000.000	160	150.000.000	160	150.000.000	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Migran korban tindak kekerasan yang ditangani	orang	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.800.000.000		4.650.000.000		4.750.000.000		4.750.000.000	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Rumah Singgah yang di bangun	Unit	1	600.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	
		2 Jumlah lansia potensial yang diberikan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
		3 Jumlah Penyandang Disabilitas yang ditangani	Orang	50	100.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	
		4 Jumlah Siswa SLTP dan SLTA yang dibina dalam pencegahan Napza	Orang	50	100.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	
		5 Jumlah penyandang disabilitas berat (orang dengan kecacatan berat/ODKB) yang mendapat Pelayanan sosial	Orang	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	
		6 Jumlah eks korban penyalahgunaan NAPZA yang diberikan bantuan	Orang	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
		7 Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibina	Orang	250	750.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	
		8 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat Pelayanan sosial kegawatdaruratan	Orang	50	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
		9 Jumlah Pendampingan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	30	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		10 Jumlah Guru BP dan Siswa SLTP dan SLTA yang dibimbing dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Sekolah	30	100.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	
		11 Jumlah Klien PMKS yang dikirim ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit Jiwa I dan Daerah Asal	Orang	60	100.000.000	65	200.000.000	70	250.000.000	70	250.000.000	
		12 Jumlah rehabilitasi sosial berbasis keluarga penyandang disabilitas (family care) yang ditangani	Orang	60	100.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	
		13 Jumlah petugas rehabilitasi sosial berbasis masyarakat (RBM) yang dibina	Orang	70	100.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	
		14 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rehabilitasi Sosial yang di tangani	Institusi	15	100.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	
		15 Jumlah Rehabilitasi Sosial melalui Operasionalisasi Rumah Singgah yang di tangani	Unit/Lokal	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Sosial
		1 Persentase penduduk miskin	Persen	13,38		13,06		12,74		12,74		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pendataan DTKS & non - DTKS	Kec.	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	
		3 Jumlah anak terlantar yang ditangani	Orang	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				700.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Orang yang terlayani dengan pengadaan Bufferstok Tanggap darrurat Bencana	Orang	400	500.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	
		2 Jumlah Kader Taruna Siaga Bencana yang terlayani	Orang	85	200.000.000	90	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial
		1 Jumlah Makam Mantan Bupati Kuningan yang terpelihara	Buah	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
		2 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Haur Duni	Kegiatan	5	100.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				113.195.679.450		120.553.398.614		137.491.151.120		137.491.151.120	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA				5.525.000.000		6.065.000.000		8.482.500.000		20.072.500.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	KERJA											
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				2.250.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		7.750.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	528	1.000.000.000	640	1.000.000.000	880	1.250.000.000	2.944	3.250.000.000	
		2 Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	96	1.250.000.000	128	1.500.000.000	160	1.750.000.000	544	4.500.000.000	
2	Program Hubungan Industrial				1.025.000.000		1.100.000.000		1.530.000.000		3.655.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Kepesertaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Orang	12.521	125.000.000	15.636	130.000.000	19.270	150.000.000	19.270	405.000.000	
		2 Tingkat Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kuningan	Persen	9	125.000.000	10	130.000.000	10	150.000.000	2.331.634	405.000.000	
		3 Pembinaan Pengusaha dan Pekerja mengenai SMK 3 tahun	Perusahaan	50	150.000.000	50	160.000.000	50	170.000.000	195	480.000.000	
		4 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Perusahaan	50	200.000.000	50	220.000.000	50	240.000.000	195	660.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5 Pembinaan Pelaksanaan peraturan Ketenagakerjaan	Perusahaan	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	195	330.000.000	
		6 Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perusahaan	15	150.000.000	15	160.000.000	15	170.000.000	70	480.000.000	
		7 Pembinaan LKS Bipartit dan Tripartit	Orang	20	175.000.000	20	190.000.000	20	200.000.000	100	565.000.000	
		8 Verifikasi Data Perusahaan Baru/Berjalan di Kecamatan per 3 Tahun	Kecamatan	-	0	-	-	32	330.000.000	32	330.000.000	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja				2.150.000.000		2.365.000.000		3.827.500.000		8.342.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan terlayani	Orang	11.940	150.000.000	12.482	165.000.000	12.682	181.500.000	57.654	496.500.000	
		2 Jumlah Pencari Kerja yang Berpartisipasi dalam Pameran Bursa Kerja / Job Fair per tahun	Orang	2.300	500.000.000	2.500	550.000.000	2.750	605.000.000	10.050	1.655.000.000	
		3 Jumlah Penganggur Musiman yang terserap	Orang	132	600.000.000	176	660.000.000	176	726.000.000	792	1.986.000.000	
		4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	5.670	150.000.000	6.230	165.000.000	7.150	181.500.000	30.530	496.500.000	
		5 Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha Baru	Orang	20	300.000.000	20	330.000.000	40	500.000.000	100	1.130.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		6 Penyebarluasan Informasi Peluang Kerja Ke-luar negeri	Desa	100	100.000.000	125	110.000.000	151	1.210.000.000	376	1.420.000.000	
		7 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	Orang	50	250.000.000	75	275.000.000	100	302.500.000	225	827.500.000	
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja				100.000.000		100.000.000		125.000.000		325.000.000	
		1 Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dari Kecamatan	Dokumen	1	100.000.000	1	10.000.000.000	1	125.000.000	5	325.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.850.000.000		1.970.250.000		2.247.070.125		2.247.070.125	
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				800.000.000		852.000.000		971.706.000		971.706.000	DPPKBP3A
		1 Jumlah Perempuan dalam Jabatan yang dibiina	Orang	50	100.000.000	50	106.500.000	55	121.463.250	255	121.463.250	
		2 Jumlah Perempuan dalm Politik yang dibina	Orang	200	200.000.000	200	213.000.000	200	242.926.500	1.048	242.926.500	
		3 Jumlah Perempuan dalam Profesi yang dibina	Orang	2.704	100.000.000	3.606	106.500.000	4.507	121.463.250	13.521	121.463.250	
		4 Jumlah Penganggaran Responsif Gender yang dibimbing	Orang	30	200.000.000	30	213.000.000	30	242.926.500	150	242.926.500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5 Jumlah Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina	Kelompok	5	100.000.000	5	106.500.000	5	121.463.250	25	121.463.250	
		6 Jumlah Organsiasi Perempuan yang dibina	Organisasi	38	100.000.000	38	106.500.000	38	121.463.250	190	121.463.250	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				200.000.000		213.000.000		242.926.500		242.926.500	DPPKBP3A
		1 Jumlah KDRT dan Trafficking yang ditangani	Kasus	5	200.000.000	7	213.000.000	10	242.926.500	15	242.926.500	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				250.000.000		266.250.000		303.658.125		303.658.125	DPPKBP3A
		1 Jumlah Desa Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dibina	Desa	1	250.000.000	1	266.250.000	1	303.658.125	5	303.658.125	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				150.000.000		159.750.000		182.194.875		182.194.875	DPPKBP3A
		1 Jumlah dokumen profil Gender	Jenis	1	150.000.000	1	159.750.000	1	182.194.875	1	182.194.875	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				300.000.000		319.500.000		364.389.750		364.389.750	DPPKBP3A
		1 Jumlah desa layak yang dibina	Desa	5	150.000.000	6	159.750.000	7	182.194.875	25	182.194.875	
		2 Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina	Forum Anak	22	150.000.000	27	159.750.000	32	182.194.875	32	182.194.875	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				150.000.000		159.750.000		182.194.875		182.194.875	DPPKBP3A
		1 Jumlah kasus Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditangani	Kasus	34	150.000.000	38	159.750.000	45	182.194.875		182.194.875	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				6.494.000.000		7.438.110.000		8.430.264.455		13.902.514.455	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.650.000.000		2.822.250.000		3.218.776.125		8.691.026.125	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Penguatan Cadangan Pangan:										
		-Cadangan pangan Pemerintah	Ton	10	500.000.000	10	532.500.000	10	607.316.250	60	1.639.816.250	
		-Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	20	100.000.000	20	106.500.000	40	121.463.250	200	327.963.250	
		2 Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	274,5	850.000.000	277,31	905.250.000	280,08	1.032.437.625	280,08	2.787.687.625	
		3 Pangsa Pangan Lokal	Persen	40	600.000.000	45	639.000.000	50	728.779.500	50	1.967.779.500	
		4 Skor Pola Pangan Harapan	Persen	84,35	150.000.000	85,27	159.750.000	86,73	182.194.875	86,73	491.944.875	
		5 Ketersediaan Energi PerKapita	Gr	2.145	200.000.000	2.160	213.000.000	2.185	242.926.500	2.185	655.926.500	
		6 Keterrersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Dokumen	2	50.000.000	2	53.250.000	2	60.731.625	2	163.981.625	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		7 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan:										
		Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (Kelompok)	Kelompok	2	100.000.000	2	106.500.000	2	121.463.250	12	327.963.250	
		Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (PUPM)	Kelompok	2	100.000.000	2	106.500.000	2	121.463.250	12	327.963.250	
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				500.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Pengawasan Pangan	Jenis	2		2		2		2		
		2 Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	25		25		25		25		
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Unit	1	700.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	5	1.000.000.000	
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan				2.644.000.000		2.815.860.000		3.211.488.330		3.211.488.330	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Terlaksananya penyaluran bantuan bagi penduduk rawan pangan	Jiwa	2.247	2.644.000.000	1.079	2.815.860.000	237	3.211.488.330	237	3.211.488.330	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				37.965.500.00 0		21.075.000.00 0		9.975.000.000		69.015.500.00 0	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				0		300.000.000		0		300.00.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		1 Jumlah Kasus/Sengketa Tanah yang diselesaikan	Ha	0	0	42	300.000.000	0	0	42	300.000.000	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				36.665.500.00 0		14.500.000.00 0		4.000.000.000		55.165.500.00 0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		1 Jumlah Lahan/Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	m²	53.859	36.665.500.00 0	52.450	14.500.000.00 0	52.512	4.000.000.000	173.266	55.165.500.00 0	
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				300.000.000		5.275.000.000		4.975.000.000		10.550.000.00 0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		1 Jumlah Sertifikat Tanah	Sertifikat	0	0	650	425.000.000	650	425.000.000	1.300	850.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Jumlah Inventarisasi Tanah Kosong dan Pemanfaatan tanah kosong	Dokumen	1	300.000.000	5	4.850.000.000	3	4.550.000.000	9	9.700.000.000	
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		3.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		1 Tertibnya administrasi pertanahan	Dokumen	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	6	3.000.000.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				61.611.000.000		60.386.000.000		65.676.000.000		249.784.000.000	
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				950.000.000		1.550.000.000		2.850.000.000		6.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Dokumen kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	14	950.000.000	19	1.550.000.000	41	2.850.000.000	88	6.800.000.000	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.750.000.000		1.150.000.000		1.090.000.000		6.790.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase Area Pencemaran Lingkungan yang diintervensi	Persen	25,77	1.750.000.000	16,94	1.150.000.000	16,05	1.090.000.000	100	6.790.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				50.850.000.000		51.000.000.000		55.300.000.000		209.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase RTH yang dikelola dengan baik /tuntas	Persen	24,14	3.500.000.000	26,21	3.800.000.000	29,31	4.250.000.000	100	14.500.000.000	
		2 Persentase SDA yang dilindungi dan dikonservasi	Persen	22,87	2.550.000.000	26,01	2.900.000.000	29,6	3.300.000.000	100	11.150.000.000	
		3 Persentase SDA yang dilindungi dan dikonservasi (KRK)	Persen	19,25	2.550.000.000	29,81	3.950.000.000	24,91	3.300.000.000	100	13.250.000.000	
		4 Jumlah Taman Kehati yang dikelola dan dikembangkan dengan lengkap	Unit	1	600.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	2.400.000.000	
		5 Persentase wilayah ekowisata KRK yang dikelola dengan lengkap	Persen	24,72	41.650.000.000	23,59	39.750.000.000	25,96	43.750.000.000	100	168.500.000.000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				3.400.000.000		1.600.000.000		1.150.000.000		7.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase Kerusakan Lingkungan yang ditangani	Persen	45,95	3.400.000.000	21,62	1.600.000.000	15,54	1.150.000.000	100	7.400.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				250.000.000		325.000.000		525.000.000		1.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Kuningan	Usaha	50	225.000.000	75	300.000.000	80	500.000.000	205	1.025.000.000	
		2 Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Kuningan	Orang/ unit	01-Jan	25.000.000	01-Jan	25.000.000	-/1	25.000.000	02-Jan	75.000.000	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				700.000.000		900.000.000		750.000.000		2.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Persentase pengelolaan lingkungan hidup berbasis kemitraan	Persen	24,56	700.000.000	31,58	900.000.000	26,32	750.000.000	100	2.850.000.000	
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				500.000.000		650.000.000		800.000.000		2.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase lembaga dan atau kelompok masyarakat yang menerapkan tatanan lingkungan hidup sesuai perundang-undangan	Persen	21,74	500.000.000	28,26%	650.000.000	34,78	800.000.000	100	2.300.000.000	
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Jumlah koordinasi dalam penanganan pengaduan lingkungan hidup	kali	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	24	300.000.000	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3.111.000.000		3.111.000.000		3.111.000.000		12.444.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase wilayah yang sampahnya ditangani dengan tuntas	Persen	30,31	3.111.000.000	30,55	3.111.000.000	30,8	3.111.000.000	30.80	12.444.000.000	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				4.233.411.000		4.508.582.715		5.142.038.586		5.142.038.586	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	DAN PENCATATAN SIPIL											
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				3.358.411.000		3.526.481.350		3.702.977.218		3.438.77.218	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
		1 Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	78	300.000.000	79	315.000.000	80	330.750.000	80	330.750.000	
		2 Kepemilikan KTP-El	Persen	97,78	421.000.000	97,79	442.000.000	98	464.000.000	98	200.000.000	
		3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	23	175.000.000	23,15	183.750.000	23,25	192.937.500	23,25	192.937.500	
		4 Terlaksannya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kepndudukan	Orang	408	140.004.000	408	147.204.000	408	154.836.000	408	154.836.000	
		5 Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Desa/Kel	22	412.413.000	25	433.033.650	30	454.685.333	30	454.685.333	
		6 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan	Paket	1	1.754.890.000	1	1.842.634.500	1	1.934.766.225	1	1.934.766.225	
		7 Terpeliharanya jaringan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Paket	1	18.104.000	1	19.009.200	1	19.959.660	1	19.959.660	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		8 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk	Kali	4	137.000.000	4	143.850.000	4	151.042.500	4	151.042.500	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				250.000.000		266.250.000		303.658.125		303.658.125	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1 Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	81.00	140,000,000	82.00	151.250.000	83.00	183.658.125	83.00	183.658.125	
		2 Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s.d 18 tahun	Persen	86.00	100.000.000	87.00	105.000.000	88.00	110.000.000	88.00	110.000.000	
		3 Penangan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100.00	5.000.000	100.00	5.000.000	100.00	5.000.000	100.00	5.000.000	
		4 Penangan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100.00	5.000.000	100.00	5.000.000	100.00	5.000.000	100.00	5.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				325.000.000		346.125.000		394.755.563		394.755.563	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1 Meningkatkan dan lancarnya pelayanan administrasi kependudukan	Kab / Kec.	1 tk. Kab 32 Kec.	325.000.000	1 tk. Kab 32 Kec.	346.125.000	1 tk. Kab 32 Kec.	394.755.563	1 tk. Kab 32 Kec.	394.755.563	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				300.000.000		319.500.000		364.389.750		364.389.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1 Meningkatnya data perkembangankependudukansebagaibahanpenyusunankebijakan	BukuProf il	70	175.000.000	70	184.500.000	70	214.389.750	210	214.389.750	
		2 Intansi yang memanfaatkan data KependudukanDisdukc apil (PKS)	Instansi	5	125.000.000	5	1350.00.000	5	150.000.000	15	150.000.000	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				334.899.798.280		367.426.692.593		402.943.122.061		403.583.122.061	
1	PROGRAM PENATAAN DESA				11.441.059.300		12.013.112.265		12.613.767.878		12.613.767.878	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Desa	361	11.341.059.300	361	11.908.112.265	361	12.503.517.878	361	12.503.517.878	
		2 PenegasandanPenetapa n Batas Desa	Desa	3	100.000.000		105.000.000		110.250.000		110.250.000	
		Indeks desa membangun	Poin	0,66		0,665		0,67		0,67		
		Desa Mandiri	Desa	10		10		15		57		
		Desa Tertinggal	Desa	4		0		0		0		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				200.000.000		440.000.000		500.000.000		1.140.000.000	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		1 Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasiitasi	Kawasan	1	200.000.000	2	440.000.000	2	500.000.000	5	1.140.000.000	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				311.038.087.980		342.141.896.778		376.356.086.456		376.356.086.456	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		1 Jumlah Aparatur Desa yang Dibina dan Terlatih	Jumlah	833	1.500.000.000	808	1.575.000.000	1083	1.653.750.000	1083	1.653.750.000	
		2 Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Desa	361	308.468.087.980	361	323.891.492.379	361	340.086.066.997	361	340.086.066.997	
		3 Jumlah BUMDesa yang mendapat pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa yang Mandiri	Desa	10	1.070.000.000	10	1.123.500.000	10	1.179.675.000	55	1.179.675.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				12.220.651.000		12.831.683.550		13.473.267.727		13.473.267.727	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Meningkatnya ekonomi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan	Desa	10	6.635.649.000		6.967.431.450		7.315.803.022		7.315.803.022	
		2 Kelembagaan Posyandu Strata Mandiri	Lembaga	429	875.000.000	472	918.750.000	500	964.687.500	500	964.687.500	
		3 Jumlah Desa yang Mengembangkan TTG	Desa	50	1.650.000.000	60	1.732.500.000	70	1.819.125.000	180	1.819.125.000	
		4 Peningkatan Kapasitas kelembagaan	Kecamatan	32	2.310.002.000	32	2.425.502.100	32	2.546.777.205	288	2.546.777.205	
		5 Tersedianya Operasional untuk PPDI dan APDESI	Lembaga	2	200.000.000	3	210.000.000	3	220.500.000	3	220.500.000	
		6 Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Agama, serta Bidang Lingkungan Hidup	Kecamatan	32	550.000.000	32	577.500.000	32	606.375.000	32	606.375.000	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.602.500.000		11.291.662.500		12.878.141.081		12.878.141.081	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1,500,000,000		1,597,500,000		1,821,948,750			DPPKBP3A

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Jumlah Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1000 (Perempuan Usia 15-19) (ASFR)	Rata-rata	29	200.000.000	28	213.000.000	27	242.926.500	27	242.926.500	
		Jumlah Kebijakan (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk	Perbup	5	300.000.000	5	319.500.000	6	364.389.750	21	364.389.750	
		Jumlah Kerjasama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah	25	200.000.000	30	213.000.000	35	242.926.500	125	242.926.500	
		Jumlah Rumah Data Kependudukan	Jumlah	22	300.000.000	23	319.500.000	25	364.389.750	25	364.389.750	
		Jumlah/Cakupan Pembinaan dengan Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat/Koalisi Kependudukan	Jumlah	4	200.000.000	5	213.000.000	6	242.926.500	6	242.926.500	
		Jumlah/Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro di Tingkat Desa	Jumlah	329	300.000.000	351	319.500.000	376	364.389.750	376	364.389.750	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				7.452.500.000		7.936.912.500		9.052.048.706		9.052.048.706	DPPKBP3A
		Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB	Jumlah	119	1.500.000.000	120	1.597.500.000	121	1.821.948.750	121	1.821.948.750	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR)	Persen	71.61	2.000.000.000	71.94	2.130.000.000	72.24	2.429.265.000	72.24	2.429.265.000	
		Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	15,16	1.750.000.000	13.94	1.863.750.000	13.73	2.125.606.875	13.73	2.125.606.875	
		Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	32,03	2.202.500.000	35.07	2.345.662.500	36.1	2.675.228.081	36.1	2.675.228.081	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.650.000.000		1.757.250.000		2.004.143.625		2.004.143.625	DPPKBP3A
		Jumlah/Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Jumlah	100	300.000.000	125	319.500.000	150	364.389.750	150	364.389.750	
		Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita		19	150.000.000	19.2	159.750.000	19.5	182.194.875	19.5	182.194.875	
		Jumlah/Cakupan Anggota BinanKeluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	27.54	100.000.000	27.62	106.500.000	27.7	121.463.250	27.7	121.463.250	
		Jumlah/Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	64.37	300.000.000	64.46	319.500.000	64.55	364.389.750	64.55	364.389.750	
		Jumlah/Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	39.47	100.000.000	39.56	106.500.000	39.64	121.463.250	39.64	121.463.250	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Jumlah/Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Persen	58.39	150.000.000	58.4	159.750.000	58.5	182.194.875	58.5	182.194.875	
		Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor	Jumlah	6.132	150.000.000	6.132	159.750.000	6.132	182.194.875	6.132	182.194.875	
		Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PPKBD	Jumlah	380	300.000.000	380	319.500.000	380	364.389.750	380	364.389.750	
		Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD	Jumlah	1.462	100.000.000	1.462	106.500.000	1.462	121.463.250	1.462	121.463.250	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				3.988.100.000		4.335.860.000		4.684.346.000		16.413.306.000	
1	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				3.988.100.000		4.335.860.000		4.684.346.000		16.413.306.000	Dinas Perhubunga n
		1 Persentase Angkutan Umum yang Terevaluasi Dokumen Perjalanannya	Persen	60%	72.600.000	65%	79.860.000	70%	87.846.000	70%	240.306.000	
		2 Persentase Kendaraan Bermotor (Wajib Uji) yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	75%	269.500.000	80%	294.000.000	80%	318.500.000	80%	1.127.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	45%	396.000.000	50%	432.000.000	50%	468.000.000	50%	1.656.000.000	
		4 Persentase Ketersediaan Trayek antar kota	Persen	40%	170.000.000	40%	170.000.000	40%	170.000.000	40%	510.000.000	
		5 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang terpelihara	Persen	40%	660.000.000	40%	720.000.000	40%	780.000.000	40%	2.760.000.000	
		6 Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	40%	2.310.000.000	45%	2.520.000.000	50%	2.730.000.000	50%	9.660.000.000	
		7 Persentase Potensi Kawasan Parkir Legal	Persen	70%	110.000.000	70%	120.000.000	75%	130.000.000	75%	460.000.000	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.535.800.000		91.889.380.000		92.828.318.000		92.828.318.000	
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.935.800.000		4.329.380.000		4.762.318.000		4.762.318.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	480.000.000	100	528.000.000	100	580.800.000	100	580.800.000	
		2 Persentase Media Komunikasi Publik yang dimanfaatkan	Persen	100	2.010.800.000	100	2.211.880.000	100	2.433.068.000	100	2.433.068.000	
		3 Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Persen	100	1.445.000.000	100	1.589.500.000	100	1.748.450.000	100	1.748.450.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				9.600.000.000		87.560.000.000		88.066.000.000		88.066.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	4.600.000.000	100	5.060.000.000	100	5.566.000.000	100	5.566.000.000	
		Jumlah terbangunnya command center	Unit	1	5.000.000.000	-	-	-	-		-	
		Jumlah Sarana Prasarana Command Center (Smart City)	Paket	-	-	1	75.000.000.000	1	75.000.000.000		75.000.000.000	
		Jumlah maintenance command center	Paket	-	-	1	7.500.000.000	1	7.500.000.000		7.500.000.000	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.833.500.000		5.158.460.000		5.760.073.630		15.752.033.630	
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				2.200.000.000		2.343.000.000		2.672.191.500		7.215.191.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	500		510		520		520		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				484.000.000		515.460.000		587.882.130		1.587.342.130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1 Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	75		75		100		400		
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				1.149.500.000		1.300.000.000		1.400.000.000		3.849.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1 Koperasi Binaan	Koperasi	20		20		25		85		
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				500.000.000		500.000.000		550.000.000		1.550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1 Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	100		100		100		100		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				500.000.000		500.000.000		550.000.000		1.550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Koperasi Binaan	Koperasi	100		100		100		100		
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.450.000.000		5.100.000.000		6.700.000.000		14.350.000.000	
1	Program Promosi Penanaman Modal				400.000.000		800.000.000		900.000.000		2.100.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi Investasi	4	400.000.000	4	800.000.000	4	900.000.000	21	2.100.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				500.000.000		1.000.000.000		1.350.000.000		2.850.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Profil Investasi Desa Pinunjul	Desa	3	100.000.000	5	200.000.000	5	300.000.000	15	600.000.000	
		2 Regulasi Perda dan Perbup penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda dan Perbup	1	300.000.000	1	500.000.000	1	700.000.000	1 Perda 6 Perbup	1.500.000.000	
		3 Jumlah Sasaran kerjasama Minimal 50 UKM Per-tahun	UKM	50	100.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000	250	750.000.000	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				850.000.000		1.050.000.000		1.300.000.000		3.200.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Jumlah Pelaksanaan Survey IKM	Kegiatan /perusahaan	1/150	350.000.000	1/150	450.000.000	1/150	550.000.000	3/450	1.350.000.000	
		2 Pendampingan Gerai Layanan Perizinan Kecamatan	Kecamatan	2	500.000.000	2	600.000.000	2	750.000.000	6	1.850.000.000	
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				400.000.000		1.250.000.000		1.650.000.000		3.300.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai RTRW	Persen	100	250.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	1.200.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi Berbasis Elektronik	Aplikasi	5	150.000.000	5	500.000.000	5	750.000.000	5	1.400.000.000	
		3 Pembuatan Media Informasi Perizinan	Iklan	4	0	4	300.000.000	4	400.000.000	16	700.000.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				1.300.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.900.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Nilai Investasi yang ada di Desa	Milyar	9.064.871.262	100.000.000	10.424.601.951	200.000.000	11.988.292.244	300.000.000	46.214.607.207	600.000.000	
		2 Jumlah Investasi di Kabupaten Kuningan	PMDN	3.933.906.587.075	100.000.000	5.048.906.587.075	200.000.000	6.394.906.587.075	300.000.000	11.988.292.244	600.000.000	
			PMA	470.687.271.496	-	649.187.271.496	-	851.687.271.496	-	851.687.271.496	-	
		3 Penyerapan Investasi di Kabupaten Kuningan	Persen	135	100.000.000	155	200.000.000	160	300.000.000	849,44	600.000.000	
		4 Berkurangnya Pelanggaran Perizinan di Kabupaten Kuningan	Persen	30	1.000.000.000	35	200.000.000	40	300.000.000	40	600.000.000	
		5 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuningan	Orang	3.700	0	4.200	200.000.000	4.600	300.000.000	19.005	500.000.000	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				161.590.615.000		28.760.000.000		42.275.000.000		224.095.615.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				23.700.000.000		4.350.000.000		5.250.000.000		33.300.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
		1 Jumlah Pemuda Prestasi ditingkat Provinsi	Orang	5	850.000.000	5	1.150.000.000	5	1.400.000.000	15	3.400.000.000	
		2 Jumlah Peserta Pelatihan dan Penguatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	400	1.200.000.000	
		3 Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persen	80	22.550.000.000	90	2.800.000.000	100	3.350.000.000	100	28.700.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				137.040.615.000		23.450.000.000		27.425.000.000		187.915.615.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
		1 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	750		800	250.000.000	900	300.000.000	2.450	550.000.000	
		2 Jumlah event olahraga Tradisional, dan Rekreasi	Event	2	350.000.000	2	400.000.000	2	475.000.000	6	1.225.000.000	
		3 Prestasi Olahraga Tingkat Regional	Peringkat		2.203.450.000		2.500.000.000		2.700.000.000		7.403.450.000	
		a. PORDA	Peringkat	-		8		-		8		
		b. POPDA	Peringkat	-		10		-		10		
		a. POPWILDA	Peringkat	1		-		1		1		
		b.PORPEMDA	Peringkat	3		3		3		3		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		c. PORSENITAS	Peringkat	1		1		1		1		
		d.POSPEDA	Peringkat	1		1		1		1		
		4 Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	20	134.362.165.000	22	20.100.000.000	28	23.650.000.000	28	178.112.165.000	
		5 Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	20	125.000.000	25	200.000.000	30	300.000.000	75	625.000.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				850.000.000		960.000.000		9.600.000.000		2.880.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
		1 Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	1	850.000.000	1	960.000.000	1	9.600.000.000	3	2.880.000.000	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				425.000.000		467.500.000		514.250.000		514.250.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				425.000.000		467.500.000		514.250.000		514.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Admin dan Buku	20 Desa 10 SKPD	425.000.000	20 Desa 10 SKPD	467.500.000	20 Desa 10 SKPD	514.250.000	80 Desa 40 SKPD	514.250.000	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				450.000.000		479.250.000		546.584.625		546.584.625	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				450.000.000		479.250.000		546.584.625		546.584.625	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Tingkat Penyelenggaraan Persandian	Admin dan SKPD	70	450.000.000	70	479.250.000	70	546.584.625	70	546.584.625	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				24.265.000.000		24.840.300.000		25.270.056.300		25.270.056.300	
1	PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN				6.550.000.000		6.681.000.000		6.821.301.000		6.821.301.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	6.000.000.000	13	6.120.000.000	14	6.248.520.000	14	6.248.520.000	
		2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	2	450.000.000	2	459.000.000	2	468.639.000	2	468.639.000	
		3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentas e	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.142.000	100	104.142.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL				5.670.000.000		5.873.400.000		5.904.851.400		5.904.851.400	
		1 Seminar Budaya	Kali	4	5.670.000.000	5	5.873.400.000	6	5.904.851.400	6	5.904.851.400	
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				770.000.000		785.400.000		801.893.400		801.893.400	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Penguatan Fungsi dan Makna gedung bersejarah	Kegiatan	3	770.000.000	4	785.400.000	4	801.893.400	4	801.893.400	
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				10.975.000.000		11.194.500.000		11.429.584.500		11.429.584.500	
		1 Jumlah Pengunjung Ke Cagar Budaya	Orang	109.130	10.975.000.000	115.904	11.194.500.000	122.204	11.429.584.500	122.204	11.429.584.500	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				300.000.000		306.000.000		312.426.000		312.426.000	
		1 Bimtek Pamong Budaya	Kali	3	300.000.000	3	306.000.000	4	312.426.000	4	312.426.000	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				15.794.967.100		16.095.467.100		880.000.000		880.000.000	
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				15.794.967.100		15.795.467.100		550.000.000		550.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Koleksi Buku di Perpustakaan	Eksemplar	24.150	15.794.967.100	26.150	15.795.467.100	28.150	550.000.000	28.150	550.000.000	
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						300.000.000		330.000.000		330.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Forum Grup Diskusi, Pelestarian dan dan Pameran Naskah Kuno	Kegiatan	-	-	2	300.000.000	2	330.000.000	2	330.000.000	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				650.000.000		715.000.000		786.500.000		786.500.000	
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				475.000.000		522.500.000		574.750.000		574.750.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	Persen	80	475.000.000	85	522.500.000	90	574.750.000	90	574.750.000	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				175.000.000		192.500.000		211.750.000		211.750.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	175.000.000	2	192.500.000	2	211.750.000	14	211.750.000	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				89.535.660.500		95.355.478.433		108.752.923.152		108.752.923.152	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.085.501.550		2.294.051.705		2.523.456.876		8.798.920.631	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.700.000.000		4.070.000.000		4.680.500.000		12.450.500.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan (NTPi) (Persen)	Persen	102,75	500.000.000	103,5	550.000.000	103,72	632.500.000	103,95	1.682.500.000	
		2 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	23.261,55	500.000.000	25.068,65	550.000.000	26.875,67	632.500.000	26.875,67	1.682.500.000	
		3 Defisit Swasembada Ikan	Ton	3.800	200.000.000	1.900	220.000.000	-	253.000.000	-	673.000.000	
		4 Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Kelompok	650	500.000.000	700	550.000.000	800	632.500.000	800	1.682.500.000	
		5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang	22.500	2.000.000.000	23.000	2.200.000.000	23.500	2.530.000.000	23.500	6.730.000.000	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				1.200.000.000		1.320.000.000		1.518.000.000		4.038.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	101,65	250.000.000	101,95	275.000.000	102,75	316.250.000	103,25	841.250.000	
		2 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	355,66	200.000.000	387,66	220.000.000	419,57	253.000.000	419,57	673.000.000	
		3 Cakupan Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	17	250.000.000	19	275.000.000	21	316.250.000	21	841.250.000	
		4 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang	1.620	500.000.000	1.700	550.000.000	1.835	632.500.000	1.835	1.682.500.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				1.800.000.000		1.980.000.000		2.277.000.000		6.057.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Pengolah dan Pemasaran	Persen	102,1	200.000.000	101,95	220.000.000	101,5	253.000.000	101,5	673.000.000	
		2 Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	204,07	150.000.000	220,4	165.000.000	236,03	189.750.000	236,03	504.750.000	
		3 Tingkat Konsumsi Ikan	(kg/kap/tahun)	25	500.000.000	25	550.000.000	25	632.500.000	25	1.682.500.000	
		4 Cakupan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	40	750.000.000	44	825.000.000	48	948.750.000	48	2.523.750.000	
		5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	2.700	200.000.000	2.800	220.000.000	3.000	253.000.000	3.000	673.000.000	
4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				238.251.550		249.576.705		264.034.376		751.862.631	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Rasio Kawasan Perairan Terhadap Total Lindung Luas Nelayan	Ha	202	88.251.550	203	90.251.550	204	94.034.376	204	272.537.476	
		2 Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen	12	75.000.000	11	79.325.155	10	85.000.000	10	239.325.155	
		3 Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	3	75.000.000	4	80.000.000	5	85.000.000	5	240.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				52.660.000.000		32.100.000.000		34.000.000.000		118.760.000.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
1	Program Pemasaran Pariwisata				2.050.000.000		3.100.000.000		4.000.000.000		9.150.000.000	
		1 Jumlah kunjungan wisata	Persen/Orang	2/975.359	2.050.000.000	2/994.864	3.100.000.000	2/3.450.195	4.000.000.000	2%/1.014.762	9.150.000.000	
2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				950.000.000		2.850.000.000		2.800.000.000		6.600.000.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1 Jumlah Subsektor Ekraf	Jenis	4	950.000.000	4	2.650.000.000	4	2.550.000.000	4	6.150.000.000	
		2 Jumlah Kajian Akademis Desa Wisata	Kajian	1	0	1	200.000.000	1	250.000.000	3	450.000.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				4.350.000.000		5.900.000.000		6.950.000.000		17.200.000.000	
		1 SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	25	2.650.000.000	25	3.800.000.000	25	4.500.000.000	135	10.950.000.000	
		2 Jaringan Kemitraan	Orang	75	1.700.000.000	75	2.100.000.000	75	2.450.000.000	75	6.250.000.000	
4	Program Peningkatan Daya Tarik				45.310.000.000		20.250.000.000		20.250.000.000		85.810.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Destinasi Pariwisata											
		1 Sarana dan prasarana destinasi pariwisata	DTW	3	44.410.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	13	64.410.000.000	
		2 Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Wisata Desa	Desa/DT W	3	900.000.000	3	10.250.000.000	3	10.250.000.000	13	21.400.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				22.289.900.000		72.942.978.500		83.789.245.735		186.452.424.235	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.936.500.000		2.062.372.500		2.352.135.837		6.351.008.337	
		1 Data dan Informasi Sektor Pertanian	Bulan	12	350.000.000	12	372.750.000	12	425.121.375	12	1.147.871.375	
		2 NTP	Persen	109,69	293.250.000	104,29	312.311.250	104,59	356.190.981	104,89	961.752.231	
		3 Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	33	1.293.250.000	36	1.377.311.250	40	1.570.823.481	450	4.241.384.731	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.000.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		3.250.000.000	
		2 Pembangunan Rehabilitasi, Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani dan Ternak	Unit	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	1.500.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Sapi Pasundan	Ekor	10	500.000.000	10	500.000.000	10	750.000.000	50	1.750.000.000	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1 Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan			13.350.000.000		61.474.375.000		70.296.855.942		152.496.230.942	
		- Padi	Kw/Ha	60,36	400.000.000	60,48		60,6		60,6		
		- Jagung	Kw/Ha	61,89	250.000.000	62,07	1.065.000.000	62,25	1.214.632.500	62,25	3.279.632.500	
		- Kedelai	Kw/Ha	14,71	200.000.000	14,78	665.625.000	14,85	759.145.313	14,85	2.049.770.313	
		- Kacang Tanah	Kw/Ha	15,16	400.000.000	15,31	532.500.000	15,46	607.316.250	15,46	1.339.816.250	
		- Kacang Hijau	Kw/Ha	11,39	200.000.000	11,52	1.065.000.000	11,65	1.214.632.500	11,65	2.679.632.500	
		- Ubi Kayu	Kw/Ha	165,51	500.000.000	167,12	532.500.000	168,73	607.316.250	168,73	1.339.816.250	
		- Ubi Jalar	Kw/Ha	213,11	200.000.000	213,15	1.331.250.000	213,19	1.518.290.625	213,19	3.349.540.625	
		- Porang	Kw/Ha	200	700.000.000	213,15	532.500.000	213,19	607.316.250	213,19	1.339.816.250	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan					532.500.000		607.316.250		1.339.816.250	
		- Pala	Kg/Ha	357,1	250.000.000	364,24	3.860.625.000	367,89	4.403.042.813	367,89	9.713.667.813	
		- Cengkeh	Kg/Ha	1.049,85	50.000.000	1.203,70	665.625.000	1.360,28	759.145.313	1.360,28	1.674.770.313	
		- Kopi Robusta	Kg/Ha	1.285,11	150.000.000	1.310,82	133.125.000	1.310,82	151.829.063	1.310,82	334.954.063	
		- Kopi Arabika	Kg/Ha	918,09	50.000.000	918,09	399.375.000	927,27	455.487.188	927,27	1.004.862.188	
		- Tembakau	Kg/Ha	1.344,62	400.000.000	1.358,09	133.125.000	1.371,67	151.829.063	1.371,67	334.954.063	
		- Tebu	Kg/Ha	3.873,23	400.000.000	3.873,23	1.065.000.000	3.911,96	1.214.632.500	3.911,96	2.679.632.500	
		- Nilam	Kg/Ha	483,83	50.000.000	488,67	1.065.000.000	493,56	1.214.632.500	493,56	2.679.632.500	
		- Kelapa	Kg/Ha	1.183,42	100.000.000	1.218,93	133.125.000	1.255,49	151.829.063	1.255,49	334.954.063	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Produktivitas Komoditas Holtikultura				266.250.000		303.658.125		669.908.125		
		Bawang Merah	Kw/Ha	95,18	300.000.000	96,04	16.108.125.000	96,9	18.371.316.563	96,9	40.529.441.563	
		Tomat	Kw/Ha	193,83	1.600.000.000	195,77	798.750.000	198,71	910.974.375	198,71	2.009.724.375	
		Cabe Besar	Kw/Ha	91,69	750.000.000	92,6	4.260.000.000	93,72	4.858.530.000	93,72	10.718.530.000	
		Cabe Rawit	Kw/Ha	89,64	1.000.000.000	90,81	1.996.875.000	92,17	2.277.435.938	92,17	5.024.310.938	
		Jamur	Kw/Ha	2.172	1.200.000.000	2.320	2.662.500.000	2.516	3.036.581.250	2.516	6.699.081.250	
		Sayuran Lainnya	Kw/Ha	40	1.200.000.000	45	3.195.000.000	50	3.643.897.500	50	8.038.897.500	
		Produksi Buah-buahan:					3.195.000.000		3.643.897.500		8.038.897.500	
		Mangga	Kw	304.329	700.000.000	306.459	6.390.000.000	309.524	7.287.795.000	309.524	13.677.795.000	
		Rambutan	Kw	31.364	700.000.000	31.678	1.863.750.000	31.994	2.125.606.875	31.994	4.689.356.875	
		Durian	Kw	53.479	1.000.000.000	54.014	1.863.750.000	54.554	2.125.606.875	54.554	4.689.356.875	
		Markisa	Kw/Ha	50	200.000.000	60	2.662.500.000	75	3.036.581.250	75	6.699.081.250	
		Jahe	Kw/Ha	150	400.000.000	160	2.500.000.000	175	3.036.581.250	175	5.536.581.250	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.460.000.000		5.400.000.000		6.440.000.000		16.300.000.000	
		Produksi Daging:			2.230.000.000		2.750.000.000		3.240.000.000		8.220.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Sapi	Ton	1.216	-	1.252	-	1.290	-	1.290	-	
		2 Domba	Ton	737	-	759	-	782	-	782	-	
		3 Ayam Buras	Ton	468	-	482	-	496	-	496	-	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Ayam Ras	Ton	19.668	-	20.651	-	22.716	-	22.716	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Itik	Ton	51	-	55	-	56	-	56	-	
		2 Meningkatnya Produksi Telur:			780.000.000		950.000.000		1.100.000.000		2.830.000.000	
		3 Ayam Buras	Ton	279	-	287	-	288	-	288	-	
		Ayam Ras Petelur	Ton	5.626	-	5.907	-	6.202	-	6.202	-	
		Itik	Ton	423	-	440	-	458	-	458	-	
		Produksi Susu Sapi	Ton	20.776	700.000.000	21.607	850.000.000	22.687	1.050.000.000	22.687	2.600.000.000	
		Populasi Ternak:			750.000.000		850.000.000		1.050.000.000		2.650.000.000	
		Sapi Perah	Ton	5.511	-	5.590	-	5.670	-	5.670	-	
		Sapi Potong	Ton	27.884	-	28.442	-	29.011	-	29.011	-	
		Domba	Ton	120.448	-	122.898	-	125.356	-	125.356	-	
		Kambing	Ton	6.825	-	6.962	-	7.101	-	7.101	-	
		Ayam Ras Petelur	Ton	556.444	-	589.831	-	625.221	-	625.221	-	
		Ayam Ras Pedaging	Ton	2.430.911	-	2.576.766	-	2.705.604	-	2.705.604	-	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				500.000.000		605.000.000		610.000.000		1.715.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Sosialisasi Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	Desa	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	165.000.000	
		Vaksin Rabies	Ekor	650	250.000.000	800	350.000.000	1.000	350.000.000	1.000	950.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Vaksin Flu Burung	Ekor	50.000	100.000.000	50.000	100.000.000	50.000	100.000.000	50.000	300.000.000	
		Pengawasan Produk Makanan asal Hewan	Sample	350	100.000.000	375	100.000.000	400	100.000.000	500	300.000.000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				300.000.000		700.000.000		900.000.000		1.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengendalian OPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan:										
		Tanaman Pangan	Ha	960	100.000.000	800	300.000.000	850	500.000.000	850	900.000.000	
		Hortikultura	Ha	100	100.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	500.000.000	
		Perkebunan	Ha	200	100.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	500.000.000	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				743.400.000		1.701.231.000		1.940.253.956		4.440.184.956	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1 Jumlah Latihan dan Kunjungan yang dilaksanakan oleh Penyuluh	Kunjungan	60.192	194.708.000	65.016	-	70.272	-	70.272	-	
		Meningkatnya Kelas Kelompok Tani:					127.800.000		145.755.900		333.555.900	
		Pemula	Kelompok	1.019	259.483.000	1.070	-	1.123	-	1.123	-	
		Lanjut	Kelompok	1.358	29.039.000	1.493	10.011.000	1.643	11.417.546	1.643	26.128.546	
		Madya	Kelompok	127	4.700.000	140	552.698.790	154	630.352.970	154	1.442.534.760	
		Utama	Kelompok	4	770.000	6	61.853.070	8	70.543.426	8	161.435.496	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Prosentase Binaan Kelompok yang difasilitasi	Persen	25	4.700.000	30	414.728.040	35	472.997.330	40	1.082.433.370	
		Penguatan Kelembagaan:					1.640.100		1.870.534		4.280.634	
		Perkebunan	Kelompok	25	100.000.000	30	213.000.000	40	242.926.500	95	555.926.500	
		Hortikultura	Kelompok	10	150.000.000	15	319.500.000	20	364.389.750	45	833.889.750	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.000.000.000		6.490.000.000		7.550.000.000		16.977.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.350.000.000		1.450.000.000		1.550.000.000		4.350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI	Pasar	1	850.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	7	2.700.000.000	
		2 Optimalisasi Pelayanan Pasar	Kegiatan	7	500.000.000	7	550.000.000	7	600.000.000	7	1.650.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				75.000.000		100.000.000		150.000.000		325.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustria n
		1 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah	Event	1	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	325.000.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR				275.000.000		400.000.000		550.000.000		1.225.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustria n
		1 Nilai Ekspor Perdagangan	USS	4.958.557,88	100.000.000	4.958,557,88	150.000.000	4.958.557,88	200.000.000	4.958.557,88	450.000.000	
		2 Jumlah Pameran Komoditi Ekspor	Event	1	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	4	325.000.000	
		3 Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor	Orang	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	355	450.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				600.000.000		3.600.000.000		4.300.000.000		8.500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustria n
		1 Jumlah UTTP yng ditera/Tera Ulang	UTTP	5.300	500.000.000	5.350	550.000.000	5.400	600.000.000	5.400	1.650.000.000	
		2 Jumlah Pengawasan alat UTTP	Kecamata n	32	100.000.000	32	150.000.000	32	200.000.000	32	450.000.000	
		3 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Metrologi Legal	Paket	0	0	1	2.900.000.000	1	3.500.000.000	4	6.400.000.000	
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				700.000.000		850.000.000		1.000.000.000		2.550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustria n
		1 Jumlah Produk IKM yang dipromosikan	Produk	30	200.000.000	30	250.000.000	30	300.000.000	120	750.000.000	
		2 Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Event	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	18	900.000.000	
		3 Optimalisasi Pelayanan Informasi Perdagangan	Kegiatan	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	900.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.110.000.000		2.321.000.000		2.633.100.000		10.214.100.000	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.000.000.000		1.450.000.000		1.550.000.000		4.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Pertumbuhan IKM	IKM	30	100.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000	208	550.000.000	
		2 Jumlah Peningkatan Produk IKM	IKM	9	200.000.000	22	250.000.000	10	200.000.000	66	650.000.000	
		3 Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan	IKM	30	250.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	124	950.000.000	
		4 Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan Kemasan	IKM	130	450.000.000	130	650.000.000	130	750.000.000	1090	1.850.000.000	
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				175.000.000		250.000.000		300.000.000		725.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Kajian dan Pengawasan Izin Usaha Industri, Standar Industri Hijau, dan Industri 4.0	Perusahaan	40	175.000.000	40	250.000.000	40	300.000.000	250		
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				150.000.000		175.000.000		175.000.000		500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Pendataan SIINAS	Industri	60	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	274	500.000.000	
							-		-		-	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				500.000.000		500.000.000		625.000.000		625.000.000	
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				300.000.000		300.000.000		375.000.000		375.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Masyarakat Translok yang meningkat Sosial Ekonomi	KK	40		40	125.000.000	40	200.000.000	180	200.000.000	
		2 Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Translok yang dibina dan dimonitor	Kube	4	200.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	12	75.000.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Pemutakhiran dan Verifikasi Pendataan Translok	KK	50	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	50	100.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Jumlah Animo Masyarakat untuk bertransmigrasi	KK	20	100.000.000	20	100.000.000	25	125.000.000	65	125.000.000	
		2 Jumlah Transmigran asal Kuningan diluar pulau jawa yang dimonitor	KK	5	100.000.000	5	100.000.000	5	125.000.000	15	125.000.000	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				69.550.343.890		74.473.313.665		75.106.748.240		75.106.748.240	
1	SEKRETARIAT DAERAH				25.103.000.000		28.858.450.000		28.780.992.500		28.780.992.500	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				20.985.000.000		24.132.750.000		23.375.187.500		23.375.187.500	
		Persentase Penyelenggaraan Hukum yang difasilitasi	Persen	100	1.400.000.000	100	1.610.000.000	100	1.851.500.000	100	1.851.500.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal, pengendalian kebijakan kepala daerah untuk mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang terintegrasi sampai pelaporan kinerja pemerintahan	Persentase	100	2.530.000.000	100	2.909.500.000	100	3.345.925.000	100	3.345.925.000	Sekretariat Daerah (Bagian Tapem)
		Persentase Lembaga/Organisasi keagamaan yang dibangun dan difasilitasi	Persentase	90	17.055.000.000	90	19.613.250.000	90	18.177.762.500	90	18.177.762.500	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.118.000.000		4.725.700.000		5.405.805.000		5.405.805.000	Sekretariat Daerah
		Persentase pengelolaan dan pengendalian perekonomian melalui kebijakan pemerintah daerah	Persentase	75	1.150.000.000	80	1.312.500.000	85	1.480.625.000	85	1.480.625.000	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Persentase meningkatnya cakupan level kematangan dan atau layanan proses UKPBJ Kabupaten Kuningan dengan 17 Standar LPSE	Persentase	60	1.818.000.000	70	2.090.700.000	80	2.404.305.000	80	2.404.305.000	Sekretariat Daerah (Bagian Peng. Barjas)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Meningkatnya tata kelola administrasi pembangunan yang akuntabel dan transparansi	Persentase	100	1.150.000.000	100	1.322.500.000	100	1.520.875.000	100	1.520.875.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
2	SEKRETARIAT DPRD				44.447.343.890		45.614.863.665		46.325.755.740		46.325.755.740	
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				11.251.645.000		11.983.001.925		12.257.744.500		12.257.744.500	Sekretariat DPRD
		1 Mengatur jalannya roda Pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat	Produk Hukum	10	3.697.295.000	10	3.882.159.750	10	4.067.024.500	10	4.067.024.500	
		2 Terbentuknya Produk-produk Hukum Daerah	Produk Hukum	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
		3 Meningkatkan Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	5	2.127.050.000	2	2.233.402.500	2	2.585.880.000	2	2.585.880.000	
		4 Terlaksananya Kegiatan Seminar, Lokakarya, Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	1	201.100.000	1	201.100.000	1	201.100.000	1	201.100.000	
		5 Terpenuhinya Koordinasi dalam Kegiatan Fraksi DPRD	Paket	1	1.035.000.000	1	1.086.750.000	1	1.138.500.000	1	1.138.500.000	
		6 Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat dalam Kegiatan DPRD	Orang	12.000	500.000.000	12.000	500.000.000	12.000	500.000.000	12000	500.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		7 Meningkatnya Wawasan terhadap 3 Fungsi DPRD	Paket	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
		8 Terfasilitasinya semua Aspirasi yang masuk	Paket	1	740.400.000	1	777.420.000,00	1	814.440.000	1	814.440.000	
		9 Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Orang	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				185.368.777.482		196.235.014.856		206.895.206.486		206.895.206.486	
1	PERENCANAAN				5.350.000.000		5.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.650.000.000		1.850.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	BAPPEDA
		1 Tingkat Partisipasi Publik dalam prosers perencanaan pembangunan daerah	Persen	93	950.000.000	93	1.100.000.000	93	1.200.000.000	93	1.200.000.000	
		2 Presentasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	700.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				3.700.000.000		4.000.000.000		4.850.000.000		4.850.000.000	BAPPEDA
		1 Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan	Persen	100	3.700.000.000	100	4.000.000.000	100	4.850.000.000	100	4.850.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembangunan Daerah										
2	KEUANGAN				169.393.877,4 82		177.957.246,3 56		187.457.017,3 87		187.457.017,3 87	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				161,263,877,4 82		169,327,071,3 56		177,793,424,9 24		177,793,424,9 24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1 Jumlah pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	20	161,263,877,4 82	20	169,327,071,3 56	20	177,793,424,9 24	20	177,793,424,9 24	
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,885,000,000		1,979,250,000		2,078,212,500		2,078,212,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	50	1,885,000,000	75	1,979,250,000	75	2,078,212,500	250	2,078,212,500	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6,245,000,000		6.557.250.000		6.885.112.500		6.885.112.500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Aplikasi Pendapatan Daerah Online Yang Diterapkan	Jenis	6	375,000,000	6	393,750,000	6	413,437,500	6	413,437,500	
		2 Nilai Target PAD	Milyar	341,03	5,870,000,000	356,52	6,163,500,000	369,67	6,471,675,000	369,67	6,471,675,000	
3	KEPEGAWAIAN				5.824.900.000		6.203.518.500		7.075.112.849		7.075.112.849	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.824.900.000		6.203.518.500		7.075.112.849		7.075.112.849	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan	%	100	5.824.900.000	100	6.203.518.500	100	7.075.112.849	100	7.075.112.849	
					5.824.900.000		6.203.518.500		6.606.747.203		6.689.864.345	
		1 JumlahPengadaan ASN	Orang	6.000	1.575.000.000	6.000	1.677.375.000	6.000	1.786.404.375	18.000	1.786.404.375	
			Formasi	500		500		500				
		2 Jumlah Pemberhentian ASN	Orang	631	250.000.000	631	266.250.000	631	283.556.250	1.893	283.556.250	
		3 Jumlah Data Informasi Kepegawaian	Dokumen	10.500	600.000.000	10.250	639.000.000	10.000	680.535.000	30.750	680.535.000	
			Aplikasip enggunaa ktif	2 10.500		2 10.250		2 10.000		6 30.750		
			Prosentasi	95		95		95		285		
		4 Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Orang	490	947.500.000	490	1.009.087.500	490	1.074.678.188	1.470	1.074.678.188	
			Laporan	1		1		1		3		
			Dokumen	3		3		3		9		
			SK.	2.500		2.500		2.500		7.500		
			SP.	30		30		30		90		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5 Jumlah ASN yang Mutasi	Orang	250	650.000.000	250	692.250.000	250	737.246.250	750	737.246.250	
			SK	3.078		3.078		3.078		9.234		
			SuratTan da Lulus	150		150		150		450		
		6 Jumlah ASN yang Promosi	Orang	200	675.000.000	200	718.875.000	200	765.601.875	600	765.601.875	
			Dokumen	1		-		-				
		7 Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Orang	11.349	1.127.400.000	11.349	1.200.681.000	11.349	1.278.725.265	34.047	1.361.842.407	
			SKPD	63		63		63		189		
			Kasus	30		30		30		90		
			Dokumen	1		-		-		-		
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.450.000.000		3.674.250.000		3.913.076.250		3.913.076.250	
1	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA				3.450.000.000		3.674.250.000		3.913.076.250		3.913.076.250	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Peningkatan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan	%	80	3.450.000.000	80	3.674.250.000	80	3.913.076.250	80	3.913.076.250	
		1 Jumlah Pengembangan KompetensiTeknis	Orang	520	450.000.000	520	479.250.000	520	510.401.250	1.560	510.401.250	
			dokumen	1		1		1		3		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Jumlah Sertifikasi Kompetensi	Orang	240	100.000.000	240	106.500.000	240	113.422.500	720	113.422.500	
		3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, Jabatan Fungsional, Prajabatan	Orang	245	2.900.000.000	245	3.088.500.000	245	3.289.252.500	735	3.289.252.500	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.100.000.000		1.300.000.000		800.000.000		800.000.000	
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.100.000.000		1.300.000.000		800.000.000		800.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Jumlah Kajian	Jenis	5	1.100.000.000	5	1.300.000.000	5	800.000.000	24	800.000.000	
6	PENGELOLAAN PERBATASAN				250.000.000		1.250.000.000		800.000.000		800.000.000	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				250.000.000		1.250.000.000		800.000.000		800.000.000	Bagian Tapem Setda
		1 Mewujudkan pilar batas daerah sebagai wilayah perbatasan	Persen	80	250.000.000	85	1.250.000.000	85	800.000.000	85	800.000.000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.746.000.000		12.509.490.000		14.267.073.345		14.267.073.345	
1	INSPEKTORAT DAERAH				11.746.000.000		12.509.490.000		14.267.073.345		14.267.073.345	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				9.641.000.000		10.267.665.000		11.710.271.933		11.710.271.933	Inspektorat
		1 Persentase hasil Reviu yang ditindaklanjuti	Persen	60	3.400.000.000	65	3.621.000.000	70	4.129.750.500	70	4.129.750.500	
		2 Jumlah SKPD yang memiliki nilai LAKIP minimal BB	Jumlah	5	300.000.000	5	319.500.000	5	364.389.750	15	364.389.750	
		3 Persentase menurunnya pelaksanaan pungli	Persen	10	750.000.000	12	798.750.000	15	910.974.375	15	910.974.375	
		4 Persentase rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat Kabupaten, Provinsi dan Itjen) yang ditindaklanjuti	Persen	60	4.666.000.000	65	4.969.290.000	75	5.667.475.245	75	5.667.475.245	
		5 Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	75	75.000.000	80	79.875.000	85	91.097.438	85	91.097.438	
		6 Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Persen	5	150.000.000	10	159.750.000	15	182.194.875	15	182.194.875	
		7 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	75	300.000.000	80	319.500.000	85	364.389.750	85	364.389.750	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.105.000.000		2.241.825.000		2.556.801.413		2.556.801.413	Inspektorat
		1 Jumlah Kebijakan Pengawasan yang diimplementasikan	Peraturan/Keputusan/Pedoman	3	400.000.000	3	426.000.000	3	485.853.000	9	485.853.000	
		2 Jumlah Asistensi/ Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	3	350.000.000	3	372.750.000	3	425.121.375	9	425.121.375	
		3 Persentase capaian reformasi birokrasi	Persen	55	400.000.000	57	426.000.000	60	485.853.000	60	485.853.000	
		4 Persentase Capaian MCP	Persen	60	450.000.000	65	479.250.000	70	546.584.625	70	546.584.625	
		5 Jumlah SKPD yang memiliki nilai SPIP Level 3	SKPD	5	150.000.000	5	159.750.000	5	182.194.875	15	182.194.875	
		6 Persentase kepatuhan LHKASN	Persen	55	80.000.000	60	85.200.000	65	97.170.600	65	97.170.600	
		7 Persentase kepatuhan LHKPN	Persen	80	75.000.000	85	79.875.000	90	91.097.438	90	91.097.438	
		8 Level Kapabilitas APIP	Level	3	200.000.000	3	213.000.000	3	242.926.500	3	242.926.500	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN											
	KECAMATAN				17.691.154.00		18.586.476.425		19.483.759.379		19.483.759.379	
1	Kecamatan Kuningan				5.520.000.000		5.796.000.000		6.085.800.001		6.085.800.001	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				47.350.000		49.717.500		52.203.375		52.203.375	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Warga yang terlayani Paten	Orang	74	15.000.000	76	15.750.000	78	16.537.500	37200	16.537.500	
		2 Jumlah hasil koordinasi antar sector yang ditindaklanjuti	Jenis	23	32,350,000	25	33,967,500	26	35,665,875	116	35,665,875	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				5.370.000.000		5.638.500.000		5.920.425.000		5.920.425.000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kec Kuningan	Unit	11	2.611.315.000	13	2.741.880.750	15	2.878.974.788	57	2.878.974.788	
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5	888.685.000	5	933.119.250	5	979.775.213	25	979.775.213	
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000		22.050.000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000		110.250.000	
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10	1.750.000.000	10	1.837.500.000	10	1.929.375.000	10	1.929.375.000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				14.390.000		15.109.500		15.864.975		15.864.975	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	14,390,000	100	15,109,500	100	15,864,975	100	15,864,975	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				69.375.000		72.843.750		76.485.938		76.485.938	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	110	69.375.000	120	72.843.750	125	76.485.938	555	76.485.938	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				18.885.000		19.829.250		20.820.713		20.820.713	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa/Kel	14	18.885.000	14	19.829.250	14	20.820.713	14	20.820.713	
2	Kecamatan Cigugur				5.372.650.000		5.691.000.000		5.975.550.001		5.975.550.001	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				47.350.000		49.717.500		52.203.375		52.203.375	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	7.400	15.000.000	7.600	15.750.000	8.000	16.537.500	37.400	16.537.500	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	32.350.000	25	33.967.500	27	35.665.875	117	35.665.875	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				5.270.000.000		5.533.500.000		5.810.175.000		5.810.175.000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11	2.611.315.000	13	2.741.880.750	15	2.878.974.788		2.878.974.788	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5	888.685.000	5	933.119.250	5	979.775.213	48	979.775.213	
		3 Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	Kegiatan	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000		22.050.000	
		4 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10	1.750.000.000	10	1.837.500.000	10	1.929.375.000		1.929.375.000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				14,390,000		15,109,500		15,864,975		15,864,975	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	14,390,000	100	15,109,500	100	15,864,975		15,864,975	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				69,375,000		72,843,750		76,485,938		76,485,938	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	120	69,375,000	130	72,843,750	150	76,485,938	620	76,485,938	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				18.885.000		19.829.250		20.820.713		20.820.713	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	18.885.000	10	19.829.250	10	20.820.713	10	20.820.713	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Kecamatan Kalimantan				170,000,000		178,500,000		187,325,000		187,325,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				-							
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	135		135		135		675		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	28		28		30		134		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				43,000,000		45,150,000		47,407,500		47,407,500	
		1 Terlaksananya pembinaan aparatur dan lembaga desa	Kegiatan	1	43,000,000	1	45,150,000	1	47,407,500	desa	47,407,500	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				15,000,000		15,750,000		16,537,500		16,537,500	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	15,000,000	100	15,750,000	100	16,537,500	100	16,537,500	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				40,000,000		42,000,000		44,000,000		44,000,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	135	40,000,000	135	42,000,000	135	44,000,000	6750	44,000,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				72,000,000		75,600,000		79,380,000		79,380,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	6	72,000,000	6	75,600,000	6	79,380,000		79,380,000	
4	Kecamatan Mandirancan				265,000,000		278,250,000		291,912,500		291,912,500	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				70,000,000		73,500,000		77,175,000		77,175,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1,45	50,000,000	1,55	52,500,000	1,55	55,125,000		55,125,000	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	28	20,000,000	28	21,000,000	30	22,050,000	134	22,050,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				15,000,000		15,750,000		16,537,500		16,537,500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	15,000,000	100	15,750,000	100	16,537,500	100	16,537,500	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	120	60,000,000	130	63,000,000	140	66,150,000	550	66,150,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100,000,000		105,000,000		110,000,000		110,000,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	100,000,000	12	105,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	
5	Kecamatan Lebakwangi				260,000,000		273,000,000		286,650,000		286,650,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				-							
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1248		1,404		156		6708		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23		25		26		96		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				50,000,000		52,500,000		55,125,000		55,125,000	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	50,000,000	100	52,500,000	100	55,125,000		55,125,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				85,000,000		89,250,000		93,712,500		93,712,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	110	85,000,000	120	89,250,000	125	93,712,500		93,712,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100,000,000		105,000,000		110,250,000		110,250,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	13	100,000,000	13	105,000,000	13	110,250,000	13	110,250,000	
6	Kecamatan Selajambe				298,000,000		312,900,000		328,545,000		328,545,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				68,000,000		71,400,000		74,970,000		74,970,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	120	43,000,000	200	45,150,000	250	47,407,500		47,407,500	
		2 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				35,000,000		36,750,000		38,587,500		38,587,500	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	35,000,000	100	36,750,000	100	38,587,500		38,587,500	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				125,000,000		131,250,000		137,812,500		137,812,500	
		Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	140	125,000,000	160	131,250,000	180	137,812,500	740	137,812,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan				50,000,000		52,500,000		55,125,000		55,125,000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Desa											
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	7	50,000,000	7	52,500,000	7	55,125,000		55,125,000	
7	Kecamatan Sindangagung				362,400,000		380,520,000		399,546,000		399,546,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				92,400,000		97,020,000		101,871,000		101,871,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	32	27,400,000	33	28,770,000	34	30,208,500	16100	30,208,500	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	26	65,000,000	28	68,250,000	30	71,662,500	134	71,662,500	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	30,000,000	100	31,500,000	100	33,075,000		33,075,000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000		33,075,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90,000,000		94,500,000		99,225,000		99,225,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	17	90,000,000	18	94,500,000	19	99,225,000	8600	99,225,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				120,000,000		126,000,000		132,300,000		132,300,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	120,000,000	12	126,000,000	12	132,300,000	12	132,300,000	
8	Kecamatan Cibingbin				270,000,000		283,500,000		297,675,000		297,675,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	27		28		29		136		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22	60,000,000	25	63,000,000	27	66,150,000	111	66,150,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				50,000,000		52,500,000		55,125,000		55,125,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11	25,000,000	13	26,250,000	15	27,562,500		27,562,500	
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	25,000,000	100	26,250,000	100	27,562,500		27,562,500	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				85,000,000		89,250,000		93,712,500		93,712,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	15	85,000,000	15	89,250,000	15	93,712,500	75	93,712,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				50,000,000		52,500,000		55,125,000		55,125,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	50,000,000	10	52,500,000	10	55,125,000	10	55,125,000	
9	Kecamatan Cipicung				202,800,000		212,940,000		223,587,000		223,587,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	22		23		24		111		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22	20,000,000	25	21,000,000	24	22,050,000	111	22,050,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000		33,075,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,050,000		22,050,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				95,000,000		99,750,000		104,737,500		104,737,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	15	95,000,000	15	99,750,000	15	104,737,500	75	104,737,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				37,800,000		39,690,000		41,674,500		41,674,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	37,800,000	10	39,690,000	10	41,674,500	10	41,674,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
10	Kecamatan Japara				192,500,000		202,125,000		204,543,750		204,543,750	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	74		76		78				
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23		25		26				
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000		33,075,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	25,000,000	100	26,250,000	100	27,562,500		27,562,500	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				75,000,000		78,750,000		75,000,000		75,000,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	1500	75,000,000	1,5	78,750,000	1,5				
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				62,500,000		65,625,000		68,906,250		68,906,250	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	15	62,500,000	15	65,625,000	15	68,906,250		68,906,250	
11	Kecamatan Cilebak				170,950,000		179,497,500		188,472,625		188,472,625	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				15,000,000		15,750,000		16,537,500		16,537,500	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	1	15,000,000	12	15,750,000	15	16,537,500	58	16,537,500	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20		22		25		101		

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				18,750,000		19,687,500		20,671,875		20,671,875	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	18,750,000	100	19,687,500	100	20,671,875		20,671,875	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				68,500,000		71,925,000		75,521,250		75,521,250	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	2	68,500,000	2	71,925,000	2	75,521,250	94	75,521,250	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				43,700,000		45,885,000		48,179,500		48,179,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	7	43,700,000	7	45,885,000	7	48,179,500		48,179,500	
12	Kecamatan Cidahu				136,000,000		120,750,000		149,940,000		149,940,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				21,000,000				23,152,500		23,152,500	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	515		515		515		2569		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	142	21,000,000	1,425		143	23,152,500	7125	23,152,500	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				14,500,000		15,225,000		15,986,250		15,986,250	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	14,500,000	1	15,225,000	1	15,986,250		15,986,250	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100				
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				64,500,000		67,725,000		71,111,250		71,111,250	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	124	64,500,000	124	67,725,000	1,245	71,111,250	6215	71,111,250	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				36,000,000		37,800,000		39,690,000		39,690,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	36,000,000	12	37,800,000	12	39,690,000	12	39,690,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
13	Kecamatan Jalaksana				271,000,000		284,550,000		298,777,500		298,777,500	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	22		23		24		111		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	22		25		25		112		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang	15		15	-	15	-		-	
		2 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Jalaksana	Unit	11		13		15				
		3 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		4 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
		5 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,050,000	75	22,050,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				91,000,000		95,550,000		100,327,500		100,327,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	15	91,000,000	15	95,550,000	15	100,327,500	15	100,327,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				140,000,000		147,000,000		154,350,000		154,350,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	15	140,000,000	15	147,000,000	15	154,350,000	15	154,350,000	
14	Kecamatan Kramatmulya				194,995,000		204,857,725		214,981,988		214,981,988	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	25		26		27				
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20		22		25				

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100				
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,390,000		102,372,475		107,372,475		107,372,475	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	14	97,390,000	15	102,372,475	16	107,372,475	16	107,372,475	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				77,605,000		81,485,250		85,559,513		85,559,513	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	14	77,605,000	14	81,485,250	14	85,559,513		85,559,513	
15	Kecamatan Maleber				205,000,000		215,250,000		226,012,500		226,012,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	22		23		25		11200		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	20		22		25		103		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	30,000,000	100	31,500,000	100	33,075,000	100	33,075,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				70,000,000		73,500,000		77,175,000		77,175,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	155	70,000,000	16	73,500,000	165	77,175,000	7800	77,175,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan				80,000,000		84,000,000		88,200,000		88,200,000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Desa											
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	16	80,000,000	16	84,000,000	16	88,200,000		88,200,000	
16	Kecamatan Cilimus				260,000,000		273,000,000		286,650,000		286,650,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	27	40,000,000	28	42,000,000	3	44,100,000	135	44,100,000	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	20,000,000	27	21,000,000	30	22,050,000	132	22,050,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,050,000		22,050,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	15	60,000,000	16	63,000,000	2	66,150,000	79	66,150,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100,000,000		105,000,000		110,250,000		110,250,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	13	100,000,000	13	105,000,000	13	110,250,000	13	110,250,000	
17	Kecamatan Darma				245,000,000		257,250,000		270,087,500		270,087,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				30,000,000		31,500,000		33,050,000		33,050,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	39		41		43		197		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	30	30,000,000	35	31,500,000	40	33,050,000	155	33,050,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				35,000,000		36,750,000		38,587,500		38,587,500	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	35,000,000	1	36,750,000	1	38,587,500		38,587,500	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	25,000,000	100	26,250,000	100	27,562,500		27,562,500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90,000,000		94,500,000		99,225,000		99,225,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	21	90,000,000	22	94,500,000	23	99,225,000	106	99,225,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65,000,000		68,250,000		71,662,500		71,662,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	19	65,000,000	19	68,250,000	19	71,662,500	19	71,662,500	
18	Kecamatan Cimahi				250,000,000		262,500,000		275,625,000		275,625,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				85,000,000		89,250,000		93,712,500		93,712,500	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	12		13		14		61		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	40	85,000,000	45	89,250,000	50	93,712,500	205	93,712,500	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	40		45	-	50	-	200	-	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90,000,000		94,500,000		99,225,000		99,225,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	22	90,000,000	23	94,500,000	24	99,225,000	111	99,225,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				50,000,000		52,500,000		55,125,000		55,125,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	50,000,000	10	52,500,000	10	55,125,000	10	55,125,000	
19	Kecamatan Nusaherang				210,000,000		220,500,000	-	231,525,000		231,525,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				40,000,000		42,000,000		44,100,000		44,100,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	21	30,000,000	22	31,500,000	24	33,075,000	10700	33,075,000	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	10,000,000	28	10,500,000	30	11,025,000	123	11,025,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				15,000,000		15,750,000		16,537,500		16,537,500	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	15,000,000	100	15,750,000	100	16,537,500	100	16,537,500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				40,000,000		42,000,000		44,100,000		44,100,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	1	40,000,000	11	42,000,000	12	44,100,000	5100	44,100,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				95,000,000		99,750,000		104,737,500		104,737,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	8	95,000,000	8	99,750,000	8	104,737,500		104,737,500	
20	Kecamatan Kadugede				185,000,000		194,250,000		203,962,500		203,962,500	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	24		25		27		12200		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	25,000,000	28	26,250,000	30	27,562,500	123	27,562,500	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	25,000,000	100	26,250,000	100	27,562,500	100	27,562,500	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90,000,000		94,500,000		99,225,000		99,225,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	14	90,000,000	15	94,500,000	18	99,225,000	7300	99,225,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	25,000,000	12	26,250,000	12	27,562,500		27,562,500	
21	Kecamatan Hantara				239,469,000		251,442,450		264,014,573		264,014,573	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan				51,431,000		54,002,550		56,702,678		56,702,678	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	22	15,000,000	23	15,750,000	24	16,537,500	111	16,537,500	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	17	36,431,000	18	38,252,550	19	40,165,178	86	40,165,178	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100				

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				79,100,000		83,055,000		87,207,750		87,207,750	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	900	79,100,000	950	83,055,000	1	87,207,750	455	87,207,750	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				83,938,000		88,134,900		92,541,645		92,541,645	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	8	83,938,000	8	88,134,900	8	92,541,645	8	92,541,645	
22	Kecamatan Cibeureum				195,000,000		204,750,000		214,987,500		214,987,500	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	11		12		13		56		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	14	60,000,000	16	63,000,000	18	66,150,000	72	66,150,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100	15,864,975		15,864,975	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				55,000,000		57,750,000		60,637,500		60,637,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	12	55,000,000	14	57,750,000	16	60,637,500	62	60,637,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	8	60,000,000	8	63,000,000	8	66,150,000	8	66,150,000	
23	Kecamatan Pancalang				230,000,000	-	241,500,000	-	253,575,000		253,575,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				40,000,000		42,000,000		44,100,000		44,100,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	2	20,000,000	205	21,000,000	21	22,050,000	6150	22,050,000	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	26	20,000,000	28	21,000,000	30	22,050,000	130	22,050,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90,000,000		94,500,000		99,225,000		99,225,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	13	90,000,000	14	94,500,000	15	99,225,000	6500	99,225,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				80,000,000		84,000,000		88,200,000		88,200,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	13	80,000,000	13	84,000,000	13	88,200,000	13	88,200,000	
24	Kecamatan Pasawahan				230,000,000		241,500,000		253,325,000		253,325,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				70,000,000		73,500,000		77,175,000		77,175,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	135		14		145		6800		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	14	70,000,000	16	73,500,000	18	77,175,000	72	77,175,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100		100		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100,000,000		105,000,000		110,000,000		110,000,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	950	100,000,000	1	105,000,000	105	110,000,000	4800	110,000,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40,000,000		42,000,000		44,100,000		44,100,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	10	40,000,000	10	42,000,000	10	44,100,000	10	44,100,000	
25	Kecamatan Garawangi				180,000,000		189,000,000		198,450,001		198,450,001	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan				11,000,000		11,550,000		12,127,500		12,127,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	27		28		3		132		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	11,000,000	27	11,550,000	30	12,127,500	132	12,127,500	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Kelurahan	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				14,694,000		15,428,700		16,200,135		16,200,135	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	14,694,000	100	15,428,700	100	16,200,135		16,200,135	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90,225,000		94,736,250		99,473,063		99,473,063	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	15	90,225,000	16	94,736,250	2	99,473,063	79	99,473,063	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				44,081,000		46,285,050		48,599,303		48,599,303	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	17	44,081,000	17	46,285,050	17	48,599,303	17	48,599,303	
26	Kecamatan Luragung				260,000,000	-	235,593,750	-	247,373,438		247,373,438	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	17		18		19		8500		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	25	60,000,000	30	63,000,000	35	66,150,000	130	66,150,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000		33,075,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				35,000,000		36,750,000		38,587,500		38,587,500	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	35,000,000	100	36,750,000	100	38,587,500	100	38,587,500	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				105,000,000		72,843,750		76,485,938		76,485,938	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	13	105,000,000	14	72,843,750	15	76,485,938	6600	76,485,938	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	16	30,000,000	16	31,500,000	16	33,075,000	16	33,075,000	
27	Kecamatan Ciwaru				220,000,000		231,000,000		242,550,000		242,550,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	25		25		25		75		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	60,000,000	23	63,000,000	24	66,150,000	114	66,150,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				85,000,000		89,250,000		93,712,500		93,712,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	3	85,000,000	3	89,250,000	3	93,712,500	15	93,712,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				55,000,000		57,750,000		60,637,500		60,637,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	12	55,000,000	12	57,750,000	12	60,637,500	12	60,637,500	
28	Kecamatan Subang				196,000,000		205,800,000		216,090,002		216,090,002	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				22,265,000		23,378,250		24,547,163		24,547,163	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	15		155		16		7500		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	22,265,000	23	23,378,250	24	24,547,163	116	24,547,163	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				22,169,000		23,277,450		24,441,323		24,441,323	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	22,169,000	1	23,277,450	1	24,441,323		24,441,323	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				27,265,000		28,628,250		30,059,663		30,059,663	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	27,265,000	100	28,628,250	100	30,059,663		30,059,663	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100,184,000		105,193,200		110,452,860		110,452,860	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	25	100,184,000	25	105,193,200	25	110,452,860		110,452,860	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				24,117,000		25,322,850		26,588,993		26,588,993	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	7	24,117,000	7	25,322,850	7	26,588,993		26,588,993	
29	Kecamatan Cigandamekar				220,000,000		231,000,000		242,550,000		242,550,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Publik											
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	22		23		24		111		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	30,000,000	23	31,500,000	24	33,075,000	114	33,075,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Partisipasi/ Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	Orang									
		2 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		3 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		4 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000		22,050,000	
		5 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		100		100				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				75,000,000		78,750,000		82,687,500		82,687,500	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	15	75,000,000	15	78,750,000	15	82,687,500	75	82,687,500	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				95,000,000		99,750,000		104,737,500		104,737,500	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	11	95,000,000	11	99,750,000	11	104,737,500	11	104,737,500	
30	Kecamatan Karangkencana				215,000,000		187,750,000		194,475,000		194,475,000	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	135		135		145		6600		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	25,000,000	23	26,250,000	24	27,562,500	114	27,562,500	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25,000,000		26,250,000		27,562,500		27,562,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500		27,562,500	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
		1 Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000		25,000,000	
		2 Terlaksananya pembinaan aparatur dan lembaga desa	Kegiatan	1	25,000,000	1	26,250,000	1	26,250,000		26,250,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				75,000,000		42,000,000		44,000,000		44,000,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	14	75,000,000	15	42,000,000	16	44,000,000	7100	44,000,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65,000,000		68,250,000		70,350,000		70,350,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	9	40,000,000	9	42,000,000	9	44,100,000		44,100,000	
31	Kecamatan Ciniru				225,000,000		236,250,000		248,062,500		248,062,500	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				95,000,000		99,750,000		104,737,500		104,737,500	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	25	75,000,000	25	78,750,000	25	82,687,500	125	82,687,500	
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	23	20,000,000	23	21,000,000	24	22,050,000	114	22,050,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000		33,075,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,050,000		22,050,000	

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60,000,000		63,000,000		66,150,000		66,150,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	3	60,000,000	3	63,000,000	3	66,150,000	15	66,150,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	9	20,000,000	9	21,000,000	9	22,050,000	9	22,050,000	
32	Kecamatan Ciawigebang				239,390,000		309,750,000		281,137,500		281,137,500	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				30,000,000		31,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Jumlah Warga yang Terlayani PATEN	Orang	32		33		34		161		
		2 Jumlah Hasil Koordinasi Antar Sektor yang Ditindaklanjuti	Jenis	27	30,000,000	27	31,500,000	27	33,075,000	131	33,075,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				40,000,000		42,000,000		44,100,000		44,100,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Sarpras yang terbangun di Kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan	Unit	11		13		15				
		2 Jumlah masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Unit	5		5		5				
		3 Terlaksananya Musrenbang Desa	Kegiatan	1	40,000,000	1	42,000,000	1	44,100,000		44,100,000	
		4 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kegiatan	1		1		1				
		5 Jumlah Kelurahan yang telah dievaluasi	Keluraha n	10		10		10				
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				14,390,000		73,500,000		33,075,000		33,075,000	
		1 Terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	30,000,000	100	31,500,000	100	33,075,000		33,075,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				70,000,000		73,500,000		77,175,000		77,175,000	
		1 Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa	Orang	24	70,000,000	24	73,500,000	24	77,175,000	12	77,175,000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				85,000,000		89,250,000		93,712,500		93,712,500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Administrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa/Kelurahan	Desa	24	85,000,000	24	89,250,000	24	93,712,500	120	93,712,500	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.325.000.000		3.491.250.000		3.665.813.000		3.665.813.000	
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				650.000.000		682.500.000		716.625.000		716.625.000	Bakesbangpol
		Jumlah Aparatur desa dan komponen masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan kesadaran bela negara	Orang	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	165.375.000	
		Jumlah Aparatur, Pelajar dan Komponen Masyarakat yang mendapat pemantapan 4(empat)pilar wawasan kebangsaan	Orang	250	250.000.000	250	262.500.000	250	275.625.000	250	275.625.000	
		Jumlah Aparatur dan Komponen Masyarakat yang yang mendapat penguatan ideologi bangsa	Orang	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	110.250.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kecamatan	Kecamatan	4	150.000.000	4	157.500.000	4	165.375.000	4	165.375.000	
			Orang	100		100		100		100		
2	PROGRAM PENBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDYA.				675.000.000		708.750.000		744.188.000		744.188.000	Bakesbangpo 1
		Dokumen Laporan Pembinaan Deteksi Dini P4GN	Dokumen	1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	275.625.000	
		Pelaku seni/ penggiat seni dan budayawan lokal yang lestari	Orang	40	150.000.000	45	157.500.000	50	165.375.000	50	165.375.000	
		terjalannya rasa persaudaraan antar umat beragama	Orang & Tokoh Agama	100	200.000.000	150	210.000.000	150	220.500.000	150	220.500.000	
		Tingkat penyelesaian konflik aliran kepercayaan	Persen	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.688.000	100	82.688.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.450.000.000		1.522.500.000		1.598.625.000		1.598.625.000	Bakesbangpo 1

Perubahan RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Kuningan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persenstase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	-		-		75.52		75.52		
		Jumlah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD	Parpol	10	50.000.000	10	52.500.000	10	55.125.000	10	55.125.000	
		Jumlah Parpol yang mendapat pendidikan politik	Peserta	50	100.000.000	50	105.000.000	50	110.250.000	50	110.250.000	
		Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu	Orang	200	100.000.000	250	105.000.000	300	110.250.000	300	110.250.000	
		Jumlah Organisasi Masyarakat dan LSM yang di fasilitasi	ORMAS/ LSM	20	550.000.000	20	577.500.000	20	606.375.000	20	606.375.000	
		Jumlah ORMAS dan LSM yang terdaftar di Pemerintah Daerah	ORMAS/ LSM	190	350.000.000	200	367.500.000	200	385.875.000	200	385.875.000	
		Jumlah PARPOL yang mendapat pembinaan pengelolaan laporan keuangan	PARPOL	10	300.000.000	10	315.000.000	10	330.750.000	10	330.750.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				550.000.000		577.500.000		606.375.000		606.375.000	
		Wilayah Rawan Konflik yang terdata	Kecamatan	8	150.000.000	10	157.500.000	11	165.375.000	11	165.375.000	
		Laporan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah di kecamatan	Laporan	384	150.000.000	384	157500000	384	165375000	384	165375000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan deteksi dini trantribum	Desa/ Kelurahan	376	250.000.000	376	262.500.000	376	275.625.000	376	275.625.000	
		Jumlah orang asing yang terdata	Orang	20	150.000.000	30	157.500.000	35	165.375.000	35	165.375.000	
		Wilayah Rawan Konflik yang terdata	Kecamatan	8	150.000.000	10	157.500.000	11	165.375.000	11	165.375.000	
		Laporan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah di kecamatan	Laporan	384	150.000.000	384	157500000	384	165375000	384	165375000	
		Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan deteksi dini trantribum	Desa/ Kelurahan	376	250.000.000	376	262.500.000	376	275.625.000	376	275.625.000	
		Jumlah orang asing yang terdata	Orang	20	150.000.000	30	157.500.000	35	165.375.000	35	165.375.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA											
		Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana, kinerja pegawai, dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.525.000.000.000	100	1.677.500.000.000	100	1.830.000.000.000	100	1.830.000.000.000	SELURUH PERANGKAT DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023. IKU Kabupaten Kuningan disajikan pada Tabel 8.1. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah, disusun Indikator Kinerja Makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju pertumbuhan Penduduk dan Indeks Gini



sebagai bagian dari penilaian kinerja utama daerah yang disajikan pada Tabel 8.1.

Selanjutnya untuk indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat IKU daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada Tabel 8.2. Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, akibat pandemi Covid-19 aspek sosial ekonomi di Indonesia terdampak cukup berat, termasuk di Kabupaten Kuningan. Untuk itu, target indikator kinerja daerah, termasuk IKK terkoreksi, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 8.1

Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	SEBELUM REVISI				HASIL REVISI			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,23	73,31-73,39	73,45-73,56	73,59-73,72	73,73-73,90	73,28	73,37	73,45	73,53
HLS/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07	12,08	12,34-12,57	12,43-12,72	12,52-12,87	12,62-13,03	12,1	12,14	12,19	12,23
RLS/ Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,37	7,64-7,75	7,74-7,86	7,83-7,97	7,94-8,08	7,41	7,46	7,52	7,6
Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.918	9.731	9.003-9.039	9.092-9.142	9.181-9.246	9.271-9.352	8.967-9.003	9.042-9.092	9.116-9.181	9.190-9.271
Indeks Kesehatan	Point	81,55	81,89	82,01	82,23	82,45	82,67	81,97	82,23	82,45	82,67
Indeks HLS	Poin	67,06	67	69,85	70,69	71,63	72,36	67,22	67,56	67,78	68,04
Indeks RLS	Poin	50,08	49	51,67	52,40	53,12	53,85	49,4	50,24	50,47	50,61
Indeks Pendidikan	Poin	58,57	58,12	60,76	61,54	62,33	63,11	58,31	60,41	60,58	60,77
Indeks Pengeluaran	Poin	66,64	69,31	66,93	67,23	67,53	67,82	66,12-66,39	66,22-66,59	66,23-66,70	66,33-66,91
IPM	Poin	68,28	69,10	69,35	69,81	70,27	70,73	68,39	69,26	69,45	69,66
Prosentase Kemiskinan	Persen	12,22	11,41	11,31	10,76	10,20	9,64	13,58	13,38	13,06	12,74
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,99	9,83	8,25	7,88	7,51	7,14	15,25	13,80	11,01	10,14
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,45	6,56	≤6,00	≤6,00	≤6,00	≤6,00	-2,42 - 1,51	1,75 - 2,65	1,90 - 3,00	2,00- 3,45
Indeks Gini Rasio	Poin	0,32	0,34	0,31	0,31	0,31	0,30	<0,38	<0,38	<0,38	<0,38
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2023

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	MISI 1 :									
1	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	82,08	83,62	74,00	74,12	74,82	75,52	75,52	Bappeda
3	Peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah	Milyar	344,43	336,09	311,53	332,37	361,57	350,50	359,17	Bappenda
	MISI 2 :									
4	Indeks toleransi beragama	Poin	N/A	68,3 – 68,6	68,7 – 69,0	69,1 – 69,4	69,5 – 69,80	69,9 – 70,2	69,9 – 70,2	Badan Kesbangpol
5	Indeks rasa aman	Poin	N/A	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6 - 76	73,6 - 76	Satpol-PP/Badan Kesbangpol
	MISI 3 :									
6	Indeks Pendidikan	Poin	58,57	58,12	58,31	60,41	60,58	60,77	60,77	Bappeda
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,28	69,10	68,39	69,26	69,45	69,66	69,66	Bappeda
7	Indeks Kesehatan	Poin	81,55	81,89	81,97	82,23	82,45	82,67	82,67	Bappeda
8	Persentase penduduk miskin	Persen	12,22	11,41	13,58	13,38	13,06	12,74	12,74	Bappeda
	MISI 4 :									
9	Perencanaan Sektor Terintegrasi berbasis Desa	Buah	-	1	1	1	1	1	1	Bappeda
10	Pembangunan Desa Agro Pinunjul	Desa	N/A	5	5	10	10	12	42	DKPP
11	Pembangunan Desa Wisata dan Budaya Pinunjul	Poin	N/A	-	8	7	7	4	26	Disporapar, Disdikbud

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Pembangunan Desa Pinunjul lainnya	Poin	N/A	2	7	10	7	6	32	Disdikbud, DKUKM Perdagin
13	Desa Pusat Investasi	Desa	N/A	1	0	4	5	5	15	DPMPSTP
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,45	≥6,00	-2,42 - 1,51	1,75 – 2,65	1,90 - 3,00	2,00- 3,45	2,00-3,45	Bappeda
15	Indeks Pengeluaran	Poin	66,64	66,46	66,12 – 66,39	66,22- 66,59	66,23-66,7	66,33-66,91	66,33- 66,91	Bappeda
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,99	9,83	15,25	13,80	11,01	10,14	10,14	Bappeda
17	Indeks Desa Membangun	Poin	0,645	0,650	0,655	0,660	0,665	0,670	0,670	DPMD
18	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,20	82,80	83,11	84,35	85,27	86,73	86,73	DKPP
	MISI 5 :									
19	Kemantapan Jalan	Persen	80,9	81,9	82,9	83,9	84,9	85,9	85,9	DPUTR
20	Kondisi Baik Irigasi	Persen	59,01	60	62	64	67	70	70	DPUTR
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	68,22	66,110	66,454	66,798	67,142	67,142	DLH

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, diolah, 2020.

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,28	69,10	68,39	69,26	69,45	69,66	69,66	Bappeda
2	Persentase Penduduk Miskin (PPM)	Persen	12,22	11,41	13,58	13,38	13,06	12,74	12,74	Bappeda
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Bappeda
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,99	9,83	15,25	13,80	11,01	10,14	10,14	Bappeda
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,45	6,56	-2,42- 1,51	1,75-2,65	1,90-3,00	2,00-3,45	2,00-3,45	Bappeda
6	Indeks Gini	Poin	0,32	0,34	< 0,38	< 0,38	< 0,38	< 0,38	< 0,38	Bappeda
7	Indeks Pendidikan	Poin	58,57	58,12	58,31	60,41	60,58	60,77	60,77	Bappeda
8	EYS/Harapan lama sekolah	Tahun	12,07	12,08	12,10	12,14	12,19	12,23	12,23	Bappeda
9	MYS/Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,51	7,37	7,41	7,46	7,52	7,60	7,60	Bappeda
10	Indeks EYS	Poin	67,06	67	67,22	67,56	67,78	68,04	68,04	Bappeda
11	Indeks MYS	Poin	50,08	49	49,40	50,24	50,47	50,61	50,61	Bappeda
12	UmurHarapan Hidup (UHH)	Tahun	73,01	73,23	73,28	73,37	73,45	73,53	73,53	Bappeda
13	Indeks Kesehatan	Persen	81,55	81,89	81,97	82,23	82,45	82,67	82,67	Bappeda
14	Persentase balita stunting	Persen	29	27	20	15	5	2,5	2,5	Dinkes
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	87,32	87,82	88,32	88,82	88,82	DPPKBP3A
16	Indeks Pengeluaran	Poin	66,64	69,31	66,12 – 66,39	66,22 – 66,59	66,23 – 66,70	66,33 – 66,91	66,33 – 66,91	Bappeda
17	Pengeluaran perkapita per tahun (Ribu Rupiah)	Rp.	8.918	9.731	8.967 – 9.003	9.042- 9.092	9.116- 9.181	9.190- 9.271	9.190-9.271	Bappeda
18	Laju inflasi	Persen	2,8	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	Bappeda
19	PDRB per kapita (adhk)	Rp. (ribu)	14.665,97	15.308,94	15.980,11	16.680,70	17.412,00	18.175,37		Bappeda
20	Garis Kemiskinan	Rp.	332.483	347.850	363.217	378.584	393.951	409.318	409.318	Bappeda

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	475.284	488.544	502.175	516.185	530.587	545.390	545.390	Bappeda
22	Rasio penduduk yang bekerja /Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,01	91,38	91,75	92,12	92,49	92,86	92,86	Bappeda
23	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72,39	74,42	76,50	78,64	80,84	83,10	83,10	DPPKBP3A
24	Keluarga pra sejahtera	Persen	5,26	5,24	5,22	5,20	5,16	5,12	5,12	DPPKBP3A
25	Keluarga sejahtera I	Persen	64,03	64,03	64,03	64,02	64,02	64,02	64,02	DPPKBP3A
26	Keluarga sejahtera II	Persen	30,71	30,73	30,75	30,78	30,81	30,86	30,86	DPPKBP3A
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR									
	BIDANG PENDIDIKAN									
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persen	74,05	74,10	74,20	74,35	74,55	74,80	74,80	Disdikbud
2	Eys/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07	12,08	12,1	12,14	12,19	12,23	12,23	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,85	99,88	99,89	99,90	99,91	99,93	99,93	Disdikbud
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	91,17	91,21	91,22	91,24	91,26	91,27	91,27	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100,11	100,12	100,13	100,14	100,15	100,16	100,16	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,99	99,04	99,05	99,07	99,07	99,08	99,08	Disdikbud
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Disdikbud
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,26	0,15	0,17	0,16	0,17	0,12	0,12	Disdikbud
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Ke SMP/MTs	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	Disdikbud
12	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	Persen	95,23	96	96	96,77	96,77	97,54	97,54	Disdikbud
13	Prosentase Guru PAUD Terlatih/ Bersertifikat	Persen	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,55	Disdikbud
14	Prosentase Ruang Kelas SD Dalam Kondisi Baik	Persen	84,47	84,72	84,97	85,22	85,47	85,72	85,72	Disdikbud
15	Prosentase Ruang Kelas SMP Dalam Kondisi Baik	Persen	97,60	97,70	97,80	97,90	98	98,10	98,10	Disdikbud
16	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/ Kursus Yang Legal	Jumlah	1.023	1.033	1.038	1.048	1.053	1.063	1.063	Disdikbud
17	Rasio Guru Terhadap Jumlah Murid Pendidikan Dasar	Rasio	1:0,06	1:0,08	1:0,08	1:0,09	1:0,10	1:0,10	1:0,10	Disdikbud
18	Rasio Jumlah Murid Dan Guru SMP Negeri/ Swasta Non Tsanawiyah	Rasio	1:0,055	1:0,053	1:0,052	1:0,051	1:0,050	1:0,050	1:0,050	Disdikbud
19	MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,37	7,41	7,46	7,52	7,6	7,6	Disdikbud
20	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	67,06	67	67,22	67,56	67,78	68,04	68,04	Disdikbud
21	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,08	49	49,4	50,24	50,47	50,61	50,61	Disdikbud
22	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	110	238	162	200	200	200	1.000	Disdikbud
23	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	37	9	70	75	75	71	300	Disdikbud

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	10	20	20	20	20	20	100	Disdikbud
25	Pemberian beasiswa (1.000 orang)	Orang	485	200	200	150	150	200	1.000	Disdikbud
BIDANG KESEHATAN										
1	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80	Persen	75	81	88	80	94	100	100	RSUD Linggajati
2	BOR		66	70	72	74	76	80	80	RSUD 45
3	LOS		3	3	3	3	3	3	3	
4	GDR		34	34	33	32	31	30	30	
5	NDR		22	22	21	20	19	18	18	
6	BTO		79	69	69	69	69	69	69	
7	TOI		2	1	1	1	1	1	1	
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,23	73,28	73,37	73,45	73,753	73,53	Dinas Kesehatan
9	Persentase Balita Stunting	Persen	29	27	20	15	5	2,5	2,5	
10	Ketersediaan ambulance gratis	Unit	40	0	8	8	8	8	72	
11	Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	N/A	284	287	284	284	284	1.423	
12	Angka Kematian Ibu	Kasus	23	23	22	22	21	21	21	
13	Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 kelahiran	4,06	4,05	4,05	4,04	4,03	4,02	4,02	
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	87,07	90	91	92	93	93	93	
16	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	Persen	91,49	92	80	85	87	90	90	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/TBA	Persen	69,52	70	71,40	72,20	73,10	74,15	74,15	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
21	Cakupan kunjungan bayi	Persen	92,78	93	93	40	94	95	95	
22	Prosentase Penduduk yang menggunakan jamban keluarga	Persen		85	86	87	88	89		
23	Jumlah sarana prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya dalam kondisi baik	Unit	28 Puskesmas, 52 Pustu	4 Puskesmas, 10 Pustu	8 Puskesmas, 10 Pustu	10 Puskesmas, 7 Pustu	8 Puskesmas, 5 Pustu	7 Puskesmas, 5 Pustu	7 Puskesmas, 5 Pustu	
24	Jumlah puskesmas dengan perawatan	Unit	6	6	6	6	6	6	6	
25	Prosentase penduduk yang mempunyai BPJS/KIS	Persen	43,42	57,34	58,12	59,06	60,19	61,54	61,54	
26	Jumlah PBI BPKJS/KIS	Orang	520.283	616.150	624.550	634.630	646.726	661.241	661.241	
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	80,9	81,9	82,9	83,9	84,9	85,9	85,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Persen	59,01	60	62	64	67	70	70	
3	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/ tersusun	Dokumen	N/A	3	9	14	3	3	32	
4	Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	8	2	-	-	-	-	10	DLH

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	640	72	72	72	72	72	1000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	15.000	600	600	600	600	600	18.000	
7	Penanganan Jalan dan Jembatan (1.000 Km)	Km	1.025	200	200	200	200	200	2000	
8	Akses Air Minum Layak	Persen	90,85	85,15	88,12	91,09	94,06	97,03	97,03	
9	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	87,77	89,87	93,25	94,93	96,62	98,31	98,31	
10	Akses Air Minum Perpipaan (%)	Persen	36,00	32,29	34,65	37,01	39,37	41,73	41,73	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase rumah layak huni	Persen	94,92	95,63	95,85	96,21	96,56	96,92	96,92	DPKPP
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	N/A	3	0	16	26	26	71	
3	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2,67	2,52	2,83	2,72	2,66	2,57	2,57	
4	Kawasan kumuh	Persen	0,05	0,03	0,296	0,231	0,199	0,152	0,152	
	BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Petugas	106	107	108	109	110	111	111	Satpol-PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	80	82	83	84	84	85	85	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
4	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kab./Kota	Persen	75	76	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	
5	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	Persen	0.20	0.20	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
7	Persentase Penegakan Perda	Persen	90	91	92	93	94	95	95	
8	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	90	90	95	95	95	96	98	
9	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	85	85	85	90	95	100	100	BPBD
10	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1	1	1	1	1	1	1	
11	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	85	80	85	90	95	100	100	
12	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,60	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	
13	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	63	80	85	90	95	100	100	
14	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	3	-	1	2	2	2	7	
16	Persentase kajian kebutuhan pasca	Persen	91	92	80	85	90	95	95	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	bencana (Jitupasna)									
	BIDANG SOSIAL									
1	Sarana Sosial seperti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	38	10	10	10	10	10	10	Dinas Sosial
2	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	8,80	9,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
3	PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	29,08	30,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	113.127	130.000	68.926	68.926	68.926	74.252	79.578	
5	Persentase penduduk miskin	Persen	12,22	11,41	11,22	13,38	13,06	12,74	12,74	
	URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									
	BIDANG TENAGA KERJA									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,99	9,83	15,25	13,80	11,01	10,14	10,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Jumlah lapangan kerja di desa	Paket	N/A	4	0	1	2	2	9	
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	N/A	80	0	20	40	40	180	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58,65	59,62	60,61	61,62	62,64	63,68	63,68	
5	Persentase Transmigrasi	Persen	15	15	15	20	25	25	25	
6	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	Persen	65,72	10,67	13,84	16,80	16,80	22,16		
7	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	99,36	74,22	30	50	57,4	68,5	68,5	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNG ANAK									
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	49,52	49,52	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	DPPKBP3A
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,40	37,42	37,42	37,42	37,44	37,44	37,44	DPPKBP3A
3	Rasio KDRT	Persen	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DPPKBP3A
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	113.127	130.000	68.926	68.926	74.252	79.578	79.578	DPPKBP3A
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	70	70	80	90	100	100	DPPKBP3A
6	Dokumen profil gender	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPPKBP3A
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	87,32	87,82	88,32	88,82	88,82	DPPKBP3A
	BIDANG PANGAN									
1	Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	268,85	270,40	271,84	274,50	277,31	280,08	280,08	
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	59	10	10	10	10	10	10	
4	Penanganan Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani	Jiwa	6.511	1300	823	500	500	500	500	
5	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	25	30	35	40	45	50	50	
6	Lumbung Pangan	Buah	N/A	1	0	3	3	3	10	
7	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,20	82,80	83,11	84,35	85,27	86,73	86,73	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	52,279,27	122.598,00	116.196,89	115.554,73	114.881,47	114.124,74	114.124,74	Dinas Lingkungan Hidup

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persen	75,29	82,74	80,25	81,09	81,91	81,91	81,91	
2	- Penanganan Sampah	Ton	43.719,27	112.621,32	106.078,97	105.294,71	104.480,21	103.652,44	103.652,44	
		Persen	60,4	66,19	62,05	61,23	60,4	59,57	59,57	
3	- Pengurangan Sampah	Ton	8.560,00	9.976,68	10.117,92	10.260,02	10.401,26	10.472,30	10.472,30	
		Persen	14,89	16,55	18,2	19,86	21,51	22,34	22,34	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	68,22	66,110	66,454	66,798	67,142	67,142	
	- Indeks Kualitas Air	Poin	65	65,25	48,5	49	49,5	50	50	
	- Indeks Kualitas Udara	Poin	86,83	86,88	87,25	87,5	87,75	88	88	
	- Indeks tutupan lahan	Poin	56,48	56,50	57,25	57,5	57,75	58	58	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	75,50	76,53	78	79	79,50	80	80	Disdukcapil
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL.)	Persen	96,10	97,76	97,77	97,78	97,79	98	98	
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	17,95	22,48	22,75	23	23,15	23,25	23,25	
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	77,52	78,45	80	81	82	83	83	
5	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	81,28	84,00	85	86	87	88	88	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	Jumlah BUMDES	Unit	180	14	5	5	10	10	10 (55)	DPMD
3	Status Desa : - Tertinggal - Berkembang - Maju - Mandiri	Desa Mandiri	3	2	2	18	10	10	15 (57)	
4	PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya									
7	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif									
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	70,68	70,87	70,21	71.61	71.94	72,24	72,24	DPPKBP3A
2	Prosentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	14,88	14,63	16,39	15,16	13.94	13,73	13,73	DPPKBP3A

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama (RKP) Wanita		18,02	18,5	18,7	19	19,2	19,5	19,5	DPPKBP3A
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59*	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	DPPKBP3A
	BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	55	55	40	40	50	65	65	Dinas Perhubungan
2	Jumlah Prasarana Perhubungan:									
	- PJU	Titik	3.700	3.700	250	400	400	400	8.850	
	- Terminal	Unit	9	2	0	0	0	0	11	
	- Terminal Penumpang Wisata Terpadu	Unit	0	0	0	1	1	1	1	
	- Kawasan/Area Parkir Terpadu	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan :									
	- Traffic light	Unit	9	1	0	1	1	1	13	
	- Warning Light	Unit	35	1	1	1	1	1	40	
	- RPPJ	Unit	114	0	46	21	21	21	223	
	- Rambu Lalulintas	Unit	2.132	70	50	161	148	148	2.709	
	- Marka Jalan	Meter	153.603,7	0	0	5.500	5.500	5.500	170.103,7	
	- Marka Zoss	Lokasi	1	1	1	1	1	1	6	
	- Guardrail	Meter	1,624	0	0	120	60	60	1.864	
	- Patok Pengaman Jalan	Unit	0	0	0	100	100	100	300	
	- Cermin Tikungan	Unit	0	0	0	4	0	0	4	
	- Velican Crossing	Unit	0	0	0	2	2	2	6	
	- Rambu Elektronik	Unit	0	0	0	2	2	2	6	
	- ATCS	Unit	0	0	0	3	3	3	9	
4	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib	Unit	11.000	11.000	10.000	10.250	10.500	11.000	11.000	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Uji Yang melaksanakan Uji Berkala									
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Website Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pameran Expo		Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Prosentase Jaringan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Informasi Publik yang Dipublikasikan	Buah	10	10	15	20	25	30	30	
5	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1.165	1.165	1.165	1.203	1.211	1.219	1.219	
6	Jumlah BTS	BTS	272	272	312	322	334	346	346	
7	Sistem Informasi Manajemen Pemda		8	9	9	10	10	10	10	
8	Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Persen	n/a	n/a	3.04	3.09	3.14	3.14	3.14	
	PERTANAHAN									
1	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda	Persen	81	50	41					
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Koperasi Aktif	Koperasi	463	480	490	500	510	520	520	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										dan Perindustrian
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UKM	N.A	100	60	100	100	100	460	
3	Desa UKM	Desa	N.A	0	0	1	1	1	3	
4	Desa Koperasi	Desa	N.A	0	0	1	1	1	3	
5	Desa Kuliner Tradisional	Desa	N.A	0	0	1	0	0	1	
6	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/ Orang	N.A	0	2/40	2/40	2/40	2/40	8/160	
	BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDM (milyar rupiah)	Persen	42,67	30,5	20,3	17,3	21,4	22,4	22,4	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Jumlah	1.719.593.8 58.571	764.767.2 78.043	765.000. 000.000	897.750. 000.000	1.115.000 .000.000	1.350.000. 000.000	6.416.9065 87.075	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	4.105	3.105	3.400	3.700	4.200	4.600	19.005	
4	Nilai Investasi yang Ada di Desa	sJumlah	5.950.300. 000	6.854.345 000	7.882.496 759	9.064.871 262	10.424.60 1.951	11.988.292 244	39.488.308 .666	
5	Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 juta	Desa	N.A	1	0	4	5	5	15	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN									

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	OLAHRAGA									
1	Prestasi Olahraga Tingkat Regional:									Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
	PORDA	Peringkat	9	-	-	-	8	-	8	
	POPDA	Peringkat	15	-	12	-	10	-	10	
	BIDANG STATISTIK									
1	Buku “Kabupaten Dalam Angka”		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Buku “PDRB” Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Jumlah Dokumen Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen	23	23	50	70	70	70	70	
	BIDANG PERSANDIAN									
1	Prosentase Informasi Daerah yang Wajib diamankan dengan Persandian	Persen	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
	BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	18	20	12	12	13	14	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	11	12	2	2	2	2	2	
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	7.000	7.650	5.900	8.500	8.750	9.000	9.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	Eksemplar	18.150	20.150	22.150	24.150	26.150	28.150	28.150	
	BIDANG KEARSIPAN									
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	65	70	75	80	85	90	90	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	1	3	3	2	2	14	
	URUSAN PILIHAN									
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	106,72	106,50	100,50	101,65	101,95	102,75	103,25	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	285,50	302,12	326,29	355,66	387,66	419,57	419,57	
3	Cakupan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	11	13	15	17	19	21	21	
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	1.250	1.372	1.500	1.620	1.700	1.835	1.835	
5	Tingkat Kesejahteraan Pembudidaya Ikan		104,47	104,25	102,60	102,75	103,50	103,72	103,95	
6	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17.822,06	18.638,95	21.451,85	23.261,55	25.068,65	26.875,67	26.875,67	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Defisit Swasembada Ikan	Ton	8.000	7.600	5.700	3.800	1.900	-	-	
8	Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	530	560	600	650	700	800	800	
9	Jumlah RumahTangga Perikanan (Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya)	Orang	17.000	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500	
10	Tingkat Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar		102,85	102,72	102,47	102,1	101,95	101,5	101,50	
11	Tingkat Produksi Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	160,65	174,96	188,96	204,07	220,40	236,03	236,03	
12	Tingkat Konsumsi Ikan	(kg/kap /tahun)	24,5	24,5	25	25	25	25	25	
13	Cakupan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	28	34	36	40	44	48	48	
14	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	3.000	3.000	
15	Rasio kawasan perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	199	200	201	202	203	204	204	
16	Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen	15	14	13	12	11	10	10	
17	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	1	2	2	3	4	5	5	
	BIDANG PARIWISATA									
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.124.948	2%/3.187. 447	70%/956.2 34	2%/975.35 9	2%/994.86 4	2%1.014.762	2%/1.014.76 2	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
2	Kampung Budaya	Desa	N/A	-	1	-	-	-	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BIDANG PERTANIAN									
1	Tersedianya data dan informasi Sektor Pertanian	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Nilai Tukar Petani (NTP)		n.a	103,69	103,99	104,29	104,59	104,59	104,89	
3	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Unit	274	27	30	33	36	40	440	
4	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan:									
	- Padi	Kw/Ha	60,00	60,12	60,24	60,36	60,48	60,60	60,60	
	- Jagung		61,35	61,35	61,71	61,89	62,07	62,25	62,25	
	- Kedelai		14,50	14,57	14,64	14,71	14,78	14,85	14,85	
	- Kacang Tanah		14,71	14,86	15,01	15,16	15,31	15,46	15,46	
	- Kacang Hijau		11,00	11,13	11,26	11,39	11,52	11,65	11,65	
	- Ubi Kayu		160,68	162,29	163,90	165,51	167,12	168,73	168,73	
	- Ubi Jalar		212,99	213,03	213,07	213,11	213,15	213,19	213,19	
	- Porang		-	-	-	200,00	213,15	213,19	213,19	
5	Produktivitas Komoditas Perkebunan									
	- Pala		344,06	350,10	350,10	357,10	364,24	367,89	367,89	
	- Cengkeh		622,32	753,66	899,47	1.049,85	1.203,70	1.360,28	1.360,28	
	- Kopi Robusta		1.247,45	1.272,39	1.285,11	1.285,11	1.310,82	1.310,82	1.310,82	
	- Kopi Arabika		192,31	900,00	909,00	918,09	918,09	927,27	927,27	
	- Tembakau		1.292,31	1.318,15	1.331,33	1.344,64	1.358,09	1.371,67	1.371,67	
	- Tebu		3.722,47	3.796,91	3.834,88	3.873,23	3.873,23	3.911,96	3.911,96	
	- Nilam		465,00	474,30	479,04	483,83	488,67	493,56	493,56	
	- Kelapa		1.083,00	1.115,49	1.115,49	1.183,42	1.218,93	1.255,49	1.255,49	
6	Produktivitas Komoditas Hortikultura									

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	- Bawang Merah	Kw/Ha	91,68	93,46	94,32	95,18	96,04	96,90	96,90	
	- Tomat	Kw/Ha	-	-	-	193,83	195,77	198,71	198,71	
	- Cabe Besar	Kw/Ha	-	-	-	91,69	92,60	93,72	93,72	
	- Cabe Rawit	Kw/Ha	-	-	-	89,64	90,81	92,17	92,17	
	- Jamur	Kw/Ha	-	-	-	2.172	2.320	2.516	2.516	
	- Sayuran Lainnya	Kw/Ha	-	-	-	40	45	50	50	
	Produksi Buah-buahan:									
	- Mangga	Kw	-	-	-	304.329	306.459	309.524	309.524	
	- Rambutan	Kw	-	-	-	31.364	31.678	31.994	31.994	
	- Durian	Kw	36.852	40.541	44.595	49.054	53.513	58.865	58.865	
	- Markisa	Kw	-	-	-	50	60	75	75	
	- Jahe	Kw	-	-	-	150	160	175	175	
	Jumlah Latihan dan Kunjungan Penyuluh	Kunjungan		51.672	55.672	60.192	65.016	70.272	70.272	
	Tingkat Kemampuan Kelompok :									
	- Kelompok Pemula	Kelompok	999	924	970	1.019	1.070	1.123	1.123	
	- Kelompok Lanjut	Kelompok	880	1.122	1.234	1.358	1.493	1.643	1.643	
	- Kelompok Madya	Kelompok	59	105	116	127	140	154	154	
	- Kelompok Utama	Kelompok	-	2	3	4	6	8	8	
	Cakupan Binaan Kelompok Tani									
	Prosentase Kelompok Tani yang difasilitasi		10,32	12,19	12,65	25,00	30,00	35,00	40,00	
	Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Kelompok	-	-	-	25	30	40	95	
	Penguatan Kelembagaan Hortikultura	Kelompok	-	-	-	10	15	20	45	
	Produksi Daging, Susu dan Telur :									Dinas Perikanan dan Peternakan
	Meningkatnya Produksi Daging (Ton)									
	Sapi	Ton	1.280	1.286	1.181	1.216	1.252	1.290	1.290	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Domba	Ton	774	789	716	737	759	782	782	
	Ayam Buras	Ton	476	486	446	468	482	496	496	
	Ayam Ras	Ton	24.551	25.042	17.880	19.668	20.651	22.716	22.716	
	Itik	Ton	50	52	50	51	55	56	56	
	Meningkatnya Produksi Telur (Ton)	Ton								
	- Ayam Buras	Ton	284	290	266	279	287	288	288	
	- Ayam Ras Petelur	Ton	6.437	6.566	5.358	5.626	5.907	6.202	6.202	
	- Itik	Ton	425	434	398	423	440	458	458	
	Produksi Susu Sapi	Ton	21.317	22.384	19.787	20.776	21.607	22.687	22.687	
	Pertumbuhan Populasi Ternak									
	- Sapi Perah		5.274	5.353	5.432	5.511	5.590	5.670	5.670	
	- Sapi Potong		29.162	29.599	27.033	27.884	28.442	29.011	29.011	
	- Domba		120.720	122.531	118.125	120.448	122.898	125.356	125.356	
	- Kambing		7.217	7.325	6.691	6.825	6.962	7.101	7.101	
	- Ayam Ras Petelur		613.905	623.114	505.858	556.444	589.831	625.221	625.221	
	- Ayam Ras Pedaging		1.692.974	3.166.381	2.271.879	2.430.911	2.576.766	2.705.604	2.705.604	
1	Expors Bersih Perdagangan (Nilai Ekspor perdagangan)	(US\$)	874.774.550	4.958.557,88	4.958.557,88	4.958.557,88	4.958.557,88	4.958.557,88	874.774.550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI)	Pasar	-	3	1	1	1	1	3	
3	Daerah Tertib Ukur (Jumlah UTP yang ditera/Tera Ulang)	UTP	2.500	5.000	5.250	5.300	5.350	5.400	2.500	
4	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Jumlah produk IKM/UKM yang	Produk	100	30	30	30	30	30	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dipromosikan)									
5	Sentra Perdagangan	Desa	N.A	5	5	5	5	5	25	
	BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pertumbuhan Industri	Persen	4,83	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
2	Kajian dan Pengawasan Izin Usaha Industri, Standar Industri Hijau, dan Industri 4.0	Perusahaan	100	5	25	40	40	40	250	
3	Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan kemasan	IKM	580	90	30	130	130	130	1090	
4	Desa Industri	Desa	N.A	2	5	3	4	4	18	
	BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Persentase Transmigrasi	Persen	15	15	15	20	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Transmigran Swakarsa	Persen	100	100	-	-	-	-	100	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	PERENCANAAN									
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	10	Bappeda, BPKAD, Bag PBJ, Bag Organisasi, Bag. Adbang,

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										BKPSDM, DPMPTSP, Bapenda
2	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	N/A	1	1	1	1	1	1	
3	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis sistem	Persen	N/A	10	30	30	20	10	100	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	98	98	100	100	100	100	100	
9	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	8	8	9	9	9	9	9	
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	KEUANGAN									
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Persen	BL 60	BL 58	BL 56	BL 54	BL 52	BL 50	BL 50	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			BTL 40	BTL 42	BTL 45	BTL 46	BTL 48	BTL 50	BTL 50	
4	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
5	Prosentase SILPA	Persen	18	17	16	15	14	13	13	
6	Penerapan e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	-	-	20	20	20	20	20	BPKAD
		Aplikasi	-	-	2	2	2	2	2	
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	50	50	75	75	250	
		Aplikasi	-	-	1	1	1	1	1	
12	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	2	2	6	6	6	6	6	Bappenda
13	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Nilai Target PAD	Milyar	344,43	336,09	311,53	341,03	356,52	369,67	369,67	Bappenda
15	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	10	Sekretariat Daerah
16	Penerapan e-SAKIP	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	20	Bagian Organisasi
16	Nilai SAKIP	Level	B	BB-	BB	BB+	A-	A	A	
17	Skor LPPD	Poin	3,4975	3,5035	3,511	3,412	3,493	3,522	3,522	
18	Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	N/A	20	5	35	20	20	20	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	2,98	5,58	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	4,41	0,95	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PENGAWASAN									
1	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat
2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	73	73	73	75	80	85	85	
3	Prosentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
4	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persentase	n/a	50	55	65	70	75	75	
	KEWILAYAHAN									
	(KECAMATAN)									
1	Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Desa								
2	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa	Desa								
3	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa	Persen								
4	Prosentase desa yang mantap pembangunan sarana prasarana infrastruktur perdesaan (jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, permukiman, persampahan)	Persen								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	68,78	71,52	-	-	-	75,52	75,52	Kesbangpol
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Persentase lembaga keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	n/a	20	5	35	20	20	20	Bag. Kesra
2	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	n/a	20	5	35	20	20	20	Bag. Kesra
3	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	9	-	-	-	8	-	8	Disporapar
4	Prestasi olahraga tingkat Regional (Popda)	Peringkat	15	-	-	-	10	-	10	Disporapar
5	NilaiTukar Petani (NTP)	Poin	n/a	<100	<100	<100	>100	>100	>100	DKPP
6	Desa agro pinunjul	Desa	n/a	5	5	10	10	12	42	DKPP
7	Jumlah sentra unggulan pertanian	Desa	n/a	5	5	10	10	10	40	DKPP
8	Desa pinunjul tematik	Desa	n/a	5	5	5	10	10	35	DKUKMPerdag in&DKPP
9	Desa wisata	Desa	n/a	5	5	5	5	5	25	Disporapar
10	Indeks desa membangun	Poin	0,645	0,650	0,655	0,660	0,665	0,670	0,670	DPMD
11	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
12	Kemantapan Jalan	Persen	80,9	81,9	82,9	83,9	84,9	85,9	85,9	DPUTR

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Kondisi Baik Irigasi	Persen	59,01	60	62	64	67	70	70	DPUTR
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	68,22	66,110	66,454	66,798	67,142	67,142	DLH
15	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	82,08	83,62	74,00	74,12	74,82	75,52	75,52	Bappeda
16	Indeks toleransi beragama	Poin	n/a	68,3 – 68,6	68,7 – 69,0	69,1 – 69,4	69,5 – 69,80	69,9 – 70,2	69,9 – 70,2	Badan Kesbangpol
17	Indeks gotong royong (aksi bersama)	Poin	n/a	N/A	0,45	0,46	0,47	0,48	0,50	Badan Kesbangpol

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, diolah, 2020

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Perubahan RPJMD 2018-2023 dilaksanakan untuk memenuhi kaidah-kaidah aturan yang berubah atau aturan baru, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019.

Perubahan RPJMD 2018-2023 ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

9.1 Kaidah

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan oleh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis PD untuk 5 (lima) tahun kedepan serta pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa atau dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Kabupaten Kuningan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Bupati Kuningan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.

5. Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019 sampai dengan 2023.
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPJMDesa pada wilayah Kabupaten Kuningan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Kuningan.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan mengacu pada RPJMD Teknokratik yang disiapkan oleh Bappeda dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Teknokratik disusun 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Bupati periode 2018 – 2023 berakhir, dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kuningan dan program strategis nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD. RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi, daerah dan lain-lain.

Kuningan, Februari 2021

BUPATI KUNINGAN



H. ACEP PURNAMA, S.H., M.H.